KAJIAN

TANAH, KUASA, DAN NIAGA:

DINAMIKA RELASI ANTARA ORANG KERINCI DAN KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI SEKITARNYA DARI ABAD XVII HINGGA ABAD XIX

HAFIFUL HADI SUNLIENSYAR

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Tanah, Kuasa Dan Niaga: Dinamika Relasi Antara Orang Kerinci Dan
Kerajaan-Kerajaan Islam Di Sekitarnya Dari Abad XVII Hingga Abad XIX
Oleh: Hafiful Hadi Sunliensyar - Jakarta: Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia, 2019
190 hlm. ; 16 x 23 cm,--(Seri Naskah Kuno Nusantara)
1. Manuskrip. I. Hafiful Hadi Sunliensyar. II Perpustakaan Nasional. III. Seri
E-ISBN : 978-623-7871-19-4 (pdf)

Editor Isi & Bahasa
Tim Editor

Perancang Sampul
Irma Rachmawati

Tata Letak Buku
Yanri Roslana

Diterbitkan oleh
Perpusnas Press, anggota Ikapi
Jl. Salemba Raya 28 A, Jakarta 10430
Telp: (021) 3922749 eks.429
Fax: 021-3103554
Email: press@perpusnas.go.id
Website: http://press.perpusnas.go.id
perpusnas.press
perpusnas.press
@perpusnas_press

Sambutan

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, mendefinisikan naskah kuno sebagai dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dibanding benda cagar budaya lainnya, naskah kuno memang lebih rentan rusak, baik akibat kelembaban udara dan air (*high humidity and water*), dirusak binatang pengerat (*harmful insects, rats, and rodents*), ketidakpedulian, bencana alam, kebakaran, pencurian, maupun karena diperjual-belikan oleh khalayak umum.

Naskah kuno mengandung berbagai informasi penting yang harus diungkap dan disampaikan kepada masyarakat. Tetapi, naskah kuno yang ada di Nusantara biasanya ditulis dalam aksara non-Latin dan bahasa daerah atau bahasa Asing (Arab, Cina, Sanskerta, Belanda, Inggris, Portugis, Prancis). Hal ini menjadi kesulitan tersendiri dalam memahami naskah. Salah satu cara untuk mengungkap dan menyampaikan informasi yang terkandung di dalam naskah kepada masyarakat adalah melalui penelitian filologi. Saat ini penelitian naskah kuno masih sangat minim.

Sejalan dengan rencana strategis Perpustakaan Nasional untuk menjalankan fungsinya sebagai perpustakaan pusat penelitian juga pusat pelestarian pernaskahan Nusantara, maka kegiatan alih-aksara, alih-bahasa, saduran dan kajian naskah kuno berbasis kompetisi perlu dilakukan sebagai upaya akselerasi percepatan penelitian naskah kuno yang berkualitas, memenuhi standar penelitian filologis, serta mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, Perpustakaan Nasional menjadi lembaga yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya di bidang pernaskahan.

Kegiatan ini wajib dilaksanakan Perpustakaan Nasional, karena merupakan amanat Undang-Undang No.43 tahun 2007 Pasal 7 ayat 1 butir d yang mewajibkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia), juga Pasal 7 ayat 1 butir f yang berbunyi "Pemerintah berkewajiban meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan".

Sejak tahun 2015, seiring dengan peningkatan target dalam indikator kinerja di Perpustakaan Nasional, kegiatan alih- aksara, terjemahan, saduran dan kajian terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2019, Perpustakaan Nasional menargetkan 150 judul penerbitan bagi hasil-hasil karya tulis tersebut. Untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas hasil penelitian filologis, maka kegiatan Alih Aksara, Alih Bahasa, Saduran, dan Kajiam Naskah Kuno Nusantara Berbasis Kompetisi ini dilakukan.

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kontribusi karya para filolog dan sastrawan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para filolog dan sastrawan yang telah mengirimkan karya-karya terbaiknya. Secara khusus, Perpustakaan Nasional juga mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang sejak awal terlibat dalam proses panjang seleksi naskah, penyuntingan, *proofreading*, sampai buku ini dapat terbit dan dibaca oleh masyarakat.

Besar harapan kami semoga fasilitasi terhadap karya tulis Alih Aksara, Alih Bahasa, Saduran, dan Kajian Naskah Nusantara Berbasis Kompetisi ini dapat meningkatkan kualitas penerbitan dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, serta bermanfaat dalam upaya menggali kearifan lokal budaya Indonesia.

Jakarta, 2019

Ttd

Deputi Bidang Pengembangan
Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

Kata Pengantar

Bersyukur saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Sesungguhnya, saya telah lama menantikan tulisan-tulisan yang secara khusus membahas mengenai orang Kerinci dari sudut pandang historis. Akan tetapi hingga buku ini digarap, hal yang saya nantikan itu belum juga terwujud. Padahal arsip dan sumber-sumber sejarah tentang Kerinci sudah begitu banyak. Saya bertanya-tanya mengapa tidak ada yang tertarik menyentuh kehidupan orang Kerinci di masa lampau?

Hampir setengah abad lamanya setelah Voorhoeve mendokumentasikan dan mengalihaksarakan naskah-naskah pusaka orang Kerinci, terjadi kekosongan kajian dan penelitian terhadap naskah-naskah tersebut. Bahkan hasil kajian Voorhoeve sama sekali tidak dimanfaatkan. Gairah penelitian itu, muncul kembali di tahun 1990-an dan di tahun 2000-an. Di saat Prof. Bill Watson memulai proyek penelitian antropologinya dan juga oleh sejarawan Dr. Barbara W. Andaya yang banyak menggunakan sumber lokal—termasuk dari *Kerinci--dalam karya historiografinya tentang Jambi*. Penelitian itu dilanjutkan pula oleh Dr. Uli Kozok yang meneliti kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Setelah itu, kajian tentang naskah-naskah Kerinci mulai redup kembali. Kenyataan ini pulalah yang pada akhirnya mendorong saya untuk menulis buku ini.

Mustahil kiranya tulisan ini dapat terwujud tanpa adanya sumbangsih para peneliti terdahulu. Kepada Dr. P. Voorhoeve Almarhum, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya. Saya telah membaca bagaimana usaha beliau di tahun 1941 mengumpulkan dan mengalihaksarakan ratusan naskah dari berbagai dusun dan mendapo di wilayah Kerinci. Tentu bukanlah sebuah perjuangan yang mudah. Kumpulan hasil alihaksara dan beberapa salinannya sempat dikabarkan hilang selama beberapa dekade hingga ditemukan kembali oleh Prof. Bill Watson. Kumpulan hasil alihaksara itu, kemudian diunggah lagi secara on-line oleh Dr. Uli Kozok pada tahun 2006 sehingga dapat diakses dengan mudah. Tanpa adanya usaha dari mereka semua, tidak mungkin saya bisa mengakses kumpulan alihaksara naskah-naskah Kerinci yang menjadi sumber utama tulisan ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih.

Rasa terima kasih yang tulus ikhlas juga saya tujukan kepada dua sejarawan wanita handal Dr. Barbara Andaya dan Dr. J. Kathiritamby-Wells yang telah sudi mengangkat Jambi dan Inderapura dalam karya historiografi mereka. Melalui tulisan mereka, saya dapat memahami kondisi sosial-ekonomi dan politik Jambi dan Inderapura di masa lampau. Tulisan mereka yang sebagian besar mengacu pada arsip-arsip peninggalan Belanda, semakin melengkapi karya

tulis saya ini. Saya menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami dokumen-dokumen Belanda. Akan tetapi, informasi yang terkandung di dalam dokumen tersebut telah dinarasikan dengan sangat "apik" dan "gamblang" di dalam karya tulis mereka. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi para pengkaji sejarah Jambi dan Inderapura.

Saya telah mengumpulkan data-data terkait dengan sejarah dan budaya Kerinci sejak lama. Di dalam usaha pengumpulan data tersebut saya dibantu oleh berbagai pihak. Mustahil bagi saya untuk melupakan jasa mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh adat di Kerinci yang telah berkenan menjadi narasumber saya, terkhusus kepada Bapak Abidin (almarhum), Bapak Muntahar, dan Bapak Zarmoni.

Di era yang serba canggih saat ini, saya sangat bersyukur bisa mendapat berbagai kemudahan dalam mengakses data dan referensi-referensi ilmiah dengan cepat dan mudah. Terutama sekali data-data naskah Kerinci yang telah didokumentasikan dan menjadi koleksi British Library. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi kinerja semua pihak yang telah melakukan proyek besar tersebut terutama kepada Tim EAP117 dan pihak British Library. Selain itu pula di era sekarang, jarak dan waktu tidaklah menjadi penghalang untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Saya memiliki banyak teman diskusi dalam memperbincangkan masalah kebudayaan di media sosial. Diskusi yang sungguh mencerahkan dan memberi pengetahuan baru bagi saya. Untuk itu secara khusus, saya berterima kasih kepada Dr. Annabel T. Gallop, yang telah bersedia berdiskusi dengan saya terkait naskah-naskah Jawi yang berasal dari Kerinci. Begitu pula dengan teman-teman sesama pecinta naskah, sejarah dan budaya Kerinci, Bapak Iwan Setio, Bapak Boppi Cassia Putra, Bapak Alimin Dpt, Bapak Asril, Bapak M. Ali Surakhman, dan Bapak Deki Syaputra. Semoga diskusi ini terus berlanjut ke depannya, guna memperkaya khazanah dan wawasan kebudayaan.

Tak luput pula, saya berterima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA), sebagai pihak penyelenggara program "Alih Bahasa, Alih Aksara, Saduran dan Kajian Naskah Kuno Nusantara Berbasis Kompetisi". Dengan adanya program ini, semoga minat dan semangat untuk meneliti dan mengkaji naskah kuno Nusantara baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum semakin meningkat. Program ini sesungguhnya sangat bermanfaat untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian terkini naskah kuno Nusantara kepada khalayak. Dengan demikian, kecintaan mereka terhadap kekayaan budaya bangsa khususnya terhadap naskah kuno makin tumbuh dan berkembang.

Karya tulis ini akan menjadi salah satu dari sekian buku yang mengupas tentang Sumatra dari perspektif sejarah. Walaupun tidak banyak sejarawan yang melirik para penghuni lembah kecil di tengah Sumatra ini. Namun, saya yakin banyak hal-hal menarik yang layak dinarasikan tentang mereka di masa lampau. Mereka yang berada di titik persimpangan antara Kesultanan Jambi di Pesisir

Timur dan Kesultanan Inderapura di Pesisir Barat tentu memiliki peranan penting baik secara sosial, politik, dan ekonomi dalam mewarnai sejarah Sumatra. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi para cendikiawan yang menaruh perhatian pada kajian naskah dan sejarah. Jujur saja karya ini masih jauh dari kata layak dan sempurna. Oleh sebab itu sebagai pengakhir kata, kritik dan saran selalu diminta, demi perbaikan buku ini di masa mendatang.

Yogyakarta, 2019

Penulis

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Singkatan

H	:	Hijriah
KUTT	:	Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
TK	:	Tambo Kerintji
VOC	:	Verenidge Oost-Indische Compagnie

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kerinci, secara georafis berada di bagian paling barat Provinsi Jambi. Berjarak sekitar 420 km dari ibukota provinsi. Wilayah ini terletak di bagian tengah jajaran Perbukitan Barisan yang membentang dari utara hingga ke selatan Pulau Sumatra. Keberadannya yang berada di antara Perbukitan Barisan yang melewati Jambi, membuat Kerinci disebut pula sebagai Dataran Tinggi Jambi. Secara topografis, wilayah Kerinci terdiri gunung, bukit, dan lembah. Gunung berapi tertinggi di Indonesia berada di wilayah ini, yakni Gunung Kerinci dengan ketinggian 3805 mdpl terletak di bagian baratlaut. Selain itu, terdapat gunung-gunung lain yang menghiasi jajaran perbukitan seperti Gunung Tujuh, Gunung Raya, Gunung Kunyit, Gunung Lumut, Gunung Patah Tigo, dan Gunung Masurai. Jajaran perbukitan ini juga mengapit lembah yang dialiri oleh banyak sungai. Lembah atau dalam istilah lokal disebut *renah* menjadi lokasi berdirinya banyak perkampungan yang disebut sebagai *dusun* terutama di sepanjang aliran sungai. Lembah terbesar disebut sebagai Lembah Kerinci yang dialiri oleh Sungai Batangmerao. Sungai ini berhulu di bagian baratlaut lembah, mengalir ke arah tenggara dan bermuara di Danau Kerinci. Danau ini sekaligus menjadi hulu bagi Sungai Batangmerangin yang mengalir ke arah timur dan bermuara ke Sungai Batanghari.

Orang Kerinci atau dalam bahasa lokal disebut sebagai *Uhang Kincai* atau *Uhang Kinci* adalah mereka yang secara geografis menghuni wilayah Kerinci. Akan tetapi, batasan geografis Kerinci di masa lalu tentulah tidak sama dengan batasan administratif saat ini. Sumber-sumber tradisi lisan menyebutkan bahwa cakupan geografis Kerinci di masa Kesultanan Jambi terdiri dari dua bagian. Pertama disebut sebagai Kerinci Tinggi, yaitu wilayah di sepanjang aliran Sungai Batangmerao dan wilayah di bagian hulu aliran Sungai Batangmerangin. Kedua disebut sebagai Kerinci Rendah yaitu wilayah di bagian hilir Sungai Batangmerangin, serta sepanjang aliran Sungai Batangmasumai dan Sungai Batangtantan. Sebagian orang Kerinci juga menghuni aliran Sungai Tabir tetapi telah bercampur dengan komunitas-komunitas lain.

Orang Kerinci dan kebudayaannya telah menjadi objek penelitian yang sangat menarik terutama pada tinggalan-tinggalan naskah kuno yang mereka punya. Orang Kerinci memiliki kebiasaan menyimpan naskah-naskah kuna peninggalan para leluhur sebagai pusaka serta menganggapnya sebagai benda keramat (Voorhoeve, 1970; Kozok, 2006). Naskah-naskah tersebut biasanya disimpan di dalam tabung bambu yang dibalut dengan kain dan dimasukkan

ke dalam peti penyimpanan bersama barang-barang pusaka yang lain. Peti penyimpanan itu kemudian diletakkan di atas loteng rumah adat. Pembukaan peti dan Pembersihan barang-barang pusaka itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Melainkan harus melalui serangkaian ritual adat yang digelar secara periodik, biasanya setahun hingga lima tahun sekali. Penurunan pusaka yang dilakukan tanpa melalui prosedur adat yang berlaku, dipercaya oleh masyarakat akan menimbulkan bencana.

Secara umum, naskah-naskah kuno yang ditemukan di Dataran Tinggi Jambi sangat bervariasi baik dari segi kronologi, isi, media hingga aksara yang digunakan. Naskah-naskah yang bernilai historis umumnya merupakan naskah beraksara Jawi yang berasal dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitar wilayah Kerinci. Naskah beraksara Jawi tersebut adalah surat-surat kerajaan yang ditujukan kepada para penguasa dan kepala suku yang ada di Kerinci. Naskah lain yang ditulis menggunakan aksara Jawi adalah naskah *tembo* atau *tambo* yakni naskah yang memuat silsilah dan kisah perjalanan tokoh leluhur pada suatu klan (Sunliensyar, 2018a). Selain menggunakan aksara Jawi, naskah *tembo* juga ditulis menggunakan aksara Incung (*surat Incung*) di atas tanduk kerbau.

Aksara atau Surat Incung merupakan aksara yang berkembang secara lokal di Kerinci dan merupakan cabang dari Surat Ulu yang berkembang di Sumatra Bagian Selatan (Kozok, 2006: 70). Naskah yang ditulis dengan surat Incung mengandung isi yang sangat beragam. Naskah-naskah yang ditulis pada media bambu dan kertas umumnya berisi mantra sihir dan prosa ratapan (Sunliensyar, 2018a). Sementara itu, naskah yang ditulis pada media tanduk kerbau biasanya adalah naskah *tembo* yang kemungkinan ditulis ulang dari sumber tradisi lisan. Dengan kata lain, proses penulisan peristiwa sejarah dalam naskah *tembo* berlangsung jauh setelah peristiwa yang dikisahkan itu terjadi. Hal ini dibuktikan dengan frasa-frasa pembuka naskah yang biasanya diawali dengan kata *"inilah surat tutur tambanya ninik puyang kami"* (inilah surat tuturan *tembo* (sejarah lisan) leluhur kami).

Kandungan pada naskah-naskah kuno dan sumber-sumber tradisi lisan masyarakat adat di Kerinci pada hakikatnya mengandung elemen penting yang menjadi sumber utama dalam penyusunan sejarah Jambi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Barbara W. Andaya (2016) dalam karangan historiografinya yang berjudul "Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII". Dalam bukunya itu, Andaya membagi wilayah Jambi menjadi dua bagian yakni hulu dan hilir. Bagian hulu adalah wilayah yang dialiri oleh sungai-sungai yang merupakan hulu dari Sungai Batanghari terutama wilayah pegunungan dengan lahan yang subur, termasuk wilayah Kerinci. Sedangkan bagian hilir adalah wilayah yang berada di bagian hilir sepanjang Sungai Batanghari. Wilayah ini didominasi oleh lahan gambut, rawa-rawa dan kondisi tanahnya yang kurang subur. Di masa lalu, dua wilayah ini memiliki kondisi sosio-politik yang sangat jauh berbeda. Bagian hulu terdiri dari banyak perkampungan dan dihuni oleh para

kawula dengan populasi yang cukup padat. Penduduknya disebut sebagai orang hulu dan orang Kerinci menjadi bagian dari komunitas yang bermukim di hulu. Penduduk hulu hidup dari hasil mengolah sumber daya alam yang banyak tersedia di sekitar mereka seperti pertanian lada, padi, dan komoditas lainnya yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, bagian ilir terdiri dari populasi yang lebih sedikit. Di sana berdiri keraton atau kediaman para Sultan Jambi. Kesultanan ini mengontrol dan memonopoli perdagangan lada dan hasil hutan di sepanjang aliran Sungai Batanghari yang menjadikannya sebagai salah satu Kesultanan termakmur pada masanya.

Andaya menggambarkan relasi antara hilir dan hulu, raja dan "*kawula"* sebagai hal yang sangat kompleks dan dinamis. Para Raja yang bermukim membutuhkan orang hulu sebagai penyuplai komoditas yang diperdagangkan di sepanjang Batanghari, mereka juga membutuhkan orang hulu yang mau berbaiat atas status raja yang mereka sandang. Semakin banyak rakyat yang tunduk, semakin tinggi pula kewibawaan sang Raja. Sementara, kondisi tatanan sosial orang hulu yang kompleks mengharuskan mereka mengakui kekuasaan sang Raja. Mereka memerlukan raja sebagai protektor ketika mereka berniaga ke berbagai tempat. Sosok raja juga berperan sebagai legitimator atas lahan yang dikuasai oleh suatu komunitas adat. Kadangkala raja juga bertindak negosiator konflik lahan antarkomunitas adat yang bermukim di hulu. Tak jarang pula hubungan Raja di hilir dan para komunitas di hulu dijalin melalui ikatan perkawinan.

Namun, narasi yang diberikan oleh Andaya sangat istana-sentris, uraiannya yang ia sampaikan difokuskan pada kehidupan para raja dan priyayi di lingkungan istana sementara kehidupan di luar kerajaan sangat sedikit sekali disinggung. Sebagai Sejarawan, Andaya melihat kehidupan di lingkungan istana Jambi dipenuhi dengan intrik politik, persaingan antarpara pangeran dalam mendapatkan kekuasaan dan peran aktif perempuan dalam berpolitik yang turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh raja. Andaya juga membahas tentang persaingan antara Jambi dan Palembang di bidang politik dan ekonomi di Sumatra bagian Tenggara pada kurun abad ke-16 dan 17 M. Sementara itu, kehidupan masyarakat di luar istana sedikit sekali dibahas. Ditambah lagi, Andaya hanya melihat dari satu perspektif saja yaitu tentang bagaimana para raja dan bangsawan memperlakukan dan menyikapi komunitas yang berada di hulu—termasuk orang Kerinci-- bukan tentang bagaimana komunitas di hulu memperlakukan dan menyikapi pihak Kesultanan. Begitu pula penggunaan kata *kawula* untuk menggambarkan orang-orang Kerinci dipandang kurang tepat.

Bila dilihat dari letak geografisnya, Kerinci sesungguhnya merupakan wilayah yang sangat strategis. Wilayah yang subur dan kaya akan sumber daya alam serta dikelilingi oleh Kerajaan-kerajaan Islam yang eksis hampir dalam kurun waktu bersamaan. Di Sebelah barat Kerinci berdiri Kesultanan Inderapura yang menguasai pesisir barat Sumatra bagian Tengah (Kathirithamby-Wells, 1976; Znoj, 1998; Sudarman, 2016). Kerajaan ini termasuk kerajaan maritim yang

menyuplai komoditas lada dan emas di masa lalu terutama di wilayah Selatan Sumatra. Di sebelah Utara berdiri Kerajaan Sungai Pagu yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau (Drakard, 1993). Sementara itu, di sebelah tenggara dan timur membentang wilayah kekuasaan Kesultanan Jambi. Kondisi geopolitik semacam ini memungkinkan orang Kerinci untuk membangun relasi dengan banyak kerajaan di sekitarnya, tidak hanya dengan Jambi.

Kenyataan ini semakin menarik bila kita melihat tatanan sosial orang Kerinci melalui etnografi. Orang Kerinci tidak mengenal suatu pemerintahan terpusat. Tiap-tiap suku atau disebut pula sebagai *kalbu* yang menghuni suatu dusun atau perkampungan memiliki struktur pemerintahan tersendiri (Sunliensyar, 2018b). Mereka dikepalai oleh seseorang bergelar *depati* dan dibantu oleh pejabat di bawahnya yang disebut sebagai *permenti ninek mamak* dan *pemangku*. Sementara itu, tiap dusun dihuni oleh empat *kalbu* yang masing-masing kepala sukunya bergiliran menjabat sebagai kepala kampung dan tiga kepala suku yang lain bertugas untuk mengawasi. Kepala kampung akan diganti secara periodik berdasarkan keputusan masing-masing kepala suku. Tiap kampung atau dusun menjalin sebuah aliansi yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, sejarah pemekaran dusun dan sejarah ikatan para leluhur di masa lalu. Persekutuan antar kampung dan dusun ini dinamakan sebagai *mendapo*. Tiap *mendapo* dikepalai oleh kepala *mendapo* yang dipilih dari seorang depati yang terhimpun dalam persekutuan itu. Jabatan kepala *mendapo* inipun akan dijabat secara bergantian di antara depati-depati yang berkuasa.

Tatanan sosial orang Kerinci yang sangat kompleks ini mencerminkan mereka sebagai masyarakat yang heterarkis dan egalitarian. Setiap kampung memiliki pemerintahan mandiri yang tidak terikat pada kekuasaan tertentu. Sebuah pemerintahan yang didasarkan pada keputusan bersama antarsuku. Pemerintahan semacam ini sangat kontradiktif dengan sistem hirarkis yang dianut oleh kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Kerinci. Oleh karenanya, pihak kerajaan sudah pasti mengalami kesulitan mengontrol secara penuh baik secara ekonomi, politik dan sosial kampung-kampung yang ada di Kerinci, apalagi jaraknya yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Fakta bahwa orang Kerinci tidak selalu tunduk kepada pihak Kerajaan dilaporkan oleh Campbell yang menyebutkan bahwa orang-orang di hulu sudah melupakan kewajiban mereka membayar upeti kepada Raja Jambi pada abad ke-18 M (Marsden, 1999).

Kesulitan mengontrol secara penuh dusun-dusun yang ada di Kerinci akan memberikan keuntungan politis bagi orang Kerinci. Tiap-tiap dusun dapat menjalin hubungan multilateral dengan banyak kerajaan di sekitarnya selama hubungan itu memberi keuntungan bagi mereka. Di sisi lain, pihak-pihak kerajaan sangat membutuhkan orang Kerinci sebagai penyokong kekuasan dan perekonomian kerajaan mereka. Sebagaiamana yang disebut oleh Hoogkamer pada tahun 1876, bahwa Kerinci menyediakan komoditas-komoditas dagang yang dicari oleh peniaga asing di bandar-bandar Pesisir (Veth, 1881: 67). Orang

Kerinci melakukan pertukaran dan perniagaan dari hasil-hasil alam di wilayah mereka seperti kemenyan, damar putih, lilin, rotan, beras dan kopi. Oleh karenanya, masing-masing kerajaan perlu memastikan orang-orang Kerinci tetap setia menjalin hubungan dengan mereka. Mereka bersaing dalam merebut simpati orang Kerinci. Dengan kata lain, orang Kerinci menjadi elemen dan unsur penting dalam arus kompetisi Kerajaan-kerajaan yang eksis di Sumatra bagian Tengah pada periode tertentu.

Sayangnya, narasi sejarah yang diungkapkan selama terkait relasi-relasi antara orang Kerinci dengan banyak kerajaaan masih terlalu parsial dan sangat sempit. Bagaimanapun juga, bentuk-bentuk relasi ini masih belum diketahui, tidak jelas dan belum diungkapkan oleh sejarawan secara mendetail. Permasalahan yang muncul di sini adalah: pertama, bagaimana bentuk dan dinamika relasi yang dibangun antara orang Kerinci dengan kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya? Kedua, mengapa orang Kerinci perlu membangun hubungan relasi tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi sejarah lokal Kerinci yang berbasis pada sumber-sumber naskah kuno dan untuk memahami peran penting orang-orang Kerinci dalam kancah perpolitikan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra bagian Tengah di masa lalu.

Teks-teks naskah kuno baik naskah Jawi dan naskah Incung sendiri memberikan keterangan-keterangan yang sangat mendukung dalam mengungkapkan permasalahan di atas. Keberadaan naskah *tembo* beraksara Incung yang ditulis oleh masyarakat lokal di luar lingkungan istana telah membuka keran untuk melihat peristiwa sejarah masa lalu dari sudut pandang orang Kerinci sendiri. Namun demikian, tulisan ini akan dibatasi secara temporal dan spasial. Secara temporal, Tulisan ini dibatasi pada kurun abad ke-17 hingga abad ke-19 M didasarkan kepada perkiraan penulisan naskah di masa lalu atau pertanggalan peristiwa yang disebut dalam teks naskah. Secara spasial, wilayah yang dibahas meliputi Kerinci dan dua kerajaan Islam yakni Jambi dan Inderapura. Dua kerajaan ini berdekatan baik secara geografis maapun secara sosio-politik dengan orang Kerinci.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dalam lima tahapan, yaitu pengumpulan data atau heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2012). Tahapan pertama adalah heuristik yakni mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan. Dalam hal ini sumber ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Sumber utama yang digunakan adalah teks naskah-naskah kuno yang ditemukan di Kerinci serta sumber-sumber tradisi lisan yang berkaitan. Sementara itu, sumber pendukung adalah hasil-hasil penelitian terdahulu baik berupa jurnal, makalah, dan buku yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

Kumpulan hasil transliterasi yang dilakukan oleh Petrus Voorhoeve pada tahun 1942 menjadi sumber primer penting dalam tulisan ini. Voorhoeve bersama rekannya Abdul Hamid serta bantuan Dr. Poerbatjaraka berhasil mentransliterasikan setidaknya terhadap 261 naskah kuno yang dikumpulkan dari berbagai dusun di Kerinci (Kozok, 2006: 48). Hasil transliterasi itu disusun oleh Voorhoeve dalam bentuk katalog sederhana yang disebutnya sebagai Tambo Kerintji (TK). Salinan Tambo Kerintji itu sempat diduga hilang selama pendudukan Jepang di Indonesia. Namun, pada tahun 1970-an, CW. Watson seorang antropolog yang sedang melakukan penelitian di Kerinci berhasil menemukan kembali salah satu salinan naskahnya dari seorang pemangku adat di Kerinci. Kemudian, pada tahun 2006 Uli Kozok mengetik ulang TK menggunakan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dan dipublikasikan secara daring melalui situs *https://ipll.manoa.hawaii.edu/indonesian/research/tambo-kerinci/* sehingga dapat diakses dengan mudah. Selain dari hasil transliterasi Voorhoeve, beberapa naskah-naskah kuno juga telah didokumentasi oleh British Library (BL) melalui melalui program Endangered Archives Programme (EAP) ke-117. Mereka telah mendokumentasikan setidaknya 200 manuskrip di wilayah Kerinci. Beberapa hasil dokumentasi tersebut juga digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Hasil dokumentasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui laman *https://eap.ul.bk*

Sumber-sumber etnografi terutama tradisi lisan juga sangat berguna dalam upaya menyusun sejarah lokal karena mengandung pesan-pesan budaya (Jan Vansina, 2014). Sumber-sumber tradisi lisan orang Kerinci telah banyak ditulis ulang orang Kerinci ketika tradisi tulis menulis mulai berkembang dan proses itu masih berlangsung hingga sekarang. Sumber-sumber tradisi lisan pada mulanya ditulis menggunakan surat Incung, kemudian berlanjut menggunakan aksara Jawi dan bahkan di era modern tradisi lisan itu ditulis dan diketik menggunakan aksara latin oleh pemangku adat setempat.

Meskipun sumber-sumber hikayat dan tradisi lisan ini sedikit meragukan terutama dari sisi kronologis yang terkesan tidak tepat dan banyaknya versi yang kadang bersifat kontradiktif. Akan tetapi, mengikut pendapat Andaya, sumber-sumber lokal—termasuk tradisi lisan yang masih dituturkan maupun yang kemudian ditulis—beberapa isinya memiliki persamaan tema yang terjadi berulang kali dan kadangkala antartema terikat satu sama lain (Andaya, 2016: 5). Alasan lain yang mungkin luput dari perhatian Andaya bahwa tradisi lisan dari masyarakat adat kadangakala memiliki keterkaitan dan kecocokan dengan kandungan teks-teks tertulis dari naskah kuno. Oleh sebab itu, Andaya menjadikan sumber-sumber lokal sebagai salah satu dasar dalam penyusunan historiografinya tentang Sumatra Tenggara dalam abad ke-17 dan 18 M.

Salah satu kendala dalam proses heuristik ini adalah banyaknya teks-teks sumber primer yang belum diterjemahkan dan bahkan belum ditransliterasi. Selain itu, terdapat pula naskah yang belum diteliti sama sekali kandungan teksnya. Oleh

sebab itu, pada tahapan pengumpulan data, peneliti juga melakukan kegiatan penerjemahan, transliterasi, dan identifikasi terhadap teks-teks naskah tersebut sesuai dengan kaidah filologis.

Kendala lain adalah kurangnya data spasial terkait dengan distribusi naskah. Naskah-naskah kuno ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi historisnya semata, tetapi juga dari sisi arkeologisnya. Naskah-naskah tersebut sudah berusia tua dan masih berada dalam konteks aslinya sejak pertama kali disimpan atau dibuat oleh sang pemilik di masa lalu. Kemungkinan ini terjadi karena perilaku kelompok masyarakat pemilik yang mengeramatkan dan menjadikan naskah-naskah kuno sebagai pusaka leluhur. Hal ini menyebabkan mereka tidak berani untuk merusak atau bahkan sekadar memindahkan pusaka tersebut dari penyimpannnya tanpa melalui prosedur tertentu. Berdasarkan pertimbangan ini, maka analisis terhadap naskah-naskah kuno ini dapat dilakukan sebagaimana analisis pada artefak-artefak arkeologis sesuai dengan kebutuhan penelitian dan permasalahan apa yang berusaha dijawab. Dalam konteks ini, pembuatan data spasial dilakukan untuk mengetahui distribusi naskah yang ada di tiap-tiap dusun atau *mendapo* yang ada di Kerinci. Data spasial mengenai distribusi naskah dapat menjadi landasan interpretasi untuk menarasikan intensitas dan independensi hubungan geopolitik antara dusun-dusun yang di Kerinci dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sumber artefak arkeologis dari masa yang sama—selain dari naskah kuno—juga sangat membantu untuk menguatkan fakta-fakta historis yang akan diungkapkan.

Tahapan kedua adalah kritik sumber. Tahapan ini terdiri dari dua bagian, yaitu kritik sumber dan analisis. Pada bagian kritik sumber atau verifikasi, peneliti memverifikasi sumber-sumber yang telah diperoleh baik dari teks naskah kuno maupun catatan-catatan yang ditulis oleh masyarakat adat. Sumber-sumber ini diverifikasi untuk diuji kebenaran dan akurasinya. Prosedur kritik sumber dilakukan dengan cara kritik internal dan eksternal (Sjamsuddin, 2007).

Tahapan ketiga adalah interpretasi. Tahapan ini merupakan tahap penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dan dianalisis. Interpretasi dilakukan terhadap data spasial yang terkait dengan distribusi naskah-naskah kuno di wilayah Kerinci dan terhadap kandungan teks naskah yang terkait dengan peristiwa penting antara orang Kerinci dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya di masa lalu. Tahapan ini juga ditekankan untuk menggali penyebab dibalik suatu peristiwa yakni motivasi-motivasi melatarbelakangi orang Kerinci di masa lalu untuk menjalin relasi dengan pihak-pihak kerajaan.

Tahapan terakhir adalah historiografi. Tahapan ini adalah tahapan penyajian sejarah dalam bentuk tulisan sesuai dengan urutan kronologis. Penyajian data harus berdasarkan fakta sejarah yang terungkap selama proses interpretasi. Pada tahap ini, sangat penting untuk diperhatikan mengenai masalah diakronis dan sinkronis. Diakronis artinya peristiwa sejarah akan diceritakan secara kronologis untuk memahami rangkaian peristiwa secara berkaitan pada kurun waktu tertentu. Urutan diakronis dalam konteks ini ditekankan dalam menarasikan dinamika

relasi antara orang Kerinci dan pihak kerajaan selama kurang lebih tiga abad atau dalam kurun waktu abad ke-17 hingga ke-19 M. Sementara itu, narasi tentang motivasi yang melatarbelakangi hubungan antara kedua belah pihak lebih bersifat sinkronis. Artinya urutan kronologis kejadian tidak begitu ditonjolkan. Dengan demikian, sekelumit sejarah orang-orang Kerinci dalam mewarnai sejarah Sumatra di masa lalu dapat terungkap dan dipahami dengan jelas.

Bab II
Gambaran Umum Orang Kerinci Dan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Sekitarnya

Pada bagian ini akan dideskripsikan kondisi sosial, pemerintahan adat, dan kehidupan religi orang Kerinci sebagai salah satu komunitas yang bermukim di wilayah hulu. Selain itu, dideskripsikan pula gambaran umum tentang Kerajaan Jambi dan Inderapura sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh politis yang sangat kuat di Kerinci.

Gambar 1. Letak gografis wilayah Kerinci dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya (Sumber: Sunliensyar, 2018b dengan modifikasi)

A. Orang Kerinci: Tatanan Sosial, Struktur Pemerintahan dan Religi Masyarakatnya

Berbicara tentang wilayah Kerinci di Dataran Tinggi Jambi tidak bisa dilepaskan dari sejarah penghunian yang sangat panjang. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan wilayah ini sudah dihuni oleh imigran Austronesia sejak sekitar 4000 tahun yang lalu (Bonatz, 2012: 43; Tjoa-Bonatz, 2012: 23). Hal ini terlihat dari sebaran situs arkeologi di Kerinci yang berasal dari berbagai periode. Situs Neolitik tertua adalah situs Bukit Arat yang berusia sekitar 4000-3500 tahun yang lalu. Situs ini menghasilkan temuan arkeologis berupa gerabah alat batu dan serpih obsidian (Bonatz, 2012: 46-47). Pada masa ini tampaknya budidaya padi dan peternakan kerbau mulai dikembangkan oleh komunitas yang menghuni wilayah Kerinci (Setyaningsih dkk, 2019). Menurut Setyaningsih dkk. (2019)

indikasi peternakan peternakan kerbau di Kerinci di mulai pada sekitar 4300 tahun yang lalu sejalan dengan migrasi Austronesia ke Sumatra. Sementara itu, awal mula budidaya padi di mulai pada 3200 tahun yang lalu (atau sekitar 1200 SM).

Periode berikutnya adalah masa paleometalik (zaman perunggu-besi) dengan temuan situs penguburan tempayan yang berkaitan pula dengan tradisi megalitik. Periode ini berlangsung cukup panjang yang diperkirakan di mulai pada abad akhir Sebelum Masehi hingga sekitar abad ke-16 M. Situs penguburan tempayan adalah situs Siulak Tenang yang berlokasi sekitar 10 km ke arah barat laut Lembah Kerinci dengan pertanggalan sekitar 486 ± 186 SM dan 116±40 SM (Budisantosa, 2015: 8). Sementara itu, situs penguburan tempayan termuda adalah situs Renah Kemumu dengan pertanggalan sekitar tahun 1200 M dan pada lapisan paling atas sekitar 1560±51 M (Bonatz dkk, 2006: 504;Tjoa-Bonatz, 2012: 24).

Pengaruh klasik (Hindu-Budha) mulai memasuki wilayah ini dengan bukti temuan berupa naskah kuno yang berasal dari periode abad ke-14 M (Kozok, 2006). Naskah tersebut dikenal sebagai kitab naskah Undang-Undang Tanjung Tanah atau kitab *Nitisarasmuscaya* (Kozok, 2015*)*. Naskah ini disimpan sebagai pusaka oleh masyarakat adat di desa Tanjung Tanah, sekitar Danau Kerinci. Naskah yang telah diteliti oleh Kozok ini, diketahui ditulis pada media *daluang* dengan menggunakan aksara Sumatra kuno yang merupakan rumpun aksara pasca *pallawa* yang lazim pula disebut dengan aksara *kawi* serta dua halaman terakhir ditulis dengan aksara Kerinci yang disebut pula dengan *surat incung* (Kozok, 2006). Kitab ini berisi undang-undang yang dirumuskan oleh para Dipati sebagai penguasa Kerinci bersama Maharaja Dharmasraya dan ditulis oleh Dipati Kuja Ali di sebuah *Paseban* yang berada di Bumi Palimbang(?) (Kozok, 2006; 2015).

Selain menyebutkan tokoh bergelar *Maharaja Dharmasraya*, Naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah (KUTT) menyebutkan nama tokoh kerajaan yang lain yaitu *Paduka Sri Maharaja Karta-bhaisaj Seri Gandawangsa Pradhana Megat Prasena Karta-Bhaisa.* Menurut Thomas M. Hunter, ke dua gelar ini merujuk kepada satu tokoh kerajaan Malayu yang memerintah dan menjadi aktor politik yang memprakarsai sidang mahamatya (*great convocation*) dengan para Dipati dari Kerinci (Hunter, 2015: 342). Lebih lanjut menurut Hunter, kemungkinan tokoh tersebut adalah pewaris dari Adityawarman yang bertahta di Pedalaman Minangkabau, Saruaso dan berkuasa hingga Dharmasraya (Hunter, 2015: 343). Dua gelar lain yang disebut dalam KUTT adalah *Sang Hyang Kema(i)ttan* dan *Dewam Sirsa Amaleswaram.* Dua gelar ini adalah gelar pendewaan dari keluarga Kerajaan yang meninggal, kemungkinannya adalah penguasa pendahulu sebelum *Paduka Sri Maharaja Karta-bhaisaj Seri Gandawangsa* yakni Adityawarman (Hunter, 2015: 343).

Di sisi lain tokoh *Kuja Ali Dipati* yang merupakan penulis KUTT ini menurut Hunter adalah seorang Muslim yang berasal dari India, Hal ini terlihat dari nama Kuja yang digunakannya (Hunter, 2015: 306-307). Menurut Hunter, kata *kuja* berasal dari kata *Khoja/khwaja* yang diserap dari bahasa Persia. Gelar ini merupakan gelar yang biasa tokoh-tokoh Sufi muslim di India (Hunter, 2015: 350). Keberadaan tokoh Khoja Ali Dipati dalam KUTT menunjukkan bahwa orang India Islam telah hadir mewarnai kehidupan politik masyarakat di pedalaman Sumatra kala itu.

KUTT juga memberikan informasi bahwa pada abad ke 14 M di Kerinci, telah terbentuknya pemerintahan lokal yang mengatur masyarakat Kerinci. KUTT misalnya menyebutkan '…….*pda mandalika di Bumi Kurinci silunjur Kurinci…'* yang merujuk kepada seorang 'gubernur' yang berkuasa di Distrik bernama Bumi Kerinci yang menerima anugrah kerajaan (*royal favour*) berupa KUTT (Hunter, 2015: 214-315). Di bawahnya terdapat pejabat-pejabat lokal lainnya seperti: (1) *mahasenapati* (panglima prajurit/*commander-in-chief of army*); (2) *prapatih (*penasihat utama raja/*foremost among principle advisors to a king or feudal lord*); (3) *samegat (*seorang dengan jabatan tinggi di lembaga peradilan/ *person invested with a high office or rank at court*); (4) *parabelang-balangan* (para hulubalang) (Hunter, 2015: 315-316).

Di samping itu, KUTT juga memuat informasi telah terbentuknya berbagai unit-unit wilayah (territorial) di Bumi Kerinci. Di mana KUTT menyebut berbagai istilah yang berkaitan dengan ruang hunian atau wilayah hunian seperti: (1) *saprakara disi,* yaitu segala bentuk wilayah hunian;(2) *desa helat mahelat* (perkampungan yang terpisah/perkampungan pendatang*);*(3) *desa pradesa* (perkampungan besar, *supra-ordinate village*); (4) *banwa sahaya* (bagian perkampungan dari daerah bawahan (Hunter, 2015: 317-318). Lebih lanjut, dijelaskan oleh Hunter bahwa pejabat-pejabat lokal yang berada di masing-masing unit wilayah tersebut dikuasai oleh seseorang bergelar Dipati sebagai pemilik utama otoritas politik di masing-masing wilayah Bumi Kerinci sebagaimana klausa dari KUTT yang berbunyi *"…… jangan tida ida peda dipatinya s(a)urang-s(a)urang..",* yang diartikan bahwa para pejabat di perkampungan jangan tidak taat kepada dipatinya masing-masing (Hunter, 2015: 318-319). Informasi yang termuat di dalam KUTT yang berasal dari abad ke 14 M, paling tidak memberikan bukti yang sangat kuat bahwa di wilayah Kerinci saat itu, telah mempunyai struktur pembagian jabatan politik dan terdapat berbagai bentuk permukiman, yang dikuasai oleh seorang tokoh bergelar Dipati.

Selain temuan naskah ini, ada pula temuan dua arca perunggu lepas yang diduga berasal dari Kerinci sebagai salah satu bukti masuknya pengaruh Hindu-Budha ke wilayah ini (Utomo, 2016: 163-164). Dua arca tersebut adalah arca *Padmapāṇi* dan arca *Awalokiteśwara.* Lebih lanjut Utomo mengemukakan bahwa arca *Padmapāṇi* temuan Kerinci dilihat dari penggambaran gaya pakaiannya mendapat pengaruh dari gaya seni masa *Śailendra* sehingga diduga arca tersebut

berasal dari abad ke-8-9 Masehi. Sedangkan arca *Awalokiteśwara* dilihat dari penggambaran kain panjang yang digunakannya memiliki persamaan dengan gaya penggambaran pada arca-arca dari *Situlpavuva* (Srilanka) yang berasal dari abad ke 7 M. Meskipun demikian, ke dua arca yang merupakan temuan lepas ini masih meragukan apakah benar-benar ditemukan di wilayah Kerinci, soalnya ketiadaan informasi terkait riwayat-riwayat awal penemuan.

Periode berikutnya adalah masa Islam yang ditandai dengan penyebaran Islam dari pesisir ke pedalaman oleh pihak-pihak Kesultanan yang berada di sekitar Kerinci. Proses islamisasi ini menguat pada abad ke-17 M (Bonatz, 2012: 65). Periode akhir dari sejarah panjang wilayah Kerinci adalah masa kolonial yang di mulai pertengahan tahun 1903 M setelah kekalahan rakyat Kerinci melawan pasukan Belanda (Madjid, 2012).

Periode sejarah yang cukup panjang tampaknya tidak banyak mengubah tatanan sosial dan struktur pemerintahan adat orang Kerinci sehingga masih bisa ditelusuri hingga sekarang. Dari segi bahasa misalnya terlihat bahwa orang Kerinci masih menuturkan bahasa Kerinci yang merupakan rumpun Austronesia dan secara fonetis beberapa dialeknya memiliki kesamaan dengan bahasa Mon-Khmer cabang rumpun bahasa Austroasiatik (Reijn, 1974: 130). Sebagian besar orang Kerinci juga masih bertahan berprofesi sebagai petani padi dan peladang (BPS, 2017). Profesi yang telah berlangsung dan bertahan ribuan tahun di Kerinci.

Sistem dan Tatanan Sosial

Secara sosial, orang Kerinci mengikuti garis keturunan ibu untuk menghubungkan kelompok kekeluargaan mereka. Sistem ini disebut juga dengan sistem matrilineal. Pihak laki-laki yang menikah dengan perempuan suatu suku (kaum) dianggap sebagai *uhang semendo,* yaitu orang dari kelompok (suku/ kalbu) lain yang bergabung dalam suku mereka selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Ketika ikatan perkawinan terputus akibat perceraian, maka laki-laki tersebut kembali kepada kelompoknya, dan tidak dianggap lagi sebagai anggota suku dari istrinya. Akan tetapi, anak-anak mereka dimasukkan ke dalam suku berdasarkan garis ibu mereka. Selain itu, masyarakat Kerinci juga menganut sistem matrilokal yaitu suami tinggal di hunian keluarga istri.

Menurut Morison (1940) organisasi sosial terkecil dalam masyarakat Kerinci disebut dengan *tumbi* atau *umah tanggo* yang terdiri dari satu kepala keluarga. Gabungan dari beberapa tumbi yang berasal dari satu nenek perempuan disebut dengan *perut.* Gabungan dari beberapa *perut* yang berasal dari leluhur perempuan satu generasi di atas nenek pada tingkat *tumbi* disebut dengan *kalbu* atau *jurai.* Selanjutnya gabungan dari beberapa *kalbu* membentuk sebuah *luhah.* Namun, istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut tingkatan organisasi sosial terkadang tidak sama antar satu dusun dengan dusun yang lain. Seperti yang terjadi antara dusun Hiang dan dusun Pondok Tinggi. Di Pondok Tinggi mereka

menggunakan istilah *pintu* untuk menggantikan istilah *tumbi* yang berlaku di Hiang. Menurut Watson (1992) perbedaan ini terjadi karena masing-masing *dusun* di wilayah Kerinci memiliki karakteristik adat tersendiri tetapi pola dan strukturnya masih sama.

Setiap anggota dari *kalbu* umumnya dibagi berdasarkan jenis kelamin. Anggota *kalbu* laki-laki disebut dengan *anak jantan* sedangkan anggota *kalbu* perempuan dinamakan *anak batino*. *Anak batino* dibagi ke dalam dua kelompok yaitu *anak batino dalam* dan *anak batino tuo*. *Anak batino tuo* adalah perempuan dalam suatu *kalbu* yang menyandang status sebagai *balian*, yaitu *anak batino* yang dipilih sebagai pelaksana dan pengatur setiap ritual atau prosesi-prosesi adat yang digelar, mereka adalah keturunan dari leluhur yang paling awal dalam sebuah kelompok. Mereka juga biasa disebut sebagai *penatih* artinya orang-orang yang menghuni rumah adat. Di luar *anak batino tuwo* mereka disebut sebagai *anak batino dalam*. Di luar *anak batino tuwo* mereka disebut sebagai *anak batino dalam* yaitu *anak batino* yang bertugas menjaga dan mengelola rumah, tanah dan pusaka milik *kalbu.*

Menurut Sunliensyar (2018b) *kalbu* digolongkan berdasarkan asal-usul dan periode kedatangan nenek moyang ke dalam suatu wilayah yang dituturkan melalui tradisi lisan. *Kalbu* yang leluhurnya datang lebih awal (*kalbu* yang lebih tua), memperoleh hak penguasaan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan *kalbu* yang lebih muda. Pertambahan anggota *kalbu* dan pengaruh sistem matrilokal menyebabkan *kalbu* yang lebih tua berkembang membentuk banyak *kalbu.* Persekutuan antara *kalbu* yang lebih tua dan *kalbu* yang merupakan *kalbu* turunannya, *kalbu* lain yang lebih muda dan *kalbu* pendatang inilah yang disebut sebagai *luhah*. Persekutuan *luhah* inilah yang nantinya mendirikan sebuah permukiman bernama dusun.
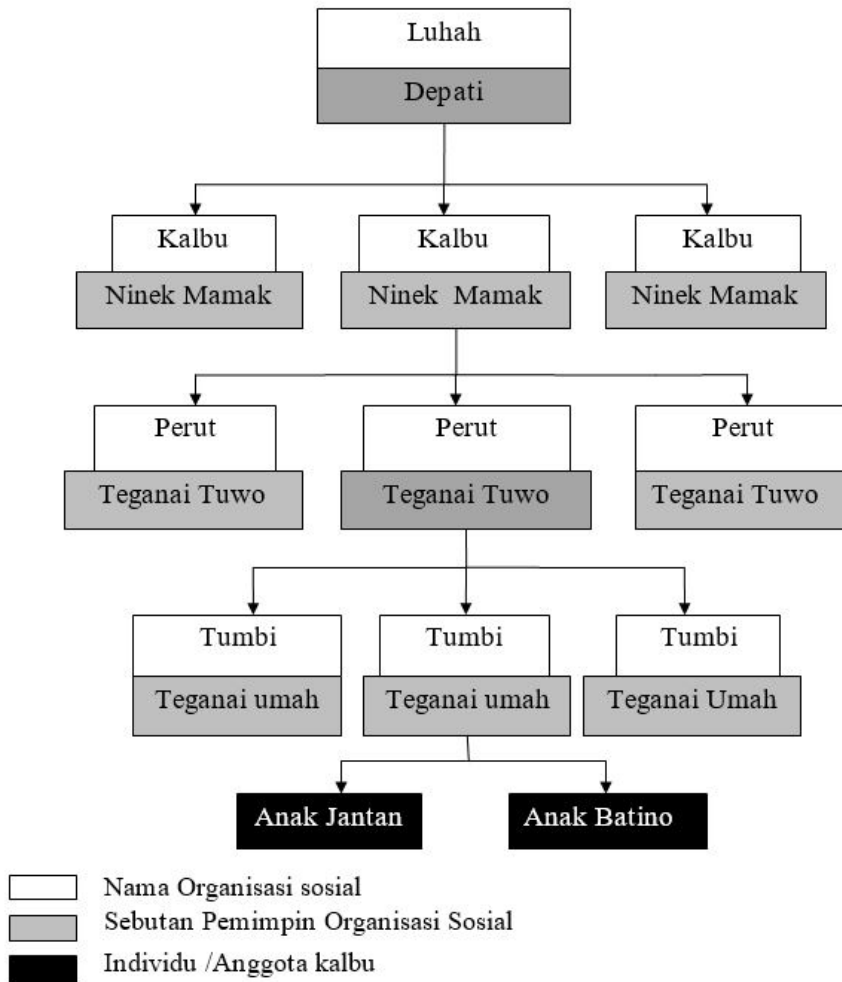
Gambar 2. Skema Struktur Organisasi Masyarakat Adat Kerinci
Sumber. Sunliensyar, 2018b

Tiap-tiap tingkat organisasi sosial ini diatur oleh lembaga yang disebut istilah *sko nan tigo takah* yang terdiri atas *sko teganai*, *sko permenti ninek mamak*, dan *sko dipati*. Pada tingkat organisasi sosial terkecil yaitu *tumbi/pintu/umah tanggo,* masyarakat adat Kerinci diatur oleh *teganai umah* yang sering dipanggil dengan sebutan *mamak* atau *tuwan*. Para *teganai umah* ini adalah saudara laki-laki dari seorang istri dalam suatu kepala keluarga. Jadi secara adat, suatu rumah tangga akan diatur oleh *teganai*, sementara suami hanya berkewajiban mencari

nafkah untuk istri dan anak-anaknya karena statusnya hanya sebagai *uhang semendo*. Biasanya seorang suami diberi hak oleh *teganai umah* untuk mengelola persawahan atau kebun yang menjadi milik klan atau *kalbu* istrinya.

Pada tingkat *perut* orang Kerinci diatur oleh *teganaituwo* atau disebut juga dengan *teganai tingkat lateh, Teganai tuwo* merupakan generasi satu tingkat di atas *teganai umah* atau saudara laki-laki dari nenek pihak ibu. Di antara *teganai tuwo* dipilihlah seseorang untuk memangku jabatan adat yang disebut *ninek mamak* untuk mengatur organisasi sosial yang lebih tinggi, yaitu *kalbu.* Para pemangku jabatan *ninek mamak* ini menggunakan gelar-gelar adat berdasarkan nama tokoh-tokoh leluhur pendiri dusun seperti Ngebi, Rio, Jindah, Jagung, Rajo, Demang, Datuk, Mangku dan lain sebagainya. Di antara para *teganai* pun ada yang dipilih untuk memangku jabatan adat yang lebih tinggi dari *ninek mamak* yang disebut sebagai *dipati* atau *depati,* mereka dipilih untuk mengatur suatu *luhah,* yaitu tingkat organisasi sosial yang terdiri atas gabungan beberapa *kalbu*. Status *teganai* secara umum melekat pada setiap *anak jantan* ketika mereka sudah beranjak dewasa dan sudah mampu mengurus kaumnya, sementara status *permenti ninek mamak* maupun *dipati* merupakan jabatan adat yang dipilih berdasarkan keputusan *teganai-teganai tuwo* dan *pemangku adat* di dalam sebuah *kalbu*, biasanya mengikuti sistem gilir-ganti dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Tingkat tertinggi dari organisasi sosial masyarakat Kerinci sampai pada *luhah* saja. Kumpulan *luhah* inilah yang mendirikan permukiman yang setingkat *dusun*. *Dusun* dikepalai oleh seorang yang disebut *kepalo dusun* atau *tuo kampung*, mereka ini sekaligus menggunakan gelar *dipati* secara adat. *Tuo kampung* atau *kepalo dusun* dijabat oleh depati-depati dari masing-masing *luhah* secara bergantian. Namun, sejak keluarnya UU no. 5 tahun 1979 mengenai pemerintahan desa, istilah *dusun* yang digunakan sebelumnya diganti dengan desa, sementara itu tenaga administratifnya tidak lagi dijabat oleh pemangku adat setempat.

Konsep Lahan

Menurut Sunliensyar (2018b: 35-38) orang Kerinci menganggap lahan atau tanah merupakan bagian dari pusaka yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Tanah atau lahan tersebut diperoleh oleh nenek moyang masing-masing *kalbu* melalui kegiatan *malatih, mancencang*, dan *manaruko* di masa lalu. Setelah kegiatan tersebut, para leluhur menandai lahan masing-masing dan kemudian mewariskannnya kepada anak keturunan mereka. Lahan yang telah diklaim kepemilikannya oleh *kalbu* disebut sebagai tanah *ajun arah.*

Tanah *ajun arah* pada dasarnya dilarang untuk diperjualbelikan dan hanya boleh dikelola oleh anggota *kalbu* tersebut. Hak pengelolaan dan kepemilikan tanah *ajun arah* diserahkan kepada anggota *anak batino* (anggota *kalbu* perempuan), sedangkan hak pengaturan dan kontrol atas lahan dipegang oleh *anak jantan* terutama yang memegang jabatan adat depati, permenti ninek mamak dan teganai.

Wahyono (2006) mengemukakan bahwa berdasarkan pemanfaatannya tanah *ajun arah* dibagi menjadi tanah basah, tanah kering dan tanah larangan. Tanah basah adalah tanah yang lebih mudah dijangkau oleh sistem pengairan. Tanah dengan kondisi seperti ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi. Sebaliknya, tanah kering merupakan tanah yang lebih sulit dijangkau sistem pengairan karena kondisi topografinya, sehingga tanah ini dimanfaatkan sebagai lahan permukiman, lahan perkebunan yang disebut sebagai *pelak* dan lahan perladangan yang terdiri dari ladang, *bluka mudo* dan *bluka tuo*. Tanah larangan adalah tanah yang dilarang untuk digarap oleh penduduk seperti area hutan dan kawasan hulu sungai.

Lebih lanjut menurut Sunliensyar (2018b) pengklaimanan tanah *ajun arah* dinyatakan berdasarkan tradisi lisan. Misalnya tanah *ajun arah Luhah* milik luhah Depati Mangkubumi di Dusun Siulak Panjang yang batas-batasnya diklaim melalui tradisi lisan yang berbunyi: "*Belah ile Lubuk Sawo Anggah, belah mudik kaki Gunung Bujang, belah di air Sitajem bedarik, ka darat Guguk Tinggi teruh ka Pematang Padun Suli lepas ka hulu Sungai Remeh badegun di Gunung Bungkuk lalu ka Gunung Berapi tasiring Depati Intan. Ingat kurano Temenggung, Rio Mudo"*.Tradisi lisan di atas mengisyaratkan bahwa orang Kerinci menggunakan fitur-fitur bentangalam (lanskap) sebagai penanda tanah *ajun arah* seperti gunung, sungai, dan bukit.

Mereka juga tidak mengenal sistem mata angin yang baku untuk menunjukkan batas-batas tanah tersebut. Penunjuk arah yang digunakan mengacu pada tanda-tanda geografis yang ada di lingkungan mereka. Petunjuk arah tersebut antara lain: (1) *mudik* yaitu arah yang menunjukkan hulu sungai; (2) *ka ile* atau *hilir* yaitu arah yang menunjukkan muara sungai; (3) *ka ayi (ke air)* yaitu arah yang menunjukkan lokasi aliran sungai, di mana sungai yang menjadi patokan dalam hal ini adalah Sungai Batangmerao; (4) *ka darat* atau *darat* yaitu arah yang menunjukkan lokasi perbukitan paling dekat dengan permukiman; (5) *ka umo* yaitu arah yang menunjukkan lokasi persawahan di sekitar dusun; (6) *belah lujung* yaitu arah antara arah *mudik* dan arah *darat*; (7) *belah tumpun* yaitu arah antara *arah hilir* dan arah *ka air*. Oleh sebab itu, arah dalam konteks masyarakat Kerinci sangat relatif, karena perspektifnya tergantung pada posisi permukiman yang ditinggali.

Konsep Permukiman

Orang Kerinci mengenal tingkatan permukiman yang tertuang dalam konsep negeri *yang mpat* (Sunliensyar, 2018b; Nofrial, 2016). Negeri adalah permukiman yang telah memiliki sturuktur pemerintahan dan tatanan sosial. Dalam konsep ini, tingkatan negeri dibagi berdasarkan luasan geografis dan jumlah penduduknya. Tingkatan negeri di mulai dari yang terkecil hingga terbesar yaitu *taratak, kuto, dusun* dan *mendapo.*

Taratak atau *talang* merupakan permukiman terkecil dalam konsepsi masyarakat Kerinci. Taratak terdiri dari satu rumah/pondok dengan lahan pertanian di sekitarnya, dan jarak antar rumah cukup jauh (Nofrial, 2016: 44). Permukiman *taratak* atau *talang* masih bisa dijumpai di area perladangan masyarakat. Ketika suatu keluarga yang menghuni *taratak* berkembang dan menjadi suatu kelompok, maka status *talang* berubah menjadi *kuto*. Ciri-ciri permukiman *kuto* adalah jarak antar rumah sudah saling berdekatan, dan penduduknya telah berkembang dari satu keturunan nenek moyang. *Kuto* seringkali dianggap sebagai tempat mula-mula permukiman karena merupakan lokasi hunian awal para leluhur sebelum mendirikan dusun (Nofrial, 2016: 44).

Dusun adalah permukiman dengan cakupan geografis yang lebih luas dan populasi yang lebih banyak. Bila *kuto* dihuni oleh satu kelompok (*kalbu*) saja, maka dusun dihuni oleh banyak kelompok (*kalbu*) dan telah membentuk federasi-federasi yang disebut sebagai *luhah*. Dusun terdiri dari masyarakat dengan tatanan sosial dan struktur pemerintahan yang cukup kompleks. Ketika populasi penduduk dalam suatu dusun sudah semakin banyak dan lahan tidak lagi mencukupi untuk membangun hunian baru, maka para Depati memerintahkan sebagian anggota masyarakat untuk mendirikan dusun baru di atas lahan yang merupakan tanah *ajun arah* mereka. Dari sinilah muncul istilah dusun induk dan dusun pemekaran. Dusun-dusun yang memiliki ikatan geneologis dan teritorial ini kemudian membentuk suatu federasi yang disebut dengan *mendapo*.
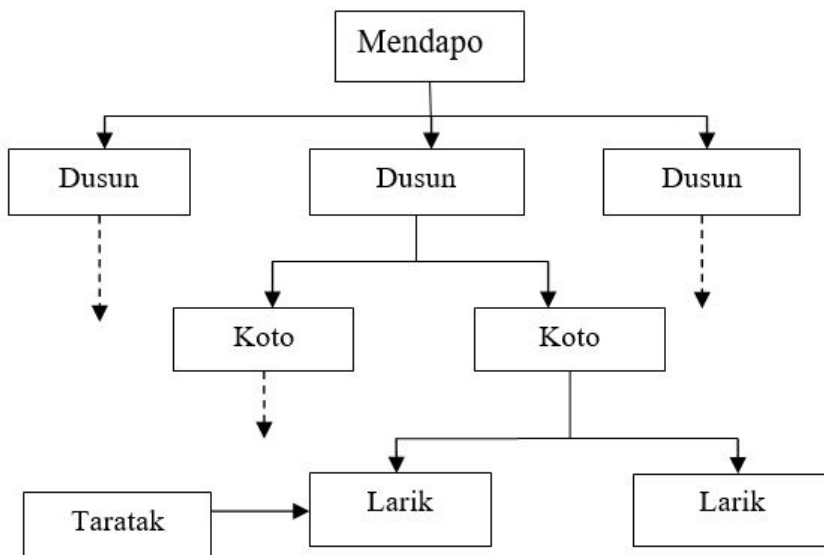
Gambar 3. Skema tingkatan hunian/permukiman masyarakat Kerinci
Sumber: Sunliensyar, 2018b

Struktur Pemerintahan Adat di Kerinci

Orang Kerinci membentuk identitas mereka berdasarkan asal usul wilayah adat, dusun dan *mendapo* mereka masing-masing sebagai suatu struktur pemerintahan adat. Wilayah Kerinci terbagi menjadi lima wilayah adat utama yaitu wilayah adat Depati Tiga Dibaruh atau disebut pula dengan Kerinci Rendah, wilayah adat Depati Empat di Atas atau Kerinci Tinggi atau disebut pula dengan sebutan wilayah III Helai Kain, wilayah adat Kumun Tanah Kurnia, wilayah adat Sungai Penuh Tanah Pegawai Jenang Pegawai Raja, wilayah adat Selapan Helai Kain dan wilayah adat Tanah Sekudung.

Wilayah adat Tiga Dibaruh meliputi dusun-dusun di bagian hilir sungai Batang Merangin, sepanjang Sungai Batangmasumai dan bagian hulu Batangtantan. Wilayah ini dikepalai oleh tiga orang depati yaitu: Depati Satio Rajo berkedudukan di Lubuk Gaung, Depati Satio Nyato di Bukit Batu dan Depati Satio Betih di Tanah Renah (Yakin, 1986). Wilayah adat Empat di atas atau III Helai kain meliputi dusun-dusun di bagian hulu Sungai Batangmerangin dan anak-anak sungainya yang terdiri dari Mendapo Tamiai, Mendapo Pulau Sangkar, Mendapo Pengasi, Mendapo Sandaran Agung, Mendapo Lolo dan Mendapo Keliling Danau. Wilayah ini dikuasai oleh empat depati masing-masing Depati Mendaro Langkap di Tamiai, Depati Rencong Telang di Pulau Sangkar, Depati Biang Seri di Pengasi dan Depati Batu Hampar di Sandaran Agung.

Wilayah adat Selapan Helai Kain atau wilayah adat Mendapo nan Selapan meliputi dusun-dusun yang berada di bagian hilir aliran Sungai Batangmerao dan di sepanjang anak-anak Sungai Batangmerao yang mengalir di sekitar wilayah tersebut (Zakaria, 1984). Wilayah ini terdiri dari delapan buah *mendapo* yaitu (1) Mendapo Seleman dengan Depatinya bergelar Depati Serah Bumi; (2) Mendapo Hiang dengan Depatinya bergelar Depati Atur Bumi; (3) Mendapo Penawar dengan Depatinya bergelar Depati Mudo Terawang Lidah; (4) Mendapo Rawang Karang Setio Tap dengan Depatinya bergelar Depati Mudo Menggalo; (5) Mendapo Rawang Karang Setio Balun dengan Depatinya bergelar Depati Punjung Tambang Gumi; (6) Mendapo Depati Tujuh dengan Depatinya bergelar Depati Sekungkung Jenak Putih; (7) Mendapo Kramantan (Kemantan) dengan Depatinya bergelar Depati Situwo; dan (8) Mendapo Semurup dengan Depatinya bergelar Depati Kepalo Sembah.

Wilayah adat Tanah Kurnia Dusun Kumun berlokasi di sepanjang Sungai Kemuan yang dikuasai oleh empat Depati yaitu Depati Sampurno Bumi Putih, Depati Galang Negeri, Depati Simpan Negeri, Depati Nyato Negaro. Wilayah adat Sungai Penuh atau disebut pula sebagai Mendapo Limo Dusun meliputi dusun-dusun yang berlokasi di sepanjang aliran Sungai Bungkalpandan. Wilayah ini dikuasai oleh Depati nan Bertujuh yakni Depati Santiudo, Depati Payung, Depati Sungai Penuh, Depati Alam Negeri, Depati Simpan Negeri, Depati Nyato Negaro dan Depati Pahlawan Negara. Wilayah adat Tanah Sekudung meliputi

dusun-dusun yang berada di sepanjang aliran hulu Sungai Batangmerao dan anak-anak sungainya yang berada di sekitar area tersebut (Sunliensyar, 2016b; 2018b). Wilayah adat ini terdiri dari Dusun Siulak Gedang, Dusun Siulak Mukai, Dusun Siulak Panjang, Dusun Siulak Kecik, Koto Rendah, Sungai Pegeh, Napal Betakuk, Lubuk Nagodang, Siulak Deras, Siulak Tenang, Tanjung Genting, Sungai Batugantih, Sungai Betung, Sungai Renah dan wilayah Kayu Aro. Wilayah ini dikuasai oleh tiga orang depati yaitu Depati Intan di Dusun Siulak Mukai, Rajo Simpan Bumi di Dusun Siulak Gedang dan Depati Mangkubumi di Dusun Siulak Panjang.

Sebagai unit-unit pemerintahan mandiri yang dibentuk berdasarkan pengklaiman wilayah adat, sangat sulit bagi para penguasa Kerinci untuk melakukan komunikasi dan berhubungan dengan pihak-pihak kerajaan secara terkoordinasi. Oleh sebab itu Para Depati ini membentuk sebuah lembaga federasi yang dinamakan Depati Empat-Selapan Helai Kain. Depati Empat bertindak sebagai perantara hubungan para Depati di Kerinci dengan pihak Kerajaan Jambi. Mereka membentuk pusat kerapatan atau balai kerapatan di Sandaran (Sanggaran) Agung, pinggir Danau Kerinci. Sementara itu, Delapan Helai Kain bertindak sebagai perantara hubungan antara Depati-Depati di Kerinci dengan pihak Kesultanan Inderapura dengan pusat kerapatan berlokasi di Hamparan Besar Tanah Rawang.

Kehidupan Religi orang Kerinci

Orang Kerinci merupakan penganut Islam. Islam telah mengakar dalam kehidupan orang Kerinci bahkan telah menjadi landasan hukum adat yang mereka gunakan. Akan tetapi, banyak pula yang masih mempratikkan tradisi dan ritual yang berakar pada animisme dan dinamisme sebagaimana yang terlihat dari upacara *asyeik, pelaho* dan upacara terhadap menhir-menhir nenek moyang (Sunliensyar, 2016a; 2018b).

Gambar 4. Para pemuka agama di Dusun Kumun, Kerinci dalam suatu upacara adat.
Sumber: Tropenmuseum (diakses 18 Maret 2019)

Tradisi orang Kerinci melakukan ritual terhadap roh-roh leluhur dan batu-batu megalitik tersirat dalam sepucuk surat yang dikirim oleh Sultan Jambi kepada penguasa Kerinci sekitar abad ke-17 M (Bonatz dkk, 2006: 511). Surat tersebut berisi larangan terhadap orang Kerinci untuk melakukan kegiatan yang dianggapnya sebagai tradisi jahiliyah termasuk *bersalih* dan menyembah batu. Indikasi tentang kepercayaan terhadap roh-roh leluhur juga termuat dalam teks-teks mantra yang tertulis dalam naskah surat Incung (Sunliensyar, 2018a). Laporan tentang kepercayaan orang Kerinci di masa lalu juga dimuat oleh W.C. Hoogkamer, seorang *countroller* Inderapura pada tahun 1876. Dalam laporan itu disebutkan bahwa orang Kerinci sama seperti orang Kubu dan Pasemah, percaya terhadap dewa-dewa dan melakukan ritual *asé-pelaro* terhadapnya (Veth, 1881: 65).

Kepercayaan orang Kerinci terhadap roh-roh leluhur dan hal lain yang berkaitan dengan animisme, dinamisme dan tradisi megalitik di beberapa tempat masih bertahan hingga kini. Setrawati (2002) memaparkan bahwa di Dusun Siulak Mukai, masyarakatnya masih melakukan ritual terhadap padi yang dianggap memiliki nilai sakral. Mereka menganggap bahwa padi memiliki roh yang disebut sebagai *simangat* padi. Oleh sebab itu, ritual *ngayun luci* mereka lakukan untuk mengundang s*imangat* padi agar bulir-bulir padi menjadi bernas dan terhindar dari hama penyakit hingga saat panen nantinya. Sunliensyar (2018b) juga mengungkapkan bahwa orang-orang Kerinci di wilayah adat Tanah Sekudung masih melakukan ritual terhadap menhir-menhir para leluhur mereka di lokasi-

lokasi sakral yang disebut *jihat* atau *t'mpat nineik.* Mereka meletakkan sesajian di kaki menhir, mendirikan panji-panji kecil di sekitarnya bahkan melumuri darah binatang korban di permukaan menhir.

B. Kesultanan Jambi: Penguasa Sembilan Sungai

Kesultanan Jambi adalah kerajaan bercorak Islam yang wilayahnya meliputi Provinsi Jambi saat ini. Kesultanan Jambi diperkirakan eksis sejak abad ke-16 M hingga awal abad ke-20 M dengan ibukotanya terletak di Tanah Pilih, Kota Jambi sekarang. Secara geografis di masa lalu, wilayah Kesultanan Jambi meliputi wilayah di sepanjang sembilan aliran sungai (sembilan lurah). Sembilan sungai itu antara lain Batangasai, Batangmerangin, Batangmasumai, Batangtabir, Batangsenamat, Batangjujuhan, Batangtebo, Batangbungo dan Batangtembesi (Harun dan Sagala, 2013: 89). Kesultanan Jambi pernah mencapai puncak kejayaan pada sekitar abad ke-16 hingga ke-17 M mengalahkan rivalnya Kesultanan Palembang (Andaya, 2016). Kekayaan Jambi diperoleh dari perdagangan lada, emas dan hasil-hasil hutan lainnya yang ada di sepanjang Sungai Batanghari dan wilayah yang berada di bawah kekuasaannya Namun sayangnya, hanya sedikit sumber-sumber sejarah yang mengemukakan awal mula berdirinya.

Sumber yang menyinggung tentang asal mula berdirinya kerajaan Jambi hanya termaktub dalam *Hikayat Negeri Jambi* yang ditulis sekitar paruh kedua abad ke-19 M, Naskah *Ini Sajarah Kerajaan Jambi* yang ditulis oleh Ngebi Umar Suto Dilogo pada 1358 H (1939 M) dan sumber-sumber tradisi lisan masyarakat adat (Andaya, 2016; Meng; 1996; Kukushkin, 2004; Tjandrasasmita, 2009: 177-178; Chatib dkk, 2011). Meskipun ada banyak versi hikayat dan tradisi lisan tentang awal mula Kerajaan Jambi terdapat satu versi kisah yang lebih masyhur di kalangan masyarakat Jambi. Kisah tersebut bermula dari seorang putri dari Pagaruyung bernama Putri Selaro Pinang Masak anak Rajo Baremah yang pulang ke tanah leluhurnya di Jambi dengan menghiliri Sungai Batanghari. Setelah sampai di Ujung Jabung, sang Putri kemudian menikahi seorang pendakwah Islam dari Negeri Istambul Turki bernama Ahmad Salim atau dikenal pula sebagai Datuk Paduko Berhalo[1]. Dari pernikahannya tersebut, lahir empat orang putra-putri yang merupakan leluhur para raja dan priyayi dalam Kerajaan Jambi. Keempat putra-putrinya tersebut adalah seorang perempuan bernama Rangkayo Gemuk dan tiga orang laki-laki bernama Rangkayo Pingai, Rangkayo Kedataran, dan Rangkayo Hitam[2]. Menurut Usman Meng (1996) ketiga putra dari Putri Selaro Pinang

1 *Versi Hikayat Negeri Jambi memberikan narasi yang berbeda bahwa Datuk Paduko Berhalo menikahi anak Demang Lebar Daun di Palembang dan memiliki putra bernama Datuk Paduka Ningsun. Datuk Paduka Ningsun inilah memiliki yang empat orang anak termasuk Rangkayo Hitam yang menjadi Raja Jambi. Sementara itu, Putri Selaro Pinang Masak dari Pagaruyung justru menikahi Pangeran Rengas Pendek yakni keponakan dari Rangkayo Hitam (Kukushkin, 2004: 53-61). Kisah ini tampaknya senada dengan sumber yang dikutip Andaya bahwa Demang Lebar Daun dari Palembang memiliki dua putri, putri tertua menikahi penguasa Bukit Siguntang dan putri yang kedua menikahi penguasa Tanjung Jabung di Pesisir Jambi (Andaya, 2016: 14).*

2 *Versi lain menyebutnya sebagai Orang Kaya atau Orang Kayo*

Masak menjadi raja Jambi dalam kurun paruh akhir abad ke-15 M hingga abad awal abad ke-16 M.

Riwayat tentang Rangkayo Hitam mendapat porsi lebih banyak dalam hikayat dan tradisi lisan dibandingkan dengan dua saudaranya yang lain. Diceritakan bahwa ketika Rangkayo Hitam menjabat sebagai Raja Jambi ia pernah memberontak ke Mataram agar Jambi tidak mengirim upeti lagi ke sana (Chatib dkk., 2011: 46). Dalam kisahnya tersebut Rangkayo Hitam meminta kepada seorang *mpu* untuk membuatkannya sebuah keris yang dinamakan keris Siginjai. Keris ini merupakan *regalia* Kesultanan Jambi diwariskan turun-temurun kepada Sultan-sultan yang bertahta.

Setelah Rangkayo Hitam wafat, tahta Raja Jambi dipegang oleh anak-anak saudaranya lantaran Rangkayo Hitam tidak memiliki keturunan (Kukushkin, 2004). Pada periode ini tahta Kerajaan Jambi dipegang oleh raja yang menggunakan gelar Panembahan. Meng (1996) dan Chatib dkk. (2011) mencatat setidaknya ada empat orang *panembahan* yang memerintah pada periode paruh awal abad ke-16 M hingga awal abad ke-17 yakni Panembahan Rantau Kapas (Pangeran Hilang di Air), Panembahan Rengas Pandak atau Rengas Pendek, Panembahan di Bawah Sawa dan Panembahan Kota Baru. Di sisi lain, Andaya berpendapat bahwa *panembahan* dan *susuhunan (sunan)* merupakan gelar bagi raja-raja tua yang akan memasuki masa pensiun dan segera menyerahkan tampuk kekuasaan kepada suksesornya (Andaya, 2016: 63). Setelah periode Panembahan, Jambi dipimpin oleh raja yang menggunakan gelar Sultan di mulai dari Sultan Abdul Qahhar dan berakhir dengan Sultan Thaha Syaifuddin pada awal abad ke-20 M (Chatib dkk., 2011: 47-46; Meng, 1996: 7-13).

Selain bersumber dari naskah-naskah lokal, catatan asing terawal tentang Jambi pada periode Islam adalah laporan penjelajah Portugis Tome Pires di awal abad ke-16 M. Dalam laporannya, Pires menyebut bahwa Jambi kala itu sedang berada di bawah kekuasaan Patih Rodim, Raja Demak dan penduduk Jambi mirip dengan penduduk Palembang yakni lebih seperti Jawa ketimbang Melayu (Andaya, 2016: 33). Menurut Andaya, laporan Pires ini menandakan Jambi sejak abad ke-15 M menjadi daerah bawahan dari Demak dan kemudian berlanjut menjadi vasal bagi Kesultanan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-17 M. Laporan-laporan asing mengenai eksistensi Kesultanan Jambi secara kuantitas semakin banyak ditemukan pada abad ke-17 M, seiring dengan semakin intensifnya jalinan Jambi dengan pihak-pihak asing terutama dengan pihak VOC.

Struktur Pemerintahan

Menurut Locher-Scholten (2004) kekuasaan tertinggi dalam Kesultanan Jambi dipegang oleh seorang sultan yang disebut pula sebagai raja. Ia dibantu oleh seorang perdana menteri yang bergelar Pangeran Ratu, yang juga kandidat kuat sebagai penerus tahta kesultanan. Para sultan dan pangeran Jambi berasal dari empat suku utama yakni Suku Kraton, Kedipan, Perban dan Raja Empat Puluh.

Para Sultan dan Pangeran Ratu biasanya dipilih dari Suku Kraton. Sementara itu, para Pangeran yang berasal dari Suku Kedipan dan Perban umumnya menduduki jabatan sebagai wakil raja di wilayah bawahan. Misalnya jabatan Pangeran Temenggung Mangkunegara dari Suku Kedipan menjadi wakil raja di wilayah Merangin dan Kerinci sedangkan jabatan Pangeran Dipanegara berasal dari Suku Perban menjadi wakil raja di wilayah Mangunjayo, Tebo. Selain itu, para pangeran dari Suku Raja Empat Puluh bertindak sebagai penasihat.

Dalam menjalankan pemerintahnya Sultan dan Pangeran Ratu dibantu oleh Pepatih Dalam, Pepatih Luar, Dewan Kalbu serta Suku XII Bangsa (Tim Depdikbud, 1979; Chatib dkk.,2011). Menurut Tim Depdikbud (1979), hingga akhir abad ke-19 M, Sultan dan Pangeran Ratu membawahi "rapat dua belas" atau Badan Pemerintahan Kerajaan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pepatih Dalam dan Pepatih Luar[3]. Masing-masing pepatih ini terdiri dari enam orang pangeran sehingga jumlah totalnya dua belas orang pangeran.

Pepatih Dalam merupakan Majlis Kerajaan (*Rijksraad*) yang dipimpin oleh Pangeran Ratu. Anggota Pepatih Dalam merupakan bangsawan kerajaan yang diberi gelar antara lain: Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati, Pangeran Suria Natakusuma, Pangeran Jayadiningrat, Pangeran Arya Jayakesuma dan Pangeran Natamenggala atau Pangeran Wirakusuma (Tim Depdikbud, 1979: 21). Sementara itu, Pepatih Luar dipimpin oleh salah seorang pangeran tertua yang bergelar Pangeran Dipanegara dengan anggotanya masing-masing bergelar: Pangeran Mangkunegara, Pangeran Purba, Pangeran Marta Jayakusuma, Pangeran Kramadilaga dan Pangeran Kusumadilaga. Perintah-perintah Sultan melalui Pepatih Dalam akan diteruskan kepada Pepatih Luar. Dari Pepatih Luar perintah-perintah tersebut diteruskan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti kepada Suku XII Bangsa atau kepada para *jenang* yakni para kurir yang diutus oleh raja ke wilayah-wilayah bawahan. Para *jenang* akan membawa perintah dari raja kepada kepala dusun dan perkampungan tujuan.

---

3 *Disebut juga dengan Kerapatan Patih Dalam dan Kerapatan Patih Luar.*

Gambar 5. Potret yang diklaim Belanda sebagai Sultan Thaha Syaifuddin dan rombongan. Judul aslinya *Groepspotret met Sultan Thaha Syaifuddin van Djambi en zijn gevolg*. Sumber: Tropenmuseum (Diakses 16 Maret 2019)

Di ambang berakhirnya kekuasaan Kesultanan Jambi yaitu pada masa pemerintahan Sultan Thaha, pejabat-pejabat Pepatih dalam dan Pepatih Luar juga diangkat dari kalangan bangsawan rendahan dan para keturunan Arab di sekitar Tanah Pilih yang telah menjadi kerabat raja (Tim Depdikbud, 1979: 22). Keturunan Arab yang menjadi anggota Pepatih Dalam di antaranya : (1) Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri bergelar Pangeran Wirakusuma; (2) Sayyid Ali bin Alwi Al-Jufri bergelar Pangeran Syarif Ali; (3) Sayyid Husin Baragbah gelar Pangeran Mangkunegara. Sementara itu, keturunan bangsawan rendahan yang menjadi anggota Pepatih Dalam maupun Pepatih Luar antara lain: (1) Ki Demang Gemuk dari Kampung Tengah; (2) Ki Demang Dullah Capuk dari Kampung Jelmu; (3) Haji Muhammad Yasin gelar Kemas Temenggung Puspawijaya dari Kampung Tanjung Pasir; (3) Temenggung Suradilaga dari Kampung Baru; dan (4) Temenggung Tando dari Kampung Johor. Selain Pepatih Dalam dan Pepatih Luar, terdapat Dewan Kalbu yang merupakan elemen lain dalam tata pemerintahan Kesultanan Jambi, mereka terdiri dari alim-ulama yakni para qadhi dan penghulu, para hulubalang (prajurit) dan para cerdik pandai.

Menurut Chatib dkk., (2011: 53-55) Suku XII Bangsa bertugas melayani segala keperluan raja dan mengurus masalah rumah tangga istana. Suku XII Bangsa merupakan keturunan dari para bangsawan tinggi Jambi yang menikahi

perempuan-perempuan dengan status sosial rendah. Suku ini terdiri dari; (1) Priyayi Tujuh Kota Sembilan Kota. Anggota suku ini merupakan keturunan Sunan (Susuhunan) Pulau Johor, mereka bertugas sebagai kepala pengaman di luar lingkungan istana. Mereka menggunakan gelar Paku Negara dengan jabatan Temenggung; (2) Priyayi Petajin. Mereka merupakan keturunan dari Rangkayo Kedataran yang bermukim di Betung Berdarah dan menggunakan gelar kerajaan Pesirah Setiaguna. Mereka bertugas mengurus rumah-rumah raja; (3) Priyayi Maro Sebo, anggota suku ini merupakan keturunan Sunan Kembang Sri yang bermukim di Dusun Kembang Sri serta menggunakan gelar kerajaan Kademang Wira Santika, mereka bertugas sebagai penjaga keamanan di dalam istana atau di dalam kota; (4) Priyayi Permas Pemayung, mereka keturunan Rangga Emas, mereka bertugas melawan musuh yang hendak menyerang kerajaan. Mereka menggunakan gelar Puspawijaya dengan jabatan Temenggung; (5) Priyayi Jebus atau Raja Sari, mereka adalah keturunan Rangkayo Pingai yang bermukim di Kampung Baru Tanjung Pedalaman. Mereka bertugas mengurusi keperluan dapur saat penobatan raja serta mengurusi masalah perbaikan keraton dan rumah-rumah raja. Mereka menggunakan gelar Suta Dilaga dengan jabatan Temenggung (6) Priyayi Air Hitam, mereka adalah keturunan Rangkayo Gemuk yang bermukim di Lubuk Kepayang, mereka bertugas mengumpulkan kayu bakar dan air untuk keperluan kerajaan. Mereka menggunakan gelar Setia Guna dengan jabatan Pasirah; (7) Priyayi Awin, mereka keturunan Sunan Muaro Pijoan yang bermukim di Pulau Kayu Aro, mereka bertugas mengawal raja dari sisi depan dengan memegang tombak. Mereka menggunakan gelar Ngebi Rasadana dengan jabatan pemangku; (8) Priyayi Penagan, mereka keturunan Sunan Muaro Pijoan yang bertugas mengawal raja dari depan dengan memegang tombak. Mereka menggunakan gelar Ngebi Singa Kerti dengan jabatan penghulu/pemangku; (9) Priyayi Miji yaitu para perempuan dari keturunan Sunan Muaro Pijoan yang bertugas memijit raja dan membuat perahu guna keperluan raja. Mereka menggunakan gelar Ngebi Kerti Diguna dengan jabatan pemangku; (10) Priyayi Pinakawan Tengah, mereka adalah keturunan Sunan Muaro Pijoan yang bermukim di Sungai Duren, mereka bertugas mengangkat *pundutan* dari rumah raja hingga Paseban Agung. Mereka menggunakan gelar Ngebi Suka Diraja dengan jabatan pemangku; (11) Priyayi Mestong Serdadu, mereka keturunan Kiyai Patih bin Panembahan Bawah Sawo yang bermukim di Sarang Burung, mereka bertugas mengurus senjata kerajaan seperti pemuras dan bedil. Mereka menggunakan gelar Ngebi Singapati Tambiyuda dengan jabatan pemangku; (12) Priyayi Kebalin, mereka adalah keturunan Kiyai Senopati bin Panembahan Bawah Sawo yang bermukim di Terusan, mereka bertugas mengawal raja di sisi kanan dan kiri dengan membawa *pandak sendrik*, *kampil* dan pedang. Mereka menggunakan gelar Ngebi Patih Tambiyuda dengan jabatan pemangku.

Susunan tata pemerintahan Kesultanan Jambi tertuang dalam pepatah adat yang berbunyi: *alam berajo, rantau bejenang, negeri bebatin, luhak bepengulu, kampung be-tuo, rumah be-teganai.* Artinya secara struktural, pemerintahan tersusun secara hirarkis dari kekuasaan tertinggi hingga terbawah yang dipegang oleh masing-masing penguasa yaitu kerajaan atau alam dikuasai oleh raja, rantau dikuasai oleh *jenang,* negeri dikuasai oleh seorang *batin*, luhak dikuasai oleh penghulu, kampung dan dusun dikuasai oleh *ketuo* (kepala) dusun atau *ketuo* kampung dan setiap rumah tangga dikuasai oleh *teganai*.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Andaya, Kesultanan Jambi mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya. Kesultanan ini pernah terlibat konflik berkepanjangan dengan Kesultanan Johor di Semenanjung Malaya, begitu pula dengan Palembang. Para pangeranpun pernah terlibat konflik mengenai suksesi tahta kerajaan yang tak dapat dipungkiri adanya keterlibatan VOC dan Belanda dalam memperkeruh hal tersebut. Hingga keruntuhannya, Belanda berhasil memecah para Bangsawan Jambi menjadi dua bagian yakni yang menentang dan mendukung mereka. Sultan-sultan yang dianggap sah dan didukung oleh rakyat tetapi menentang hegemoni Belanda di Jambi terpaksa menghindar jauh ke wilayah hulu. Sementara itu, Belanda mengangkat sultan-sultan yang pro terhadap mereka di ibukota kerajaan di Tanah Pilih.

C. Kesultanan Inderapura: Penguasa Pesisir Barat

Tidak seperti Kesultanan Jambi, literatur yang membahas tentang Kesultanan Inderapura sangat sedikit dijumpai. Dua tulisan yang secara spesifik membahas tentang Kesultanan Inderapura antara lain karya Kathirithamby-Wells (1976) yang berjudul "*The Inderapura Sultanate: The Foundations of Its Rise and Decline, from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries*" dan tulisan Sudarman (2016) dalam disertasinya yang berjudul "*Jaringan Perniagaan dan Islamisasi di Kerajaan Inderapura Abad XVII dan Awal Abad XVIII M".* Tulisan lain yang bersinggungan dengan Kesultanan Inderapura adalah tulisan Putri (2018) dalam tesisnya yang berjudul *Pelabuhan Muaro Sakai di Pantai Barat Sumatra Masa Kesultanan Inderapura.* Sumber lain yang menarik adalah dokumen yang ditulis oleh Sutan Arbi dan Sutan Iradat yang merupakan keturunan Sultan Inderapura[4]. Dokumen ini tampaknya terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, berjudul "*Kisah Kerajaan Airpura"* yang isinya menceritakan tentang sejarah Inderapura, asal usul raja, struktur pemerintahan dan hukum adatnya. Bagian kedua, berjudul *Sejarah Pertalian Alam Kerinci dengan Indrapura*, isinya bercerita tentang Inderapura di bawah pemerintahan Sultan Gegar Alamsyah yang pada masanya hubungan diplomatik Kerinci dan Inderapura mulai dijalin. Bagian ketiga, bercerita tentang sejarah penaklukan Kerinci oleh pihak Belanda. Isi dokumen ini setelah dicermati tampaknya memiliki kesamaan dengan teks-teks naskah kuno,

4 *Isi dokumen tersebut diunggah oleh Bapak Eman Canser yang merupakan ahli waris mereka dalam website https://kerajaanairpura.blogspot.com (diakses 16 Maret 2019)*

dokumen sejarah maupun dengan tulisan-tulisan sejarawan sebelumnya sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendukung dalam penyusunan historiografi ini.

Inderapura adalah kerajaan bercorak Islam yang telah eksis sejak abad ke-16 M (Kathirithamby-Wells, 1976; Sudarman, 2016). Kesultanan ini berada di Pantai Barat Sumatra yang wilayah kekuasaannya membentang dari Air Bangis hingga wilayah Muara Ketahun di Bengkulu (Sudarman, 2016: 2; Kathirithamby-Wells, 1976: 72). Kesultanan ini merupakan salah satu kerajaan maritim yang sering luput dari perhatian sejarawan padahal ia merupakan kerajaan penting yang menyuplai komoditas lada, emas dan beras di bagian Selatan Pulau Sumatra pada abad ke-16 hingga ke-18 M.

Secara geografis pada abad ke-17 M, wilayah Inderapura terbagi menjadi dua bagian wilayah (*subregion*). Bagian wilayah pertama, berada di sepanjang aliran Sungai Airhaji dan Batang Inderapura. Di wilayah ini terdapat sekitar dua puluh permukiman yang disebut 20 Koto ditambah dengan federasi Bandar X yang dipimpin oleh Rajo Nan Ampek (Rajo Airhaji, Rajo Bungo Pasang, Rajo Kambang, Rajo Palangai)(Sudirman, 2016: 2; Kathirithamby-Wells, 1976: 70, 72). Masing-masing *koto* dipimpin oleh seorang *mentri* yang merupakan para penghulu suku dalam wilayah Minangkabau. Dua puluh *mentri* ini terbagi dalam tiga wilayah kekuasaan yaitu VI di wilayah hulu, VI di wilayah hilir dan VIII di wilayah tengah. Bagian wilayah kedua, merupakan wilayah Anak Sungai yang meliputi dataran Menjuto-Air Dikit dengan XIV Koto (permukiman) yang berdiri di dalamnya dan wilayah Muko-muko dengan V Koto yang terdapat di dalamnya. Dua wilayah ini juga dipimpin masing-masing oleh 14 *mentri* dan lima *mentri*. Selain itu, terdapat beberapa perkampungan di Airdikit, Bantal, Triamang, Ipuh, Airrami, Seblat, Ketahun dan Urai yang dipimpin oleh Peroatin nan Kurang Satu Enam puluh[5] (sebanyak 59 peroatin). Kesemua *mentri* dan *peroatin* ini berada di bawah otoritas Sultan Indrapura yang diwakili oleh seorang Mangkubumi (Sudarman, 2016: 2, lampiran X; Kathirithamby-Wells, 1976: 72).

Terdapat puluhan bandar atau pelabuhan kecil yang membentang di sepanjang wilayah kekuasaan Inderapura. Misalnya saja Bandar Muara Sakai, Bandar Muko-muko dan Bandar Sepuluh. Bandar Sepuluh memiliki sepuluh buah bandar yakni Painan, Batangkapeh, Taluk Taratak, Surantih, Amping Parak, Kambang, Lakitan, Pelangai, Sungai Tunu dan Pungasan dan Airhaji. Keberadaan bandar-bandar ini tidak lepas dari kondisi topografis yang ada di Inderapura. Banyaknya sungai dan danau yang berhulu di Perbukitan Barisan di bagian sebelah timur yang kemudian bermuara di Samudra Hindia di bagian sebelah barat, menjadikan Inderapura memiliki banyak lokasi-lokasi strategis untuk dijadikan sebagai bandar.

Sebagai contoh, Putri (2018) mencatat setidaknya ada empat sungai besar yang mendukung keberadaan Bandar Muaro Sakai di Inderapura. Sungai-sungai tersebut antara lain: pertama, Sungai Sindang yang berhulu di Gunung Sarang

5 *Peroatin kedudukannya sama dengan mentri, tetapi istilah peroatin digunakan di wilayah-wilayah sebelah Selatan Sumatra terutama yang mendapat pengaruh Jambi dan Palembang*

kemuning. Sungai ini disokong oleh anaknya yang bernama Sungai Lasi dan Sungai Air Gasang. Alirannya menuju ke Sungai Rumbai, Sungai Gedang, Sungai Panjang dan Sungai Keri yang kemudian berbelok ke arah utara dan bertemu dengan Batang Pandan. Selanjutnya, aliran sungai ini bersatu dengan arus Batang Lunang di pertigaan Danau Pinggan.

Gambar 6. Peta wilayah Kesultanan Inderapura di Pantai Barat Sumatra
Sumber: Kathirithamby-Wells, 1976.

Kedua, Batang Lunang. Sungai ini berhulu di Gunung Sarang Kemuning

dan di Sungai Sikabu yang berasal dari hulu Bukit Sasaran Kayu Gading. Alirannya menuju arah Barat dengan melintasi Lunang dan Danau Parang. Debit airnya ditambah dari beberapa anak sungainya yang bermuara di sepanjang alirannya yakni oleh Sungai Kumbang Gedang, Sungai Kumbang Ketek dan Sungai Ruyung. Pertemuan arus Sungai Sindang dan Batang Lunang mengalir ke Danau Kesik, terus ke Danau Padang bertemu dengan Sungai Air Bajurung dan kemudian bergabung dengan Batang Tapan.

Ketiga, Batang Tapan. Sungai ini berhulu di wilayah Kerinci yang mengalir ke arah barat. Alirannya diperkuat oleh beberapa anak sungainya yaitu Sungai Dalam, Air Sako, Air Pelajang Dalam kemudian bertemu dengan Lubuk Batu Tunggal dan Lubuk Kubu. Semantara itu, dari utara arusnya diperkuat oleh Sungai Penadah, Sungai Gambir yang melintasi Bukit Lubuk Ubai dan bertemu dengan Lubuk Kubu. Alirannya melintasi Tapan terus ke arah barat berbelok rke utara. Di sana debit alirannya diperkuat oleh Sungai Tinuri, Sungai Talang, Sungai Pulai Bangaung, Sungai Gajah, Sungai Palang. Selanjutnya, alirannya bertemu dengan Air Tapan Ketek yang berhulu di Bukit Air Panggang, Sungai Batang berhulu di wilayah Jambi, Gunung Galam, Gunung Pandan Kecil dan Gunung Sibilusus. Dari pertemuan antara Batang Tapan dan Air Tapan Kecil alirannya terus mengalir ke arah barat dan kemudian bermuara di pertigaan Sungai Sindang dan Batang Lunang. Arus besar yang dihasilkan oleh Sungai Sindang, Batang Lunang dan Batang Tapan terus mengalir ke Muara Sakai. Di Muara Sakai, arusnya bertemu dengan Batang Inderapura dan Sungai Air Batu. Setelah itu, aliran sungai ini melintasi Lubuk Gedang dan arusnya diperkuat lagi oleh Air Pelokan hingga sampai ke Muara Gedang. Di Muara Gedang, alirannya diperkuat oleh gabungan dua yaitu Sungai Sirah dan Sungai Bantaian. Saking besarnya, di muara sungai ini mengapung dua pulau kecil di tengahnya yakni Pulau Rajo dan Pulau Puti. Kedua pulau ini merupakan tempat bersejarah bagi Kesultanan Inderapura.

Keempat, Batang Silaut. Sungai berhulu di Bukit Sasaran Kayu Gading yang mengalir ke arah barat dan kemudian membelok ke selatan. Arusnya diperkuat oleh Sungai Nepai, Sungai Batu Nipis, Sungai Gendawang, Sungai Baajaban, Air Hitam, dan Air Muaro Terurai Bunga. Sungai ini bermuara di Muaro Tasambur yang berada di utara Sungai Mingkuang.

Sama halnya dengan Jambi, awal mula Kesultanan ini tidak dapat dipastikan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa berdirinya Kesultanan ini segera setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511 M (Kathirithamby-Wells, 1976: 65). Semantara itu, sumber-sumber lain yang bercerita tentang awal mula Kesultanan Inderapura hanyalah berasal dari sumber-sumber hikayat dan *tamb*o. Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa Kesultanan Inderapura didirikan oleh Tuanku Berdarah Putih bergelar Sultan Gegar Alamsyah. Ia merupakan anak dari perkawinan anak Raja Alam Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Sultan Muhammadsyah, raja kerajaan Airpura (nama awal dari Kesultanan Indrapura) (Kathirithamby-Wells, 1976: 66). Sementara itu, dokumen milik Sutan Arbi dan Sutan Iradat memaparkan dua versi berbeda tentang Tuanku Berdarah Putih. Versi pertama memiliki kesamaan dengan versi lain yang disampaikan oleh

Katharithamby-Wells yang menyebutkan bahwa Tuanku Berdarah Putih adalah anak tertua dari tiga orang putra Cindur Mato dengan istrinya Putri Reno Bulan dari Renah Sikalawi[6] (Kathirithamby-Wells, 1976: 66). Sementara itu, versi kedua mengatakan bahwa Tuanku Berdarah Putih bernama asli Arung Masuba. Ia merupakan putra dari Sultan Firmansyah dengan seorang putri berdarah bugis bernama Putri Syaiful Alam atau Putri Ranit Jintan[7]. Sultan Firmansyah sendiri merupakan saudara dari raja Airpura sebelumnya yang bernama Muhammadsyah. Muhammadsyah inilah yang menikahi anak Yang Dipertuan Pagaruyung sebagaimana yang disebut oleh Kathirithamby-Wells. Keterkaitan erat antara Inderapura dengan Pagaruyung ini menjadikan Inderapura sebuah wilayah yang disebut sebagai ujung Pagaruyung dan sekaligus menjadikannya bagian rantau dari wilayah Minangkabau *(*Kathirithamby-Wells, 1976: 65-66).

Sepanjang sejarahnya, Inderapura pernah menjalin relasi yang sangat dekat dengan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten. Namun secara perlahan wilayah, ini menjadi objek perebutan monopoli dagang antara Belanda dan Inggris. Kathirithamby-Wells (1976) menggambarkan bahwa hubungan antara Inderapura dengan Aceh maupun Banten dijalin melalui ikatan perkawinan. Tercatat dalam Sadjarah Banten bahwa putri penguasa Inderapura pernah dinikahkan dengan Sultan Hasanuddin (1552-70 M) dari Banten dengan mahar berupa lahan di sebelah selatan Air Urei, Ketahun, Bengkulu saat ini (Katharithamby, 1976: 67).

Hubungan dengan Aceh terjalin pada pertengahan abad ke-16 M, saat Aceh di bawah pemerintahan Sultan Ala'uddin (Ri'ayat Syah) Al-Kahar, memulai untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya ke Selatan hingga ke Pantai Barat Sumatra dan berhasil menguasai wilayah Tiku-Pariaman. Namun Inderapura berhasil mencegah ekspansi itu sampai ke wilayahnya secara politis dengan cara menikahkan Raja Dewi, anak perempuan dari Sultan Inderapura yang bernama Sultan Munawarsyah atau Raja Mamulia, dengan Sri Alam Firmansyah saudara Sultan Aceh Ali Ri'ayatsyah (1568-75 M) (Katharithamby-Wells, 1976:67).

Pengaruh politik Inderapura atas Aceh semakin menguat ketika suami Raja Dewi menduduki tahta Aceh pada tahun 1576 M dengan gelar Sultan Sri Alam. Sayangnya, kekuasaan Sultan Sri Alam tidak bertahan lama, akibat ia tidak didukung oleh para elit Aceh terutama kalangan ulama. Ketidaksukaan para Ulama kepada Sultan Sri Alam terjadi ketika ia menyetujui pengangkatan seorang pejabat yang dilaporkan suka menyabung ayam. Hal ini diperparah dengan rumor konspirasi politik yaitu pembunuhan bayi laki-laki Sultan Riayat Syah yang kemudian memuluskan jalan Sultan Sri Alam menduduki tahta. Pembunuhan itupun diduga dilakukan oleh seorang hulubalang yang berasal dari Inderapura, kerabat dekat dari sang I\istri, Raja Dewi.

---

6 *Lihat pula http://kerajaanairpura.blogspot.com/2014/01/sejarah-pertalian-alam-kerinci-dengan.html (diakses 16 Maret 2019)*

7 *Sumber ini menyebutkan bahwa Sultan Firmansyah adalah Raja Airpura setelah kakaknya Sultan Muhammadsyah. Mereka berdua ini merupakan putra dari Raja sebelumnya yang bergelar Zaatullah dengan seorang Putri bernama Gondo Layu. Muhammadsyah menikahi Putri Bunga Setangkai, putri Raja Pagaruyung sedangkan Firmansyah menikahi putri bangsawan Bugis (lihat. http://kerajaanairpura.blogspot.com/2014/01/kissah-dan-sejarah-kerajaan-air-pura.html, diakses 16 Maret 2019) .*

Hubungan harmonis Aceh dan Inderapura kembali terjalin beberapa dasawarsa setelahnya yakni ketika Sultan Iskandar Muda (1607-36 M) bertahta di Aceh dan Sultan Muzaffar Syah bertahta di Indrapura. Menurut Kathirithamby-Wells, pada tahun 1615 Iskandar Muda berhasil memperkuat pengaruhnya di Tiku-Pariaman hal ini menjadi kendala bagi Raja Itam penguasa Inderapura saat itu menguasai perdagangan lada dan beras di pelabuhan-pelabuhan sebelah utara. Oleh karenanya, Raja Itam memperkuat aktivitas perdagangan di pelabuhan Selatan yakni di wilayah Silebar yang terhubung dengan Banten dan saat itu dipenuhi oleh pedagang-pedagang Inggris dan Belanda. Hubungan dengan pihak asing berlanjut semasa pemerintahan Raja Besar bersama mangkubuminya Muzaffar Syah di Inderapura sekitar tahun 1624 M. Pada masa ini, perjanjian perdagangan dibuat dengan pihak Belanda untuk mencegah resiko kerugian akibat perdagangan itu. Raja Putih sebagai saudara sekaligus sebagai suksesor Raja Besar melanjutkan hubungan dagang bebas cukai dengan pihak Belanda serta menentang perdagangan dengan pihak Aceh. Sikap Inderapura yang terus menerus seperti ini membuat Iskandar Muda murka. Dan pada tahun 1633 Iskandar Muda mengirim pasukan ke Inderapura, Raja Putih dihukum mati dan pejabat-pejabatnya disandera dan semua muatan lada dibawa ke Aceh.

Gambar. 7. Kompleks pemakamann Tuanku Berdarah Putih atau Sultan Gegar Muhammadsyah di Pelokan Hilir, Inderapura. Nisan-nisan dalam kompleks pemakaman ini menggunakan batu aceh menunjukkan eratnya hubungan Aceh dan Inderapura di masa lalu. Dok. Youdhi Prayogo

Peristiwa ini ternyata menguntungkan bagi Muzaffar Syah, walaupun ia terlibat dalam mendorong perdagangan dengan Belanda, ia dibebaskan dari sanksi dan bahkan pihak Aceh mendukungnya sebagai penerus tahta Inderapura. Raja Muzzaffar Syah yang merupakan cucu Raja Dewi diharapkan mampu mengatur administrasi kerajaan yang telah kacau serta memulihkan kembali hubungan Inderapura dan Aceh (Kathirithamby-Wells, 1976: 69-70).

Hubungan Aceh dan Inderapura kembali merosot setelah berkurangnya dominasi Aceh di Pantai Barat pada masa Sultan Iskandar Tsani (1636-41) dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-75). Hilangnya pengaruh Aceh pada masa itu, kembali menguatkan pengaruh Belanda di Pantai Barat yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran perekonomian Inderapura. Hal ini diperparah pula dengan pertentangan elit Inderapura mengenai suksesi kerajaan.

Sekitar tahun 1660 M, Raja Muzzaffar Syah ingin mengangkat putranya Muhammad Syah sebagai suksesornya mengikuti tradisi patrilineal. Akan tetapi, usaha ini ditentang oleh para *mentri* terutama di wilayah Negeri XV Koto (Menjuto) dan dari Negeri V Koto (Muko-muko) yang menginginkan Raja Adil (atau Raja Itam?) yakni keponakan Muzzafaar Syah sebagai suksesornya mengikuti tradisi Matrilineal. Pertentangan Muzzafar Syah dengan para mentri berakibat konflik antara anaknya yang disokong oleh VOC dengan keponakannya Raja Adil. Namun pada tahun 1663, konflik ini berakhir dengan diakuinya kekuasaan Raja Adil di wilayah Menjuto sebagai bagian dari wilayah Inderapura.

Konflik ini kembali menguat ketika anak Raja Adil, Sultan Gelumat bertahta pada tahun 1691. Sultan Gelumat dengan ambisi kuatnya berhasil melepaskan wilayah Anak Sungai dari Inderapura yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Sultan Mansursyah, keponakan Muhammadsyah raja sebelumnya. Kemerosotan Inderapura dan Anak Sungei secara politik dan ekonomi terus berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Hingga pada akhir abad ke-18 M dan awal abad ke-19 M, Belanda berhasil kekuasaan politik yang sangat kuat di wilayah tersebut dan berhasil mengontrol urusan kerajaan termasuk masalah suksesi (Kathirithaby-Wells, 1976: 80).

Bab III
Naskah-Naskah Pusaka Orang Kerinci

Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai naskah kuno yang ada di Kerinci. Naskah-naskah tersebut akan diklasifikasi berdasarkan jenis huruf yang digunakan, media tulis, dan asalnya. Penjelasan tentang naskah akan difokuskan pada naskah-naskah yang digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian ini terutama naskah-naskah dari Kesultanan Jambi dan Inderapura yang ditemukan di Kerinci serta naskah *tembo* yang isinya berkaitan dengan naskah-naskah dari dua kesultanan tersebut

A. Jenis-Jenis Naskah Kerinci

Sebagaimana yang telah dipaparkan sedikit di bagian pendahuluan, penelitian terhadap naskah-naskah pusaka orang Kerinci dilakukan secara komprehensif oleh Petrus Voorhoeve pada tahun 1941-1942. Dalam penelitiannya itu, ia dibantu oleh dua orang pengalihaksara yakni Abdul Hamid untuk naskah-naskah Jawi dan Dr. Poerbatjaraka di Batavia untuk naskah-naskah beraksara Kawi dan Jawa (Voerhoeve, 1970). Hasil alihaksara tersebut disusun menjadi sebuah katalog yang ia namakan sebagai Tambo Kerintji (TK).

Voorhoeve berhasil mengumpulkan 261 naskah dari 10 mendapo yang ada di Kerinci ditambah dengan naskah-naskah yang kini menjadi koleksi Perpustakaan Nasional[8] (Kozok, 2006: 45). Menurut Kozok, dari 261 naskah itu, hanya 240 naskah yang layak untuk dianalisis sementara selebihnya dikaegorikan tidak layak dengan alasan hanya memuat bubuhan cap, naskah yang tidak diperlihatkan kepada Voorhoeve, dan naskah yang tidak dapat dibaca lagi (Kozok, 2006: 45). Berdasarkan jenis aksaranya, diketahui bahwa dari 240 naskah tersebut sebanyak 134 ditulis menggunakan Surat Incung, 92 naskah ditulis menggunakan aksara Jawi, dan 10 naskah menggunakan aksara Jawa. Berdasarkan media tulisnya, diketahui bahwa 34 naskah ditulis pada bambu (buluh), 82 ditulis pada media tanduk, 97 naskah ditulis pada media kertas, 11 naskah pada kulit kayu, 13 naskah ditulis pada media lontar, satu naskah pada tulang dan dua naskah ditulis pada media lainnya seperti pada daun tapakgajah (lihat tabel I).

Selain dari 261 naskah di atas, terdapat empat naskah baru yang ternyata belum didokumentasikan dan ditransliterasi oleh Voorhoeve. Dua naskah tersebut kini menjadi koleksi Museum Siginjei Jambi dengan nomor inventaris 07.05 dan 07.07, keduanya ditulis pada media bambu (Sunliensyar 2018a: 34). Satu naskah Jawi dari Hiang didokumentasikan pada tahun 2006 oleh Tim EAP dari British Library dengan nomor EAP117/51/1/10 serta satu naskah lontar dari Mendapo Penawar yang belum sempat disalin oleh Voorhoeve[9].

8 *Pada tahun 1904, H.K Manupassa controuller Belanda yang bertugas di Kerinci pernah mengirimkan beberapa naskah Kerinci ke Batavia (Voorhoeve, 1970: 369)*

9 *Agaknya naskah lontar tersebut adalah TK 253 yang tidak disalin oleh Vooerhoeve. Saya mendapat dokumentasi naskah tersebut dari Bapak Indra Gunawan dan Bapak Hendi Wisnu Pamungkas namun*

Tabel I. Media dan aksara tulis naskah-naskah Kerinci yang telah ditransliterasi oleh Voorhoeve.

	Surat Incung	Jawi	Jawa	Jumlah
Buluh	34	0	0	34
Tanduk	81	1	0	82
Kertas	10	89	0	97
Kulit Kayu	3	8	0	11
Lontar	3	0	10	13
Tulang	1	0	0	1
Lain-lain	1	1	0	2
Jumlah	134	92	10	240

Sumber: Kozok, 2006:48

Berdasarkan kandungan teksnya, naskah-naskah Kerinci juga sangat bervariasi. Naskah-naskah beraksara Incung yang ditulis pada bambu dan kertas dengan Incung umumnya berisi prosa ratapan dan mantra (Voorhoeve,1970; Kozok, 2006; Alimin dkk., 2003; Sunliensyar, 2018a). Naskah-naskah Incung yang ditulis pada tanduk umumnya berupa naskah *tembo* atau *tambo* (Voorhoeve, 1970; Kozok, 2006: 51). Sementara itu, naskah-naskah Jawi umumnya adalah naskah yang berasal dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di sekitar Kerinci, terutama dari Jambi dan Inderapura (Voorhoeve, 1970: 387; Kozok, 2006: 52). Selain itu, terdapat pula naskah Jawi yang ditulis secara lokal yang berisi tentang tambo. Terdapat pula naskah yang isinya berupa undang-undang dan kitab keagamaan yakni Kitab Nitisarasamuscaya atau Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah (TK 241), kitab Undang-Undang dari Jambi (TK 215), kitab keagamaan yang ditulis pada lontar dari Dusun Balai Semurup (TK 146), dan satu kitab mantra yang ditulis pada daun lontar dari Hiang (TK 188) (Kozok, 2006; Voorhoeve, 1970: 389).

Jika melihat dari beragam kandungan teksnya, maka sesungguhnya tidaklah tepat Voorhoeve memberi judul Tambo Kerintji atas kumpulan transliterasi naskah-naskah Kerinci. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tambo diartikan sebagai: (1) sejarah; babad; hikayat; riwayat kuno; (2) uraian sejarah suatu daerah yang sering kali bercampur dengan dongeng (Diakses, 18 Maret 2019). Padahal, kandungan teks naskah-naskah Kerinci tidak hanya berisi tambo semata. Agaknya kekeliruan Voorhoeve pada penamaan judul katalognya pada tahun 1941-1942 itu telah disadarinya di kemudian hari. Hal ini terlihat dengan pemberian judul “Kerinci Documents” (Naskah-naskah Kerinci) pada jurnalnya yang terbit pada tahun 1970.

belum sempat dilakukan transliterasi dan transkipsi.

Untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang naskah-naskah Kerinci terutama yang menjadi sumber utama dalam tulisan ini maka pembahasan selanjutnya difokuskan kepada dua jenis naskah yakni naskah-naskah beraksara Incung yang isinya berupa tambo dan naskah-naskah Jawi baik berupa surat-surat kerajaan maupun tambo.

B. Naskah-Naskah Surat Incung

Keberadaan *surat incung* yang digunakan oleh orang Kerinci pertama kali dilaporkan oleh William Marsden pada tahun 1834 M (Voorhoeve, 1970). Disebut pula dalam laporan Hoogkamer pada tahun 1876 yang menyatakan bahwa orang Kerinci menggunakan aksara yang disebut sebagai *Intjong* (Veth, 1881: 65). Ketertarikan terhadap naskah Surat Incung di mulai pada tahun 1904, saat Kerinci menjadi wilayah jajahan Hindia Belanda. Saat itu, Controuller Kerinci H.K. Manupassa mengirim beberapa naskah kuno *surat incung* ke Lembaga Seni dan Sastra di Batavia. Perhatian terhadap naskah *surat incung* berlanjut pada tahun 1916 yakni oleh Edward Jacobson yang menyalin dua naskah *surat incung* tanduk kerbau pusaka Datuk Singarapi Putih dari Dusun Sungai Penuh. Karena ketidakmampuan membacanya, Jacobson mengirim hasil salinannya kepada L.C. Westenenk pejabat Belanda di Bengkulu (Voorhoeve, 1970; 369-371). Pada tahun 1922, hasil transliterasi dan terjemahan terhadap salinan *surat incung* tersebut kemudian dimuat dalam sebuah makalah yang berjudul '*Rentjong Schrift'* oleh L. C. Westenenk (Westenenk, 1922).

Westenenk menggunakan istilah *rentjong/rencong* untuk menyebut aksara Kerinci yang digunakan untuk menulis naskah tersebut. Padahal penggunaan istilah *rentjong* perlu dikoreksi. Teks-teks naskah Kerinci sama sekali tidak memuat istilah *rencong* melainkan menggunakan istilah incung. Seperti dalam naskah surat Incung pusaka Rajo Sulah di Siulak Mukai yang menyebut *"hih basumilah aku mangarang surat incung……"* (Bismillah/dengan nama Allah aku menulis surat Incung) (Alimin dkk, 2003; Andhifani, 2012). Oleh sebab itu, istilah yang lebih tepat digunakan untuk menyebut aksara Kerinci adalah *surat incung* bukan aksara rencong sebagaimana yang dikemukakan oleh Westenenk.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa naskah surat Incung yang ditulis pada bambu dan kertas umumnya berisi prosa ratapan dan mantra. Hasil transliterasi Voorhoeve menunjukkan setidaknya sebanyak 22 naskah incung isinya berupa prosa ratapan. Sementara itu, naskah-naskah yang ditulis pada media tanduk umumnya berupa naskah tambo dengan jumlah sekitar 78 naskah. Selebihnya adalah naskah-naskah yang berisi surat-surat keterangan hutang serta kisah-kisah asal mula penciptaan bumi dan Adam. Sayangnya, teks naskah-naskah surat Incung tak satupun yang memuat pertanggalan sehingga tidak dapat diketahui waktu pembuatan atau penulisannya secara pasti.

Salah satu naskah yang isinya berupa prosa ratapan adalah naskah Incung pusaka Rajo Sulah dari Dusun Siulak Mukai. Naskah ini termasuk naskah yang tidak ditransliterasi oleh Voorhoeve. Pengalihaksaaran dan penerjemahan naskah ini dilakukan oleh Alimin dkk. (2003) dan oleh Andhifani (2012). Naskah ini disimpan oleh Bakhtiar Anip dan didokumentasi ulang oleh Tim EAP pada tahun 2006. Naskah ini dapat diakses secara daring melalui laman British Library dengan nomor dokumentasi EAP117/63/1/15. Teks naskah incung Rajo Sulah terdiri dari dua bagian, bagian pertama terdiri dari 11 baris dan bagian kedua terdiri dari 9 baris. Berikut hasil transliterasi yang dibuat oleh Alimin dkk (2003: 31-32) dengan beberapa perubahan penerjemahan:

(bagian pertama) Aih basumilah mujur akung mangarang parapatah surat incung Jawa Palimbang/dalam ari sa ari ini karana aku anak mamilang runtung idak bahawak aih/sahih sarandir ka'u iya tubuh piya alah aku malang sabagay ini bagay buwah/maralang jadi bagay bunga maralang kambang iya tubuh barang dirujut larat/sampay barang dicakap idak tiba kapada itu ba'ik tabuwang/ka'u tubuh ba'ik manumpang angin lalu iya badan ba'i/k manumpang jung ka tangah la'ut tipak kapada badan aku ka/sih burung bahang tarabang duduk di sini idak bakawan awak/dibuang kurung kampung sarata dingan ipar bisan surang ka'u lagi la/ku arap iya adik salayang burung tipak kapada badan ka'u dalam sikarung bantar/kini lagi kacik batali rantay alah gadang baraban basi sabap itu muka aku malu (bagian kedua) aih ini surat satangan urang bagalar Kasumba Muda urang Kuta Baru/ Maligay Angin karana aku disaya Madara Muda urang Kuta Panjang dalam/ ari sa ari ini mangaday di muka tangga ari katika ampar/ jama angin sabunyi riyang tali bungi samang talu manalu tasadar di/untung idak ba'ik bungi sagih timpa manimpa bungi siyun anay di/anay bungi kacap parucang mamah asa ayun darah gamuncing tulang litak kapa/luk panin aih sahih ka'u iya adik sini kita baragih kasih sayang ini pantu/n aku sapatah dari banta apuk madaray dari padi madaray jangan dari mata/ kita bacaray dari ati bacaray jangan iya adik Dara Capik.

Terjemahannya:

Aeh! (semacam ungkapan tradisional orang Kerinci yang sama maknanya dengan wahai) Bismillah mujur aku menulis pepatah surat Incung Jawa Palembang seharian ini, sebab aku hendak berbilang untung yang tiada berpunya. Aeh saeh sarandir (semacam ungkapan) engkau wahai tubuh, mengapalah aku malang seperti ini, seperti buah yang tak kunjung matang, seperti bunga yang tak kunjung mekar, wahai tubuh. Sesuatu yang dikehendaki tidak terjadi, sesuatu yang dikatakan tidak

datang. Oleh karenanya, lebih baik terbuang engkau tubuh, menumpang angin yang berlalu, menumpang *jung* (kapal) ke tengah laut. Sedang diriku sendiri, mencintai burung yang mengudara terbang, duduk di sini tiada yang menemani, aku dibuang oleh orang sekampung dan keluarga, hanya engkau seorang yang kuharap wahai adinda Selayang Burung. Sedangkan engkau sekarang ini, selagi kecil bertali rantai setelah besar bertutup besi (perumpaaan bahwa sigadis susah didapatkan) itulah makanya aku merasa malu. Aeh! Inilah surat yang ditulis oleh Kesumba Muda orang Kota Baru Mahligai Angin atas suruhan Madara Muda orang Kota Panjang. Seharian ini, termangu di depan tangga saat menjelang sore, angin berbunyi seperti getaran tali, bunyi siamang talu-menalu, tersadar akan nasib yang tidak baik, bunyi ranting timpa-menimpa, bunyi siulan alun-mengalun, bunyi kecap peruncang *mamah,* berasa sayung darah bergemuruh, tulang letih kepala pening. Aeh sahih engkau wahai adinda, di sinilah kita berbagi kasih sayang. Inilah pantunku sepatah, dari bantal kapuk berderai, dari padi berderai jangan, dari mata kita bercerai dari hati bercerai jangan.

Teks naskah ini berisi prosa kesedihan yang dibuat oleh seseorang pria bernama Kesumba Muda atas suruhan Madara Muda yang ditujukan kepada seorang gadis bernama Dara Capik, kadang gadis ini diumpamakan seperti seekor burung yang diberi julukan Selayang Burung. Madara Muda tampaknya meluahkan kegundahannya karena cintanya yang tidak berbalas kepada Dara Capik melalui sebuah karangan prosa. Menariknya, prosa tersebut ditulis oleh orang lain atas permintaannya. Jikalau informasi dalam teks ini benar, maka profesi sebagai tukang tulis telah wujud dalam kehidupan sosial orang Kerinci di masa lalu. Hal ini dikarenakan tidak semua orang memiliki kemampuan membaca dan menulis aksara Incung.

Gambar 8. Naskah Surat Incung pusaka Rajo Sulah dari Dusun Siulak Mukai, Koleksi Bakhtiar Anip. Sumber: British Library, EAP117/63/1/15 (diakses 18 Maret 2019)

Naskah-naskah Incung yang teksnya berupa mantra, salah satunya terdapat dalam naskah Incung pusaka Rio Sukadano Itam dari Dusun Koto Dua, Sungai Liuk (TK 79) (Sunliensyar, 2018a: 41). Teks naskah ini terdiri dari 14 baris yang

ditulis pada tabung bambu. Menurut Voorhoeve di dalam tabung tersebut terdapat kertas yang isinya berupa rajah. Naskah ini telah dialihaksarakan oleh Voorhoeve pada tahun 1941, kemudian dialihaksarakan dan diterjemahkan oleh Alimin dkk (2003: 41) dan diteliti kembali oleh Sunliensyar untuk menelaah kandungan teksnya. Berikut hasil alihaksara dan terjemahan naskah tersebut:

> Gar sagar saratu maya baraja/ kepada bumi bumi sagampa raja taguh saga/mpa raja suwara sabus sapatar/ dani sapatir ta'u ku saparati ha/ ngin panas saparati kilat / haku mamakay gantung tikan sangkabunung/ gantung baraya saratu lawanku/gar sagar satu maya baraja haku /pada bumi bumi sagampa raja sura/ku sabus sapatar gan patir/sajataku saparati kilat ta'u sapa/rati hangin haku mamakay ga/ntung takan sangkabunuh gantung bara/ ya saratu lawanku.

> Terjemahannya:

> Gar gegar! Serta maya beraja kepada bumi, bumi segempa raja, teguh segempa raja suara *sabus sepetar dani* sepetir, pengetahuanku seperti angin, panas seperti kilat, aku menggunakan gantung tikam sanggabunuh, gantung beraya serta lawanku. Gar segar! Satu maya beraja aku kepada bumi, bumi segempa raja, suaraku *sabus sepetar dani* sepetir, senjataku seperti kilat pengetahuanku seperti angin, aku menggunakan gantung tikam sanggabunuh, gantung beraya serta lawanku.

Mantra yang termaktub dalam teks naskah ini disebut sebagai mantra sanggabunuh. Mantra ini digunakan sebagai penangkal, pelindung dan pakaian diri bagi seseorang agar tidak terbunuh oleh musuhnya di dalam medan peperangan (Sunliensyar, 2018a: 47).

Gambar 9. Naskah Incung Rio Sukadano Itam, Dusun Koto Dua Sungai Liuk.
Sumber: Alimin dkk. 2003: 34

Berdasarkan kandungan teksnya, naskah *tembo* surat Incung dibedakan lagi menjadi dua yaitu *tembo ninek* dan *tembo hutan-tembo tanah. Tembo ninek* mengandung informasi silsilah, sejarah dan asal-usul nenek moyang atau leluhur suatu *kalbu* dari masyarakat pemilik naskah. Sedangkan *tembo hutan-tembo* tanah berisi sejarah mengenai asal-usul *tanah ajun arah* milik suatu *kalbu* atau batas-batas wilayah adat antar*kalbu.* Meskipun demikian, satu naskah bisa saja mengandung dua informasi tersebut.

Contoh naskah *tembo ninek* yang sangat lengkap adalah naskah Incung pada empat buah tanduk kerbau pusaka Depati Sungai Lago atau Depati Singalago di Dusun Koto Beringin, Mendapo Rawang. Oleh Voorhoeve naskah ini diberi nomor TK 37, TK 38, TK 39 dan TK 40. Naskah ini juga telah didokumentasikan oleh British Library dengan penomoran masing-masing TK 37 (EAP117/2/1/1), TK 38 (EAP117/2/1/3), TK 39 (EAP117/2/1/4) dan TK 40 (EAP117/2/1/2). Secara keseluruhan empat naskah ini terdiri dari 121 baris. Berikut hasil alihaksara keempat naskah itu oleh Voorhoeve[10]:

> (*TK 37) hini tutur hurang datang bukit pariyang padang panjang puti hundut pinang masak/ baduwa pabisan puti dayang baranay barajalan hurang baduwa pabisan hitu ka kuta/ lima manis kapada dana(u) banta kadiyan puti hunduk pinang masak/ baduwa dingan puti dayang baranay maka datang bujang nampuh surang hindah sahurang bihi/mba singgah ka rumah lalu pajaka ka rumah hitu barakata halah haku jantan hika batina ma/nyimbat puti hunduk pinang masak muka jadi kawin muka lama/hitu dingan jantan mintak didalak kutu hitu baratamu parut kapala ka/ mu hini mukas manyimbat hanya ditajang dingan/ turak luka haku muka manyimbat dingan batina/ h(i)ya halah haku manajang dingan turak/muka tahu dingan sanak/ lapas jari di kapala hitu muka malu halah kapada dingan sanak hitu/muka diranggut hambut balik ka rumah hitu dikirat rata ba/tunda ... muka ba/ jajalan puti hunduk pinang masak baduwa dingan puti dayang/ baranay lalu ka kuta ranah muka na'ik pula kuta bari/ngin barakukuh di kuta baringin muka baraja/lalan lalu ka kota kunyit bakukuh dari situ muka datang tuwan/ sa'ih samiluhalah baratamu halah di kuta kunyit kawin tuwan sa/ 'ih samiluhalah dingan puti dayang baranay muka barajalan puti hunduk lalu ka gunung hintan tangah la'ut muka hada hanak puti dayang/ baranay dingan tuwan sa'ih samilu halah ngada hanak huran sa/ bilan baduwa jantan batujuh batina hini galar dingan jantan/bagalar hajang ri hajang hangsi hini galar/hiyang batina hurang tujuh hitu surang bagalar handir bingin surang bagalar handir/caya surang bagalar handir hukir surang bagalar/handir macit surang bagalar handir campa surang bagalar handir/ kuning batujuh handir handuh baduwa balik ka kuta baringin/ tumbuh kuta baringin papun kawin handir/bingin ngambik dipati riya dagu/handir caya*

10 *Lihat: http://ipll.manoa.hawaii.edu/tambo/b.html*

*kawin dingan dagang/ dapati harik dipadang hurang bana (*tulisan bagian ujung tanduk: *suruh surat kata janang tutur ninik hurang kuta baringin) (TK 38) hurang banang kabaw hurang baduwa hitu banang kabaw barapa hanak handir bingin baduwa jantan surang batina surang bagalar dipati hular laga dingan itu batina hitu baranak jantan surang pula batina hangan jantan hitu bagalar/ patih madiri hanak dingan batina bagalar handir/landun tiba kapada handir caya baranak baduwa surang jantan surang batina hah hitu hitu/batina hu…tu baranak jantan banak batina/ ……tu bagalar handir…… mulam dingan jantan bagalar bujang pani/paniyan hitu hiyang baranama manti gara baduwa hitu……/muka hada malim suka muka hada pamangku bulih hada pula mangku garang muka turun dipa/ti sunga laga tiba kapada padun sari mananti hitu barama hanak/handir handun muka turun patih madiri turun di hatih kuta hari/baringin lalu pada pamantang galanggang lalu ka kuta ba/ dang lalu kasawah riya gamalar lalu ka tangga riyang/ … gamalah itu pantak patih madiri dingan manti barapat muka bara/ jalan lalu kajambu sakampun/ batamu dingan raja namangsa taba'a halah raja namangsa lalu ka lubuk/tjambun balarik lalu kamara sakukun mati lalu ka padin/ samari nanti muka turun bujang paniyan lalu ka kuta/ranah barajalan lalu kapada padun sari mananti lapas lalu/ baracaray lalu ka kuta ha'uw pati sungay laga dingan patih madiri barajalam lalu ku/ta tapurun hanak handir malam manjadi di(pa)ti muda malim suka jadi/ mangku muda cucung hajang hangsi hitung jadi datuk caya dipati mamarit mamanggan/ dipati sungay laga dingan patih madiri salukur sabuah dipati/muda dingan dipati sunga(y) laga mangku muda sama halah mamalir/mangku bugulir bahutan tanah patih madiri bujang/ payah mangarah mangajun (TK 39) muka sudah manibalung manibaju maka talar ha…….ki dipati cucung dipati hanak/pamangku cucung pamangku hanak dipatih sungay laga hanak panakan dipati muda hanak/panak mangku muda sada hitu hurang talaras tanjur muka na'ik janan muka halar dipati sungay………./laga dingan dipati muda lalu ka tanah sagara hagung manapat lagi di tanjung karaba jatuh maka…………./baratanya pangiran kapada dipati muka babita dipati muda mangata datuk caya dipati panday ma…………../rang mati di dalan kubur jangan kata dipati sungai laga muka babita juga dipati muda muka barakata pangi(ran)………./ mbang mana dantak caya dipati maka hilar dantak caya dipati/baparahu bakajang canday maka tiba di tapiyan ma/(ngga) mana datuk caya dipati panday nanya hurang mati kabaranya pangiran kapada datuk/dalan kubur maka kata datuk caya dipati mana bulih/mananya hurang mati dalam kubur mabalik lalu ka rumah maka batanya/pangiran kapada datuk caya dipati panday mananya hurang mati di dalam kubur mana bulih/ saguling batang bakas dipati manangis hanak panakan dipati hidak tuwu hayir mata/nya surang hitu hanak panakan galak hilay jadi tapuk tari jadi surak saray/ muka hilir pula dantuk caya (da) dipati malapas hutang taba/ 'a karaba jatang badur hayan kurak panjang hikur puyuh panjang dangung*

lapas/ halah hutang sagulan batang dingan/ hitu jadi dipati satuwur dingan galak/ hitu jadi dipati suka baraja muka pati satuwur tinggan/ di panawar dipati suka baraja balik ka tanah rawan muka lama malun patih madi/ ri bujang padiyan kapada dipati sungay laga/ dingan dipati muda dipamangku mada majawat pulan patih/ madiri bujang paniyan muka kapada mangku muda muka kir dipati sungay/laga dingan dipati muda muka himba ninik hambuk/ninik hambukpun tiba…….luku pa? dipati da………ni jadi riya dibalan tanah rawang/ muka kata dipati jangan kata dipati sungay laga ha………ni galar bagalar hiya digala/ mati gara maka kata mangku muda jangan ba/muka digalar riya diba/lan kuta baringin (TK 40) maka balik ka kuta baru riya di balan maka pula da……./riya dibalan dingan patih madiri dingan ri……………/masak pamintak dipatih madiri cucu huyar di riya dibalan………../baru maka lama mati dipati sungay laga sangak jadi dipati sa………kacik surang jadi dipati/ punjung janak maka barabuk dipati sungay laga dingan dipati muda/ dipati punjung balawan dipati muda barabuk sarah jajah na'ik hidak sudah kapada manti/ muka barajalan ka tanah hiyan muka tapak hamih sahamih hiyan hidak/ sudah lalu ka sagara hagung rapat pula di situ hidak juga sudah maka sampay halah/ ka pengiran muka batutur dipati punjung maka kata/mana dipati sungay laga ka gati bali/ya haku bajalan baliya tinggan maka baratutur dipati/ muda ja mati sama ditanan dingan dipati sungay laga hidak disayan maka tala/buh hukun pangiran kapada dipati punjung/ hatat balung handak barahumah pula/ muka kata pangiran kapada depati muda bita pagala muda saka tua hidak babunyi dipati/muda muka digala dipati muda/ da magala muka dipati punjung mawa hamit balik na'ik karici nampuh jala/ n taba pandak tiba situ dipati punjung sakit maka barapangsan maka barapa………/n……..r maguni sampay/kapada dipati sungay laga sarata hanak jantang hanak batina hatat balung dipati/ muda kata pangiran kapa(da) dipati punjung dipati sungay laga tiba kapada maguni hidak dila/ tas pangsan kapada dipati sungay laga sarata hanak jantan……..hanak batina/maka badiri maguni barimba hidak dihusir dipati…….(riya)tijaput/maguni hitu takut kalah dipati muda mangusir karay (atau karaja?)………/hitu duwa kali tujuh hari lama barimbi hidak kampung 'a………………/ maka pik(i)r magumi maka dijaput dipati sungay laga kac………../ mbung muka mudik sarata hanak batina/ bagalar saka galar hanak batina itu galar hanak………../ balik hilir jadi karaja hatat balun muka masuk / kapada kuwak bagih Riya dibalan mangku mamangku masuk ma/ngku hagung sakuwak sabagih dingan mangku gular/ maka jadi karan satiya dingan dulu/dulu jaga dihanjak dimakan satiya.

Terjemahannya:

(TK 37) Inilah kisah tuturnya orang (leluhur) yang datang dari Bukit Periang Padang Panjang, Puti Unduk Pinang Masak berdua dengan sepupunya Puti Dayang Beranai. Berjalanlah berdua orang itu ke Koto Limau Manis di

dekat Danau Bento, tempat tinggal mereka berdua. Maka datanglah dua orang laki-laki ke tempat itu, seorang namanya Indah seorang lagi namanya Baimba, mereka singgah dan masuk ke rumah itu (rumah Puti Unduk Pinang Masak). Berkatalah (seorang laki-laki), aku laki-laki kamu perempuan, menjawablah Puti Unduk Pinang Masak sehingga menikahlah mereka. Setelah lama kemudian, yang laki-laki minta dicarikan kutu, Puti Unduk Pinang Masak menemukan parut di kepalanya. Si laki-laki berkata bahwa parut itu luka akibat dipukul *turak* (perkakas tenun). Maka menjawab Puti Unduk Pinang Masak adalah aku yang memukulmu dengan *turak.* Maka tahulah Puti Unduk Pinang Masak si laki-laki itu adalah saudaranya. Karena merasa malu, pergilah Puti Unduk Pinang Masak dari rumahnya ditemani sepupunya Puti Dayang Beranai, menuju ke Koto Renah setelah itu naik pula ke Koto Beringin, berhenti di Koto Beringin, lalu pergi pula ke Koto Kunyit, berhenti di situ. Maka datanglah Tuan Syaikh Samilullah bertemu di Koto Kunyit. Maka menikahlah Tuan Syaikh Samilullah dengan Puti Dayang Beranai, sedangkan Puti Unduk Pinang Masak pergi ke Gunung Intan di tengah laut. Maka adalah anak Puti Dayang Beranai dengan Tuan Syaikh Samilullah sembilan orang, dua laki-laki tujuh perempuan. Ini nama yang laki-laki Ajang Ri, Ajang Angsi. Ini nama yang perempuan orang bertujuh itu. Seorang bernama Andir Bingin, seorang bernama Andir Caya, seorang bernama Andir Ukir, seorang bernama Andir Mecit, seorang bernama Andir Campa, seorang bernama Andir Kuning, yang ketujuh bernama Andir Anduh. Dua orang pulang ke Koto Beringin, menetap dan menikah di sana. Andir Bingin menikah dengan Depati Rio Dagu, Andir Caya menikah dengan pendatang Depati Rik di Padang orang Minangkabau (tulisan bagian ujung tanduk: Disuruh menulis oleh *jenang*, tutur leluhur orang Koto Beringin) (TK 38) Berapa anak Andir Bingin? Dua orang, laki-laki seorang perempuan seorang, yang laki-laki bernama Depati Ular Laga. Kemudian yang perempuan itu beranak pula seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki bernama Patih Madiri yang perempuan bernama Andir Landun. Tibalah kepada Andir Caya, memiliki anak dua orang, seorang laki-laki seorang perempuan. Yang perempuan memiliki anak pula laki-laki dan seorang perempuan. Yang perempuan bernama Andir Malam yang laki-laki bernama Bujang Peniyam, Manti Gara, Malin Suka, Pemangku Bulih, dan Mangku Garang. Kemudian turunlah Depati Sungai Laga tiba di Peradun Seri Menanti bertemu anak Andir Landun. Maka turun Patih Madiri di atas Koto Beringin ke Pematang Gelanggang kemudian ke Koto Padang lalu ke persawahan Rio Gemalar lalu ke tangga (rumah) Rio Gemalar itulah pantak (tanda batas tanah) Patih Madiri dengan Manti berempat. Maka berjalan terus ke Jambu Sekampung bertemu dengan Raja Namangsa, maka dibawalah Raja Namangsa pergi ke Lubuk Cembung Belarik lalu ke Muara Sekungkung Mati lalu ke Peradun Seri Menanti. Kemudian turunlah Bujang Peniyam pergi ke Koto Renah, kemudian

berpisah lalu ke Koto Au Depati Sungai Laga dan Patih Madiri berjalan pergi ke Koto Tempurung. Anak Andir Malam diangkat menjadi Depati Muda, Malin Suka diangkat menjadi Mangku Muda, cucu Ajang Angsi itu diangkat menjadi Datuk Caya Dipati. Memarit memenggallah (membuka lahan permukiman) Depati Sungai Laga dan Patih Madiri selukur sebuah Dipati Muda dengan Depati Sungai Laga, Mangku Muda juga ikut memalir(?) mencangkul, menggulingkan, berhutan tanah, Patih Madiri dan Bujang Peniyam mengarah mengajun (TK 39) Setelah menembilang (*membalung?*) dan membajau (*membajo*?) maka teratur lah anak depati cucu depati, anak pemangku cucu pemangku, anak Depati Sungai Laga, anak kemenakan Depati Muda, anak kemenakan Mangku Muda sebanyak itulah mereka diatur. Kemudian datanglah utusan raja (*jenang),* maka Depati Sungai Laga dan Depati Muda pergi ke Tanah Sanggaran Agung menempat lagi ke Tanjung Kerbau Jatuh. Maka bertanyalah Pangeran (utusan raja Jambi), kemudian berberitalah Depati Muda mengatakan bahwa Datuk Caya Depati memiliki kemampuan menanyai orang mati di dalam kubur. Berkatalah pangeran, di mana Datuk Caya Depati itu? Maka Datuk Caya Depati ke hilirlah ia dengan berperahu beratap cindai (sejenis kain) dan tibalah ia di tepian. Benarkah Datuk Caya Depati yang bisa menanyai orang mati dalam kubur? kata Pangeran kepada Datuk. Maka berkata Datuk Caya Depati mana bisa menanyai orang mati di dalam kubur. Kemudian kembalilah Pangeran (kerumahnya), Pangeran bertanya lagi kepada Datuk (di hadapan Depati Muda dan Sungai Laga) tentang menanyai orang mati, "mana mungkin" kata datuk. Maka dua depati itu terdenda sebesar seguling batang. Ada dua orang keponakan (depati) di situ, seorang menangis kerjanya seorang lagi gila mengerjakan gelak, tepuk-tari, sorak sorai. Kemudian hilirlah lagi Datuk Caya Depati untuk menebus denda itu dengan membawa seekor kerbau jantan *badur(?),* ayam kurik panjang ekor, dan burung puyuh panjang dengungnya, maka lunaslah denda itu. Adapun kemenakannya yang menangis tadi diangkat menjadi Depati Situwu, yang mengerjakan gelak tepuk-tari diangkat menjadi Depati Suka Beraja. Depati Situwur tinggal di Penawar, Depati Suka Beraja kembali ke Tanah Rawang. Lama kelamaan, terasa malulah Patih Madiri dan Bujang Peniyam kepada Depati Sungai Laga, Depati Muda, dan Pemangku Muda. Oleh karenanya, Patih Madiri dan Bujang Peniyam kembali pulang (ke Koto Beringin?). Maka oleh Pemangku Muda, Depati Sungai Laga, dan Depati Muda dipanggillah Nenek Embut. Nenek Embutpun tiba ke Tanah Rawang, maka dijadikan ia sebagai Rio Dibalang. Para Depati berbantahan atas gelarnya, Depati Muda memberi gelar Rio Dibalang Tanah Rawang, "jangan" kata Depati Sungai Laga. Depati Sungai Laga memberi gelar Rio Dibalang Mentri Gara, "jangan" kata Mangku Muda. Maka kemudian diberilah gelar Rio Dibalang Koto Beringin (TK 40). Maka Rio Dibalang kembali ke Koto Baru, di sana ia merebut *cucung air* (mungkin istilah untuk pembayaran adat) dari Patih

Madiri dan Bujang Paniyam. Setelah lama kemudian meninggallah Depati Sungai Laga Sengak, kemudian wujudlah Depati Sungai Laga Kecik dan Depati Punjung Jenab. Setelah itu Depati Sungai Laga dan Depati Muda berseteru dengan Depati Punjung berebut *serah jajah naik* (hasil pembayaran pajak). (Perkara itu) tidak selesai di hadapan *mentri* mereka berjalan ke Tanah Hiang diletakkan *mas seemas* (uang persidangan) tidak selesai juga (perkaranya), maka (mereka) pergi ke Sanggaran Agung, bersidanglah di sana tetapi tidak juga terselesaikan. Maka (perkara itu) dihadapkan ke Pangeran. Depati Punjung Jenab mengadu (kepada) Pangeran. Maka kata Pangeran, di mana Depati Sungai Laga (dan) yang akan menjadi pengganti belia (pembantu?), aku berjalan belia tertinggal. Maka berkatalah (Depati Punjung), Depati Muda sama mati sama ditanam dengan Depati Sungai Laga, bukan pada saya. Maka keluarlah hukum Pangeran, *atap balung* hendak berumah (membangun rumah) pula. Kata Pangeran kepada Depati Muda, beta berikan gelar Muda Sko Tua, tidak menjawab Depati Muda, maka Depati Muda diberi gelar Depati Muda Uda Menggala. Setelah itu, Depati Punjung membawa *amit*(?) pulang ke Kerinci melalui jalan Tebo Pandak. Sesampai di situ Depati Punjung sakit, maka berpesanlah ia kepada Manggumi[11]. Sampaikan kepada Depati Sungai Laga dan kepada anggota sukunya (*anak jantan anak betinanya)* tentang *atap balung* Depati Muda, itulah kata Pangeran kepada Depati Punjung. Depati Sungai Laga datang kepada Manggumi tetapi tidak disampaikannya pesan itu kepada Depati Sungai Laga dan kepada anggota sukunya. Kemudian Manggumi berdiri memanggil tetapi tidak juga didatangi oleh Depati Muda. Manggumi itu hendak menjemput Depati Muda, tetapi ia takut menganggu sebuah kerja (pesta). Dua kali tujuh hari lamanya ia memanggil tidak ada yang berhimpun. Maka berpikirlah Manggumi, dijemputnya Depati Sungai Laga Kecik, maka mudiklah Depati Sungai Laga Kecik beserta anggota sukunya (menuju tempat Manggumi) maka gelar itu (Depati Muda Uda Menggala) diberikan kepada anggota suku Depati Sungai Laga Kecik. Kemudian mereka pulang ke hilir membuat pekerjaan *atap balung*. Setelah itu (mereka) masuk dalam pembagian (*kuak bagih*) Rio Dibalang, (dan) pemangkunya, Mangku Agung sepembagian dengan Mangku Gular. Maka itulah yang menjadi karang setia (persumpahan) yang terdahulu, jika diubah, dimakan (kutukan) persumpahan.

Teks naskah ini tampaknya menjelaskan urutan kronologis peristiwa penting para leluhur masyarakat di dalam Mendapo Rawang di masa lalu, meskipun pertanggalannya tidak dimuat. Teks naskah ini di mulai dengan kisah leluhur perempuan mereka yang bergelar Puti Dayang Beranai--sepupu Puti Unduk Pinang Masak--menikahi seorang ulama bernama Syaikh Samilullah. Mereka memiliki sembilan orang anak. Dua di antara anak perempuannya yang bermukim di Koto Beringin menjadi leluhur bagi dua kelompok besar yang menghuni

11 Teks aslinya disebut Maguni, tetapi jika dilihat dalam teks naskah lain beraksara Jawi (TK 41) diketahui bahwa Maguni yang dimaksud adalah Manggumi

wilayah Rawang. Kelompok pertama adalah keturunan Andir Bingin yang menurunkan Patih Madiri dan Depati Sungai Laga sedangkan kelompok kedua adalah keturunan Andir Caya yang menurunkan Bujang Peniyam dan Depati Muda. Kisah-kisah berikutnya bercerita tentang hubungan dua depati ini dengan pangeran dari Jambi serta perseteruan mereka dengan Depati Punjung, kepala suku dari kelompok lain. Naskah ini tampaknya ditulis jauh setelah peristiwa yang diceritakan berlangsung sebagaimana bunyi teks singkat di ujung tanduk TK 37 yang berbunyi *suruh surat kata janang tutur ninik hurang kuta baringin (*disuruh menulis oleh utusan raja, kisah leluhur orang Koto Beringin).

Gambar 10. Empat buah naskah Tanduk (TK 37-40) pusaka Depati Sungai Lago atau Depati Singolago di Koto Beringin, Rawang. Sumber. Alimin dkk., 2003: 35.

Salah satu naskah Incung yang memuat informasi mengenai batas-batas wilayah adat adalah naskah TK 200 yang berasal dari Mendapo Hiang. Naskah yang ditulis pada tanduk dan telah dialihaksarakan oleh Voorhoeve[12], berbunyi:

> Hini surat dipati tiga lurah manyurat bangun sataruh duwa dingan cik balu hiyang mabunuh haja ha bangar lalu hutan duwa jiring singan pa kubang lalu hulu sungay hulu mara kabak panyang sa lalu ka tangah pada … la tanah ti …. mara pusu karabaw sikur pa makan maka tatkala rasada papaniga hati

12 *http://ipll.manoa.hawaii.edu/tambo/f.html*

ta…r pakaya hindah tiga baradik bagalar dayang ki… malah nika dapati canar(?) dayang ramasah ninik janang dayang hindah maka dapati hiyang tangadah mangada dipati riya hiyan maka hanak hurang balima dayang ramasah mangada hanak batiga batina baduwa surang jantan bagalar nasiya yang batina bagalar daradang mas surang bagalar dara lirak sariya lila babini tabing tinggi dara mas baralaba mangada patih suhan patih suhan baduwa surang bagalar mata salih surang bagalar dibalang gayur hini surat batas hutan pamangku malin deman ka darat talang batu sar ngusir(?) bukit ga'ung himaw sungay tala(r)……lak tanah mangguk balarik lalu kabakan g(u?)jah tuhalah hingat pamangku muda singan sungay hasam kumbang……..mal(i) n diman ta(?) mana pula hingat pamangku tamanggun dakit tapus saharik mangilir sungay panjang masir tabin…..nggi lalu pandi…..ka nasi singgan hitu kayin hingas pamangku dasinga mih(?) singan sungay panjung mari hilat…dik sanga air sungay macur ngusir ba…kuta subalah bukit tapus galanggang hitu halah hi… singa marik…lah surat tutur tutur hutan tanah dipati hiyang dingan dipati sungay langit canda ja(?)lik bukit bungkuk ca hini batu ba sadawat bungkabak(?) bahinyi(?) sabatu ba……hutan dangan hurang kuta pandan mahanda hayir..ngkan lubuh tuba tuba sungay daras gunung tujuh.

Terjemahan:

Inilah surat Depati Tiga Lurah menyurat bangun[13] separuh dua dengan Cik Balu yang membunuh raja, kemudian ia membayar bangun (berupa) hutan dua jirim sehingga Pakubang terus ke hulu sungai, hulu Muara Kebak Panjang (Tebat Panjang?) terus ke tengah pada(ng) lalu tanah ti ... Muara Pusu, seekor kerbau makanannya. Maka setelah selesai perkara menyusahkan itu, *pakaya* (?) Indah tiga bersaudara bergelar Dayang Ki.. menikahi Depati Canar, Dayang Ramasah (menikahi) Ninik Jenang, Dayang Indah menikahi Depati Hiang memiliki anak Depati Riaiyam (Depati Riayam), (Depati Riayam) memiliki anak berlima orang. Dayang Ramasah memiliki anak bertiga orang, dua perempuan seorang laki-laki. Seorang laki-laki bernama Sariya Lila, yang perempuan bernama Dara Dang Mas dan Dara Lirak. Sariya Lila beristri di Tebing Tinggi. Dara Mas menikahi Patih Suhan. Patih Suhan memiliki dua orang anak, seorang bernama Mata Salih, seorang bernama Dibalang Gayur. Inilah surat batas hutan Pemangku Malin Deman, ke (arah) darat Talang Batu menuju Bukit Gaung Harimau, Sungai Tala .. lak Tanah Mangguk Balarik, terus ke Pekan Gajah, itulah ingat (wilayah) Pemangku Muda. Sehingga Sungai Asam Kumbang (dikuasai oleh) Malin Deman. Di mana pula ingat (wilayah) Pemangku Temenggung, (yakni) di Bukit Tapus Serik menghiliri Sungai Panjang menuju Tebing Tinggi terus ke Pandi (tidak terbaca). Sehingga itu ke sini ingatan (wilayah)

13 Bangun merupakan sejumlah pembayaran adat sebagai sanksi atas pidana pembunuhan, semacam diyat dalam hukum Islam (Hatta, 2002).

> Pemangku Singamarik[14]. Sehingga Sungai Panjung ke arah mudik, sehingga Air Sungai Mancur menuju ke Koto sebelah Bukit Tapus Gelanggang itulah ingat (wilayahnya) Singamarik. Inilah surat tutur hutan tanah Depati Hiyang dengan Depati Sungai Langit, sehingga di Bukit Bungkuk ke sini Batu Sadawat *bungkabak(?) bahinyi(?)* sebatu. Ba(tas) hutan dengan orang Koto Pandan, menyeberangi (sungai) Air (bu)ngkan Lubuk Tuba-tuba Sungai Deras Gunung Tujuh.

Teks naskah ini memberikan informasi mengenai tiga hal, pertama tentang sejumlah denda bangun yang dibayarkan oleh seseorang bernama Cik Balu karena membunuh raja kepada Depati Tiga Lurah. Denda bangun itu berupa lahan tanah yang disebutkan batas-batasnya serta seekor kerbau yang dimakan bersama. Informasi kedua mengenai keturunan dari tiga orang leluhur perempuan yang ketiganya menggunakan gelar Dayang, mereka menikah setelah pembayaran denda bangun itu. Informasi paling banyak yang dimuat di dalam teks ini mengenai batas-batas wilayah adat, yaitu batas wilayah antara Pemangku Malin Deman, Pemangku Temenggung, dan Pemangku Singamarik serta batas wilayah antara Depati Hiang dengan Depati Sungai Langit dan penduduk Koto Pandan.

C. Surat-Surat Kerajaan: Distribusi, Jenis dan Periodesasi

Distribusi naskah

Naskah-naskah Jawi yang ditemukan di Kerinci, terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah naskah-naskah *tembo*. Naskah ini memiliki kandungan teks yang hampir mirip dengan teks-teks *tembo Incung.* Sebagai contoh, naskah Incung TK 37-40 memiliki kesamaan isi dengan teks pada naskah Jawi bernomor TK 41. Begitu pula dengan teks naskah Incung bernomor TK 30 memiliki kesamaan informasi dengan teks naskah Jawi bernomor TK 33. Hal ini menunjukkan adanya proses alihaksara dari aksara Incung ke aksara Jawi dan proses alihmedia dari media tanduk ke media kertas yang dilakukan oleh orang Kerinci di masa lalu.

Kedua, adalah naskah-naskah Jawi yang dikirim oleh pihak kerajaan di sekitar Kerinci yang ditujukan kepada para Depati di Kerinci. Naskah tersebut sebagian besar berasal dari Kesultanan Jambi dan sebagian lainnya berasal dari Indrapura dan Pagaruyung. Berdasarkan Tambo Kerintji Voorhoeve dan data-data terbaru, ditemukan sekitar 35 naskah di Kerinci Tinggi serta 7 naskah dari Serampas dan 3 naskah dari Muara Mendras (Kerinci Rendah) yang semuanya berasal dari Kesultanan Jambi (Voorhoeve, 1941; Gallop, 2009; Gallop, 2013). Selain itu, diketahui pula terdapat tiga belas naskah yang berasal dari Kesultanan

14 Voorhoeve menulis Dasingamih dengan tanda tanya setelah huruf mih, kemungkinan dia masih meragukan alihaksaranya. Namun setelah kata Dasingamih ini, ada kata Singamarik yang tertulis dengan jelas. Saya berpendapat bahwa kata Dasingamih sebenarnya adalah Dasingamarik. Tetapi karena kesulitan pembacaan pada teks yang pertama,Voorhoeve mentrasliterasikan menjadi Dasingamih, memang karakter surat Incung untuk kata "mih" dan "rik" memiliki persamaan bentuk, apalagi jika terdapat kesalahan dari penulis naskah di masa lalu.

Indrapura dan lima naskah berasal dari Pagaruyung (Voorhoeve, 1941; Zakaria dkk., 1989; Drakard, 1993).

Naskah-naskah Jawi yang berasal dari luar Kerinci terdistribusi dalam sepuluh mendapo yang ada di Kerinci. Jumlah naskah terbanyak ditemukan di Mendapo Rawang sekitar 18 naskah. Jumlah paling sedikit ditemukan di Mendapo Kemantan dan Depati Tujuh masing-masing tiga naskah. Sementara itu, di Mendapo Penawar tidak ditemukan satupun naskah Jawi yang berasal dari luar Kerinci. Naskah-naskah berupa surat dari Kesultanan Inderapura hanya ditemukan di beberapa *mendapo* saja yaitu Mendapo Limo Dusun (dua naskah), Mendapo Rawang (tiga naskah), Mendapo Hiang (satu naskah), Mendapo Kemantan (dua naskah), Mendapo Semurup (satu naskah) dan Mendapo Tanah Kampung (dua naskah). Peta persebaran naskah ini dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11. Sebaran surat-surat Kesultanan Jambi dan Inderapura di wilayah Kerinci (Sumber. Google earth pro dengan modifikasi oleh Hafiful Hadi Sunliensyar, 2019)

Jenis Naskah

Naskah-naskah dari Kesultanan Jambi lazim disebut sebagai surat piagam, surat celak piagam surat titah, dan surat cap oleh masyarakat (Gallop, 2009). Gallop menyebutkan bahwa penamaan surat tersebut tergantung dari isi surat. Surat piagam atau disebut pula dengan celak piagam adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk mengesahkan batas-batas wilayah adat yang dikuasai oleh Depati tertentu, perintah untuk menjalankan undang-undang dan hukum kerajaan Jambi di wilayah kekuasannya itu serta menjelaskan hak prerogatif raja (perihal larangan raja). Kadangkala di dalam satu teks naskah berisi semua hal tersebut dan kadangkala dipisah dalam naskah yang berbeda. Selain berisi hal-hal tersebut di atas, surat-surat kerajaan disebut sebagai surat titah. Sementara itu, penamaan surat cap terkait dengan stempel-stempel kerajaan yang tertera pada naskah. Ada lagi istilah yang menyebutnya sebagai piagam belang. Hal ini merujuk pada penampilan teks naskah yang terkesan seperti garis-garis belang.

Sebagai dokumen yang bersifat resmi. Piagam-piagam Kesultanan Jambi memiliki struktur teks tersendiri. Gallop (2009: 246-278) memaparkan bahwa teks naskah terdiri dari kalimat pembuka, isi dan cap atau stempel kerajaan. Kalimat pembuka teks terdiri dari enam unsur yakni pertanggalan, frasa *pada saat ini* (*at this time*), nama-nama pemberi atau yang mengeluarkan naskah, jenis naskah, nama-nama penerima naskah dan tujuan dikeluarkannya naskah. Kalimat pada teks naskah dimulai dengan menyebutkan angka tahun yang terkadang diikuti pula oleh nama tahun berdasarkan perhitungan kalendar delapan tahunan yang digunakan di dunia Melayu. Setelah penyebutan angka tahun diikuti oleh penyebutan bulan, tanggal, nama hari bahkan waktu. Sebagai contoh teks naskah yang memiliki unsur lengkap adalah piagam Dusun Cupak Mendapo Seleman (TK 212). Teks naskah ini di mulai dengan penyebutan pertanggalan "*Hijrat al-Nabi sallallahu 'alaihi wasallam seribu dua ratus enam tahun alif pada selikur hari bulan Sa'ban pada hari Ahad pada waktu tengah hari"* (Hijrat Nabi sallalahu 'alaihi wasallam 1126 tahun alif pada hari ke-21 bulan Sya'ban, hari Ahad waktu tengah hari). Kemudian diikuti oleh frasa *dewasa itulah* (pada saat itulah), nama tokoh yang mengeluarkan naskah "Pangeran Temenggung Kebal di Bukit", penyebutan jenis naskah (*memberi cap serta piagam kepada*), nama-nama penerima naskah (*Depati yang bertiga Tanah Cupak: Depati Serah Bumi, Depati Suka Barajo dan Depati Mangkubumi*), dan selanjutya diikuti oleh tujuan dikeluarkannya atau pesan naskah (*adapun yang diicak diicanya di dalam Dusun Cupak.....*).

Lebih lanjut menurut Gallop, teks-teks naskah yang tidak memuat unsur pertanggalan akan langsung menyebut jenis naskah, nama-nama yang mengeluarkan naskah, nama-nama yang menerima naskah dan pesan atau tujuan dikeluarkannya naskah itu. Seperti pada naskah Piagam Dusun Sanggaran Agung (TK 229) di mulai dengan penyebutan jenis naskah (*ini surat celak piagam*), nama tokoh yang mengeluarkan naskah (*Pangeran Temenggung*), nama-nama penerima

naskah (*Depati Sanggaran Agung, [Depati] Suka Beraja*) dan pesan naskah (*akan perihal piagam...)*.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa isi teks naskah piagam atau celak piagam terdiri dari tiga hal. Pertama, mengenai batas-batas wilayah kekuasaan para Depati disertai dengan pengakuan Kesultanan atas hak mereka di dalam wilayah tersebut. Penyebutan batas-batas wilayah di dalam teks memiliki kesamaan dengan batas-batas wilayah yang disebutkan di dalam tradisi lisan yakni dengan menggunakan fitur-fitur lanskap (bentang alam) sebagai penanda dan penunjuk arah (lihat halaman 14). Ada dua tipe penyebutan batas-batas wilayah adat di dalam teks yaitu dengan langsung fitur alam sebagai penanda batas disertai dengan penyebutan nama tokoh yang menguasai wilayah bersebelahan. Contohnya dapat dilihat dalam teks Piagam Tanah Kepala Persembah (TK 161) yang dikeluarkan oleh Sultan Anum Suria (Seri?)[15] Ingalaga dan Pangeran Temenggung Mangku Negara kepada Depati-Depati yang berkuasa di wilayah itu yakni Depati Raja Simpan Bumi, (Depati) Mangkubumi, Depati Raja Simpan Bumi Andum Laksana, Depati Muda Pamuncak Negara dan Depati Mendalo Bumi. Disebutkan batas-batas wilayahnya dengan bunyi:

> "[...]Adapun pebatasannya dengan Yang Patuan Maraja Bungsu Gunung Berapi, dan pebatasannya dengan Depati Empat, Muara Sekungkung Mati dan pebatasannya dengan Raja Hitam dan Raja Putih Bukit Tulang Orang dan pebatasannya dengan Orang Teba, Pangkal Titian[...]"

> Terjemahannya:
>
> [...] Adapun perbatasannya dengan Yang Dipertuan Maraja Bungsu (adalah) Gunung Berapi, dan perbatasannya dengan Depati Empat (adalah) Muara Sekungkung Mati, dan perbatasannya dengan Raja Hitam dan Raja Putih (adalah) Bukit Tulang Orang dan perbatasannya dengan penduduk Teba (Tebo) (adalah) Pangkal Titian [...].

Contoh lain penyebutan batas-batas wilayah adat adalah Piagam Muara Mendras (MS D). Piagam ini dikeluarkan oleh Sultan Abdul Rahman Nasaruddin (1841-1855) kepada Depati Muncak Alam Tiang Agama di Sungai Tenang. Naskah yang telah diteliti oleh Gallop (2013: 34) ini, menyebutkan batas-batas wilayah depati tersebut yang berbunyi:

> "[...]dari Tanah Du(r)ian Balai lalu ke Lubuk Lubang Muara Mempiyul, dari situ hilir ke Lubuk Kamumu, maka menaiki ke Tanah

15 *Voorhoeve dibantu Guru Abdul Hamid mengalihaksarakan teks Jawi sa-ra-ya sebagai Suria. Sementara itu, Gallop mengalihaksarakan sebagai Seri*

Genting Sawa Meluncur, maka mendapat Du(r)ian Rabung, dari Du(r)ian Rabung maka memelah Pematang Bunga, maka terjun ke Lubuk Pekak, dari Lubuk Pekak hilir ke Rantau Limau Kapas mendapat Muara Sungai Seluang, menapuh Peradun Sago, lalu ka Bukit Rejang, terjun ke Lubuk Muara Sungai Masat, mehilir ke Lubuk Batu Kiari, maka mudik meriping Bukit Rutai, terjun ka hulu Narso Gedang, dari situ maka menda(pat) Muara Sungai Empang Kepayang, lalu Kepayang Belarik, mendapat Kepayang Tinggi Bani, menaiki Pematang Mipis, lalu Pematang Pugung Parang, terjun ke hulu Tengkui, lalu ka hulu Tengkui Kecik, mudik ke Rantau Lalang, menuju Serik Bejajo Batung Manis, lalu ke hulu Rawas, mendapat ka hulu Kuis Tinggi, mudik ka hulu Rawas, melayang penyura(n) Danau Besyar, dari situ menuju ke Pauh Kumambang Manis Masam Sebelah, terjun Muara Suwa Batu Begombak dalam Batang Ketahun, merimping Batang Ketahun, lalu ke Teluk Manau Kuning, menaiki Bukit Barisan, terjun Muara Ipu Buih, menaiki Bukit Pandan Tua, terjun ke paradun Limau Kaling, lalu Muara Sungai Kelukum, mudik ke Rantau Ketangkal, melayang penyuran Danau Gedang, menapu bendung ke Tangkal Luas, mendapat ke Paradun Kayu Pasak Berjupang Empat [...]

Terjemahan:

[...] dari Tanah Durian Balai menuju ke Lubuk Lubang Muara Mempiyul, terus menghiliri Lubuk Kemumu, mendaki di Tanah Genting Sawa Meluncur, kemudian menepat ke Durian Rabung, dari Durian Rabung membelah Pemayang Bunga kemudian turun ke Lubuk Pekak, dari Lubuk Pekak menghiliri Rantau Limau Kapas menempat di Muara Sungai Seluang menempuh Peradun Sago, melewati Bukit Rejang, turun ke Lubuk Muara Sungai Masat menghilir ke Lubuk Batu Kiari, kemudian ke arah mudik menuju Bukit Rutai, turun ke hulu Narso Gedang, dari situ kemudian menuju Muara Sungai Empang Kepayang, melewati Kepayang Belarik kemudian menepat di Kepayang Tinggi Bani, mendaki Pematang Mipis melewati Pematang Pugung Parang, lalu turun ke hulu Tengkui, menuju ke Hulu Tengkui Kecik, mudik ke arah Rantau Lalang, menuju Serik Bejajo Betung Manis, menuju ke Hulu Rawas, menepat ke Hulu Kuis Tinggi, mudik ke arah Hulu Rawas, menyeberangi penyuran Danau Besar, dari situ menuju ke Pauh Kumambang Manis Masam Sebelah, turun ke Muara Suwa Batu Begombak dalam Batang Ketahun, merimping Batang Katahun menuju Teluk Manau Kuning, mendaki Bukit Barisan, turun ke Muara Ipuh Buih, mendaki Bukit Pandan Tua kemudian turun ke Paradun Limau Keling menuju Muara Sungai Kelukum, memudiki Rantau Ketangkal, kemudian menyeberangi Penyuran Danau Gedang, melewati bendungan ke Tangkal Luar, menepat ke Peradun Kayu Pasak Bercupang Empat [....]

Teks naskah ini menunjukkan batas-batas wilayah adat ditunjukkan berdasarkan pada perjalanan seseorang setelah keluar dari Kampung Durian Balai

menuju tempat-tempat yang disebutkan secara berurutan dengan berpedoman kepada arah aliran sungai yang dilewati (hilir atau mudik), menaiki (naik ke), menuruni (turun, terjun) atau melewati (*meniti*) fitur-fitur perbukitan (Bukit, Peradun, Pematang) serta dengan menyeberangi (*melayang*) sungai dan danau. Sepanjang tempat-tempat yang dilewati itulah yang menjadi pembatas wilayah adat mereka. Contoh ini merupakan tipe kedua dari penyebutan batas-batas wilayah di dalam teks naskah piagam.

Setelah penyebutan batas-batas wilayah tersebut, biasanya diikuti oleh kalimat penegasan terhadap hak-hak Depati dan kelompoknya untuk memiliki dan memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di dalam wilayah kekuasaan mereka. Misalnya dalam piagam Tanah Siulak (TK 173) yang diberikan kepada Depati Intan, Depati Mangkubumi dan Depati Rajo Simpan Bumi, tertulis: "... *hilir sehingga Tebing Tinggi, mudik tersekut ke Gunung Berapi ialah depati yang batiga punya, serta anak jantan anak betinonya, sebatang larisnya, setitik airnya, sekapan tanahnya, ialah depati yang batiga punya...".* Sebelah hilir batasnya hingga Tebing Tinggi, sebelah mudik batasnya hingga Gunung Berapi adalah kepunyaan depati yang bertiga serta kelompoknya, baik sebatang larasnya, setitik airnya, dan sekepal tanahnya (kadangkala di naskah lain disebutkan pula seekor ikannya, serotan sekayunya) adalah kepunyaan depati yang bertiga. Bahkan di dalam piagam Mendapo Limo Dusun TK 4 disertai dengan kewenangan para Depati untuk merampas dan membunuh jika melawan, orang-orang yang tanpa izin mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah kekuasaan mereka, *"Dan barang siapa cala calo mengambil kayu mayunya atau rotan rambainya*[16] *atau buluh bilahnya atau barang sebagainya tiada memberi tahu orang yang mempunyai tanah, dirampas hukumnya; jikalau melawan dibunuh* (dan barang siapa yang sengaja, mengambil kayu-mayu, rotan-rambai, buluh-bilah dan barang lainnnya dengan tidak memberi tahu pemilik tanah, dirampas hukumannya, jikalau melawan dibunuh). Teks serupa juga disebut dalam naskah piagam Renah Alai (MS A) (Gallop, 2009: 282).

Kedua, teks piagam berisi perintah pihak kerajaan kepada para Depati untuk menjalankan fungsi eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang dan hukum Kesultanan Jambi di wilayah kekuasaan mereka. Misalnya di dalam teks Piagam Mendapo Limo Dusun (TK 04) disebutkan:

> "[...]Adapun segala Depati itu mendirikan hukum raja yaitu boleh para Depati menyeti mendenda, pancung punjung, kelam bunting beras andam ke dalam, pancung sula, itupun dengan bicara Mangku yang bertiga dan Menteri nan Sepuluh adanya. Dan adalah seko cupak gantangnya Depati itu, barang suatu ngadu bicaranya melainkan mengadu para Menteri, dan para Menteri itu mengadu kepada para Mangku, dan para Mangku itulah menyampaikan kepada para Depati [...]"

16 *Gallop mentransliterasinya sebagai rumbianya*

Terjemahan:

[...]adapun semua Depati melaksanakan hukum raja yaitu dibolehkannya para Depati *menyeti* dan mendenda, *pancung punjung kelam*, *bunting beras andam ke dalam*, *pancung sula*. Itupun dengan perundingan/pembicaraan (bersama dengan) Mangku bertiga dan Menteri nan Sepuluh adanya. Dan adalah kewajiban (*seka*) bagi *cupak gantang*nya[17] (rakyatnya) Depati itu, bila hendak mengadu sesuatu hal, (maka) mengadu kepada Menteri, dan para menteri itu mengadu kepada para Mangku dan para Mangku itulah yang menyampaikan kepada para Depati [. ..]

Contoh lain teks naskah piagam yang memuat perintah menjalankan fungsi eksekutif bagi para Depati oleh pihak kerajaan dapat dilihat dalam piagam Tanah Siulak (TK 173), yang berbunyi:

"[..] Perihal perintah Seri Sultan Anum Suria Ingalaga serta Pangeran Temenggung Mangku Negara yang dijunjungkan baginda atas dipati yang bertiga sekedudukan barang yang kusut beselesaikan, su(a)rang beragih, harta orang jangan diambil, harta diri jangan diberikan kepada orang. Barang siapa membunuh memberi bangun, barang siapa melukai memberi pampas. Barang siapa kepanjing ke dalam sepancung sulanya dipati yang bertiga. Barang perintahnya dan barang hukumnya yang dilakukannya itu, hukum Sultan dan Pangeran yang dijunjungnya itu adanya [...]

Terjemahan:

Perihal perintah Seri Sultan Anum Suria (Seri) Ingalaga dan Pangeran Temenggung Mangku Negara yang diberikan baginda kepada Depati yang bertiga sekedudukan (Depati Intan, Depati Mangkubumi dan Depati Rajo Simpan Bumi) (yaitu) sesuatu yang kusut (perkara-perkara) diselesaikan, harta perserikatan (suarang) dibagi, harta milik orang lain jangan diambil, harta milik sendiri jangan diberikan kepada orang, barang siapa yang melakukan pembunuhan membayar (denda) *bangun*, barang siapa yang melukai membayar (denda) *pampas*, barang siapa yang terhukum di dalam wilayahnya Depati yang bertiga, perintah dan hukum yang diterapkan itu adalah hukum sultan dan pangeran adanya.

Ketiga, naskah-naskah piagam berisi penjelasan tentang hak prerogatif atau hak istimewa raja. Hak prerogatif raja tersebut biasa disebut dengan *hal larangan raja*. Maksudnya adalah barang-barang mewah yang dianggap sangat bernilai

17 *Cupak gantang adalah istilah adat yang merujuk kepada rakyat atau penduduk yang berada di bawah kekuasaan Depati (wawancara, Muntahar Temenggung Titin Rajo, 30 Agustus 2016)*

kala itu seperti *pesilak indah, geliga taring mustika* (batu-batu berharga), canding dan gading (cula badak dan gading gajah) serta *emas jatah jati rupa* (emas murni) yang didapatkan di dalam suatu wilayah depati menjadi milik raja dan para depati maupun mentrinya wajib mempersembahkan barang tersebut kepada raja baik melalui *jenang* (utusannya) maupun diantarkan secara langsung kepada raja (Gallop, 2009: 278). Teks-teks yang memuat perihal larangan raja ini ditemukan di dalam naskah Piagam Renah Alai, Piagam Mendapo Limo Dusun (TK 2, TK 22), piagam Koto Baru atau piagam Depati Gembala Indah (TK 67), piagam Tanah Kepala Persembah (TK 161, TK 169), dan piagam Tanah Siulak (TK 171, TK 173, TK 174). Bahkan, di dalam piagam Tanah Sekungkung (TK 107), secara tegas diperintahkan kepada Depatinya:

> " [...] jikalau ada mendapat kamu dalam hutan tanah air ngalih itulah terindah taring mustiko dan jatah jati rupa melainkan kamu sembahkan kepado duli Pangeran dan jangan kamu ngalih di pekan dan jikalau kamu ngalih di pekan melainkan kamu membawah ti'da berakar dan mengatas tiada berpucuk[...]."

> Terjemahan:
>
> "[...]Jikalau kamu mendapatkan di dalam hutan (dan) tanah (di sepanjang sungai) Air Ngalih (berupa) *pesilak indah taring mestika* dan (emas) *jatah jati rupa*, maka kamu sembahkan kepada Duli Pangeran dan jangan kamu menjualnya di pasar[18]. Jika kamu menjualnya di pasar maka kamu akan menderita[19][...]"

Teks-teks naskah piagam Kesultanan Jambi banyak sekali menyebutkan perkara hukum bentuk frasa metafora (perumpamaan) seperti *pancung sula, denda sakti (menyeti), bunting beras andam ke dalam*, ada lagi istilah *orang bungkuk orang timpang, orang Jebut beralih muka* (TK 67). Secara adat, istilah-istilah tersebut masih digunakan oleh pemangku adat di Kerinci dan dituturkan melalui tradisi lisan. Misalnya, Haji Qadri dalam Idin (2009) memaparkan tentang wewenang dari Luhah Depati Intan[20] di Dusun Siulak Mukai wilayah adat Tanah Sekudung yaitu memegang *pancung sulo dendo sakti* artinya melaksanakan dan memutuskan hukuman terhadap pelanggar undang-undang kerajaan baik itu berupa hukuman mati, pembayaran denda dan sanksi adat lainnya. Orang-orang yang dikategorikan sebagai pelanggar hukum kerajaan itu diistilahkan dengan: (1)

18 *Ngalih di sini diserap dari bahasa Kerinci ngaleih, yang berasal kata menggalas maknanya sama dengan menjual atau menjajakan.*

19 *Frasa aslinya ke bawah tidak berakar ke atas tidak berpucuk, frasa ini merupakan frasa kutukan bila seseorang melanggar sumpah. Orang-orang yang terkena sumpah diibaratkan seperti tanaman yang hidup tanpa akar dan tanpa pucuk (Muntahar, 30 Agustus 2016).*

20 *Nama Depati Intan disebut dalam piagam TK 173, TK 174 dan TK 175*

puyuh panjang ranto ketitir panjang dengung, yaitu orang-orang yang melakukan penunggakan pembayaran pajak (*serah jajah*) dengan berbagai alasan; (2) *urang bungkuk urang timpang, urang jebut beralih muka* yaitu orang-orang asing yang masuk tanpa izin serta para pelaku kriminal dari daerah lain yang bersembuyi di wilayah adat Tanah Sekudung. Para pelaku segala bentuk perzinahan yang diistilahkan dengan: (3) *munting breh mendap ke dalam, munting padi idak bajudu,* yaitu janda yang hamil tanpa diketahui pelakunya; (4) *tebu melingkar urat*, yaitu orang yang melakukan perzinahan dengan anak atau orangtuanya sendiri; (5) *pisak masak diguyang-guyang,* yaitu orang yang melakukan perzinahan dengan saudara kandung; dan (7) *tebu panjang keladi berisi*, yaitu gadis yang diketahui hamil tanpa ikatan pernikahan.

Sebagai penutup teks, naskah-naskah piagam yang ditemukan di Kerinci umumnya mengandung kalimat kutukan. Hal ini berbeda dengan naskah-naskah piagam yang ditemukan di wilayah Serampas dan Muara Mendras yang hanya memuat frasa "hubaya-hubaya jangan dilalu!", sebuah larangan keras untuk melanggar isi surat. Beberapa teks dalam piagam Kerinci memuat pula kalimat kutukan yang berbunyi:

> *[....] Barang siapa mengubah-ubahi seperti di dalam piagam ini dimakan sumpah (kena kutuk) duli Pangeran Suta yang dahulu-dahulu itu selama gagak hitam selama kuntul putih selama air hilir selama langit tinggi selama burung terbang bubungannya ke bawah tiangnya ke atas dan dimakan bisa kawi duli Kiayi Senapati dan Panembahan di bawah sawa dan duli Pangeran Temenggung dan duli Pangeran Dipa dan duli Pangeran Suta* (TK 205, Piagam Depati Aturbumi, Tanah Hiang).

> *....Hubaya-hubaya jangan dilalui seperti di dalam cap piagam ini dan barang siapa melalui perintah dalam piagam ini atau beraja hitam, beraja putih, kena kutuk Pangeran Temenggung Kebul di Bukit, tiang rumahnya ke atas dan bubungannya ke bawah (TK 161, Piagam Tanah Kepala Persembah).*

> *"...Barang siapa yang ngubahkan kata raja itulah orang yang mematahkan tanggo depati selapan helai kain, itulah orang yang memecat memando raja, orang mengaburkan karang setia, Jikalau mengadap ke Raja Benangkebau kena kutuk bisa kawi yang patuan dan jikalau, mengadap ke tanah Jambi kena kutuk penambahan Bawah Sawa, ke bawah tiada berakar, ke atas tiada berpucuk sama tengah dilarik kumbang, selama-lamanya tiada beroleh baik, hubaya-hubaya jangan dilalui* (TK 148, Surat Titah Pangeran Sukarta Negara kepada).

> Terjemahan:

...... Barang siapa mengubah-ubah isi piagam ini, akan dimakan sumpah, kena kutuk Duli Pangeran Suta yang terdahulu itu, selama gagak berwarna hitam, selama kuntul berwarna putih, selama air mengalir ke hilir, selama langit tinggi, terbang bubungannya ke bawah tiangnya ke atas[21], (dia) dimakan racun kawi (racun yang kuat) Duli Kiyai Senapati dan Panembahan Bawah Sawa[22], serta Duli Pangeran Temenggung, Duli Pangeran Dipa dan Duli Pangeran Suta (TK 205). .....jubaya-hubaya, janganlah dilanggar apa yang tersebut di dalam cap piagam ini. Barangsiapa melanggar piagam ini, atau beraja hitam beraja putih, kena kutuk Pangeran Temenggung Kebul di Bukit, tiang rumahnya ke atas dan bubungannya ke bawah (TK 161). ...barang siapa yang mengubah perkataan raja itulah orang yang mematahkan tangga Depati Selapan Helai Kain, orang yang melawan raja, orang yang merusak persumpahan (karang setia). Jikalau (ia) menghadap ke Raja Minangkabau, (ia terkena) kutukan racun kawi Yang Dipertuan dan jikalau ia menghadap ke Tanah Jambi kena kutukan Panembahan Bawah Sawa. Ke bawah ia tiada berakar, ke atas ia tiada berpucuk, di tengah digigit kumbang, selama-lamanya tiada mendapat kebaikan, hubaya-hubaya janganlah dilanggar! (TK 148).

Selain berupa naskah piagam, naskah-naskah dari Kesultanan Jambi disebut sebagai surat titah. Surat titah ini berupa perintah raja menyangkut perkara-perkara tertentu seperti masalah hubungan diplomatis antara pejabat Kesultanan dan para Depati atau perkara hukum yang tidak mampu diselesaikan oleh para depati sehingga perlu meminta keputusan dari pihak Kesultanan. Contoh surat titah adalah TK 242 yang berbunyi:

Ini titah Pangeran Suta Wijaya datang kepada Dipati Uda Menggala perkara bicara Ria Bahi dengan Dipa(ti) Semurup itu sedatang Jenang (di Kerinci) sudahi dengan dipati empat serta Jenang. Jikalau tiada mangu Dipati Semurub disudahi Jenang dengan dipati ‘empat titah duli Pangeran Suta disuruh turun (menghadap) Jikalau tiada mengu turun lepas taksiran oleh Dipati Uda Menggala. Oleh kerana itu kembalikan ke semurub sanak ba dengan sanak. Jikalau luka bapampas dua jikalau mati bebangun dua. Tammat.

Terjemahan:

Inilah titah Pangeran Suta Wijaya kepada Depati Uda Menggala mengenai perkara Ria Bahi dengan Depati Semurup. Setibanya jenang ke Kerinci, (perkara itu) diselesaikan oleh Depati Empat dan Jenang. Jikalau Depati Semurup tidak mau (perkara itu) diselesaikan oleh jenang dan Depati Empat. Perintah Duli Pangeran Suta disuruh turun menghadap(nya).

21 *Metafora bagi si pelanggar sumpah akan hancur laksana sebuah rumah yang terjungkir balik.*

22 *Mereka adalah leluhur dari Sultan Jambi.*

Jikalau tidak mau turun, lepas tanggungjawab Depati Uda Menggala. Oleh karena itu, (perkara itu) kembalikan ke Semurup (selesaikan) antara keluarga dengan keluarga. Jikalau luka berpampas dua, jikalau mati berbangun dua. Tammat.

Naskah ini berisi informasi mengenai perintah Pangeran Sutawijaya mengenai perkara antara Ria Bahi dan Depati Semurup. Perintah itu disampaikan kepada Depati Uda Menggala. Pangeran meminta agar perkara tersebut diselesaikan oleh jenang dan Depati Empat di Kerinci. Namun apabila Depati Semurup tidak mau perkaranya diselesaikan oleh mereka, Pangeran memintanya untuk menghadap langsung dan apabila tidak maujuga, maka perkara tersebut lepas dari tanggung jawab Depati Uda Menggala. Pangeran meminta perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sesuai hukum yang berlaku, pembayaran *bangu*n dua kali lipat jika korbannya mati, dan pembayaran *pampas* dua kali lipat jika korbannya luka.

Dilihat dari isinya, naskah-naskah dari Kesultanan Inderapura yang dikirim ke Kerinci sangat jauh berbeda dengan naskah dari Jambi. Bila naskah-naskah dari Jambi isinya berupa pengesahan dan perintah dari pihak Kesultanan, maka teks-teks naskah dari Inderapura, susunan kalimatnya lebih diplomatis dan banyak berisi permintaan Sultan kepada para Depati yang ditujunya. Di antara permintaan Sultan tersebut misalnya permintaan agar Depati berdagang ke Inderapura. Hal ini dapat dilihat dalam teks naskah TK 248. Naskah ini dikirim oleh Sultan Pesisir Barat kepada Kiai Depati Uda Menggala di Dusun Tanah Kampung, berikut bunyi teksnya menurut Voorhoeve:

Bahwa ini salam do'a yaitu daripada Yang dipertuan Seri Sultan pesisir barat dan serta menteri yang dua puluh d…….pula barang disampaikan Allah subhanahu wata'ala kiranya datang kepada Kiahi Depati Uda(?) Banggala peri hal mengatakan sup(aya) suruhan mamanda Kiahi Uda(?) Banggala Banggala telah sampailah kepada kami hendak meneguhkan sumpah setia yang dahulu……..Kami inipun tiada (usah?) pada kami……..lagi teguh kiahi pada sumpah setia itu patut kiahi suruhkan…………anak Kurinci ke Inderapura bertiga dengan barang kehendak perniagaan(?) atau garam atau besi atau………….hendaknya karena mamanda anak tuhanku Sultan yang tua. Jikalau ada murah-murahan hati kiahi dupati turun jua ke Inderapura karena akan membarui perbuatan yang dahulu kala seperkara lagi akan membaiki perniagaan anak Kurinci dan orang Inderapura. Amma ba'du kami kirimkan kepada kiahi kahin beremas sehelai baju warnanya kuning……. barang kurnia pada Kiahi Dupati Uda Manggala. Manakala sampai surat hamba yang dibawa Patih Mendiri kan segera bicarakan oleh kiahi. Tammat.

Terjemahan:

Bahwa ini salam do'a dari Yang Dipertuan Seri Sultan Pesisir Barat dan Menteri yang Dua Puluh di (Inderapura), semoga disampaikan Allah

Subhanahu wa Ta'ala kepada Kiai Depati Uda Menggala. Adapun utusan Pamanda Kiai Uda Menggala telah sampai kepada kami, perihal hendak meneguhkan perjanjian (sumpah setia) yang terdahulu (dengan) kami. Hal ini (seharusnya) tidak usah dilakukan (karena) Kiai masih berpegang teguh kepada perjanjian itu. Lebih patut Kiai memerintahkan orang Kerinci ke Inderapura bersama dengan barang perniagaan, garam, besi, (tidak terbaca) hendaknya, karena Mamanda adalah anak Tuanku Sultan yang tua. Jikalau berkenan, Kiai Depati ikut turun (pergi) juga ke Inderapura, karena akan memperbaharui perbuatan yang terdahulu dan lagi akan memperbaiki perniagaan orang Kerinci dan orang Inderapura. Amma ba'du, kami kirimkan kepada Kiai kain bermas, sehelai baju warnanya kuning, sebagai barang kurnia kepaa Kiai Depati Uda Menggala. Apabila sampai surat hamba yang dibawa Patih Mandiri, segera rundingkan oleh Kiai. Tammat.

Teks naskah ini berisi permintaan Sultan Inderapura saat itu, Sultan Pesisir Barat, agar Kiai Uda Menggala mengutus orang berniaga dan bila mungkin ikut serta ke Inderapura guna memperbaiki hubungan perdagangan kedua belah pihak. Tampaknya, kiriman surat ini sebagai balasan atas kunjungan utusan Kiai Uda Menggala sebelumnya. Surat ini disertai pula dengan hadiah kain kepada Kiai Uda Menggala sesuai dengan tradisi kerajaan di masa lalu.

Kronologi Naskah

Berdasarkan hasil transliterasi Voorhoeve, dilihat dari sisi pertanggalannya, naskah Jawi tertua yang berasal dari Kesultanan Jambi, ditemukan di Mendapo Lima Dusun yakni TK 23 dengan pertanggalan 1100 Hijriah (1689 M) dan naskah termuda ditemukan di Mendapo Rawang yakni TK 44 dengan pertanggalan 1234 Hijriah (1819 M). Di samping dua naskah surat tersebut terdapat 10 naskah lainnya yang juga memuat informasi pertanggalan (lihat tabel 2). Sementara itu, sebagian besar di antaranya justru tidak memiliki pertanggalan. Ada sebanyak 23 naskah yang tidak memilikinya. Meskipun demikian, Naskah-naskah tanpa pertanggalan ini dapat diketahui usianya dengan menelusuri riwayat dari sultan atau pangeran yang menerbitkan surat tersebut (lihat tabel 3).

Transliterasi yang dibuat Voorhoeve menempatkan piagam Depati Payung Dusun Pondok Tinggi (1688 M) (TK 23) sebagai piagam yang paling awal dikeluarkan oleh Kesultanan Jambi meskipun Voorhoeve sendiri meragukan pertanggalan tersebut. Ia memberi catatan khusus pada teks pertanggalan dengan menyebutkan *"Perkataan sanah 1100 tamat itu lain tulisannya daripada tulisan piagam itu"*. Keraguan Voorhoeve ini cukup beralasan karena perbedaan tulisan teks naskah secara keseluruhan dengan teks yang menunjukkan pertanggalan. Apalagi jika dilihat dari nama pejabat Kesultanan yang mengeluarkan piagam ini yakni Pangeran Suria Negara memiliki persamaan nama dengan tokoh yang

mengeluarkan piagam Depati Perbo Singo sekitar 28 tahun setelahnya (1128 H/1716 M).
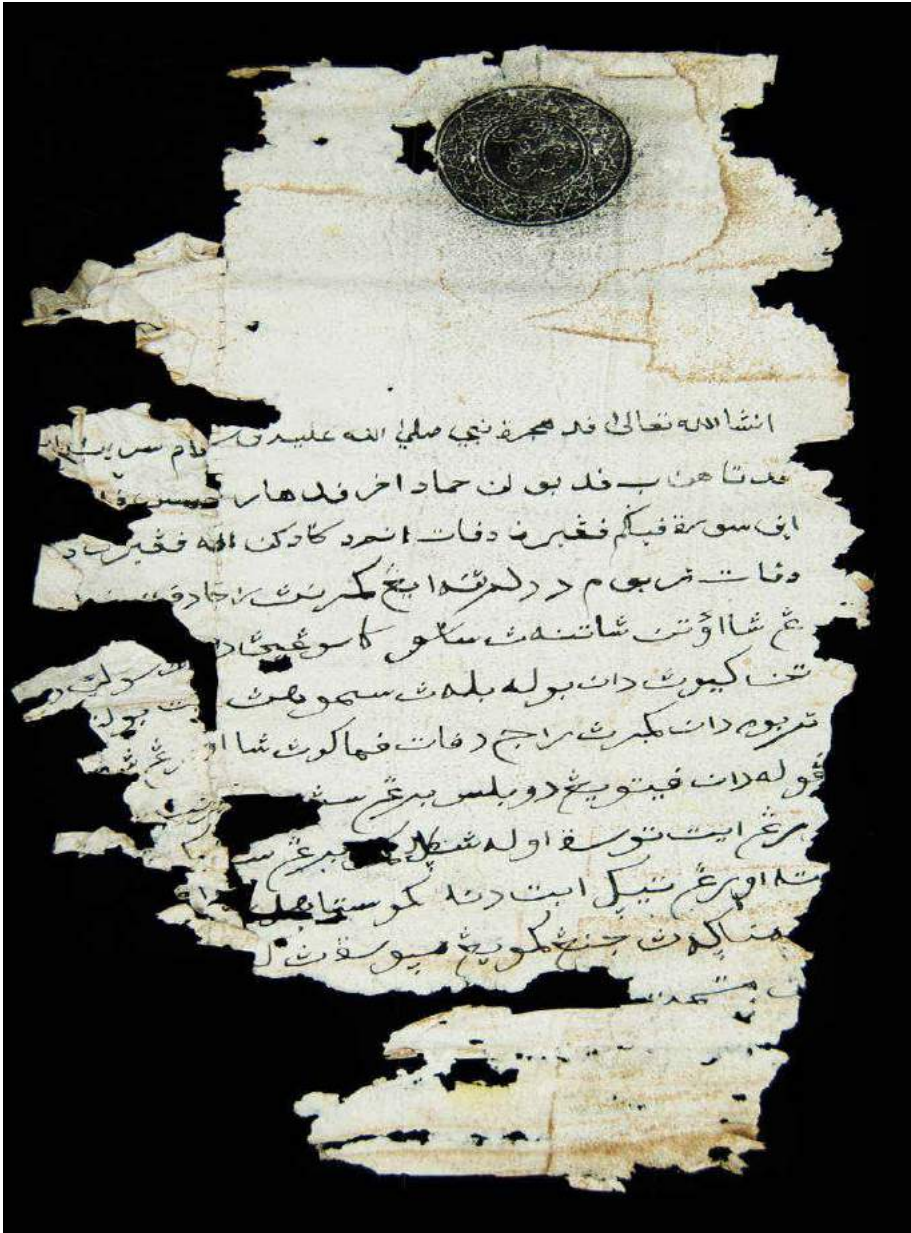
Gambar 12. Naskah Piagam Depati Atur Bumi Dusun Hiang Tinggi, Dok. British Library No. EAP117/51/1/10 (Diakses 10 Februari 2017)[23]

Perdebatan tentang naskah piagam terawal yang dikeluarkan oleh Jambi

23 *https://eap.bl.uk/archive-file/EAP117-51-1-10*

di Kerinci, agaknya sedikit terselesaikan dengan temuan naskah piagam terbaru. Naskah ini didokumentasikan oleh Tim EAP pada tahun 2006 dengan nomor EAP117/51/1/10, dan belum terdokumentasi oleh Voorhoeve sebelumnya (lihat gambar 12). Naskah ini merupakan Piagam Depati Atur Bumi yang bermukim di Dusun Hiang Tinggi. Bagian atas naskah dibubuhi stempel (cap) berbentuk lingkaran dengan motif flora di sekelilingnya. Bagian tengah cap tertulis teks Jawi yang berbunyi "Pangiran Dipa Ningrat". Naskah ini dalam kondisi rusak, terutama bagian pinggirnya yang terdapat banyak sobekan. Kondisi ini menyebabkan banyak teks yang tidak terbaca. Berikut bunyi teks pada naskah:

> "(1) Insya Allah Ta'ala, pada Hijrat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam seribu ana (bagian sobek) (2) pada tahun Ba Bulan Jumadil Ahir pada Hari Khamis (bagian sobek), (3) Ini surat piagam Pangiran Dipati Anum digaduhkan oleh Pangeian Di- (bagian sobek: kemungkinan sambungannya -pati Anum kepada) (4) Depati Tur Bumi di dalam Tanah Iyang, kambarnya Raja Di (bagian sobek) (5) ng sehutan setanahnya seanak sungainya dan sa alai (bagian sobek) (6) tan kayunya dan buluh bilahnya samuwahnya itu bu (bagian sobek) (7) Tur Bumi dan kembarnya Raja Dipati pemangkunya se orang se (bagian sobek) (8) puluh dan pitu yang dua belas barang (bagian sobek) (9) rang itu turut oleh segala (bagian sobek) barang (bagian sobek) (10) (bagian sobek) tah orang tiga itu denda satahil (bagian sobek) (11) (bagian sobek) manegahnya jenang kamu yang menyuratnya (bagian sobek) (11) n tammat"

> Terjemahan:
>
> Insya Allah ta'ala, pada Hijrat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam seribu ana (bagian sobek, pada tahun Ba bulan Jumadil Ahir pada Hari Khamis (bagian sobek), Ini surat piagam Pangeran Depati Anum digaduhkan oleh Pangeran Di(pati Anum), (kepada) Depati (A)tur Bumi di dalam Tanah (H)iyang, kembarannya Raja Di(pati) (di dalam Tanah Iya)ng, sehutan setanahnya seanak sungainya dan sehelai (daun kayunya), (ro)tan kayunya dan buluh bilahnya semuanya itu bu (bagian Sobek), (Depati) (A)tur Bumi dan kembarnya Raja Dipati pemangkunya seorang se (orang) (tidak diterjemahkan lagi karena hanya sedikit yang terbaca).

Naskah ini secara jelas memuat pertanggalan tahun, tetapi karena ada bagian yang sobek, teks setelahnya tidak terbaca lagi. Bagian yang terbaca dalam teks hanya frasa "seribu ana(m)". Berdasarkan hal tersebut, diperkirakaan naskah ini ditulis dalam rentang waktu seribu enam puluh hingga seribu enam puluh sembilan (1060-1069) Hijriah atau bila dikonversikan ke dalam tahun Masehi menjadi 1650-1659 M. Perkiraan ini diperkuat lagi oleh nama Pangeran Dipati Anum yang tertulis dalam teks sebagai pejabat kerajaan yang mengeluarkan piagam. Menurut Andaya (2016: 71-72), gelar Pangeran Dipati Anum adalah gelar yang digunakan oleh Sultan Abdul Jalil dan anaknya Sultan Abdul Muhyi pada periode 1630-1679.

Sebelum naik tahta, Sultan Abdul Jalil menggunakan gelar Pangeran Dipati Anum hingga tahun 1661. Setelah ia diangkat sebagai Pangeran Ratu, gelar Pangeran Dipati Anum kemudian disandang oleh anaknya dan juga oleh cucunya Pangeran Pringgabaya (Andaya, 2016: 126, 164-165, 227). Berdasarkan hal ini, menjadi sangat meyakinkan bahwa piagam Depati Atur Bumi, ditulis pada rentang tahun 1650 hingga 1659 M saat gelar Pangeran Dipati Anum masih dipakai oleh Sultan Abdul Jalil dan ia menjadi piagam terawal yang dikeluarkan Jambi untuk para Depati di Kerinci.

Tabel II. Naskah-naskah Kesultanan Jambi yang memuat pertanggalan, disusun sesuai urutan kronologi.

Kode Naskah	Pertanggalan (Hijriah/Masehi)	Jenis Naskah	Dari	Untuk
EAP117/ 5/1/1/10	1060-9 H (1650-9 M)	Piagam	Pangeran Dipati Anum	Depati Atur Bumi Dusun Hiang Tinggi
TK 23	1100 H (1688 M)	Piagam	Pangeran Suria karta Negara	Depati Payung Dusun Pondok Tinggi
TK 22	28 Rabiul Awal 1116 H/30 Juli 1704	Piagam	Pangeran Sutawijaya	Depati Payung Dusun Pondok Tinggi
TK 205	24 Rajab 1116 H/ 21 November 1704 M	Piagam	Pangeran Sutawijaya	Depati Atur Bumi Dusun Hiang Tinggi
TK 174	01 Zulhijjah 1116 H 26 Maret 1705 M	Piagam	Pangeran Sutawijaya	Depati Intan Kumbalo Bumi Dusun Siulak Mukai
TK 189	20 Sya'ban 1128 H/ 08 Agustus 1716 M	Piagam	Sultan Kiai Gede, Pangeran Suria Negara	Depati Perbo Singo Dusun Koto Baru Hiang
TK 175	1131 H (1719-20 M)	Piagam	Pangeran Temenggung	Depati Intan Maro Masumei Dusun Siulak Mukai
TK 4	22 Jumadil Akhir 1192 H/ 17 Juli 1778 M	Piagam	Pangeran Sukarta	Para Depati di Mendapo Limo Dusun

TK 3	29 Jumadil Akhir 1192 H 24 Juli 1778 M	Undang-undang	Pangeran Sukarta	Mangku Depati, Mangku Rajo, Ngabi Teh Satio Bawo, Mendapo V dusun
TK 212	21 Sya'ban 1206 H 13 April 1792 M	Piagam	Pangeran Temenggung Kebul di Bukit	Depati Serah Bumi, Depati Suka Barajo, Depati Mangku Bumi Dusun Cupak
-	21 Sya'ban 1206 H 13 April 1792 M	Piagam	Pangeran Temenggung Kebul di Bukit	Empat orang Depati di Dusun Kumun
TK 43	12 Zulhijjah 1208 H 10 Juli 1794 M	Surat Titah	Pangeran Suria Kusuma, Pangeran Ratu dan Sultan Ahmad Badrudin Almarhum	Depati Empat, Selapan Helai Kain Alam Kerinci
TK 44	Syawal 1234 H Juli 1819 M	Piagam	Pangeran Citra Puspa Jaya Kebul di Bukit	Depati Sungai Laga Pertama Tanah Kedipan Dusun Rawang

Tiga belas naskah dengan pertanggalan tahun ini serta sumber-sumber tulisan sejarah sebelumnya, dapat digunakan untuk menentukan pertanggalan 23 tanpa tanggal lainnya. Caranya adalah dengan mengidentifikasi nama-nama pejabat Kesultanan atau Sultan yang mengeluarkan naskah. Kemudian nama-nama tersebut dicocokkan dengan nama tokoh yang tertera di dalam naskah bertanggal, atau dengan mencocokkan nama tokoh tersebut dengan tulisan-tulisan sejarah yang ditulis sebelumnya. Adapun penyelidikan pertanggalan naskah dengan berpedoman pada nama tokoh yang tertera pada stempel atau cap kerajaan tidak dapat dilakukan dikarenakan berbagai alasan. Gallop menyebutkan bahwa satu stempel bisa saja digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama oleh pejabat Kesultanan, dan digunakan terus menerus oleh para suksesor dan keturunan mereka (Gallop, 2009: 284). Misalnya kasus cap Pangiran Suta Wijaya, cap ini digunakan oleh banyak pejabat di Kesultanan Jambi dalam rentang waktu lima puluh empat tahun lamanya. Hal ini bisa saja menimbulkan ketidakakuratan pertanggalan bila hanya berpedoman pada cap yang tertera pada naskah.

Berdasarkan nama pejabat kesultanan yang mengeluarkannya, naskah-naskah tanpa tanggal ini dapat dibagi menjadi 10 kelompok. Pertama, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Suta Wijaya, sebanyak dua naskah (TK 242,

243). Kedua, naskah yang dikeluarkan oleh Sultan Anum Suria (Seri?) Ingalaga bersama dengan Pangeran Temenggung Mangkunegara sebanyak tiga naskah (TK 161, 169, 173). Ketiga, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Temenggung dan Duli Sultan, sebanyak satu naskah (TK 147). Keempat, naskah dikeluarkan oleh Pangeran Temenggung Mangku Negara, sebanyak dua naskah (TK 57, 229). Kelima, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Sukarta Negara, sebanyak tujuh naskah (TK 171, 67, 58, 59, 190, 230, 231). Keenam, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Sukarta Negara dan Duli Sultan, sebanyak satu naskah (TK 107). Ketujuh, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Sukarta Negara dan Pangeran Temenggung, sebanyak satu naskah (TK 54). Kedelapan, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Temenggung Kebul di Bukit, sebanyak dua naskah (TK 169, TK 117). Kesembilan, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Temenggung Nyata Negara Kertapati, sebanyak satu naskah (TK 216). Kesepuluh, naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Nyata Patih Jaya Kebul di Bukit, sebanyak satu naskah (TK 02).

Bila membandingkan tabel 2 dan tabel 3 serta beberapa tulisan sejarah, maka dapat diperkirakan pertanggalan dari naskah-naskah tanpa tanggal di atas. Surat-surat yang dikirimkan oleh Pangeran Sutawijaya ke Kerinci berada pada rentang Rabiul Awal-Zulhijjah 1116 Hijriah atau sekitar 1704-1705 M. Surat-surat tersebut berupa piagam yang diberikan kepada Depati Payung, Depati Atur Bumi dan Depati Intan Gemala (Kumbalo) Bumi sedangkan piagam yang dikirim ke Renah Kemumu berada dalam tahun 1120 H (1709 M). Dengan demikian patut diduga naskah-naskah tanpa tanggal yang dikirim oleh Pangeran Suta Wijaya ke Kerinci juga berada dalam rentang tahun sama yakni antara 1704-1709 M. Menurut Andaya (2016: 254, 284), Pangeran Suta Wijaya adalah gelar dari Mangkubumi (perdana menteri) Sultan Maharaja Batu yang berkediaman di Muara Masumai, Merangin. Gelar ini juga digunakan oleh putra bungsu Maharaja Batu yakni Sultan Anum Suria (seri?) Ingalaga sebelum naik tahta.

Tabel III. Naskah-naskah Kerinci tanpa tanggal serta perkiraan pertanggalannya

Kode Naskah	Dari	Untuk	Jenis Naskah	Perkiraan Pertanggalan
TK 242	Pangeran Sutawijaya	Depati Uda Menggala Dusun Tanah Kampung	Surat Titah	1704-1709 M
TK 243	Pangeran Sutawijaya	Depati Empat Depati Uda Menggala Para Depati di Kerinci	Surat Titah	1704-1709 M
TK 229	Pangeran Temenggung	Depati Sanggaran Agung Depati Suka Beraja Dusun Sanggaran Agung	Piagam	1709-1743

TK 161	Sultan Anum Suria Ingalaga dan Pangeran Temenggung Mangkunegara	Depati Raja Simpanbumi Depati Mangkubumi Raja Simpan Bumi Andum Laksana Tanah Kepala Persembah	Piagam	1743-1783
TK 169	Sultan Anum Suria Ingalaga dan Pangeran Temenggung Mangkunegara	Depati Muda Pamuncak Depati Muncak Negara Depati Mandala Bumi Tanah Kepala Persembah	Piagam	1743-1783 M
TK 173	Sultan Anum Suria Ingalaga dan Pangeran Temenggung Mangkunegara	Depati Intan Depati Mangkubumi Depati Raja Simpan Bumi Dusun Siulak	Piagam	1743-1783 M
TK 107	Pangeran Sukarta Negara dan Sultan	Depati Sekungkung Depati Mendala Depati Kuning Dusun Sekungkung	Piagam	1743-1783 M
TK 54	Pangeran Temenggung dan Pangeran Sukarta Negara	Depati Bungsu Depati Singalaga Depati Negara Mendapo Rawang	Piagam	1743-1783 M
TK 57	Pangeran Temenggung Mangkunegara	Depati Suta Menggala Depati Kuto Keras Dusun Koto Keras	Piagam	1743-1783 M
TK 171	Pangeran Sukarta Negara	Depati Mangkubumi Suta Menggala Dusun Siulak Gedang	Piagam	1743-17783 M
TK 67	Pangeran Sukarta Negara	Depati Gembala Indah Dusun Koto Baru	Piagam	1743-1783 M
TK 58	Pangeran Sukarta Negara	Depati Uda Menggala Dusun Rawang	Surat Titah	1743-1783 M
TK 59	Pangeran Sukarta Negara	Depati Muda Dusun Rawang	Piagam	1743-1783 M

TK 190	Pangeran Sukarta Negara	Depati Mendaro Bumi Mendapo Hiang	Piagam	1743-1183 M
TK 147	Pangeran Sukarta Negara	Depati di Mendapo Semurup	Surat titah	1776-8 M
TK 148	Pangeran Sukarta Negara	Depati di Mendapo Semurup	Surat Titah	1776-8 M
TK 230	Pangeran Sukarta Negara	Depati IV, Depati VIII Helai Kain dan Depati Sanggaran Agung	Surat titah	1776-8 M

Tabel 1. Lanjutan

TK 231	Pangeran Sukarta Negara	Depati IV, Depati Sanggaran Agung, Depati VII, Depati 12, Depati VIII Helai Kain, di Kerinci	Surat Titah	1776-8 M
TK 117	Pangeran Temenggung Kebul di Bukit	Depati Manggumi dan Depati Situwo	Surat titah	1792 M
TK 69	Pangeran Temenggung Kebul di Bukit	Depati Punjung Gedang, Depati Sampurna Gumi Mendapo Rawang	Piagam	1792 M
TK 216	Pangeran Temenggung Nyata Negara Kertapati	Depati Karto Gumi Nyato Negaro Mendapo Seleman	Piagam	Awal abad ke-19 M
TK 02	Pangeran Nyata Patih Jaya Kebul di Bukit	Depati Alam Negeri, Dusun Baru Mendapo Limo Dusun	Piagam	Awal abad ke-19 M
TK 204	Sultan Thaha	Depati Empat dan III Helai Kain	Surat titah	Awal abad ke-19 M

Saat itu, sedang terjadi dualisme kepemimpin di dalam tahta Kesultanan Jambi akibat konflik dua bersaudara terkait masalah suksesi (Andaya, 2016: 226). Konfik tersebut memecah tampuk Kesultanan menjadi dua bagian. Sultan Kiai Gede sebagai Sultan yang diakui pihak Belanda bertahta di Tanah Pilih, Jambi Hilir. Sementara itu, Sultan Sri Maharaja Batu (Pangeran Pringgabaya)

yang didukung oleh penduduk huluan Jambi dan Raja Minangkabau bertahta di Mangunjayo, Jambi Hulu. Pangeran Suta Wijaya yang menyokong Maharaja Batu diangkat sebagai perdana mentri (mangkubumi) dan bertahta di Muara Masumai. Ia juga bertugas sebagai wakil sultan yang mengurusi hubungan Jambi dengan para Depati di Kerinci.

Sayangnya, sokongan Pangeran Sutawijaya terhadap Maharaja Batu tidak lama. Hal ini disebabkan Sultan Maharaja Batu tidak mampu memperbaiki keadaan ekonomi di Jambi Hulu, Sutawijaya kemudian berbalik arah mendukung Sultan Kiai Gede. Berkurangnya dukungan terhadap pemerintahan Maharaja Batu di hulu, telah mendorong rekonsiliasi antara dia dan kakaknya, Kiai Gede. Atas upaya Abraham Patras, pada paruh akhir Tahun 1709 M kedua raja ini akhirnya berdamai (Andaya, 2016: 251). Sultan Kiai Gede diakui sebagai Sultan yang resmi, raja tua. sementara itu, Maharajabatu menjabat sebagai bupati bagi seluruh wilayah Kerajaan, atau dianggap sebagai raja muda.

Setelah rekonsiliasi di tahun 1709 itu, Sultan Kiai Gede tampaknya menegaskan kembali kekuasaannya di wilayah Kerinci. Tercatat ada satu piagam yang dikeluarkan oleh dirinya bersama putranya Pangeran Suria Negara yakni piagam Depati Perbo Singo Dusun Koto Baru Hiang yang berangka tahun 1716 M (1128 H), dan juga satu piagam yang yang dikeluarkan oleh Pangeran Suria Negara untuk Depati Payung di Dusun Pondok Tinggi.

Pangeran Sutawijaya setelah rekonsiliasi itu, secara resmi ditunjuk sebagai wakil raja di Merangin dan sejak saat itu pula ia tidak lagi menggunakan gelar Pangeran Sutawijaya tetapi menggunakan gelar resminya Pangeran Temenggung Mangkunegara. Hal ini terlihat dari teks-teks piagam yang keluar setelah tahun 1709 M. Teks naskah tersebut tidak lagi menyebutkan nama Pangeran Sutawijaya melainkan nama Pangeran Temenggung. Meskipun demikian, ia tetap menggunakan cap/stempel lamanya yang bertuliskan “ini cap Pangiran Suta Wijaya”. Agaknya jabatan tersebut dipegangnya hingga putra tertua Sultan Maharaja Batu naik tahta dengan gelar Sultan Astra pada tahun 1726. Setelah itu, gelar Sutawijaya sekaligus menjabat sebagai Pangeran Temenggung digunakan oleh saudara termuda Sultan Astra pada tahun 1743 M. Selama dua periode Sutawijaya ini ada dua piagam yang dikirim ke Kerinci. Satu piagam memiliki pertanggalan tahun 1131 H (1719-20 M) yakni piagam Depati Intan Muaro Masume di Dusun Siulak Mukai. Sedangkan satu piagam lagi tanpa tanggal adalah piagam untuk Depati-Depati di Dusun Sanggaran Agung.

Pada 25 Januari 1743, Pangeran Sutawijaya yang merupakan saudara termuda Sultan Astra diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Zainuddin atau dikenal pula sebagai Sultan Anum Suria (Seri?) Ingalaga menggantikan kakaknya (Andaya, 2016: 284). Sultan Anum bertahta dari tahun 1743 hingga sekitar tahun 1783[24]. Selama periode tersebut tampaknya ia bersama

24 ANRI, 2015, Overview of Diplomatic letters, lihat www.sejarah-nusantara.anri.go.id.

pejabat Pangeran Temenggung yang baru—Pangeran Temenggung Mangku Negara--telah mengeluarkan tiga piagam ke Kerinci yaitu dua piagam Tanah Kepala Persembah dan satu piagam Tanah Siulak Ke tiga piagam itu tidak memuat pertanggalan, tetapi dengan terteranya nama Sultan Anum Suria Ingalaga di dalam teks, menunjukkan bahwa piagam tersebut dikeluarkan selama pemerintahannya.

Pangeran Temenggung Mangku Negara sebagai pengganti Suta Wijaya belum diketahui hubungan kekerabatan mereka secara jelas. Meskipun di dalam banyak suratnya ia selalu menggunakan cap Pangeran Suta Wijaya. Pangeran Temenggung Mangku Negara memerintah di wilayah Merangin dari tahun 1743 hingga wafatnya tahun 1776. Selama menjabat, Pangeran Mangku Negara dibantu oleh putranya yang bernama Pangeran Sukarta Negara sekaligus sebagai suksesornya. Setelah tahun 1776, jabatan tersebut diambil alih secara penuh oleh Pangeran Sukarta Negara.

Selama rentang tahun 1743-1776, Pangeran Temenggung Mangku Negara telah mengirimkan banyak surat ke Kerinci dengan rincian: pertama, surat yang dikirim atas nama dirinya dan nama Sultan Anum telah terdiri dari lima naskah piagam (TK 147, 148, 161, 169, 173). Kedua, surat yang dikirim atas nama dirinya saja, sebanyak satu surat piagam (TK 57). Ketiga, surat yang dikirim atas nama dirinya dengan anaknya, Pangeran Temenggung Mangku Negara dan Pangeran Sukarta Negara, sebanyak satu naskah piagam (TK 54). Keempat, surat yang dikirim atas nama Pangeran Sukarta Negara dengan menggunakan stempel Pangeran Sutawijaya sebanyak empat naskah (TK 58, 59, 67, 171). Selain itu, ada tiga naskah yang dikirim oleh Pangeran Sukarta Negara tanpa bubuhan cap Pangeran Suta Wijaya (TK 90, 230, 231). Surat-surat yang dikirim atas nama Pangeran Sukarta Negara berakhir pada tahun 1778 M. Salah satu isi dari surat yang dikirim oleh Pangeran Sukarta Negara memberikan kabar duka tentang kematian ayahnya, Pangeran Temenggung Mangku Negara pada tanggal 21 Mei 1776 M. Oleh sebab itu, naskah-naskah yang dikirim atas nama Pangeran Sukarta Negara sendiri tanpa teraan cap Pangeran Sutawijaya diperkirakan dikirim antara tahun 1776-1778 M.

Surat-surat berikutnya yang dikirim ke Kerinci dikeluarkan oleh pejabat yang menggunakan gelar Pangeran Temenggung Kebul di Bukit pada tahun 1792 M. Surat-surat itu adalah piagam Dusun Kumun dan piagam Dusun Cupak. Dua surat tanpa tanggal yakni TK 69 dan 117 diduga juga dikeluarkan pada periode ini karena dikeluarkan atas nama Pangeran Temenggung Kebul di Bukit. Pada masa ini, tahta Kesultanan Jambi diduduki oleh Sultan Mas'ud bin Ahmad Badrudin (1792-1794).

Kiriman surat berlanjut pada tahun 1794, berupa surat titah yang dikirim oleh Pangeran Suria Kesuma dan Pangeran Ratu sebagai penerus dari Sultan Mas'ud bin Ahmad Badrudin yang telah wafat. Naskah ini berisi pemberitahuan kepada Depati Empat-Selapan Helai Kain bahwa Pangeran Ratu kini telah menjadi penerus Sultan yang wafat disertai dengan kutipan ayat dari Alqur'an. Selain itu, isi surat juga memuat titah raja kepada semua haji, syeikh dan faqih yang ada

di Kerinci untuk membantu Depati dalam menyelesaikan perkara hukum karena mereka lebih memahami hukum Syarak (Syariat Islam).

Surat-surat terakhir yang dikirim oleh pihak Jambi ke Kerinci berada pada periode 1234 H hingga naik tahtanya Sultan Thaha sekitar pertengahan abad ke 19 M. Naskah TK 44 bertahun 1234 H/1819 M dikeluarkan oleh Pangeran Citra Puspa Jaya Kebul di Bukit kepada Depati Sungai Laga Pertama Tanah Kadipan dari Dusun Rawang berupa naskah *piagam*. Dua naskah piagam lain tanpa tanggal yang dikirim pada periode ini adalah piagam Depati Alam Negeri dan Depati Karta Gumi.

Naskah TK 207 yang dikeluarkan oleh Sultan Thaha kepada Depati Empat dan Depati III Helai Kain. Isi surat berupa perintah Sultan kepada para Depati untuk datang segera ke Jambi karena Sultan hendak menikahkan anaknya yang bernama Pangeran Depati. Naskah ini, juga menginformasikan bahwa salah satu regalia hubungan Jambi dan Kerinci yaitu kelakati (Kacip Pinang) telah dihilangkan oleh Depati di Kerinci. Surat lain yang diduga dikirimkan oleh Sultan Thaha adalah TK 167 daan 168. Surat tersebut berisi perintah Sultan kepada Depati Tata Negara, Depati Riyam, Depati Atur Bumi dan Depati Uda Menggala untuk datang ke Jambi menghadap Sultan karena saat itu negeri Jambi telah rusak akibat perang. Naskah surat ini diawali klausa peringatan yang berbunyi *"barang siapa menjadikan rebut rampas tuwah parang itulah yang mengubahkan setia…"* (Barang siapa yang mengambil keuntungan dari perang itulah yang merusak sumpah setia).

Naskah-naskah dari Kesultanan Inderapura yang ada di Kerinci, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan naskah Jambi. Hanya ada sebelas naskah yang ditemukan hingga kini, dengan rincian enam naskah memuat pertanggalan dan lima naskah lainnya tanpa pertanggalan (Lihat tabel 4). Naskah-naskah bertanggal umumnya dibuat pada abad ke-19 M. Naskah tertua adalah naskah TK141 yang ditemukan di Kemantan berangka tahun 1236 Hijriah (1831 M), sedangkan naskah termuda ditemukan di Sungai Penuh (TK 08) berangka tahun 1923 M.

Naskah-naskah tanpa tanggal dari Inderapura sangat sulit untuk diperkirakan pertanggalannya meskipun di dalamnya disebutkan gelar Sultan yang mengeluarkannya. Hal ini dikarenakan penggunaan gelar yang sama oleh para raja dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya raja yang menggunakan gelar Sultan Muhammadsyah. Gelar ini disebutkan oleh Kathirithamby-Wells ayahnya Tuanku Berdarah Putih, pendiri Kesultanan Inderapura (Kathirithamby-Wells, 1976: 66). Gelar ini juga muncul sekitar tahun 1660 M, digunakan oleh putra Sultan Muzaffar Syah sekaligus sebagai suksesornya (Kathirithamby-Wells, 1976:72). Gelar Muhammadsyah muncul kembali pada tahun 1716-1728, gelar ini digunakan oleh putra Sultan Galumat, sebagai penerus tahta Kerajaan Inderapura di wilayah Anak Sungei (Muko-Muko), Bengkulu (Kathirithaby-Wells, 1976: 83; Znoj, 1998: 107). Di dalam naskah-naskah Kerinci gelar Muhammadsyah muncul

pada surat-surat yang dikirim pada sekitar tahun 1831 M, juga muncul seabad kemudian yakni pada tahun 1923 M (lihat tabel 4). Oleh sebab itu, ketika naskah tanpa tanggal menyebutkan nama sultan yang mengeluarkannya, kita tidak bisa langsung menentukaan perkiraan pertanggalannya tanpa penyelidikan lanjutan.

Naskah-naskah tanpa tanggal tersebut, di antaranya memuat nama Sultan Pesisir Barat (TK 248), Seri Sultan Muhammad Syah (TK 246), Tuanku Inderapura (TK 204) dan Yang Dipertuan Sultan Inderapura (TK 183). Dua naskah yakni TK 248 dan 246 mungkin saling berkaitan karena ditujukan kepada orang yang sama yaitu Kiai Depati Uda Menggala di Tanah Kampung serta isinya juga saling terkait. Naskah TK 248 (Lihat halaman 51-52) berisi permintaan berdagang dan keberlanjutan perjanjian yang telah dibuat oleh sultan sebelumnya. Di dalam surat tersebut Sultan Pesisir Barat menganggap Kiai Uda Menggala sebagai pamannya dan sebagai anak tertua dari Sultan sebelumnya. Sementara itu di dalam naskah TK 246, Sultan Muhammadsyah menganggap Kiayi Uda Menggala sebagai saudaranya disertai dengan pemberitahuan telah hancurnya Inderapura dan kini ia menjadi raja pengganti tahta saudaranya yang meninggal.

Gelar Sultan Pesisir Barat ini, digunakan di Muko-muko dan di Inderapura, keduanya merupakan wilayah dari Kesultanan Inderapura. Di Muko-muko, Sultan Pesisir Barat merupakan Raja yang bertahta pada tahun 1752-1789 M. Ia merupakan anak dari Sultan Gendam Syah (1728-1752) sekaligus memiliki ikatan kekerabatan dengan Sultan Kecil Muhammadsyah yang bertahta di Muko-muko pada tahun 1716-1728 (Znoj, 1998: 107). Di Inderapura, gelar Sultan Pesisir Barat muncul pada tahun 1696 M sebagai pengganti raja sebelumnya Sultan Mansur Syah (1689-1696). Sultan Pesisir Barat ini merupakan cucu dari saudara perempuan Sultan Muhammadsyah (1660-1689). Gelar Sultan Pesisir Barat ini, terus digunakan oleh suksesornya hingga tahun 1790 M.

Kekacauan kronologi urutan raja-raja yang bertahta dengan gelar yang sama ini dan kurangnya tulisan sejarah yang membahas tentang Kesultanan Inderapura, semakin menyusahkan dalam memperkirakan pertanggalan dua surat yang mengatasnamakan Raja Ahmadsyah dan Sultan Pesisir Barat. Namun saya berasumsi bahwa dua raja ini bertahta pada akhir abad ke-18 M hingga awal abad ke-19 M. Berdasarkan dua naskah ini diketahui bahwa Raja Ahmadsyah adalah satu generasi dengan Kiai Depati Uda Menggala sehingga sang Sultan menganggapnya sebagai saudara, sedangkan Sultan Pesisir Barat menganggap Uda Menggala sebagai pamannya yang berarti ia satu generasi di bawah Kiai Depati Uda Menggala. Oleh sebab itu, dapat diasumsikan Sultan Pesisir Barat adalah suksesor dari Raja Ahmadsyah yang sebelumnya juga mengirimkan surat kepada Depati Uda Menggala. Dua surat lain (TK 183 dan 246) yang mengatasnamakan Tuanku Inderapura atau Yang Dipertuan Sultan Inderapura lebih rumit lagi untuk diperkirakan pertanggalannya. Saya mengira bahwa dua surat ini dikirim oleh sultan yang sama. Sultan ini bertahta sebelum Sri Sultan Muhammadsyah Johan Berdaulat yang berkirim surat pada tahun 1831 M, atau bertahta setelah Sultan

Pesisir Barat yang berkirim surat kepada Kiai Uda Menggala. Singkat kata, saya berpendapat bahwa surat-surat yang dikirim oleh Kerajaan Inderapura ke Kerinci berada dalam kurun waktu akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20 M.

Tabel IV. Naskah-naskah dari Kesultanan Inderapura di Kerinci

Kode Naskah	Dari	Untuk	Isi Naskah	Pertanggalan
TK 7	Kerajaan Inderapura	Depati-Depati di Sungai Penuh	Cerita tentang Sultan Inderapuran dan Pangerang Temenggung	-
TK 8	Sultan Muhammadsyah	Depati-Depati di Sungai Penuh	Keterangan silsilah	2 Desember 1923
TK 86	Merah Muhammad Baki/ Tuanku Sultan Firmansyah	Kiyai Depati Empat, Pemangku Lima, Selapan Helai Kain	Aturan tentang pengirinan surat dari Inderapura ke para Depati di Kerinci	29 Mei 1888 M/ 18 Ramadhan 1305 H
TK 87	Tuanku Sultan Firmansyah	Pemangku Sukarami Bandar Inderapura, Mangku Sukarami Hitam, Mangku Sukarami Tuah, Dipati Muda Temenggung Dipati Menggala Cahaya Dipati, Mendapo Rawang	Penganugerahan hadiah sebuah gong kepada para Pemangku dan Depati tersebut	15 Ramadhan 1305 H/26 Mei 1888 M
TK 88	Tuanku Sultan Firmansyah	Pemangku Sukarami Bandar Inderapura	Pemberian surat cap Sultan Firmansyah kepada Mangku Sukarami Bandar Inderapura	01 Rabiul Akhir 1290 M/ 28 Mei 1873 M
TK 204	Tuanku Inderapura	Depati Empat, Pemangku Lima	Surat permintaan bantuan	-

TK 140	Seri Sultan Muhammadsyah Johan Berdaulat	Kiai Depati Raja Muda Pangeran	Riwayat hubungan antara Raja Muda dan Sultan Inderapura terdahulu	23 Ramadhan 1246 H/08 Maret 1831 M
TK 141	Seri Sultan Muhammadsyah Johan Berdaulat	Depati Bertiga, Menteri Berenam, Negeri Karamantan Darussalam	Perihal pengangkatan Baginda Raja Muda Tua sebagai Raja Pangeran	20 Ramadhan 1246/05 Maret 1831 M
TK 183	Yang Dipertuan Sultan Inderapura, Orang Kaya Serian dan Orang Kaya Petor Muda	Depati Bertiga, Mentri Delapan, Kiai Raja Simpan Bumi di dalam Negeri Semurup	Surat permintaan berdagang	-
TK 246	Yang Dipertuan Raja Ahmadsyah	Kiai Depati Uda Menggala, Dusun Tanah Kampung	Surat permintaan berdagang	-
TK 248	Seri Sultan Pesisir Barat	Kiai Depati Uda Menggala, Dusun Tanah Kampung	Surat permintaan berdagang	1752-1789 M

Bab IV
Dinamika Relasi Orang Kerinci dengan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya

Pada abad ke 14 M, terjadi pertemuan agung antara para penguasa Kerinci yang bergelar Dipati dengan Maharaja Dharmasraya di sebuah Paseban yang berada di Bumi Palimbang. Pertemuan itu digelar untuk merumuskan undang-undang yang akan diberlakukan di Kerinci. Undang-undang itu kemudian ditulis oleh Dipati Kuja Ali dan dibukukan pada 31 helai *daluang*. Kitab undang-undang itu dikenal sebagai Kitab Nitisarasmuscaya atau Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah.

Keberadaan kitab undang-undang ini menyiratkan bahwa sejak era klasik orang Kerinci dianggap sebaga sekutu penting oleh pihak Kerajaan. Kerinci yang kaya sumber daya alam seperti emas dan hasil hutan, tentu saja menarik minat bagi para penguasa Malayupura. Apalagi mereka telah mendeklarasikan diri sebagai penguasa tanah emas (Istiawan, 2006). Ambisi ini telah mendorong mereka untuk menjalin relasi dengan penguasa Kerinci yang menguasai lembah subur di sebalik pegunungan barat daya dari pusat kekuasaan mereka.

Sebaliknya orang Kerinci tampaknya juga mendambakan sosok raja yang tidak ada dalam kehidupan politik mereka. Selayaknya para penutur Austronesia yang masih menjalankan tradisi kuno mereka. Tiap komunitas dan tiap permukiman menjalankan pemerintahan secara mandiri. Tiap komunitas memiliki aturan hukum masing-masing. Kondisi semacam ini memungkinkan tingginya konflik antarkomunitas apalagi mereka hidup di dalam bentang alam yang sama yakni, di sepanjang Lembah Kerinci. Pada suatu titik, mereka sadar bahwa mereka memerlukan penguasa yang lebih besar kekuatan dan pengaruhnya dibandingkan mereka. Sang penguasa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah penguasa Malayupura. Sang penguasa diharapkan mampu memberikan hukum yang dipatuhi oleh semua komunitas yang bermukim di Lembah Kerinci untuk memperbaiki kondisi sosial mereka. Puncak dari relasi itu adalah sebuah pertemuan agung di Bumi Palimbang.

Setelah pertemuan agung yang melibatkan orang-orang Kerinci dengan Maharaja Dharmasraya itu, hampir tidak ada lagi sumber sejarah tentang orang Kerinci. Kurun abad ke-15 hingga abad ke-16 M sering dianggap sebagai abad-abad kekosongan sumber sejarah di mana-mana tempat di Sumatra. Yakub (1987) menyebutkan bahwa masa kekosongan sumber sejarah ini diisi oleh cerita dan peristiwa yang bersumber dari *hikayat, kaba, tambo* dan *babad*. Hikayat-hikayat ini dipercaya menjadi titik tolak dari berdirinya pemerintahan bercorak Islam di Sumatra.

Di wilayah Minangkabau, pada masa ini muncullah sebuah *kaba* yang disebut sebagai Kaba Cindur Mato (lihat. Syamsuddin Rajo Endah, 2008). Kaba ini bercerita tentang keluarga Kerajaan yang beristana di Pagaruyung, Ulak Tanjung Bungo. Dikisahkan saat itu, Pagaruyung dikuasai oleh raja perempuan bernama Bundo Kanduang, ia memiliki seorang anak bernama Dang Tuanku dan seorang anak angkat bernama Cindur Mato. Kisah ini berlanjut dengan pertentangan antara Bundo Kandung dan saudara lelakinya Rajo Mudo, seorang raja yang bermukim di Ranah Sikalawi. Pertentangan ini terjadi akibat pemutusan pertunangan antara Dang Tuanku dan Puti Bungsu secara sepihak oleh Rajo Mudo yang juga ayah dari Puti Bungsu. Bundo Kanduang mengutus anak angkatnya Cindur Mato ke Sikalawi untuk menyelidiki perkara itu dan diketahui adanya peran dari seorang pangeran bernama Imbang Jayo, putra Rajo Tiang Bungkuk yang berkuasa di Sungai Ngiang.

Diceritakan bahwa Imbang Jayo berhasil menaklukan Ranah Sikalawi dan meminta Rajo Mudo menikahkannya dengan sang putri jikalau tidak infin kerajaannya binasa. Rajo Mudo terpaksa memenuhi permintaan Imbang Jayo tersebut. Namun saat hari pernikahan berlangsung, Cindur Mato secara diam-diam membawa Puti Bungsu ke Pagaruyung untuk dinikahkan dengan Dang Tuanku. Imbang Jayo dengan marahnya bersama ratusan pasukan mengejar Cindur Mato hingga ke Pagaruyung. Namun ia ditangkap sebagai perusuh dan dibunuh di dalam sebuah persidangan oleh para pembesar kerajaan. Mengetahui sang anak telah dihukum mati secara tidak adil, Tiang Bungkuk menyerang Pagaruyung hingga takluk. Cindur Mato dijadikan budak dan tawanan di Sungai Ngiang. Suatu ketika, Cindur Mato mengetahui rahasia kekuatan Tiang Bungkuk dan berhasil membunuhnya. Cindur Mato kemudian diangkat menjadi raja di wilayah kekuasaan Tiang Bungkuk.

Sosok Cindur Mato dalam hikayat di Kerajaan Inderapura dipercaya merupakan leluhur bagi raja mereka. Mereka percaya bahwa Cindur Mato adalah raja yang memiliki kekuatan supernatural sekaligus ayah dari Tuanku Darah Putih, pendiri Kesultanan Inderapura. Hubungan antara Cindur Mato dan Dang Tuanku sebagai mana disebutkan di dalam *kaba* ini menjadi landasan yang mengikat hubungan para raja yang bertahta di Pagaruyung dan para raja yang duduk di istana Inderapura.

Di Jambi, hikayat yang serupa juga berkembang bahkan memiliki dua versi. Versi pertama tertuang di dalam Hikayat Negeri Jambi (Kukushkin, 2004). Diceritakan bahwa seorang Pangeran dari Turki bernama Datuk Paduko Berhalo yang berasal dari Negeri Stambul (Istambul). Dalam perjalanannya, ia terdampar di sebuah pulau bernama Pulau Berhala antara Pulau Singkep dan Muara Sungai Batanghari. Di sana ia membangun permukiman baru dan kemudian menikahi seorang putri Demang Lebar Daun, penguasa Palembang. Setelah wafat, anaknya yang bernama Datuk Paduka Ningsun melaksanakan wasiat sang ayah untuk mendirikan permukiman baru di wilayah daratan, permukiman itu bernama Ujung

Jabung. Di tempat baru itu, Datuk Paduka Ningsun terus mengirimkan upeti ke kerajaan Mataram Jawa. Pengiriman upeti itu berlanjut hingga ia digantikan anaknya Orang Kaya (Rangkayo?) Hitam. Orang Kayo Hitam kemudian memindahkan lokasi huniannya ke arah hulu tepatnya ke Muara Simpang.

Selama bertahta, Orang Kayo Hitam mulai berhenti mengirim upeti ke Mataram Jawa. Ia pergi ke Jawa untuk melawan perintah raja, di sana ia mendapatkan keris yang diberi nama Keris Siginjai. Sekembalinya dari Jawa ia mulai menaklukkan kampung-kampung di wilayah hulu hingga kekuasaannya semakin meluas. Sayangnya Orang Kaya Hitam tidak memiliki keturunan sehingga setelah wafat ia digantikan oleh tiga saudaranya yang lain.

Orang Kaya Mamak sebagai salah satu saudaranya yang termuda, saat kembali dari Jawa untuk menaiki tahta wafat di tengah perjalanan. Kelima anak Orang Kaya Mamak melaksanakan wasiat ayahnya untuk memindahkan lagi ibukota kerajaan ke arah hulu dan menemukan tempat bernama Rengas Pendek. Di sana mereka memilih saudara termuda mereka sebagai raja baru yang diberi gelar Pangeran Rengas Pendek.

Suatu ketika, tersebutlah seorang putri dari Yang Dipertuan Raja Minangkabau yang bernama Putri Pinang Masak. Ia berkeinginan meninggalkan Minangkabau untuk mendirikan permukiman baru ke wilayah Jambi. Mendapat kabar yang demikian, Pangeran Rengas Pendek mengirim utusan untuk menemui sang putri. Setelah itu, sang Pangeranpun menemui Putri Pinang Masak. Pertemuan tersebut berujung dengan pernikahan mereka. Mereka dikurniai empat orang Anak.

Setelah wafat, anak-anak Pangeran Rengas Pendekpun mengikuti apa yang dilakukan pendahulu mereka. Mereka memindahkan ibukota ke arah hulu. Mereka juga melanjutkan ke ekspansi ke daerah hulu Sungai Batanghari hingga mendekati wilayah Minangkabau. Mendengar tentang berita penaklukan, Yang Dipertuan Minangkabau segera menghimpun pasukan dan pergi ke wilayah Tanjung Simalidu. Setibanya di sana, Yang Dipertuan menyadari bahwa yang melakukan ekspansi itu adalah cucu-cucunya sendiri. Oleh sebab itu, secara damai kedua belah pihak menentukan batas-batas kekuasan dan wilayah kerajaan serta dengan disaksikan oleh Yang Dipertuan, anak dari Pangeran Rengas Pandak memilih saudara termuda mereka sebagai raja yang baru bergelar Panembahan di Bawah Sawa.

Dalam perjalanan pulangnya, Panembahan di Bawah Sawa mengumpulkan makanan dari wilayah-wilayah jajahan dan dikirim dengan ratusan rakit yang terbuat dari Batang Pisang. Rakit itu berhenti di sebuah tempat bernama Tanah Pilih. Di tempat itu juga, Panembahan di Bawah Sawa naik ke daratan. Di sana ia juga bertapa selama tujuh hari tujuh malan untuk mendapatkan wangsit dari para leluhurnya. Di dalam pertapaannya itu, dua orang roh leluhur menemui Panembahan. Ia memberi pakaiannya kepada roh leluhur tersebut dan para leluhur memberinya barang pusaka berupa meriam, gong dan tombak. Setelah itu, bersama rakyatnya ia mulai membangun benteng dan kota di Tanah Pilih.

Panembahan di Bawah Sawa sendiri memiliki dua orang anak. Seorang putri yang menikahi Raja Johor dan seorang putra yang menjadi raja bernama Sultan Agung Seri Ingalaga.

Versi yang lebih masyhur dan diterima oleh banyak kalangan termasuk kalangan sejarawan lokal di Jambi adalah versi kedua. Seperti yang ditulis oleh Usman Meng (1996) dan Chatib dkk. (2011), tulisan mereka didsari dari sebuah naskah yang berjudul *Sadjarah Kerajaan Djambi* yang ditulis ulang oleh Ngebi Umar Sutodilogo sekitar tahun 1358 Hijriah (1939 M). Versi ini memiliki isi cerita yang sedikit berbeda dengan versi yang pertama. Diceritakan bahwa Datuk Paduka Berhala yang juga bergelar Ahmad Salim menjadi raja di wilayah Ujung Jabung. Ia kemudian menikahi seorang putri bernama Putri Selaro Pinang Masak, anak raja Minangkabau yang bernama Rajo Bramah. Mereka dikurniai empat orang anak yaitu Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Kedataran, Orang Kayo Gemuk dan Orang Kayo Hitam. Orang Kayo Hitam dalam hikayat ini, juga diceritakan menjadi raja yang menghentikan pengiriman upeti ke Jawa Mataram.

Meskipun memiliki dua versi yang berbeda. Dua hikayat ini pada hakikatnya menceritakan hal yang sama yakni asal usul penguasa dan pendiri Kesultanan Jambi. Versi pertama menghubungkan bahwa para Raja Jambi sebagai bangsawan yang memiliki darah Turki Usmani, Palembang, Minangkabau serta memberitakan adanya hagemoni kerajaan Jawa yang mereka sebut sebagai Jawa Mataram saat embrio Kesultanan mulai muncul. Sementara itu, versi yang kedua jauh lebih sederhana. Para Raja Jambi dianggap sebagai keturunan bangsawan dari Turki Usmani dan dari Pagaruyung.

Satu-satunya catatan asing di dalam periode kekosongan adalah catatan perjalanan seorang Portugis bernama Tome Pires yang pernah mengunjungi di Sumatra pada paruh awal abad ke 16 M. Catatan Tome Pires ini, tampaknya membenarkan apa yang disebut oleh dua versi hikayat di atas. Pires mencatat bahwa Jambi kala itu dikuasai oleh penguasa dari Jawa yang bernama Pate Rodim bahkan perilaku masyarakatnya mendekati perilaku orang Jawa dibandingkan perilaku orang Melayu yang pernah dijumpainya.

Tak jauh berbeda dengan Jambi dan Minangkabau, di Kerinci *tembo-tembo* baik yang telah ditulis maupun tutur lisan mewarnai periode kekosongan sejarah ini bahkan beberapa ceritanya memiliki kesamaan dengan hikayat yang beredar di Jambi maupun di Minangkabau. Orang-orang Kerinci yang bermukim di wilayah Sungai Penuh, Rawang dan Tanah Kampung, mengakui diri mereka sebagai keturunan leluhur perempuan yang berasal dari Tanah Pariangan Padang Panjang, suatu tempat di kaki Gunung Merapi pedalaman Minangkabau sekaligus tempat ditemukannya banyak prasasti peninggalan Adityawarman.

Sebagaimana yang ditulis pada tanduk-tanduk sakral mereka (TK 37-40, TK 19-20; Westenenk, 1922). Diceritakan bahwa Puti Unduk Pinang Masak—nama yang memiliki kemiripan dengan Puti Pinang Masak dalam hikayat Jambi—bersama sepupunya Puti Dayang Beranai meninggalkan Tanah Pariangan Padang Panjang karena pertengkaran dengan saudara lelaki mereka yang bernama Patih

Sebatang. Puti Unduk Pinang Masak menuju ke selatan ke arah Gunung Berapi (Gunung Kerinci). Mereka tiba di sebuah tempat yang berada di kaki Gunung Kerinci yang di dekatnya juga terdapat sebuah danau bernama Danau Bento. Di lokasi itulah mereka membangun permukiman yang diberi nama Koto Limau Manis. Suatu ketika, datanglah lelaki bernama Saindah ke tempat itu dan Puti Unduk Pinang Masak kemudian menikahinya. Suatu hari, Puti Unduk Pinang Masak mencari kutu si suami dan secara tidak sengaja ia menjumpai parut bekas luka dikepalanya. Si suami menerangkan bahwa luka itu akibat dipukul perkakas besi oleh saudara perempuannya ketika ia masih kecil. Mendengar hal tersebut, sang Putri begitu terkejut, tanpa ia sadari, ia telah menikahi saudara kandungnya sendiri. Suatu perbuatan yang sangat amoral dalam pandangan masyarakat adat Kerinci. Karena malunya itu, Puti Unduk Pinang Masak meninggalkan Koto Limau Manis bersama sepupunya Dayang Beranai. Sampai di sini, cerita mengenai Puti Unduk Pinang Masak berakhir dan diteruskan dengan cerita sepupunya Dayang Berani.

Dalam perjalanan migrasi mereka, Dayang Berani menjumpai seorang ulama di sebuah permukiman bernama Koto Kunyit. Ulama tersebut bernama Tuan Syaikh Samilullah atau dikenal pula dengan panggilan Siak Lengih. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai sembilan anak. Anak-anak keturunan mereka inilah yang kemudian menjadi para Depati penguasa di wilayah Mendapo Rawang, Limo Dusun dan Tanah Kampung.

Selain *tembo* mengenai Puti Unduk Pinang Masak, kehadiran sosok Tiang Bungkuk sebagaimana yang terdapat di dalam kaba Cindur Mato, juga terdapat dalam legenda masyarakat Kerinci. Yakin (1986) menceritakan tentang Tiang Bungkuk, seorang penguasa di sebuah permukiman bernama Tanjung Muara Sekiau di pinggir Sungai Batangmerangin sebelah selatan Lembah Kerinci. Sosok ini menentang hadirnya kekuasaan Jambi di wilayah kekuasaannya. Pihak Jambi mengalami kewalahan dalam menangani Tiang Bungkuk, bahkan empat puluh utusan (jenang empat puluh) yang mereka kirim semuanya dibunuh oleh Tiang Bungkuk. Hingga pada akhirnya, pihak kerajaan mengundang Patih Jaya dari Mataram untuk kembali ke kerajaan bapaknya di Jambi.

Patih Jaya diceritakan sebagai anak Orang Kayo Hitam dari selirnya Ratu Mas Pemalang dari Mataram. Patih Jaya juga merupakan leluhur bagi para suku Kedipan, yakni para bangsawan Jambi yang bermukim di wilayah Merangin. Patih Jaya berhasil mengalahkan Tiang Bungkuk dengan tipuan baju yang dapat mengikat dengan sendirinya. Setelah menumpas Tiang Bungkuk, wilayah di Selatan Kerinci menjadi bagian wilayah Jambi. Patih Jaya kemudian ditabalkan menjadi Pangeran Temenggung Kebul di Bukit dengan jabatan Mangkunegara di sebuah bukit suci yang disebut Bukit Siguntang-Guntang dan atas jasanya itu, ia beserta anak keturunannya dijadikan sebagai wakil raja di wilayah hulu.

Nama Tiang Bungkuk juga disebut di dalam teks naskah *tembo* yang ditulis pada tanduk suci. Naskah ini disimpan di Dusun Sungai Tutung oleh keturunan

Depati Riyam (TK 136). Teks *tembo* itu menyebutkan *"....adapun paratama dipati hiyalah dipati riyam dingan dipati lantu kunin hiyalah tiyang bingkuk paratama baraja jannang"* (Adapun yang pertama menjadi Depati adalah Depati Riyam dan Depati Lantu Kuning, dan adalah Tiang Bungkuk yang pertama beraja kepada Jenang). Teks *tembo* ini seolah-olah membenarkan kehadiran tokoh Tiang Bungkuk di masa lalu sebagai orang yang pertama kali tunduk kepada *jenang* (utusan Jambi).

Pada hakikatnya, hikayat-hikayat di atas memiliki kesamaan pola dan struktur di beberapa bagian bahkan memiliki keterkaitan satu sama lain. Pertama, di dalam hikayat tersebut diceritakan bahwa leluhur para raja maupun depati berasal dari Pagaruyung ataupun dari Tanah Pariang Padang Panjang. Tempat-tempat ini berada dalam suatu kawasan yang sama dan secara arkeologis kaya akan tinggalan pada masa klasik (Hindu-Buddha), terutama tinggalan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa para penguasa di masa lalu mengaitkan diri mereka sebagai keturunan dari bangsawan Malayupura sekaligus sebagai kelanjutan historis dari kerajaan tersebut.

Kedua, dimasukkannya simbol-simbol Islam di dalam hikayat dan *tembo*. Di Jambi, disebutkan bahwa para raja mereka berasal dari leluhur bernama Datuk Paduka Berhala atau Ahmad Salim dari negeri Istambul yang menikahi seorang putri bangsawan Pagaruyung. Istambul sendiri merupakan lokasi dari ibukota kekhalifahan Turki Usmani sejak abad ke-15 M. Narasi serupa juga terdapat di dalam salah satu tembo Kerinci yang menceritakan bahwa mereka berasal dari pernikahan antara leluhur perempuan yang berasal dari Pariangan Padang Panjang dengan seorang ulama yang disebut Tuan Syaikh Samilullah atau Siaklengih. Di Inderapura, raja yang pertama mendirikan kesultanan diberi gelar Darah Putih yang memiliki makna simbolis bahwa raja tersebut adalah keturunan para ulama. Hikayat-hikayat ini menandakan awal baru penyusunan sejarah lokal, di mulai dari para leluhur yang telah memeluk Islam. Sebuah usaha untuk memutuskan hubungan sejarah dengan para leluhur dari masa Pra-Islam meskipun secara tersirat diakui pula bahwa leluhur perempuan mereka berasal dari wilayah bekas pusat pemerintahan kerajaan Malayupura di masa lalu.

Ketiga, para penguasa hulu dan hilir serta pejabat tinggi dan bawahan mengaitkan diri mereka satu sama lain bahwa mereka masih memiliki hubungan kekerabatan paling tidak leluhur mereka berasal dari satu tempat yang sama. Hal ini menjadi sebuah legitimasi bagi mereka untuk menjalin sebuah hubungan persekutuan. Para Sultan pun, mengklaim diri mereka sebagai keturunan bangsawan yang berasal dari berbagai tempat agar mereka mendapat dukungan dan kepercayaan dari rakyat untuk menduduki tahta kerajaan. Pola-pola semacam ini berlaku merata baik bagi para penguasa di wilayah pusat dan pinggiran.

Orang-orang Kerinci-pun menggunakan legitmasi silsilah sebagai salah satu cara menjalin relasi politik baik dengan Jambi maupun dengan Inderapu-ra. Meskipun demikian hubungan segitiga itu sangat dinamis, susah ditebak dan

dipenuhi oleh banyak intrik. Berdasarkan tembo dan hikayat, permulaan hubungan Kerinci dengan Inderapura dan Jambi terjadi melalui peristiwa yang sangat berbeda satu sama lain.

A. Sebuah Permulaan: Penaklukan dan Perjanjian Sakral

Keruntuhan Malayupura pasca pertemuan agung di Bumi Palembang secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi politik di Lembah Kerinci. Para Dipati kembali pada kebiasan lama mereka, menjalankan suatu pemerintahan secara mandiri mengikuti hukum yang diwariskan para leluhur mereka sejak dulu kala laiknya komunitas Austronesia yang ajek di pedalaman. Mereka hanya mengurusi komunitas sendiri yang terikat ikatan geneologis. Kadangkala saling bersaing untuk mengklaim lahan dan hutan untuk dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan, di masa lalu Malayupura juga membebaskan mereka untuk tetap menjalankan tradisi kuno tersebut. Para Depati dan menteri masih menempati kedudukan tertinggi di dalam komunitasnya. Orang-orang yang tidak mau mematuhi mereka di denda dengan sejumlah pembayaran emas.

Di lain pihak jauh di Pesisir Timur, embrio Kesultanan Jambi mulai berkembang. Orang Kayo Hitam mulai mencoba melepaskan diri dari hegemoni Jawa di Pantai Timur. Dia juga memulai melakukan ekspansi ke pedalaman melalui jalur sungai yang terhubung ke Sungai Batanghari. Sebuah kerajaan yang mulai tumbuh dan berkembang membutuhkan sebuah pengakuan dari para penguasa kecil sekitarnya. Tanpa itu semua, Jambi tidak akan diakui sebagai kerajaan superior lain yang membentang di Sumatra hingga ke Jawa. Ambisi dan cita-cita Orang Kayo Hitampun terus dilanjutkan oleh para keturunannya.

Tentu saja jalan untuk menggapai ambisi tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penguasa-penguasa lokal di daerah hulu masih enggan menyatakan diri bertakluk kepada Jambi. Para penantang ini disimbolkan dengan gelar “Tiang Bungkuk” (tiang yang bengkok, tidak lurus), kadangkala gelar tersebut ditambah dengan frasa *mendago rajo (*menentang raja). Simbol ini disematkan bagi penguasa seorang yang bermukim di pinggiran sungai Batangmerangin, tepat di kaki perbukitan Barisan sebelah barat Jambi sekaligus sebagai pintu masuk ke Lembah Kerinci.

Tiang Bungkuk menolak untuk mengakui kekuasaan Jambi di wilayahnya yang saat itu masih bernama Tanjung Muara Sekiau. Sekitar empat puluh utusan telah dikirim untuk menangkap Tiang Bungkuk tetapi hasilnya sia-sia belaka. Dengan siasat cerdik dari seorang pangeran bernama Patih Jaya, Tiang Bungkuk berhasil ditangkap dan wilayahnya berhasil dikuasai. Satu persatu permukiman kecil di sepanjang Batangmerangin mulai dikuasainya. Di mulai dari permukiman bernama Tamiai, terus ke arah hulu menuju Pulau Sangkar, Pengasi dan berakhir di Sanggaran Agung. Semua depatinya menyatakan takluk kepada Jambi. Jambi mulai mengatur mereka dengan membentuk ke empat permukiman itu menjadi wilayah persekutuan depati yang bernama Tanah Depati Empat.

Namun demikian, para budayawan lokal tampaknya memiliki interpretasi yang berbeda terhadap legenda ini. Mereka mengatakan bahwa seluruh lembah Kerinci berhasil dikuasai oleh Patih Jaya atau Pangeran Temenggung Kebul di Bukit dalam suatu waktu (Yakin, 1986: 11-12). Penafsiran kontroversial ini, tentu saja tidak didukung oleh bukti-bukti naskah kuno yang ditemukan di berbagai tempat di Kerinci. Apalagi secara teoritis, menurut Andaya, populasi penduduk di Dataran Tinggi Jambi (di hulu) jauh lebih padat dan permukimannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pusat kerajaan di hilir, ditambah lagi jarak yang cukup jauh serta kesulitan jalur perhubungan keduanya. Hal ini membuat penguasaan seluruh Kerinci lewat jalur peperangan menjadi hal yang sangat mustahil dilakukan oleh Jambi yang saat itu mulai tumbuh dan berkembang.

Perlulah disadari bahwa penaklukan itu adalah langkah awal yang memulai proses panjang hubungan antara orang Kerinci dengan pihak Kesultanan Jambi. Agaknya setelah mencapai hulu dari Sungai Batangmerangin yakni sebuah tempat bernama Sanggaran Agung atau Tanjung Kerbau Jatuh di pinggir Danau Kerinci. Pangeran Temenggung tersadar bahwa penaklukan dengan cara peperangan tidak dapat lagi dilanjutkan karena masih banyaknya perkampungan di bagian baratlaut Lembah Kerinci. Cara-cara yang lebih diplomatis akan lebih dikedepankan guna memperluas pengaruh Jambi di Kerinci. Asumsi ini diperkuat di dalam dua pepatah adat masyarakat Kerinci yang menyatakan "Sanggaran Agung ujung Tanah Kedipan" maksudnya adalah Sanggaran Agung merupakan titik terakhir (ujung tanah) yang dijejaki oleh para penguasa di dalam suku Kedipan—termasuk Patih Jaya sebagai leluhur mereka—dan pepatah "bujuk Jambi" yang di dalam perspektif penguasa Kerinci bermakna Jambi mengedepankan jalur yang diplomatis (bujukan) untuk mempengaruhi mereka.

Sadar akan semakin menguatnya pengaruh Jambi di sebelah tenggara (hilir) Danau Kerinci, membuat penguasa lokal di bagian baratlaut (hulu) lembah Kerinci semakin ketar ketir. Sebuah rencana pun disusun untuk bersekutu dengan kerajaan yang secara geografis lebih dekat dengan mereka yakni Kesultanan Inderapura. Aliansi dengan kesultanan ini juga dipandang lebih menguntungkan secara ekonomis karena mereka menguasai bandar-bandar perdagangan di sepanjang pantai Barat Sumatra. Raja Muda salah satu penguasa di perkampungan bernama Kramantan (Kemantan), menginisiasi sebuah pertemuan dengan Tuanku Berdarah Putih (1565-1600?) hingga berlanjut pada perjanjian sakral di atas sebuah bukit suci bernama Bukit Sitinjau Laut.

Peristiwa bersejarah itu dikenang dengan baik oleh pihak Inderapura maupun orang Kerinci. Hingga pada tahun 1831, Sultan Inderapura yang bergelar Seri Sultan Muhammadsyah Johan Berdaulat mengirim dokumen yang isinya bercerita tentang peristiwa perjanjian itu kepada pewaris Raja Muda di Negeri Kemantan. Salinan dokumen ini dimuat oleh van Aken (1915) di dalam bukunya dan pernah dialihaksarakan oleh Voorhoeve di tahun 1941 (TK 140). Berikut transliterasi penggalan naskah tersebut oleh van Aken (1915:74) dan terjemahan

oleh Sunliensyar:

> *Fasal pada menyatakan patuturan dan pakunun Yang dipertuan Inderapura dengan Kerinci. Bahwa pada awalnya adalah Yang Dipertuan Berdarah Putih tetap/ di atas takhta Kerajaan pada negeri Jayapura ujung tanah Pagaruyung, serambi 'alam Minangkabau, memerintahkan sekalian daerah Pesisir/ Barat. Pada suatu hari maka datanglah Datuk Permai Diwasa dari Tapan hendak mengadap Duli Yang Dipertuan. Titah Yang dipertuan: "Hendaklah/ segera sia mari,". Maka Datuk Permi Diwasa segera datang. Maka ditegur Yang dipertuan: "Apa khabar Datuk Permi Diwasa." Sembah Permi Diwasa: "Patik/ bertemu dengan seorang manusia muara? utan sebelah Gunung Barisan ini, dia hendak mengadap duli Yang dipertuan. Adalah dia serta/ dengan patik ini, jika benar jadi pada Yang Dipertuan supaya patik panggil akan dia. Jika tidak patut pekerjaan patik itu, diharapkan Yang dipertuan empunya kelimpahan memberi ampun di atas batu kepala patik yang bebal ini, supaya segera patik enyahkan dia dari sini."/ Titah Yang dipertuan: "Panggil akan dia segera mari" Setelah itu maka orang itupun datang. Titah Yang dipertuan: "Apa namamu dan dari/ mana kamu datang?" Jawabnya: "Aku datang dari sebelah Gunung Barisan nama Kurinci, nama aku Raja Berkilat, dusanak aku Raja Bakawai."/ Titah Yang Dipertuan: "Adakah negeri di sebelah Gunung Barisan ini?" Jawab Raja Berkilat:"Ada, Yang dipertuan." Titah Yang dipertuan: "Kalau begitu, marilah/ kita membuat sumpah setia supaya negeri kamu itu dengan negeri aku ini menjadi satu." Jawab Raja Berkilat itu: "Tidak aku berani/ membuat sumpah setia dengan Yang Dipertuan, karena aku ini suruh-suruhan orang. Adalah pertuanan aku, bergelar Raja Muda Pancardat daripada tuan/ Perpatih Sabatang dari Minangkabau. Jika Yang dipertuan hendak bersumpah bersetia, dengan beliau itulah". Maka Raja Berkilatpun kembali/ ke Kerinci membawa khabar kepada Raja Muda. Maka berpatutanlah mufakat itu. Maka Raja Berkilatpun merambah jalan yang semak, mengabung/ batang yang terlintang, merateh onak yang bejarahit dari Kerinci ke Dayapura, di istana Taluk Air Manis. Maka Yang Dipertuan naik dari/ Dayapura, Raja Muda naik dari Kerinci, maka bertemulah di atas Bukit Peninjau Laut. Diperbuatlah balai panjang dua belas, yaitu/ dua belas hasta. Maka dipotonglah kerbau putih tengah dua, yaitu beranak dalam. Dipertiga dipertigalah kepeng yang sekepeng, diaru darah kerbau,/ dimakan dagingnya, nyawanya dipersumpahkan. Kalu Gunung-gunung Yang dipertuan, kalu laut-laut dupati, sedalam laut setinggi langit, nan tidak/ lapuk di ujan, nan tidak lakang di panas. Siapalah orang yang bersumpah? Raja Muda di Kerinci Tinggi, Dupati Rantau Telang di Kerinci/ Rendah, Siapalah yang mengarang sumpah setia? Ialah Pangeran Kebaru di Bukit, datang dari Jambi. Jadi empatlah orang yang bersumpah:/ Pertama Yangdipertuan Berdarah Putih, kedua Raja Muda,*

ketiga Dipati Rantau Telang, keempat Pangeran Kebaru Di bukit. Maka jadi/ lah tanah Kerinci tanah menang, yaitu tanah pertemuan raja/ antara Sultan Jambi dengan Sultan Inderapura, Jika mengadapa/ ia ke hilir jadilah beraja ke Jambi. Jika mengadap ia ke barat, ialah ke tanah Inderapura. Akan kepeng sekepeng dipertiga itu:/ sepertiganya ke pesisir balik bukit, sepertiganya ke Kubung Sungai Pagu, sepertiganya tinggal di Kerinci. Maka diguntinglah rambut/ Yang dipertuan Berdarah Putih, tinggal di Kerinci ganti batang tubuh Yang dipertuan. Dan keris malila mengarang karang setio/ yaitu Malila Panikam Batu, tatkala Yang dipertuan naik ke tanah daratan di Pulau Langka Puri, dari Gunung Gemala Rampah jadilah keris/ itu lantak tempat bergantung oleh Yang dipertuan, itupun tinggal di Kerinci akan ganti tulang belakang Yang dipertuan:/ sarungnya kembali ke Jaya-pura. Dan mangkuk tempat mengarang setio tinggal di Kerinci akan ganti mulut Yang dipertuan./ Akan Raja Berkilat itu, diberilah karunia akan dia jadi Pemangku Sukarami Hitam, karena tidak mengubah kata/ Raja Muda pertuanannya. Apalah pekerjaannya? Jalan semak dirambah, batang melintang dikabung. Jadi wa'adlah/ perjanjian itu sekiannya hendaklah dipagangkan dan diingatkan anak cucu kami. Barang siapa mengubahkan/ dikutuk Allah dikutuk Rasulullah dan Kur'an tiga puluh juz, dikutuk karang setio, dimakan biso/ kawi, anak dikandung jadi batu padi ditanam lalang tumbuh.

Terjemahan:

(bagian judul) Pasal yang menyatakan tuturan dan kisah Yang Dipertuan Inderapura dengan Kerinci. Bahwa pada awalnya Yang Dipertuan Berdarah Putih menetap di atas tahta Kerajaan Inderapura di Negera Jayapura, ujung Tanah Pagaruyung, serambi Alam Minangkabau, memerintahkan daerah Pesisir Barat. Pada suatu hari datanglah Datuk Permai Dewasa dari Tapan hendak menghadap Duli Yang Dipertuan. Titah Yang Dipertuan: "*hendaklah segera dia ke sini"*, maka Datuk Permai Diwasa segera datang dan disapa oleh Yang Dipertuan: *"apa kabar datuk?",* maka menyembahlah Datuk Permai Dewasa: *"patik bertemu dengan seorang manusia yang keluar dari hutan sebelah Gunung Barisan ini, dia mau menghadap Duli Yang Dipertuan dan dekarang ia bersama patik. Jika Yang Dipertuan mau bertemu dengannya, maka patik akan panggilkan dia. Jika tidak patut pekerjaan patik itu, maka diharapkan kelimpahan ampunan dari Yang Dipertuan di atas kepala patik yang bebal ini, dan akan saya usir dia segera dari sini".* Kemudian bertitahlah Yang Dipertuan: "panggil dia datang segera ke sini". Setelah itu maka orang itupun datang, Titah Yang Dipertuan: *"Siapa namamu dan darimana asalmu?"* Jawabnya*: "Aku datang dari sebelah Gunung Barisan bernama Kerinci, namaku Raja Berkilat, (dan) berdua dengan saudaraku Raja Begawai".* Titah Yang Dipertuan*: "Adakah negeri di sebelah Gunung Barisan ini?"* Jawab Raja Berkilat*:"Ada, Yang Dipertuan",* titah Yang

dipertuan*: ”Jikalau begitu, marilah kita membuat persumpahan setia supaya negerimu dan negeriku ini menjadi satu”* Jawab Raja Berkilat itu*: “Tidak berani aku membuat persumpahan setia dengan Yang Dipertuan, karena aku ini adalah suruhan orang yaitu pertuananku bergelar Raja Muda Pancardat (keturunan) daripada Perpatih Sebatang dari Minangkabau, Jikalau Yang Dipertuan hendak melakukan persumpahan maka dengan beliau itulah*”. Maka Raja Berkilatpun kembali ke Kerinci membawa kabar kepada Raja Muda. Maka sesuailah permufakatan itu. Kemudian Raja Berkilat merambah jalan yang semak, mengumpulkan batang (kayu) yang melintang, merentas onak yang bejahit dari Kerinci hingga ke Dayapura di istana Taluk Air Manis. Kemudian setelahnya, Yang Dipertuan naik dari Dayapura dan Raja Muda naik dari Kerinci untuk mengadakan pertemuan di atas Bukit Paninjau Laut. Dibangunlah balai (pertemuan) panjang dua belas, yakni (panjangnya) dua belas hasta (sekitar 5,5 meter). Kemudian dipotonglah kerbau putih yang sedang bunting. Dibagi tigalah kepeng (koin) yang satu kepeng (satu koin), dikacaulah darah kerbau itu, dagingnya dimakan dan nyawanya dipersumpahkan. Jikalau gunung, gunungnya Yang Dipertuan, jikalau laut, lautnya Depati, sedalam laut setinggi langit, yang tidak lapuk karena hujan, yang tidak lekang karena panas. Siapakah yang melakukan persumpahan? Raja Muda dari Kerinci Tinggi, Depati Rantau Telang dari Kerinci Rendah. Siapakah yang membuat (ikrar) persumpahan? Adalah Pangeran Kebaru (Kebul) di Bukit yang datang dari Jambi. Jadi empat oranglah yang bersumpah: pertama, Yang Dipertuan Berdarah Putih, kedua Raja Muda, ketiga Dipati Rantau Telang, keempat Pangeran Kebaru (kebul) di Bukit. Maka Tanah Kerinci menjadi tanah menang, yaitu tanah (tempat) pertemuan raja, antara Sultan Jambi dan Sultan Inderapura. Jika (orang Kerinci) menghadap ke hilir jadilah (mereka) beraja ke Jambi. Jika menghadap ke (arah) barat, menjadi Tanah Inderapura. Perihal koin satu koin yang dibagi tiga itu, sepertiganya ke Pesisir balik Bukit, sepertiganya ke Kubung Sungai Pagu, dan sepertiganya lagi tinggal di Kerinci. Maka diguntinglah rambut Yang Dipertuan Berdarah Putih dan ditinggalkan di Kerinci sebagai pengganti tubuhnya. Keris Malela Penikam Batu yang digunakan dalam persumpahan, keris itu diperoleh Yang Dipertuan ketika naik ke daratan di Pulau Langkapuri dari Gunung Gemala Rempah dan dijadikan tonggak pegangan Yang Dipertuan, juga ditinggalkan di Kerinci sebagi pengganti tulang belakangnya dan sarungnya dibawa kembali ke Inderapura. Mangkuk yang digunakan sebagai tempat (mengacau) darah persumpahan juga ditinggalkan di Kerinci sebagai pengganti mulut Yang Dipertuan. Dan lagi, Raja Berkilat diberikan karunia menjadi Pemangku Sukarami Hitam atas jasanya melaksanakan perintah tuannya Raja Muda untuk membuat dan membersihkan jalan (dari Kerinci ke Inderapura). Menjadi *wa'ad*-lah perjanjian itu, seharusnya hendaklah dipegang dan diingat oleh anak cucu kami. Barang siapa mengubahnya dikutuk Allah

> dikutuk Rasulullah dan Qur'an tiga puluh juz, dikutuk persumpahan setia, dimakan racun yang kuat, anak yang dikandung menjadi batu, padi yang ditanam, lalang tumbuh.

Pemilihan lokasi persumpahan di atas puncak bukit yang berada di antara dua wilayah ini menunjukkan nilai sakral perjanjian yang akan dibuat. Kesakralan dari persumpahanpun semakin terlihat kuat dari berbagai ritual yang dilaksanakan. Mengikuti tradisi persumpahan kuno, seekor kerbau putih yang tengah bunting dikorbankan, dagingnya dimakan, darahnya diaduk dan tanduknya ditanam. Ritual dilanjutkan dengan meminum air siraman keris secara bersama dari sebuah mangkuk oleh pihak-pihak yang bersumpah. Dengan demikian, kekuatan supernatural diharapkan turut menjaga persumpahan hingga ke anak keturunan mereka. Bila mereka melanggarnya kutukan dan kesialan dipercaya akan menimpa mereka.

73 BIJLAGE VII.

فصل فد مپتکن باب اين*

ڤنتوران دان ڤكرنن يڠدڤرتوان ايندرڤور دڠن كورنچي*

بوا فد اوالث اداله يڠدڤرتوان بردارە ڤوتيه تتف دياتس تحت كرجاءن دالم
نݢري ايندرڤور اوجوڠ تانه ڤڠراويڠ شرمبي عالم مينڠكبو ممرينتهكن سکلين دايره
ڤشيشير بارت فد سوت هاري مک دتڠله دتوء ڤرمڤي د واس داري تاڤن هندق
مڠادف دولي يڠدڤرتوان مک تيته يڠدڤرتوان هندقله سݢير دي كماري مک
دتوء ڤرمڤي ديواس سݢير دتڠ مک دتڽور يڠدڤرتوان اف خبر دتوء مک سمب
دتوء ڤرمڤي ديواس ڤاتيک برتمو دڠن سؤرڠ مانسي كلور دري هوتن سبله ݢونوڠ
برنشن اين دي هندق مڠادف دولي يڠدڤرتوان اداله دي سرة دڠن ڤاتيک اين
جک بنر جاد فد يڠدڤرتوان سفاي ڤاتيک ڤڠݢيلن دي جک تيدق ڤاتت ڤكرجاءن
ڤاتيک ايت دهارف اكن يڠدڤرتوان امڤون كليمڤڽ ممبري امڤون دياتس باتو
كڤلا ڤاتيک يڠ بباو اين سفاي سݢير ڤاتيک ڤڽکن دي درسيڽ مک تيته
يڠدڤرتوان ڤڠݢيلكن دي سݢير كماري ستله اد مک اورڠ ايتڤون دتڠ مک تيته
يڠدڤرتوان اف نامامو دان دري مان كامو دتڠ مک جاواب اورڠ ايت اكو دتڠ
دري سبله ݢونوڠ بريسن نام كورنچي دان نام اكو رج بركيلت دان دوسانقكو
رج بكوي مک تيته يڠدڤرتوان اداكه نݢري دسبله ݢونوڠ بريسن اني مک
جاواب رج بركيلت اد يڠدڤرتوان مک تيته يڠدڤرتوان كالو بݢيتو ماريله كيتا
ممبوتكن سمڤه ستيا سفاي نݢري كامو ايت دڠن نݢري اكو اني جادي ساتو
مک جاوب رج بركيلت تيدق اكو براني ممبوت سمڤه ستيا دڠن يڠدڤرتوان
كرن اكو اني سورڠ٢ ان اورڠ اداله ڤرتواني اكو برݢلر رج مود ڤاڠچردة *) درفد
ڤرڤاتيه سبتڠ °) دري مينڠكبو جک يڠدڤرتوان هندق برسمڤه برستيا دڠن بليو
ايتله مک رج بركيلت ڤون كومباليله كڤد كورنچي ممباوء خبر كڤد رج مود
مک برڤاتوتڽله موفقت ايت مک رج بركيلت ڤون مرومبه جالن يڠ سماء
مڠابوڠکن باتڠ يڠترليتڠ مرتيه اونق يڠبرجاهيت در فد كورنچي لالو كاداي
ڤور ايستان تلوء اير مانيس مک يڠدڤرتوان نايک دري ايندرڤور دان رج مود نايک
دري كورنچي مک برتموله دياتس بوکت ستينجو لاوت مک دڤربواتله بالي ڤنجڠ
دوبلس يا يت دوبلس هيتا مک دڤوتوڠله كربو ڤوتيه تڠه دوا ياءيت برانق ديدالم
دڤرتيڠکنله كيڤيڠ سكيڤيڠ مک دهاروله دره كربو ايت دماكنله داݢيڠڽ ڤاوان دڤر
سمڤهكن كالو ݢونوڠ٢ يڠدڤرتوان كالو لاوت٢ دوفاتي امڤت سدالم لاوت ستڠݢي
لاڠيت ني تيدق لاموء داوجن ني تيدق لكڠ دڤانس سياف اورڠ يڠبرسمڤه اياله رج

(* Waarschijnlijk bedoeld فاچرسه, zie Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, deel XXXIX, pag. 28 (E.B.)

(° Waarschijnlijk bedoeld ڤرفانيه سبتڠ een der vorsten van Minangkabau. (E.B.)

Gambar 13. Teks naskah surat dari Inderapura yang dikirim ke Kerinci tahun 1831 M (TK 140) (Sumber: Aken, 1915: 74)

Betapa Tuanku Berdarah Putih menganggap pentingnya menjalin aliansi dengan Orang Kerinci, hingga bagian tubuh dan barang-barang pusaka kerajaan ditinggalkan kepada mereka. Rambut yang berada di atas kepala dan dianggap bagian tubuh yang paling mulia oleh orang-orang Melayu ditinggalkan di Kerinci. Begitu pula dengan keris yang diperolehnya di Pulau Langkapuri (Pulau Lingga?) pun turut ditinggalkannya di Kerinci. Hal ini menjadi penanda bahwa persumpahan itu adalah momen awal yang sekaligus sangat penting sepanjang sejarah Inderapura.

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan di dalam teks sebab musabab mengapa Yang Dipertuan begitu antusias dan reaktif menyambut tawaran persahabatan orang Kerinci. Tampaknya kekayaan alam di sebelah Timur Perbukitan Barisan telah menawan hati Yang Dipertuan dan menjadi salah satu penyebabnya. Lembah Kerinci yang begitu luas, subur dan kaya sumber air telah menghasilkan berton-ton beras dan padi. Surplus panen padi yang dihasilkan oleh orang Kerinci terlihat dari penuh terisinya lumbung-lumbung padi yang berjajar di sepanjang perkampungan. Panen padi yang melimpah di Kerinci menjadikannya sebagai lumbung pangan bagi penduduk di Pesisir Barat (Aken, 1915: 18-19). Belum lagi ketersediaan "lilin" yang berkualitas dari Kerinci. Lilin yang dimaksud berasal dari resin atau getah pinus yang disebut oleh penduduk sebagai getah *kayu sigi*. Di masa lalu resin pinus digunakan sebagai sumber pelita pengganti minyak. Oleh karenanya menjadi getah pinus menjadi barang yang berharga dan juga dibutuhkan. Di sekitar wilayah Kesultanan Inderapura, pohon pinus hanya tumbuh di wilayah Kerinci, karena pinus hanya bisa hidup pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut. Selain itu, ada lagi kayu yang menghasilkan resin yang berbau harum ketika dibakar. Kayu tersebut lazim disebut sebagai kayu kemenyan. Sumber daya alam lain yang menarik minat Yang Dipertuan adalah emas. Sumber-sumber asing menyebutkan bahwa orang Kerinci masih menukarkan butiran-butiran emas dengan barang-barang kebutuhan mereka pada abad ke-18 M. Belum lagi sumber daya hutan lainnya semisal kayu manis, gading, cula badak dan rotan yang kesemuanya itu merupakan komoditas yang sangat diminati di masa lalu.

Tuanku Berdarah Putih memandang bahwa orang Kerinci lah di masa mendatang yang akan menyokong perekonomian Kesultanan Inderapura. Apalagi setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis ditahun 1511 M, persaingan sultan-sultan pesisir Sumatra kian menguat. Inderapura harus menghadapi kekuatan Aceh untuk bandar-bandar yang berada di baratlaut. Sementara itu, untuk bandar-bandar di bagian Tenggara mereka harus menghadapi kekuatan Banten. Tak ayal, bandar-bandar yang di tengahlah menjadi tumpuan bagi Inderapura yang penyuplai utamanya diharapkan datang dari orang-orang Kerinci.

Di lain pihakpun, Raja Muda memiliki kepentingan ekonomi dan politik dibalik keinginannya membangun aliansi bersama Inderapura. Selain hendak mengimbangi kekuataan politik Jambi yang semakin kuat di tenggara lembah, Raja Muda menginginkan jaminan keamanan dan status bebas pajak orang-orang Kerinci yang berniaga di sepanjang Pesisir Barat. Di dalam tradisi lisan, masyarakat Kerinci percaya bahwa jaminan kemanan termasuk di dalam pasal perjanjian Sitinjau Laut, yang berbunyi "*Kalu terjun anak buah anak kemenakan Depati Empat Orang Selapan Helai Kain lepeh Kalaut yang balebu, kalunyo mati minta dibangun, ilang mintak dilala, kalunyo ait mintak dicari, Kalu tabenam mintak diselem, Kalu tatabun mintak dikekeh*[25] *(*Jikalau turun anak buah anak

25 *Saya berterima kasih kepada Bapak Zarmoni gelar Temenggung Rio Bayan yang telah menyalin kembali dalam bentuk teks tradisi lisan yang dilantunkan saat acara bernama Ngaji Adat.*

kemenakan Depati Empat Orang Selapan Helai Kain (maksudnya orang-orang Kerinci) menuju laut yang berdebur (wilayah Inderapura), kalau mereka mati supaya dibayar dendanya, kalau mereka hilang dan raib minta dicarikan, kalau mereka tenggelam minta diselami, jikalau mereka tertimbun minta digali).

Raja Muda menampilkan diri sebagai penguasa lokal yang jago berdiplomasi. Ia tidak langsung menghadap Sultan melainkan mengutus dua orang diplomatnya terlebih dulu yakni, Raja Berkilat dan Raja Begawai. Raja Muda ingin menunjukkan kepada pihak Kesultanan bahwa ia adalah orang yang cukup dihormati di kawasan Lembah Kerinci dan Kerinci saat itu telah terdapat sturuktur pemerintahan yang mapan. Apalagi dua utusannya itu menyebut tuan mereka Raja Muda sebagai keturunan Datuk Perpatih nan Sebatang dari Minangkabau. Pernyataan ini tentu saja menambah keyakinan Sultan untuk membangun relasi persahabatan dengan Kerinci karena sang Sultan juga mengakui diri sebagai keturunan bangsawan dari Pagaruyung.

Penting juga dilihat pasal lain yang menguntungkan bagi orang Kerinci di dalam perjanjian ini adalah status orang-orang Kerinci yang dibebaskan secara politik untuk menjalin hubungan baik dengan Jambi dan Inderapura. Sultan Jambi dan Inderapura mungkin berhak atas beberapa sumber daya alam Kerinci atau untuk menerapkan hukum kerajaan di sana sebagai konsekuensi atas perjanjian, tetapi hak mereka terbatas. Mereka tidak berhak mengatur pilihan politik orang-orang Kerinci. Jikalau orang Kerinci menghadap ke raja Jambi berarti mereka menjadi bagian dari Jambi. Begitu pula sebaliknya, jikalau menghadap ke Inderapura maka mereka menjadi bagian Inderapura. Wilayah Kerinci pun ditetapkan sebagai Tanah Menang, tanah tempat pertemuan Sultan Jambi dari timur dan Sultan Inderapura dari barat.

Berdasarkan berbagai hikayat dan tembo di atas, semakin jelaslah bahwa relasi tiga wilayah ini sangat kompleks yang dimulai dari dua jalur yang berbeda. Di satu sisi, dimulai melalui jalur ekspansi dan penaklukan, namun di sisi lain di mulai dengan jalan diplomasi. Akan tetapi, ini hanyalah babak baru goresan sejarah yang ditandai dengan perubahan ideologi keagamaan para penguasa. Selanjutnya, hubungan tiga sekutu ini berlangsung sangat dinamis dan mengalami banyak pasang surut seiring dengan semakin meluasnya cengkraman Inggris dan Belanda hingga masuk ke dalam istana dan mulai mempengaruhi kebijakan-kebijakan para raja. Dan pada akhirnya, orang Kerincipun tak bisa luput dari pengaruh tersebut.

B. Pasang Surut Relasi Pasca-Perjanjian

Perhitungan astronomis tentang waktu bukanlah hal yang asing bagi penduduk Sumatra. Sejak era Sriwijaya, torehan pertanggalan waktu telah ditulis di dalam prasasti peninggalan mereka. Pengetahuan pertanggalan terus berlanjut berabad-abad kemudian hingga era Dharmasraya-Malayu. Terbukti dengan

adanya begitu banyak penanggalan dan *sengkalan* di dalam prasastinya yang tersebar di pedalaman Minangkabau. Bahkan teks kitab Nitisarasamuscaya yang ditemukan di Kerincipun memuat angka pertanggalan meskipun teksnya sudah pudar hingga tak terbaca lagi.

Akan tetapi perlu disadari pula bahwa di era klasik tidak semua orang memiliki pengetahuan astronomis yang mumpuni. Mungkin saja kemampuan itu hanya dimiliki oleh kaum agamawan, laiknya para datu di Tanah Batak. Sistem pertanggalan itupun berlaku terbatas, hanya digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam suatu wilayah Kerajaan. Orang-orang pedalaman seperti orang Kerinci, yang jauh dari pusat kerajaan dan sedikit mendapat pengaruh Hindu-Budha sudah barang tentu tidak memiliki pengetahuan tentang sistem pertanggalan yang digunakan pada masa itu. Seperti orang-orang Austronesia di pedalaman lainnya, pertanggalan mereka hanyalah berpatokan pada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan dengan menggunakan penunjuk waktu "sebelum" dan "sesudah". Misalnya di dalam TK 200 yang menyebutkan peristiwa berlangsungnya perkawinan leluhur mereka terjadi setelah selesainya pembayaran denda pembunuhan. Kadangkala ditandai dengan peristiwa naiknya *jenang* yang terjadi secara periodik. Begitu pula di dalam teks-teks tembo Kerinci yang lain, tak ada satupun yang memuat angka pertanggalan atau petunjuk waktu yang bisa dikonversi ke dalam pertanggalan konvensional masehi maupun hijriah.

Ketidakpedulian terhadap pertanggalan terus berlanjut hingga di awal-awal pemerintahan bercorak Islam. Di Jambi maupun Inderapura, sistem pertanggalan hijriah baru digunakan pada dokumen-dokumen Kesultanan yang dikeluarkan pada abad ke-17 M. Tak ada satupun bukti dokumen Jambi maupun di Inderapura yang lebih awal dari itu sejauh penyelidikan yang telah dilakukan. Kenyaataan ini membuat kita memahami mengapa peristiwa penting seperti perjanjian Sitinjau Laut tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya.

Satu-satunya patokan waktu diselenggarakannya perjanjian itu adalah masa bertahtanya Tuanku Berdarah Putih. Tulisan-tulisan para ahli waris Inderapura mencatat bahwa Tuanku Berdarah Putih bertahta sekitar tahun 1565 hingga 1600 M[26]. Akan tetapi, sumber-sumber ini masih diragukan kevalidannya karena ditulis jauh setelah peristiwa itu berlangsung. Pun begitu dengan laporan asing, tak ada satupun laporan mereka yang menulis tentang perjanjian ini karena memang saat itu Belanda maupun Inggris belum menguasai Inderapura maupun Jambi.

Namun demikian, ketiadaan informasi pertanggalan perjanjian ini bukan berarti peristiwa tersebut hanyalah rekaan belaka. Betapa pentingnya perjanjian tersebut di mata para sultan Inderapura, sampai-sampai Sultan Muhammadsyah di tahun 1831 M kembali menulis peristiwa itu berdasarkan apa yang dia dengar turun temurun dari sultan sebelumnya. Salinan dokumen tersebut dikirim pula ke Kerinci agar terus diingat oleh kedua belah pihak. Tindakan Muhammadsyah

26 http://kerajaanairpura.blogspot.com/2014/01/sejarah-pertalian-alam-kerinci-dengan.html (diakses 16 Maret 2019)

bukanlah satu-satunya. Penguasa Inderapura sebelum itupun mengirim surat yang bagian pada teksnya selalu menyebut tentang persumpahan dan perjanjian leluhur.

Ketiadaan informasi pertanggalan yang cukup valid juga terjadi di dalam sumber-sumber sejarah Kesultanan Jambi dari masa Orang Kayo Hitam hingga masa pemerintahan para penembahan. Penulis lokal seperti Meng (1996) dan Chatib dkk (2011) menggunakan naskah Sadjarah Kerajaan Djambi yang ditulis ulang tahun 1939 untuk merunut kronologi pemerintahan awal raja-raja Jambi. Menurut mereka, Orang Kayo Hitam bertahta pada tahun 1500-1515 M dan zaman Panembahan berlangsung dari tahun 1515 hingga tahun 1615, seabad lamanya. Berturut-turut Panembahan yang bertahta setelah Orang Kayo Hitam adalah Panembahan Rantau Kapas (1515-1540 M), Panembahan Rengas Pandak (1540-1565 M), Panembahan Bawah Sawo (1565-1590) dan Panembahan Kota Baru (1590-1615 M). Selanjutnya penguasa Jambi mulai mengadopsi sistem pemerintahan bercorak Islam di mulai dari diangkatnya Pangeran Kedak sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Qahhar (1615-1643).

Bila pertanggalan di atas bila disandingkan dengan pertanggalan yang ada di Inderapura, maka kemungkinan besar perjanjian Sitinjau Laut yang digadang-gadang itu berlangsung pada masa bertahtanya Panembahan Bawah Sawa dan Panembahan Kota Baru di Jambi. Sayangnya pula hanya ada satu buah *tembo* yang menceritakan hubungan orang Kerinci dan penguasa Jambi pada periode ini.

Relasi Jambi dan Kerinci pada era Panembahan diceritakan dalam salah satu *tembo* beraksara Jawi (TK 143) yang ditemukan di Mendapo Kemantan. Tembo ini menceritakan tentang perjalanan lelulur mereka yang bernama Sungai Tenang untuk menemui Raja Jambi yang saat itu dipimpin oleh para panembahan. Sungai Tenang membawa persembahan kepada raja berupa tanduk kijang bercabang tujuh yang ia peroleh dari penukaran tanduk kancil yang ia punya dengan orang-orang Serampas. Sesampainya di Jambi, Sungai Tenang ditemui oleh tiga orang pangeran yaitu Pangeran Pendek, Pangeran Bawah Sawo dan Pangeran Gadis[27]. Oleh mereka, Sungai Tenang diberi gelar kerajaan Depati Nyalo Sangkar Bulan dan tanduk kijang yang dipersembahkannya itu, dijadikan gagang badik yang kemudian menjadi regalia Kesultanan Jambi. Badik bergagang tanduk kijang tersebut menjadi penanda bagi para utusan raja yang memasuki wilayah Kerinci (Utomo dkk, 2009: 102).

Kisah di dalam *tembo* ini menunjukkan bahwa secara perlahan kekuasaan kerajaan Jambi mulai diakui oleh orang-orang Kerinci yang bermukim di baratlaut Danau Kerinci pasca “penaklukan” di bagian tenggaranya. Orang Kerinci seperti Sungai Teman membawa hadiah kepada Raja untuk mendapatkan gelar-gelar kerajaan yang mereka anggap sebagai sesuatu hal yang sangat prestisius. Begitu pula ketika mereka kembali kepada ke kelompoknya setelah mendapat gelar

27 Pangeran Pendek ini kemungkinan yang dimaksud oleh penulis naskah adalah Panembahan Rengas Pendek (Rengas Pandak). Sedangkan Pangeran Bawah Sawo adalah Panembahan Bawah Sawo dan Pangeran Gadis adalah Panembahan Kota Baru.

kerajaan. Mereka dipandang sebagai orang yang dihormati oleh kelompoknya. Bahkan di satu titik menimbulkan keinginan kelompok lain untuk mendapatkan gelar yang serupa karena paersaingan sosial antar kelompok kala itu.

Riwayat Jambi maupun Inderapura di masa lampau mulai memasuki titik terang setelah laporan-laporan asing mulai membahas mengenai dua kerajaan ini. Di Jambi, sebagaimana yang dipaparkan Andaya, keberadaannya sebagai salah satu penghasil merica di Sumatra telah diketahui oleh bangsa Portugis pada pertengahan abad ke-16 M. Mereka juga mulai melakukan pelayaran ke Jambi pada akhir abad ke-16 M di saat hubungan mereka dengan Aceh dan Banten menegang (Andaya, 2016: 84). Akan tetapi, Keberadaan Jambi sebagai salah satu penghasil merica di Pulau Sumatra tetap dirahasiakan oleh Portugis karena persaingan dagang dengan bangsa Eropa yang lain. Pada saat yang sama Belanda mulai mendarat di Banten dan mulai mendirikan pos perusahaan dagang Belanda (VOC) di sana.

Pada tahun 1615 setelah pos dagang VOC dipindahkan ke Batavia, atas perintah direktur pos dagang VOC Pieterzoon Coen, sebuah kapal dikirim ke Jambi untuk meninjau kemungkinan perdagangan merica di sana. Kemudian pada tahun yang sama sebuah pos dagang didirikan di sana setelah mendapat sambutan dari Panembahan Kota Baru, sang raja Jambi yang saat itu telah uzur (Andaya, 2016: 88). Menggeliatnya perdagangan merica di Jambi, membuatnya memasuki masa kemakmuran. Sejak era Panembahan Koto Baru hingga kepada penerusnya yang bergelar Sultan Agung yang bertahta pada paruh akhir abad ke-17 M. Jambi semakin diperhitungkan secara regional. Berbagai hubungan diplomatis dijalin oleh Jambi dengan Kesultanan tetangganya seperti dengan Jambi dan Banten. Bahkan, Jambi mengakhiri statusnya sebagai vasal Kesultanan Mataram saat Pangeran Ratunya dinobatkan sebagai Sultan Agung dengan gelas Sultan Abdul Jalil (1639-1670).

Merica sebagai salah satu komoditi andalan di Kesultanan Jambi, tidaklah ditanam di kawasan hilir, melainkan berasal dari Hulu Sungai Batanghari. Merica ini ditanam oleh pendatang dari Minangkabau yang bermukim di distrik Tanjung dan Kuamang di dalam wilayah federasi Tujuh Koto dan Sembilan Koto. Untuk itulah, pada masa ini hubungan Jambi lebih difokuskan dengan mereka karena merekalah sebagai penyuplai utama merica di Jambi. Apalagi orang-orang Minangkabau seringkali menampakkan ketidaksukaan mereka kepada pemerintahan di Hilir. Seorang bupati yang ditempatkan Sultan di sana bernama Kiai Rangga sering tidak mereka patuhi. Secara politis mereka lebih memilih tunduk kepada penguasa Minangkabau yang bertahta di Pagaruyung daripada tunduk kepada Jambi padahal secara kewilayahan mereka menempati wilayah Kesultanan Jambi.

Pada masa Sultan Agung, energi Jambi terkuras untuk mengurusi perniagaan merica antara orang-orang Minangkabau di Hulu Batanghari dengan pedagang-pedagang asing yang ada di hilir. Terlebih lagi para penguasa Jambi harus

menghadapi tekanan asing karena bagaimanapun antara Inggris dan Belanda yang telah mendirikan loji di sekitar Muara Kumpeh juga saling bersaing mendapatkan perhatian raja. Akibatnya, hubungan dengan orang-orang Kerinci tidak begitu teracuhkan oleh para Sultan yang bermukim di hilir.

Kondisi semacam ini terlihat dari terbatasnya surat-surat kerajaan yang dikirim untuk para penguasa yang bermukim di sepanjang Batangmerangin hingga ke wilayah Kerinci. Di Serampas, Merangin, hanya terdapat satu buah piagam dengan cap Pangiran Ratu. Gelar yang dipakai Sultan Agung sebelum tahun 1669 M. Piagam lain dikeluarkan atas nama Duli Pangeran Dipati dengan angka pertanggalan tahun 1086 H (1675/1676 M) (Gallop, 2009: 289-290). Satu piagam ditujukan kepada Depati Atur Bumi beserta menterinya yang bernama Raja Dipati yang bermukim di Dusun Hiang Tinggi dengan perkiraan pertanggalan tahun antara 1650-1659 M (Lihat halaman 52-54). Piagam ini dikeluarkan atas nama Pangeran Dipati Anum, gelar yang digunakan oleh Sultan Agung sebelum tahun 1661 M[28].

Dampak lain dari tidak teracuhkan wilayah Kerinci dan Merangin oleh Sultan di hilir adalah semakin leluasamya wakil mereka yang ditempatkan di hulu. Sebagai contoh konkret misalnya Pangeran Dipanegara yang merupakan anak Pangeran Temenggung Merangin telah membangun kepercayaan politik yang begitu kuat bagi para penguasa lokal di kawasan hulu. Hingga pada tahun 1663, para penguasa lokal menolak perintah dari hilir untuk mengganti Pangeran Dipanegara sebagai Temenggung di Merangin, sampai-sampai mereka menganggap Pangeran Dipanegara kedudukannya lebih tinggi dari pangeran (Andaya, 2016: 155).

Ketidakacuhan Jambi terhadap para penguasa lokal yang bermukim di kawasan Kerinci terus berlanjut hingga tahta Kesultanan Jambi diserahkan kepada Sultan Anum Ingalaga atau dikenal pula sebagai Sultan Abdul Muhyi ketika sang ayah "Sultan Agung" mangkat di tahun 1679 M (Andaya, 2016: 188). Bila di masa Sultan Agung, Kerinci menjadi tidak begitu diperhatikan di masa kemakmuran, maka di masa Sultan Anum Ingalaga Kerinci tidak diperhatikan di masa kemerosotan ekonomi.

Sepeninggal Sultan Agung, Sultan Anum tidak mampu mengelola pemerintahan sebaik ayahnya. Selama pemerintahannya, Sultan Anum harus menghadapi berkurangnya intensitas perdagangan merica di Jambi sebagai hasil dari apa yang berlaku pada periode akhir pemerintahan sang ayah. Ditambah lagi ketegangan yang muncul di awal pemerintahannya karena berseteru dengan kerajaan bersebelahan, Palembang. Pada pertengahan abad ke-17 M, bibit perseteruan antara Johor dan Jambi sudah terlihat terkait masalah penguasaan wilayah perairan strategis di pesisir timur Jambi yakni Tungkal. Perselisihan ini

28 Menurut Andaya, Sultan Agung menggunakan gelar Pangeran Depati Anum hingga tahun 1661, kemudian ia menggunakan gelar Pangeran Ratu. Sedangkan gelar Pangeran Depati Anum digunakan oleh anaknya. Pada tahun 1669 M, Sultan Agung menanggalkan gelar Pangeran Ratu karena ia naik tahta menggantikan kakandanya Sultan Abdul Qahhar.

pada mulanya mampu diredam oleh Sultan Agung melalui perkawinan antara putrinya dengan Raja Muda Johor (Andaya, 2016: 172-173).

Akan tetapi beberapa tahun pasca perkawinan, Raja Muda kembali ke daerah asalnya dengan tanpa kembali lagi ke Jambi. Diketahui ia telah menikahi seorang putri laksamana setibanya di Johor. Sang istri yang hendak menyusul suaminya di Johor ditolak oleh pihak istana disertai dengan pemberitahuan pembatalan perkawinan. Tentu saja, kejadian ini mengundang amarah Sultan Agung karena merasa terhina putrinya diperlakukan seperti itu. Pada tahun 1666, Belanda menjadi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi berujung pada kegagalan. Setahun setelahnya, armada Johor menyerang pelabuhan Tungkal. Membumihanguskan banyak perkampungan dan membawa orang-orang Jambi di sepanjang pesisir Timur yang ditaklukannya ke Johor untuk dijadikan tawanan. Pada tahun yang sama, sang putri yang menjadi objek sengketa meninggal dunia. Amarah Sultan Agung semakin menggelora ketika ia meyakini bahwa sang putri tewas diracun oleh agen Johor (Andaya, 2016: 173).

Sebuah rencana pembalasanpun disusun oleh Sultan Agung, di tahun yang sama sekitar 70 kapal yang memuat sekitar dua ribuan pasukan menuju Johor. Dengan bantuan Orang Laut, ibukota Johor di Kepulauan Riau diporak-porandakan oleh pasukan Jambi. Jambi berhasil memenangkan pertempuran atas Johor dengan membawa berbagai harta rampasan disertai dengan tiga ribu lima ratus tawanan dan empat puluh budak (Andaya, 2016: 175; Rahim, 2015: 60). Pada tahun 1679, Johor kembali menyerang Jambi. Pada serangan kali ini Jambi kalah telak, ratusan orang ditawan, rumah dan sawah dirusak bahkan Jambi terpaksa membayar 3000 rijkdalders, 3 kati emas dan dua pucuk logam sebagai ganti rugi atas penyerangan Jambi sebelumnya (Andaya, 2016: 182; Zakaria dalam Rahim, 2015: 160) . Konflik ini pada akhirnya menjadi sebab utama turunnya intensitas perdagangan merica di Pantai Timur Jambi. Tungkal sarana penting dalam perniagaan merica kehilangan posisinya sebagai bandar utama karena ketakutan para pedagang berlayar ke sana. Sultan Anum harus mewarisi kondisi ekonomi yang semacam ini dari sang ayah yang mangkat beberapa tahun pasca kekalahan perang.

Tidak cukup sampai di sana, Sultan Anum kembali harus menghadapi perseteruannya dengan Palembang. Kali ini disebabkan oleh dendam mantan istrinya yang juga putri sultan Palembang Sultan Abdul Rahman. Konflik ini terjadi sekitar antara tahun 1681-3 dan menimbulkan begitu banyak kerugian. Banyak kebun-kebun merica di sekitar Tembesi dirusak oleh orang-orang Palembang saat persengketaan ini berlangsung. Akan tetapi, Sultan Anum berhasil memenangkan beberapa pertempuran dengan Palembang dan berakhir dengan resolusi damai kedua belah pihak (Andaya, 2016: 187).

Sultan Anum telah berusaha keras memulihkan perekonomian negerinya. Meskipun ia berhasil melewati krisis, tetapi ia tidak mampu memulihkan kejayaan Jambi sebagaimana ayah dan kakeknya dahulu. Usaha-usaha itu ditunjukkan

Sultan Anum dengan menggalang dukungan dari Raja Minangkabau, Yang Dipertuan Sakti atau dikenal pula dengan Sultan Ahmad Syah (Andaya, 222-3). Raja Minangkabau tampil sebagai sosok yang dihormati di kalangan para raja di Kepulauan Nusantara karena sikapnya yang begitu menentang kehadiran VOC. Pada tahun 1680, Sultan Anum melawat ke hulu Batanghari, di sana ia bertemu dengan Putri Jamilan untuk mempertegas kembali batas wilayah kerajaan dan kuasa Jambi atas Minangkabau. Enam tahun setelahnya, utusan Sultan Ahmad tiba di Tanah Pilih untuk menawarkan kerjasama dengan imbalan pembagian hasil jarahan serta ribuan tenaga kerja Minangkabau yang ditinggalkan di Tanah Pilih nantinya. Hubungan mereka ini diperkuat lagi ketika Sultan Ahmad mengangkat Sultan Anum sebagai anaknya dan menyerahkan penguasaan orang-orang Minangkabau yang bermukim di seluruh wilayah Jambi. Bukti pengakuan ini tertera di dalam empat stempel yang digunakan oleh para pejabat Minangkabau (Gallop, 2014: 14). Teks pada stempel itu berbunyi:

> *"Sultan Abdul Jalil yang mempunyai tahta kerajaan negeri Minangkabau mengaku anak kepada Sultan Abdul Muhyiuddin yang mempunyai tahta kerajaan negeri Jambi menyerahkan rakyat hingga kaki Gunung Berapi hilir hingga kuala Jambi mudik"* (Gallop, 2014: 15).

Sudah barang tentu jalinan hubungan Jambi-Minangkabau ditentang oleh pihak VOC. Pada tahun 1687, VOC memblokade Sungai Jambi dan meminta Sultan Anum menyerahkan orang-orang Minangkabau (Andaya, 2016: 224). Akan tetapi, permintaan itu ditolak oleh Sultan Anum karena mengingat sumpahnya terdahulu yang diucapkan kepada penguasa Minangkabau. Sultan Anumpun menawarkan gencatan senjata tetapi tidak diindahkan oleh pihak VOC. Mereka kemudian mundur ke Sungai Kumpeh sekitar 1 mil dari kota untuk menyiapkan penyerangan.

Sultan Anum kembali harus menerima kenyataan pahit saat anak tertuanya Pangeran Dipati melakukan konspirasi bersama pihak VOC untuk menggulingkan tahtanya. Sejumlah bangsawan Jambi bersama sang putra membelot mendukung VOC dan pada 5 September 1687 mereka bersama-sama menyerang ibukota. Sudah dapat dipastikan bahwa kudeta ini membuahkan hasil berupa kemenangan. Sultan Anum bersama pendukungnya terpaksa melarikan diri ke Muara Tebo dan Pangeran Dipati yang melakukan kudeta diangkat oleh VOC menjadi sultan dengan gelar Kiai Gede. Tentu saja pengangkatan itu disertai persyaratan yang disetujui oleh Kiai Gede yakni untuk mengusir orang Minangkabau, Makassar dan Bugis dari Jambi (Andaya, 2016: 224-225).

Di hulu, Sultan Anum mengumpulkan kembali pengikut setianya. Ia menyusun strategi untuk merebut kembali ibukota. Hingga pada tahun 1688, bersama dengan sekitar 1600 pasukan, Sultan Anum bergerak ke hilir tetapi ia

urung melakukan serangan. Sultan Anum memilih untuk menawarkan perjanjian damai dengan VOC bahkan bersedia menyerahkan tahtanya dengan syarat ia dibiarkan hidup dengan damai bersama istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, pihak VOC malah melakukan tindakan sepihak karena ketidakpercayaan mereka kepada Sultan Anum. Pada saat itu juga, Sultan Anum beserta anak istrinya ditangkap dan dibuang ke Batavia oleh VOC hingga wafat di sana (Andaya, 2016: 226).

Perseteruan internal di Kesultanan Jambi terus berlanjut hingga kepada anak-anak Sultan Anum. Pangeran Pringgabaya, saudara Sultan Kiai Gede menolak posisi sang kakak sebagai raja. Ia mengikuti tindakan ayahnya untuk menyingkir ke Muaro Tebo, di sana ia mengembangkan permukiman baru bernama Mangunjayo dan mendirikan pemerintahan independen yang terlepas dari kekuasaan sultan di hilir. Persoalan ini kian meruncing tatkalan Pangeran Pringgabaya justru mendapat lebih banyak dukungan dibanding sang kakak. Pangeran Pringgabaya didukung oleh penguasa-penguasa lokal di hulu dan penguasa Minangkabau yang dulu mendukung ayahnya. Ia diberi gelar oleh penguasa Minangkabau sebagai Sri Maharaja Batu Johan Pahlawansyah (Andaya, 2016: 227; Drakard,1993: 265). Pringgabaya juga didukung oleh Pangeran Sutawijaya putra Pangeran Dipanegara, Temenggung yang bertahta di Muara Masumai yang sekaligus bertindak sebagai perdana menterinya.

Namun, dukungan terhadap Maharaja Batu tidak bertahan lama. Keadaan ekonomi masyarakat hulu yang tidak juga membaik membuat mereka mulai tidak percaya terhadap kecakapan Maharaja Batu dalam memimpin. Pengalihan dukungan di mulai dari perseteruan Yang Dipertuan Sakti dengan Maharaja Batu karena permasalahan penguasaan perkampungan. Akibatnya, Maharajabatu kehilangan perlindungan politik. Maharaja batu juga berseteru dengan penguasa lokal Minangkabau di Hulu Batanghari karena ia mulai mengurusi masalah perdagangan yang dikendalikan oleh mereka serta upaya Maharajabatu untuk menguasai wilayah milik leluhur mereka. Tidak cukup sampai di sana Maharaja batu ditinggalkan oleh perdana menterinya sendiri Sutawijaya yang kembali tunduk kepada sultan di hilir.

Penarikan dukungan terhadap Maharaja Batu membawa secercah harapan untuk rekonsiliasi kedua raja ini. Maharaja Batu mulai melunak terhadap pemerintahan di hilir. Pada tahun 1709 atas bantuan Abraham Patras Kiai Gede dan Maharaja Batu sepakat berdamai. Maharaja Batu bersedia mengakui kakandanya sebagai Raja Tua sementara ia sendiri akan bertindak sebagai Raja Muda. Sayangnya kesepakatan damai ini hanya bertahan sekitar setahun. Maharaja Batu kembali membangkitkan permusuhan dengan cara menggalang dukungan Palembang dan Johor untuk mengambialih tahta Kiai Gede. Dengan bantuan VOC, Kiai Gede akhirnya meringkus Maharaja Batu pada Desember 1710. Maharaja Batu kemudian diasingkan ke Batavia dan seterusnya ke Pulau Banda hingga wafat di sana pada 1716 M (Andaya, 2016: 225)

Kematian Maharajabatu di pembuangan tidak serta merta membawa atmosfer kedamaian di dalam keraton Jambi. Pasca pengasingan Maharaja Batu muncul pemberontakan yang dipimpin oleh orang Minangkabau di hulu Batanghari. Ia juga berhadapan dengan pemberontak di dalam istana yang ingin menggeser kedudukannya. Kehilangan dukungan rakyat dan bangsawan simpati VOC menjadikan Sultan Kiai Gede begitu tertekan. Pada 20 Juni 1719 dalam sakit yang berlangsung sekitar tiga minggu membawa sultan kepada kematiannya (Andaya, 2016: 266).

Kekacauan pemerintahan terus berlangsung hingga generasi sultan berikutnya. Raden Astra Wijaya, anak tertua dari Maharaja Batu dipulangkan dari Batavia untuk dilantik sebagai Sultan Jambi. Ia diberi gelar Sultan Astra Ingalaga. Pemerintahan Sultan Astra tak luput dari bayangan permasalahan moral dan dukungan keluarga istana sebagaimana yang pernah menimpa paman dan ayahnya. Di sisi moralitas misalnya, Sultan Astra dinilai oleh khalayak sebagai orang yang kurang "bermoral". Ia dituduh mengambil gundik pamannya Kiai Gede untuk dijadikan sebagai gundik sendiri meskipun hukum kerajaan membenarkan hal tersebut. Sultan Astra juga tidak memperhatikan kesejahteraan mantan ratu dan anak-anak Kiai Gede, hingga sang mantan ratu menukarkan minyak rambut dan dedaunan untuk sekadar membeli beras. Isu moral lain yang mengemuka adalah bahwa Sultan Astra merupakan pecandu madat (Andaya, 2016: 267, 282). Hal ini mengakibatkan Sultan Astra kehilangan simpati dari rakyat dan ulama.

Andaya (2016: 267-271) menarasikan masa pemerintahan Sultan Astra dengan sangat dramatis. Ia beberapa kali harus dilengserkan dari tahta dan menghadapi pemberontakan dari keluarganya sendiri terutama dari *trah* Kiai Gede. Di tahun 1720, Sultan Astra menghadapi pemberontakan dari Pangeran Nattaningrat menantu dari Kiai Gede yang ingin menempatkan anak Kiai Gede, Pangeran Surianegara, untuk menduduki tahta. Namun, pemberontakan itu berhasil diredam melalui rekonsiliasi dirinya dengan sang sepupu, menyusul pula kematian Nattaningrat yang memimpin pemberontakan.

Akan tetapi, cita-cita Nattaningrat dilanjutkan oleh anaknya Raden Demang. Pada Januari 1725, Raden Demang bersama komplotannya menyerang keraton. Mereka mengambil keris regalia kerajaan, menguasai harta benda serta mengurung Sultan Astra di dalam rumah batu (Andaya, 2016: 269). Seorang saudara Sultan Astra berhasil kabur ke hulu dan diselamatkan oleh penduduk di wilayah Tujuh Koto. Selama beberapa bulan mereka mengumpulkan pasukan di sana untuk menyerang Tanah Pilih. Pada Mei 1725, pasukan dari hulu tiba di Tanah Pilih. Mereka kemudian menyerbu keraton, membebaskan dan menempatkan kembali Sultan Astra di atas tahtanya. Di akhir Juni, Raden Demang kembali menyerang kelompok pro Sultan Astra, mereka berhasil merongrong para pasukan dari hulu itu dan mengusir mereka kembali ke tempat asalnya. Pada Juli 1725, Pangeran Surianegara yang telah dibuang ke Batavia, dibawa kembali oleh Belanda ke Jambi. Ia kemudian dilantik menjadi sultan dengan gelar Sultan Muhammad Syah atas persetujuan Belanda (Andaya, 2016: 270).

Belum genap dua tahun memimpin, pada 21 Desember 1726, Sultan Muhammadsyah harus mangkat di usia yang terbilang masih muda. Ia meninggal karena wabah cacar yang menyerang ibukota. Sekali lagi tahta kesultanan Jambi terguncang dengan kematian rajanya yang begitu mendadak. Penduduk percaya bahwa *trah* Kiai Gede memang telah dikutuk karena perbuatannya yang durhaka di masa lalu. Atas usulan penguasa di Pagaruyung kepada Belanda, pada Maret 1727, Sultan Astra kembali ditempatkan di atas tahtanya setelah sekian lama meringkuk di dalam penjara.

Setelah insiden yang begitu melelahkan, akhirnya Sultan Astra dapat bernafas lega. Pemimpin pemberontak, Raden Demang, yang menentangnya telah dibuang ke Batavia. Kini ia dapat mengelola negara dengan tenang tanpa gangguan berarti. Akan tetapi, harapan Sultan Astra seolah sirna tatkala konflik sosial di tengah penduduk mengalami peningkatan. Hal ini akibat persaingan antara penduduk lokal dan para pendatang Minangkabau.

Menurut Andaya (2016: 274, 278), para migran yang berasal dari Minangkabau datang ke wilayah Jambi untuk mencari lokasi penambangan emas yang baru. Akan tetapi, mereka kurang menghargai kepenguasaan tanah penduduk lokal yang telah diakui oleh pihak Kesultanan. Terkadang mereka enggan membayar sewa tanah kepada pemiliknya, bahkan seringkali terjadi pembunuhan ketika pemiliknya tidak mau meyerahkan tanah untuk ditambang. Kesulitan penguasa Jambi mengatur para pendatang ini dipertegas saat lawatan Sultan Astra ke hulu antara 1729-1734. Sultan Astra saat itu mengatakan bahwa ia masih bisa memerintah suku Pindah untuk memotong kayu atau memerintahkan penduduk VII Koto dan Sembilan Koto untuk menanam merica. Akan tetapi, ia tidak mampu memerintah para penambang dan pedagang Minangkabau karena mereka rakyat dari Yang Dipertuan. Mereka tidak berada di bawah kekuasaanku, kata Sultan Astra (Andaya, 2016: 279).

Kesulitan yang dihadapi Sultan Astra untuk mengatur orang Minangkabau yang berinvasi ke wilayah Jambi serta mencegah konflik sosial dengan penduduk lokal, menjadi salah satu penghambat Sultan Astra untuk memulihkan perekonomian negerinya. Di tengah krisis ekonomi dan sosial tersebut, Sultan Astra kembali ingin memantik peperangan dengan Palembang karena masalah yang sepele yakni masalah kekeluarga. Ia merasa terhina karena ia tidak diberitahu tentang pernikahan janda bangsawan Jambi dengan bangsawan Palembang (Andaya, 2016: 283).

Lemahnya kualitas kepemimpinan Sultan Astra memaksa pihak Belanda bertindak. Pada 25 Januari 1743, ia diturunkan dari tahta dan adiknya yang termuda Pangeran Sutawijaya dikukuhkan sebagai penggantinya. Pangeran Sutawijaya dinobatkan dengan gelar Sultan Ahmad Zainuddin atau dikenal pula dengan Sultan Anum Suria (Seri) Ingalaga[29] (Andaya, 2016: 284). Sultan Astra

29 Voorhove yang dibantu Abdul Hamid mengalihaksaran teks Jawi sa-ra-ya pada gelar Sultan Anuum menjadi Suria. Sedangkan Gallop mengalihaksarakannya sebagai Seri. Andaya menggunakan kata

kini hidup sebagai panembahan dengan gelar Panembahan Puspanegara. Ia dipercayakan memegang kendali atas sebuah sungai yang ada di Jambi sebagai salah satu sumber pemasukannya selama masa pensiun.

Konflik-konflik yang terus berlangsung di Jambi selama beberapa puluh tahun atau beberapa kali pergantian tahta pasca pemerintahan Sultan Agung, telah membuat hubungan pihak Kesultanan dan orang-orang Kerinci semakin renggang. Hal ini terlihat jelas dari sedikitnya piagam yang mereka keluarkan untuk orang-orang Kerinci selama sekitar 64 tahun. Di era Sultan Anum Ingalaga (1679-1687) saja, hanya ada satu piagam yang diberikan kepada Depati Pulang Jawa di Serampas[30] (Gallop, 2009: 295). Sementara itu, tidak ada satupun piagam yang dikeluarkan oleh Sultan Anum Ingalaga untuk para Depati di Kerinci. Demikan pula di masa konflik antara Sultan Kiai Gede dan Maharaja Batu (1687-1719), hanya ada tiga piagam yang diberikan kepada para Depati di wilayah Kerinci yakni kepada Depati Payung di Dusun Pondok Tinggi, Depati Perbo Singo di Dusun Koto Baru Hiang dan Depati Intan Maro Masumai di Dusun Siulak Mukai. Pada masa Sultan Astra dan Sultan Muhammadsyah (1719-1743) tidak ada satupun piagam yang diberikan kepada orang-orang Kerinci.

Kurangnya kontrol para Sultan yang bertahta jauh di hilir ini berdampak pada semakin luasnya pengaruh politik para bangsawan yang ditugaskan mewakili kerajaan di hulu. Tercatat selama enam puluh empat tahun tersebut ada beberapa pangeran yang menjabat sebagai Temenggung Mangkunegara yaitu Pangeran Dipanegara pada masa Sultan Agung dan Sultan Anum (Andaya, 2016: 184). Pangeran Sutawijaya putra Pangeran Dipanegara pada masa Kiai Gede (Andaya, 2016: 250), dan Pangeran Sutawijaya putra Maharaja Batu pada era Sultan Astra (Andaya, 2016: 285). Bahkan kuatnya pengaruh politik para pejabat Pangeran Temenggung di hulu ini, sampai-sampai penguasa lokal di sana menganggap mereka sebagai penguasa tertinggi yang berasal dari keturunan sangat tinggi, di atas para pangeran manapun (Andaya, 2016:184).

Gambaran bagaimana para Pangeran Temenggung berusaha memperkuat pengaruh politik mereka di wilayah Kerinci diceritakan di dalam *tembo-tembo* masyarakat adat. Misalnya di dalam naskah Incung pada tanduk (TK 234) yang disimpan oleh Depati Kecik Dusun Koto Tengah, Mendapo Tanah Kampung yang teksnya menurut Voorhoeve adalah sebagai berikut:

> "hini tutur takala janang nayik manapat mehudun sati/ manalak hanak sanginda mana diyam hanya diyam di/ kuta bingin barajaji dingan janang hacik sanggabit/ mahudun sati sajama'at halah bana anak sanginda hanya diyam/ di kuta bingin jikala halah pada mintak di hantar lalu ka kuta bingin/ tiba dumah hanak sanginda janang hacik sanggarit batanya janang hacik sanggarit/ mana diyam hanak sanginda hada dumah kata bujang padiyam

"Seri" di dalam penyebutan gelar Sultan Anum ini.

30 *Gallop mengalihaksarakan nama depati di dalam teks sebagai Depati Paling Jawa. Namun kenyataannya, di dalam struktur adat Marga Serampas hanya terdapat gelar Depati Pulang Jawa (Gallop, 2009: 306)*

hanak ninik sangi/nda suruh kaluwar halah hanak sanginda talatak karis dingan/ka'in kamu jadi dipati harik di padang hada sata'un duwa ta'un datang katiga/ muka naik janang hacik turit maka lalu ka kuta bingin muka … das hanya situ di/ himbaw hidak handak datang muka tasampay halah ka'in dari sigay muka talatak halah tu/mbak talatak pula candung sarujan hangin talatak cambun hatak saribu muka jadi dipati/(su)ngay laga muka talatak kandi hudang muka talatak tudung saji sapa mangada hakan dipati sungay/ laga tujuh baradik hiya juga panatih panjang dipati sungay laga ngada hakan hanak hurang ha/mpat batampat tanah kampung sapa hanak batuga surang bagalar pasak talang surang bagalar munggut/ surang bagalar handir bungkuk"

Terjemahan:

Inilah cerita tatkala seorang jenang (utusan Kesultanan Jambi) yang datang ke wilayah Kerinci, menuju tempat Mangkudum Sakti. Ia mencari anak Sanginda yang bertempat tinggal di Koto Beringin. Kemudian *jenang* yang bernama Encik Sangabit itu membuat kesepakatan dengan Mangkudum Sakti, (Kata Mangkudum Sakti) "Sejama'at lah nama anak Sanginda dia bertempat tinggal di Koto Beringin, jikalau hendak bertemu marilah saya antar menuju Koto Beringin". Sesampainya di tempat anak Sanginda, *jenang* Encik Sangabit bertanya, "dimana anak Sanginda?", "ada di rumah" jawab Bujang Pandiyam. "Suruh dia keluar" (kata jenang), (maka) keluarlah anak Sanginda. Kemudian diletakkan keris dan kain oleh jenang, "kamu menjadi Depati Rik di Padang". Berlalulah setahun dua tahun, maka pada tahun ketiga datanglah *jenang* bernama Encik Turit, ia menuju Koto Beringin. Sesampainya di sana, ia memanggil (penduduk) tetapi tidak ada yang mau datang. Maka dibentangkannya kain di atas sigai, diletakkannya tombak dan candung[31] yang bernama Sirujan Angin (sejenis parang), diletakkannya pula mangkuk retak seribu (keramik cina), kemudian (diangkatnya seseorang) menjadi Depati Sungai Laga. Setelah itu, diletakkan pula kendi udang, tudung saji oleh tujuh saudara Depati Sungai Laga termasuk Panatih Panjang (untuk menjamu *jenang*). Adapun Depati Sungai Laga memiliki anak empat orang yang bertempat tinggal di Tanah Kampung yaitu yang bernama, Batuga, Pasak Talang, Munggut, dan Andir Bungkuk.

31 Candung menurut KBBI adalah parang yang dibuat dari satu besi yang bilah dan hulunya bersambung (Diakses 29 Maret 2019).

Gambar. 14. Berdasarkan TK 234, keramik menjadi salah satu hadiah yang diberikan oleh Penguasa Jambi kepada penguasa lokal di Kerinci. Keramik ini disimpan sebagai pusaka oleh salah satu suku di Semurup (Dok. British Library No. EAP117/27/1/3, diakses 9 April 2019)

Kisah di dalam *tembo* ini menceritakan bagaimana Pangeran Temenggung melalui utusannya (jenang) secara periodik menuju Kerinci untuk mencari anak-anak penguasa lokal yang bersedia diangkat menjadi depati. Para *jenang* menuju tempat-tempat yang sebelumnya belum tersentuh oleh Pangeran Temenggung Kebul di Bukit, sang leluhur, di masa lalu termasuk ke permukiman yang bernama Koto Beringin Permukiman ini berada di Bagian baratlaut Danau Kerinci, di kawasan perbukitan yang kini berada di atas Desa Sungai Liuk. Sang *jenang* membawa berbagai hadiah yang dianggap sebagai barang mewah ketika itu seperti kain, keramik, dan berbagai jenis senjata untuk menarik perhatian anak-anak penguasa lokal. Tentu saja, pengangkatan depati ini disertai dengan konsekuensi untuk patuh terhadap pejabat kerajaan terutama kepada para pangeran di Muara Masumai. Hal inilah yang membuat mereka terkadang menolak anugrah gelar dan barang-barang mewah tersebut. Seperti ketika kedatangan jenang yang kedua kali, banyak yang tidak mau menghadiri himbauan *jenang* kecuali satu orang yang kemudian digelari Depati Sungai Laga.

Semakin gencarnya gerakan politik para Pangeran Temenggung di baratlaut Lembah Kerinci, meluluhkan juga sikap para penguasa di sana. Sebagaimana di dalam teks TK 37-40 dan TK 41 (lihat halaman 37-39) yang menceritakan bagaimana antusias keluarga para penguasa lokal Kerinci untuk menemui Pangeran Jambi yang saat itu datang ke pesanggrahan mereka di Sanggaran

Agung. Diceritakan bahwa Depati Sungai Laga dan Depati Muda yang kini telah membuat permukiman baru bernama Dusun Rawang menghadap sang Pangeran di Sanggaran Agung. Mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya dapat membuat pangeran mengangkat keluarga mereka menjadi Depati. Pada kejadian ini, dua orang keponakan mereka yang ikut menghadap pangeran mendapatkan gelar sebagai Depati Situwu dan Depati Suka Beraja. Legenda lain dengan tema cerita yang hampir sama juga terdapat di wilayah Siulak, perkampungan paling baratlaut Lembah Kerinci. Diceritakan bahwa ada seorang Depati yang mendapatkan gelar setelah mencegat rombongan pangeran ketika perjalanan menuju Kerinci. Depati tersebut digelari Depati Intan Tengah Padang, karena dia diangkat sebagai depati oleh pangeran di tengah padang rumput[32].

Akan tetapi, para Depati ini adalah depati-depati yang hanya dianugerahi gelar --dan mungkin juga hadiah barang mewah—tanpa adanya piagam yang diberikan oleh pihak Kesultanan Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan para depati ini dilakukan oleh Pangeran Temenggung tanpa sepengetahuan sultan dan otoritas yang berada di hilir atau di saat kontrol hilir terhadap para bangsawan di hulu sangat lemah sehingga mereka menggalang kekuatan politik sendiri di hulu dengan mengangkat para depati secara ilegal. Di saat para Pangeran mulai bertindak di luar kendali pusat, pejabat kesultanan yang berada di hilir kembali menegaskan kekuasaan politik mereka kepada para kepala suku yang ada di Kerinci dengan mengangkat para depati berserta surat resmi (piagam) yang menyertai mereka. Usaha-usaha inilah yang pernah dilakukan oleh Pangeran Dipati Anum (Sultan Agung) antara tahun 1650-1659 ke wilayah Hiang.

Lepasnya kendali hilir atas bangsawan di hulu semakin menjadi-jadi saat dua suksesor Sultan Anum Ingalaga berseteru. Pangeran Sutawijaya yang kala itu menjadi mangkubumi Maharaja Batu, pihak oposisi istana di hilir, dengan berani mengeluarkan piagam disertai penggunaaan cap miliknya sendiri. Hal ini dapat terlihat dari tiga piagamnya yang dikirim pada tahun yang sama yaitu 1116 H (1704-1705 M). Piagam –piagam tersebut ditujukan kepada Depati Atur Bumi di Dusun Hiang Tinggi, Depati Payung di Dusun Sungai Penuh dan Depati Intan Kemala Bumi di Dusun Siulak Mukai (lihat tabel 2).

Sultan Kiai Gede yang bertahta di hilir saat itu tidak mampu mencegah gerakan politik pangeran yang ada di hulu. Namun, pada akhirnya Sutawijaya membelot mendukungnya sehingga mendorong terjadinya rekonsiliasi antara Sultan Kiai Gede dan Maharaja Batu. Pasca-rekonsiliasi di tahun 1709, wewenang para pangeran yang berkedudukan di hulu tampaknya semakin diperluas. Mereka diperbolehkan mengeluarkan piagam untuk para penguasa lokal yang ada di Serampas dan Kerinci, meskipun kedudukan piagam itu berada di bawah piagam yang secara resmi dikeluarkan atas nama sultan. Tindakan ini dilakukan oleh Kiai Gede untuk memperbaiki kerenggangan antara pejabat di hilir dan di hulu. Sultan Kiai Gede sendiri pasca rekonsiliasi tersebut juga pernah mengeluarkan

32 Wawancara bapak Abidin gelar Temenggung Adil Bicaro, 16 Januari 2016.

piagam bersama sang putra Pangeran Suria Negara kepada Depati Perbo Singo dusun Koto Baru Hiang di tahun 1716 M kepada Depati Payung Negeri di Dusun Pondok Tinggi.

Selama masa pemerintahan Sultan Astra (1719-1743), pejabat Pangeran Temenggung di Merangin setidaknya mengeluarkan dua piagam. Pertama piagam yang diberikan kepada Depati Intan Maro Masumei tertanggal 1131 Hijirah (1719-20 M). Berdasarkan gelarnya saja sudah jelas bahwa depati yang satu ini dinobatkan di Muara Masumai oleh Pangeran Temenggung. Satu piagam lagi yang mengatasnamakan Pangeran Temenggung adalah piagam yang diberikan kepada para Depati di Sanggaran Agung. Merenggangnya kembali hubungan Jambi dan orang Kerinci disebabkan konflik internal yang terus berlanjut antar faksi yang mendukung keturunan Kiai Gede dan faksi yang mendukung keturunan Seri Sultan Maharaja Batu.

Di lain pihak, orang Kerinci tampaknya menikmati kebebasan berpolitik mereka sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam persumpahan Sitinjau Laut. Mereka tidak hanya menjalin hubungan dengan Jambi tetapi juga dengan Inderapura. Apalagi relasi antara orang Kerinci dengan penguasa Jambi di hilir tidak begitu intens selama masa-masa krisis ekonomi dan krisis pemerintahan melanda Kesultanan Jambi.

Secara geografis, Inderapura jauh lebih dekat dengan Kerinci dibandingkan dengan ibukota Kesultanan Jambi di Tanah Pilih. Mereka hanya perlu menempuh perjalanan beberapa jam melalui jalan setapak untuk mencapai Inderapura. Di samping itu pula, wilayah Inderapura yang membentang di Pantai Barat Sumatra memiliki banyak pelabuhan yang dapat diakses dengan mudah oleh orang-orang Kerinci. Kondisi semacam ini jauh berbeda dengan Jambi. Untuk mencapai Muara Masumai saja mereka harus melewati medan yang cukup berat berupa hutan-hutan belantara dan jurang terjal. Belum lagi jika mereka harus ke Tanah Pilih, satu-satunya jalan tercepat adalah melalui transportasi sungai melewati Batangtembesi menuju Batanghari dan kemudian mendarat di Tanah Pilih. Alternatif lain adalah melalui perbukitan terjal dan belantara lebat di perbukitan sebelah Timur Lembah Kerinci, dari sana mereka menuju Sungai Ulu Tebo dan menghilir sungai tersebut hingga sampai di Muaro Tebo, Mangunjayo. Dari sana mereka harus lagi naik perahu atau kapal untuk menuju Tanah Pilih. Letak bandar-bandar pesisir Timur pun cukup jauh dari ibukota kerajaan, mereka harus naik kapal atau perahu lagi untuk menuju Muara Kumpeh atau menuju Tungkal. Jikapun mereka membawa barang dagangan hingga ke Muara Masumai atau ke Mangunjayo, para pejabat kesultanan di sana akan memainkan dan memonopoli harga pasar karena harus dibawa lagi ke ibukota yang tentu merugikan bagi orang Kerinci. Oleh sebab itu, sangat tidak efektif dan efisien bila mereka menjalin hubungan dagang dengan Jambi. Bagi mereka sangat tidak efektif dan efisien baik dari segi manapun untuk menjalin hubungan dagang dengan Jambi.

Kebebasan politik yang telah dijanjikan mereka, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalin hubungan perniagaan dengan Inderapura. Orang Kerinci dijamin keamanan dan dibebaskan dari pajak apapun untuk berdagang di wilayah Inderapura. Atas jasa baik para Sultan tersebut, mereka membebaskan beberapa tambang emas untuk dikelola oleh keluarga kesultanan Inderapura di wilayah Kerinci. Di tahun 1668 misalnya, sekitar dua belas orang Depati dari Kerinci menandatangani kontrak penambangan emas dengan Raja Adil, kerabat Kesultanan Inderapura di Muko-muko (Kathirithamby-Wells, 1976: 76).

Secara tersirat hubungan perdagangan dengan Inderapura juga dimuat di dalam teks naskah Incung pada bambu yang disimpan oleh Depati Suko Bajo Tuo di Dusun Koto Majidin (TK 130). Hasil alihaksara tersebut oleh Voorhoeve adalah sebagai berikut:

> [......]muka bajalan pagi ka hayi haji mabali garan barapa hamas haku duwa pitis dihambik balah pitis tinggan tangah duwa pitis hamas haku hitu kapada tuwan haku sapay sakarang hini hamas haku hitu juga lama lama dan kalama mati pula dantun putin haku dihambik pula ka'in tuwan hanik humah di hipuk panjang hampat gabung sapintih hada pula ka'in haku sagabung jadi panjang lima raganya sa suku[.....]
>
> Terjemahan:
>
> [.....]Maka (aku) berjalan pergi ke Air Haji membeli garam, berapa emasku? Dua pitis, kemudian dikurangi tinggal tengah dua (satu setengah) pitis emasku itu yang disimpan oleh Tuanku[33] sampai sekarang. Dan setelah lama kemudian, meninggal pula bibi putihku[34], (maka) diambil pula kain Tuan Nik[35] yang bertempat tinggal di Ipuh, panjang empat gabung sepitis (harganya). Ada pula, kainku satu gabung dengan panjang lima, harganya satu suku [....]
>
> [....]hitu juga baturun karajat ka'in haku juga dingan turun panjang hampat gabung hitu halah hadanya takanak takala haku balik dantang ka hayi haji baliyar hambik garan hampat gantang haraganya[...]
>
> Terjemahan:
>
> .... itupun dibayarkan biaya kainku, dengan yang dibayarkan itu panjang empat gabung itulah adanya. Terpakai ketika aku pulang pergi ke Air Haji, untuk membayar dan mengambil garam empat gantang, harganya separuh pitis....

---

33 *Tuan di dalam bahasa Kerinci lama merupakan panggilan untuk paman atau saudara ibu yang laki-laki. Sampai sekarang kata sapaan ini masih digunakan di beberapa tempat (Lihat Qadri, 1995: 89).*

34 *Di dalam teks ditulis Datung Putih. Kata datung dalam bahasa Kerinci berarti bibi sedangkan kata putih merupakan sapaan untuk seseorang yang lahir pada urutan ke lima atau ke enam (Lihat Qadri, 1995: 89-90).*

35 *Nik atau Nek adalah kata sapaan untuk seseorang yang lahir pada urutan ke empat (Lihat Qadri, 1995: 90).*

Naskah ini memuat informasi tentang sejumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh pemilik naskah. Namun naskah ini memuat informasi lain, bahwa si penulis naskah melakukan perniagaan garam dan kain yang diperolehnya dari Air Haji dan Ipuh. Air Haji merupakan salah satu bandar yang terdapat di bagian baratlaut Inderapura sedangkan Ipuh adalah bandar yang berada di sebelah tenggara Muko-muko yang juga bagian dari wilayah Kesultanan Inderapura (lihat Kathirtamby-wells, 1976: 66). Informasi yang terkandung di dalam naskah ini semakin menguatkan adanya hubungan perniagaan yang dijalin antara orang kerinci dengan pihak Kesultanan yang berkuasa di Pantai Barat Sumatra.

Hubungan ekonomi yang sangat harmonis antara orang Kerinci dan Inderapura selama kerenggangan relasi dengan Jambi, akhirnya menimbulkan kecemburuan pihak Jambi. Pada masa Sultan Astra tepatnya pada tahun 1736, tercatat bahwa ia pernah mengutus saudaranya ke Kerinci untuk membujuk para depati agar mengalihkan pertukaran emas mereka ke Jambi dari pada ke Pesisir Barat (Muko-Muko dan Inderapura). Lawatan itu tampaknya membuahkan hasil karena pada tahun 1741 ditemukan adanya kayu manis yang berasal dari Kerinci sebagai salah satu hadiah raja yang dikirim ke Batavia (Andaya, 2016: 281).

Bagaimanapun juga, orang Kerinci tetap akan menghormati otoritas kesultanan Jambi sesuai dengan perjanjian para leluhur di masa lalu. Mereka sudah pasti akan takut terkena sumpah leluhur bila melanggar titah sang raja. Apalagi pihak Sultan di hilirlah yang memulai dan berkeinginan memulihkan relasi perdagangan yang semakin renggang selama beberap dekade belakangan. Niat baik itu tentunya disambut hangat oleh orang-orang Kerinci. Delapan tahun pasca lawatan saudaranya ke Kerinci, Sultan Astra lengser dari tahtanya. Ia digantikan sang adik, Pangeran Sutawijaya yang sangat dihormati oleh orang-orang di hulu. Penghormatan ini memang tidak berlebihan karena ia pernah memegang jabatan sebagai Pangeran Temenggung di Muara Masumai.

Sultan Anum Suria (seri) Ingalaga itulah gelar yang dipakainya sejak naik tahta pada tahun 1743. Di hadapan sang sultan, sudah terpampang banyak pekerjaan terutama di dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Harapan besar rakyat Jambi tergantung kepadanya di masa depan. Ia diharapkan mampu memperbaiki hubungan hulu dan hilir serta memperbaiki perekonomian Jambi yang porak-poranda pasca mangkatnya Sultan Agung.

C. Raja Baru dan Masalah Baru

Upaya pemulihan hubungan antara penguasa di hulu dan di hilir serta dengan orang Kerinci mulai serius dilakukan oleh Sultan Ingalaga. Hal ini terlihat semakin intensnya ia berhubungan dengan orang-orang Kerinci sebagaimana yang tampak dari banyaknya naskah piagam yang ia keluarkan bersama dengan Pangeran Temenggung Mangkunegara di Muara Masumai. Di Kerinci,

ditemukan sekitar tiga piagam yang dikeluarkan oleh mereka. Sementara itu di wilayah Serampas hanya ditemukan satu naskah piagam yang ditujukan kepada enam depati di Renah Kemumu (Gallop, 2009: 296-300). Naskah piagam ini dikeluarkan pada tahun 1756 M. Selain itu, terdapat tujuh piagam tanpa tanggal di Kerinci yang diduga kuat dikeluarkan selama pemerintahan Sultan Ingalaga oleh dua pejabat Temenggung Mangkunegara di Muara Masumai. Dua pejabat itu adalah Pangeran Temenggung Mangku Negara dan anaknya Pangeran Sukarta Negara.

Bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Sultan Ingalaga dan pejabat di Muara Masumai menerbitkan jauh lebih banyak piagam untuk para depati di Kerinci. Piagam-piagam ini umumnya ditujukan kepada para depati yang bermukim di bagian barat laut Kerinci. Dua piagam ditujukan kepada para penguasa di Tanah Kepala Persembah, dua piagam ditujukan kepada para depati di Tanah Siulak, tiga piagam ditujukan kepada para Depati di Rawang dan Koto Baru, satu piagam untuk Depati di wilayah Sekungkung dan satu piagam untuk Depati di Koto Keras. Sementara itu, terdapat satu piagam yang ditujukan kepada Depati di Koto Baru Hiang, permukiman yang terletak di sisi timur laut tidak jauh dari Danau Kerinci.

Jambi kini telah memiliki kekuatan politik yang makin kokoh di Kerinci. Hampir semua penguasa di bagian barat laut sudah sepenuhnya di bawah kendali Jambi. Menjadi pertanyaan yang cukup besar mengapa para penguasa Kerinci ini secara tiba-tiba mulai menerima penguasa Jambi sepenuhnya di masa Sultan Anum? Orang Kerinci tampak lebih condong menerima penguasa Jambi daripada bersikap netral sesuai dengan hak istimewa yang telah mereka peroleh sejak lama. Di masa lalu, orang-orang Kerinci hanya meminta gelar bangsawan dari pihak kerajaan karena nilai prestesius yang ada. Gelar tersebut secara tidak langsung akan menaikkan status sosial seseorang dalam kelompoknya dan mereka akan dihormati. Akan tetapi, kini mereka tidak hanya menginginkan gelar tetapi juga piagam yang berisi pengakuan terhadap wilayah kekuasaan mereka. Seperti halnya, lima orang depati sebelumnya pada masa Sultan Agung dan Kiai Gede.

Orang Kerinci terdiri dari banyak masyarakat komunal yang hidup berdasarkan ikatan geneologi dan teritorial. Secara sosiologis, masyarakat seperti ini rentan berkonflik apabila terjadi gesekan sosial antar penduduk. Persaingan ini terlihat begitu jelas dalam kehidupan orang Kerinci ketika pengaruh Jambi semakin menguat. Mereka bersaing untuk mendapatkan pengakuan Jambi atas status dan kedudukan kelompok mereka termasuk di antaranya tanah-tanah ulayat (Sunliensyar, 2016b;2018b). Peristiwa semacam ini terjadi ketika Sultan Ingalaga bertahta, sebagaimana yang tersirat di dalam beberapa teks naskah piagam.

Piagam bernomor TK 107, 148, 161, 169 dan 173 adalah piagam yang saling terkait satu sama lain dan dapat mengindikasikan adanya konflik di tengah masyarakat Kerinci di masa lalu. Piagam TK 161 dan 169 adalah dua piagam yang diperuntukkan kepada dua kelompok depati yang berbeda oleh Sultan

Ingalaga dan Pangeran Temenggung Mangkunegara. TK 161 ditujukan kepada Depati Raja Simpan Bumi, (Depati) Mangkubumi dan kepada Raja Simpan Bumi Andum Laksana. TK 169 ditujukan kepada Depati Muncak Negara, Depati Muda Pamuncak dan Depati Mendala Bumi. Akan tetapi, dua kelompok depati ini diakui oleh Jambi menguasai satu wilayah yang sama. Wilayah tersebut dinamakan sebagai Tanah Kepala Persembah. Penanda batas wilayah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam teks adalah Gunung Berapi, Muara Sekungkung Mati, Bukit Tulang Orang dan Pangkal Titian.

Dua piagam ini terkesan janggal, karena pejabat yang sama memberikan piagam kepada dua kelompok berbeda padahal mereka memiliki wilayah kekuasaan yang sama. Sebelum era Sultan Anum maupun sesudahnya, para depati yang berkuasa di dalam wilayah yang sama hanya dituliskan namanya dalam satu piagam saja atau dibuatkan salinan piagam lain yang isinya persis sama. Dua piagam ini mengindikasikan adanya dua kelompok depati yang terpecah karena saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan raja atas wilayah kekuasaan yang sama. Atau paling tidak satu kelompok depati tidak mau wilayahnya dikuasai oleh kelompok depati yang lain sehingga kemudian mereka meminta Jambi mengeluarkan piagam yang mengakui pula kekuasaan mereka atas wilayah yang sama.

Indikasi persaingan penguasa Kerinci untuk mendapatkan pengakuan Jambi atas wilayah kekuasan mereka semakin menguat bila kita menelaah piagam TK 173 dan 107. Gelar-gelar depati yang sebelumnya disebutkan di dalam TK 161 yaitu Depati Raja Simpan Bumi dan Depati Mangku Bumi sebagai di antara penguasa Tanah Kepala Persembah, di dalam teks piagam TK 173 telah diakui pula oleh Sultan Anum memiliki wilayah dengan batas sebelah hilir Aro Tebing Tinggi dan sebelah mudiknya Gunung Berapi. Wilayah ini dikuasai bersama dengan Depati Intan. Bila diperhatikan di dalam peta, tempat yang bernama Aro Tebing Tinggi posisinya berada di tengah wilayah Tanah Kepala Persembah sehingga membelah wilayah ini menjadi dua bagian. Dari Aro Tebing Tinggi ke arah baratlaut (mudik) hingga Gunung Berapi dikuasai oleh federasi tiga depati yang tersebut di dalam piagam TK 173. Sementara itu, dari Aro Tebing Tinggi ke tenggara (hilir) batasnya hingga Muara Sekungkung Mati dikuasai oleh federasi depati yang lain.
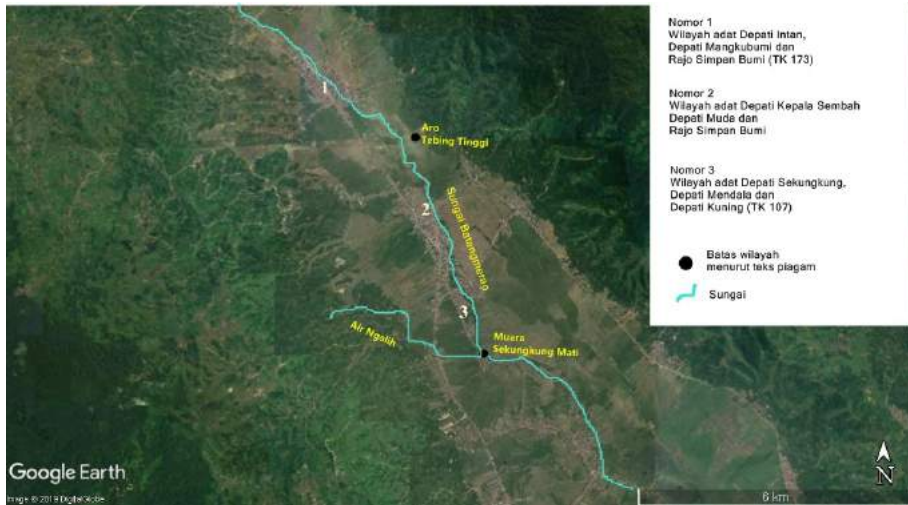
Gambar. 15. Pembagian wilayah adat Tanah Kepala Persembah pada masa Sultan Anum Seri (Suria) Ingalaga (Sumber: Google earth pro, dimodifikasi oleh Hafiful Hadi Sunliensyar)

Depati Mendala yang namanya disebutkan di dalam TK 169 karena termasuk di dalam depati yang berkuasa di Tanah Kepala Persembah, kini telah membentuk persekutuan dengan depati yang lain pula. Di dalam TK 107, ia disebutkan tergabung dengan Depati Kuning dan Depati Sekungkung dengan wilayah kekuasaan di sepanjang Sungai Air Ngalih. Air Ngalih sendiri merupakan salah satu anak Sungai Batangmerao. Sungai ini mengalir dari perbukitan sebelah barat lembah Kerinci ke arah Timur melewati beberapa dusun dan akhirnya bermuara di Batangmerao. Titik pertemuan antara Air Ngalih dan Batang Merao ini dinamakan sebagai Muara Sekungkung Mati yang menjadi penanda batas paling hilir wilayah Tanah Kepala Persembah sebelumnya.

Keempat piagam di atas menunjukkan adanya persaingan antar kelompok depati terkait pengklaiman wilayah adat yang dinamakan Tanah Kepala Persembah. Sehingga pada akhirnya Tanah Kepala Persembah ini dibagi menjadi beberapa wilayah adat. Adanya konflik terkait perebutan tanah di atas juga disebutkan di dalam legenda masyarakat adat Tanah Sekudung yang menyatakan bahwa Tanah Sekudung adalah tanah yang dipenggal dari wilayah adat sebelumnya (Sunliensyar, 2016b). Kejadian konflik ini juga diperkuat di dalam salah satu surat titah yang dikeluarkan oleh Pangeran Sukarta Negara (TK 148). Surat titah yang disimpan oleh Depati Sigumi Putih di Semurup ini yang berbunyi:

> "[....]Jangan kamu lupa kepada kata jenang raja yang diletakkan Pangeran Temenggung di (Tanah) Kepala Pesembah dengan Sulak. Jikalau depati kembali kepada seko depati jikalau menti kembali kepada menti seperti

tanah pulang kejatinya seperti abung pulang ke suluh [......]"

Terjemahan:

> [..] Jangan engkau melupakan perkataan utusan raja yang ditempatkan oleh Pangeran Temenggung di Tanah Kepala Persembah dan Siulak. Jikalau depati kembali menjadi depati, jikalau menteri kembali menjadi menteri, seperti tanah yang pulang ke asalnya seperti abu yang kembali pada suluh [....]

Di dalam teks ini terdapat kalimat metafora yaitu "seperti tanah yang pulang ke asalnya seperti abu yang kembali pada suluh" . Teks ini dapat ditafsirkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pangeran Temenggung terkait dengan persengketaan Tanah Kepala Persembah dan Siulak sudah tepat yakni dengan mengembalikan hak tanah dan gelar para depati ke tempat asalnya semula. Hak tanah dan gelar depati yang berasal dari Siulak dikembalikan ke Siulak begitu pula dengan hak tanah dan gelar depati yang berasal dari Tanah Kepala Persembah dikembalikan pula ke wilayah asal mereka.

Apa yang terjadi di Lembah Kerinci hanya sebagian kecil dari permasalahan baru yang muncul selama pemerintahan Sultan Ingalaga. Meskipun ia mampu memperbaiki hubungan dengan para penguasa lokal di lembah Kerinci, namun senyatanya permasalahan baru muncul akibat perubahan peta politik Jambi di Kerinci yang begitu mendadak bergesekan dengan kondisi sosial penduduknya. Di tempat lain, persoalan klasik belum juga mampu diselesaikan oleh Sultan Ingalaga. Seperti persoalan antara perantau Minangkabau di wilayah hulu (Sembilan dan Tujuh Koto) yang cenderung tidak mematuhi dan mengakui penguasa Jambi. Di sisi lain dalam perspektif perantau Minangkabau, ketidakpatuhan mereka kepada penguasa Jambi akibat ulah penguasa Jambi yang berlaku buruk terhadap mereka (Andaya, 2016: 291-292).

Persoalan yang jauh lebih rumit tampak berlaku di bagian hilir. Sultan Ingalaga mulai memikirkan untuk tidak lagi hubungan kerjasama dengan VOC. Perilaku beberapa pejabat Belanda yang dinilai tidak bermoral menurut norma sosial yang berlaku di Jambi mulai merisaukan sang sultan. Apalagi selama beberapa dekade terakhir tidak ada keuntungan besar yang diperoleh oleh pihak Jambi dari kerjasama di sektor perniagaan. Justru yang terjadi sebaliknya, banyak di antara para bangsawan yang terlilit utang kepada VOC. Pihak VOC pun berpikiran bahwa tentang tidak diperlukannya pembaruan kontrak dengan kerajaan-kerajaan Bumiputra. Hubungan yang kurang harmonis antara Jambi dan VOC berakibat pada dibukatutupnya loji dagang di Belanda antara tahun 1750-an hingga 1760-an (Andaya, 2006: 293-296).

Di sisi lain, musibah-musibah yang menimpa sultan dan Jambi turut membangkitkan sisi spritualitasnya untuk bersikap menentang para "kafir" Belanda yang selama ini bekerjasama dengannya. Andaya (2016: 292) memaparkan bahwa pada tahun 1750, putri Sultan Ingalaga meninggal karena

sakit disusul salah satu putranya dua tahun kemudian. Pada tahun yang sama, gempa bumi besar dilaporkan melanda Jambi, Musibah itu menyebabkan dua negeri hilang ditelan air dan selama tiga hari sungai-sungai di hilir dipenuhi lumpur yang menyebabkan ikan-ikan mati. Sang sultan percaya bahwa negerinya sedang dikutuk oleh tuhan dan satu-satunya cara untuk melenyapkan kutukan itu adalah memutus hubungan dengan pihak VOC.

Pada akhirnya sebuah serangan oleh ratusan orang di pagi buta tertanggal 20 Maret 1768, menghancurkan pos dagang Belanda yang ada di Kumpeh. Peristiwa ini memaksa VOC menutup pos dagangnya yang telah berdiri lebih dari seratus tahun di Tanah Jambi (Andaya, 2016: 297). Sebuah era baru tampaknya akan segera di mulai di Jambi. Sebuah masa di mana pemerintahan Jambi diharapkan berjalan tanpa gangguan VOC.

D. Masa Reformasi di Kerinci

Pemberian wewenang yang lebih luas kepada pejabat di hulu pada masa Sultan Ingalaga, telah memberi ruang gerak lebih bebas kepada pejabat Pangeran Temenggung di Muara Masumai untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, meskipun tetap di bawah kendali sultan yang ada di hilir. Kebijakan baru ini telah membawa atmosfer yang lebih baik dalam relasi Jambi dan orang-orang Kerinci. Termasuk pula munculnya tokoh-tokoh politik baru di dalam lingkup pemerintahan Jambi di hulu.

Selama pemerintahan Sultan Ingalaga (Sultan Ahmad Zainuddin), ia telah menempatkan seorang pejabat di sana untuk menggantikan kedudukannya sebagai Pangeran Temenggung. Pejabat itu menggunakan gelar Pangeran Temenggung Mangkunegara. Ia bersama Sultan Ingalaga telah mengirimkan tiga piagam ke Kerinci. Selama menjabat Pangeran Temenggung Mangkunegara, tampaknya ia dibantu oleh sang putra Pangeran Sukarta Negara. Besar kemungkinan Pangeran Temenggung Mangkunegara menjabat di usia yang sudah tua sehingga ia harus dibantu oleh putranya. Di dalam satu piagam (TK 54) yang ditujukan kepada para depati di Mendapo Rawang tertulis nama Pangeran Temenggung Mangkunegara dan Pangeran Sukarta Negara yang menunjukkan bahwa mereka pernah secara bersama-sama menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan Jambi di dalam wilayah hulu.

Pengaruh Pangeran Sukarta Negara bagi orang Kerinci tampak lebih besar bahkan dibandingkan dengan Sultan Ingalaga sendiri. Ia telah mengeluarkan sekitar tujuh piagam, lima surat titah dan satu naskah undang-undang kepada para penguasa Kerinci atas namanya sendiri. Kepopuleran Pangeran Sukarta Negara di khalayak di Kerinci bukanlah tanpa sebab. Ia menampilkan diri sebagai tokoh reformis yang membawa atmosfer baru dalam kehidupan sosial dan pemerintahan orang Kerinci sebagaimana terlihat di dalam surat-surat yang ia kirimkan.

Sebenarnya, gagasan untuk mereformasi sistem tata kelola pemerintahan Kesultanan Jambi sudah mulai timbul di benak Sultan Ingalaga. Beberapa bencana yang menimpa dirinya dan negerinya telah membangkitkan kesadaran spritual untuk mereformasi pemerintahan Jambi. Di tengah titik nadir akibat upaya untuk memperbaiki kemerosotan ekonomi Jambi yang belum berhasil. Ia berharap datangnya sebuah mukjizat dari Tuhan untuk menyingkirkan kutukan terhadap negerinya. Kutukan yang ia anggap berawal dari persekutuan para raja terdahulu dengan "kafir" Belanda. Untuk itulah, ia tampak tidak tertarik lagi memperbarui kontrak kerjasama dengan VOC selama bertahta. Selain itu, ia juga menginginkan kehidupan yang lebih religius di dalam masyarakat Jambi sebagai salah satu upaya mengembalikan kemakmuran.

Akan tetapi, kondisi fisik sultan yang telah menua serta atmosfer di hilir yang dipenuhi banyak intervensi baik di kalangan kerabatnya sendiri maupun pihak asing telah menghambat gagasannya itu. Kondisi seperti ini jauh berbeda dengan di hulu. Para pejabat di sana dapat bergerak dengan bebas dan jauh dari intervensi pihak asing. Kedudukan mereka juga didukung secara penuh oleh para penguasa lokal di pedalaman. Apalagi dengan kehadiran Pangeran Sukarta Negara, sosok muda visioner yang membantu ayahnya dalam mengatur pemerintahan di hulu.

Gagasan Sultan Ingalaga untuk kehidupan yang lebih religius di Jambi dilanjutkan oleh Pangeran Sukarta Negara. Setelah ayahnya, Pangeran Temenggung Mangku Negara, wafat di tahun 1776, kini ia telah mengambil alih kekuasaan di wilayah hulu. Dengan segera ia memproklamirkan diri sebagai penerus kekuasaan sang ayah kepada para depati di seluruh Kerinci. Akan tetapi, surat-surat yang ia kirimkan tidak hanya berisi tentang deklarasi dirinya sebagai penerus kekuasaan di hulu tetapi juga perintah kepada para depati terkait dengan reformasi di bidang hukum.

Setidaknya ada lima surat titah dan satu undang-undang yang dikirimkan oleh Pangeran Sukarta Negara ke berbagai wilayah adat di Kerinci. Satu surat undang-undang (TK 3) dan satu surat titah (TK 4) dikirimkan ke wilayah adat Mendapo Limo Dusun, dan kemudian di simpan oleh Datuk Caya Depati Kodrat di Dusun Baru (Voorhoeve, 1970). Dua surat titah (TK 230, 231) dikirimkan kepada Depati di Sanggaran Agung dan dua surat titah (TK 147, 148) dikirimkan kepada depato di Mendapo Semurup. Surat-surat ini disimpan oleh Depati Sigumi Putih Kodrat Dusun Balai. Naskah-naskah ini dikirim dalam periode tahun 1776 dan 1778. Naskah-naskah yang dikirimkan ke Sanggaran Agung dan ke Semurup tidak memuat pertanggalan. Akan tetapi di dalam teks disebutkan berita tentang kematian Pangeran Temenggung Mangku Negara pada 21 Mei 1776 sehingga kemungkinan besar naskah ini juga dikirim pada tahun yang sama, selang beberapa bulan pasca kematian Pangeran Temenggung Mangku Negara (Lihat Kozok, 2015: 231). Sementara itu, surat titah dan undang-undang yang dikirimkan ke wilayah Mendapo Limo Dusun, Sungai Penuh memuat pertanggalan 17 dan 24 Juli 1778 M (22/29 Jumadil Akhir 1192 Hijirah) (Lihat tabel 2).

Ada beberapa poin penting yang dimuat dalam teks naskah-naskah di atas terkait dengan pelaksanan hukum di Kerinci berdasarkan perintah Pangeran Sukarta Negara. Pertama, pemberitahuan bahwa Pangeran Sukarta Negara tidak akan mengubah beberapa struktur kelembagaan dan ketetapan hukum yang telah dibuat oleh pejabat sebelumnya. Pernyataan ini dimuat di dalam beberapa teks.

> *"[.....]adapun segala lembaga yang ditetapkan oleh duli Pangeran Sukarta itu seperti segala lembaga yang dahulu kala juga tiyada diubahkan oleh duli Pangeran melainkan tetap jua adanya. Adapun segala Depati itu mendirikan hukum raja yaitu boleh para Depati menyeti mendenda, pancung punjung, kelam bunting beras andam ke dalam, pancung sula.... "*

> Terjemahan:
>
> [....] adapun semua lembaga yang ditetapkan oleh Pangeran Sukarta seperti semua lembaga yang sudah ada sejak dulu. Tidak akan diubah oleh Pangeran, tetap sebagaimana adanya. Adapun semua depati mendirikan hukum raja yaitu mereka diizinkan *menyeti mendenda, pancung punjung, kelam bunting beras andam ke dalam, pancung sula* (lihat halaman 47-49)

> "[....]dan demikian lagi yang diketahui oleh segala hukum parentah adat negeri seperti hukum orang daga dagi dan sandu' samun, umu' umbai, upas racun, telum tikam malam, kincung kicuh, sekaliannya itu mati hukumnya; dan jikalau ada orang sumbang salah, berzina laki-laki dengan perempuan yang tiyada membatalkan air sembahyang mati juga hukumnya. Dan adalah hukum yang telah sampai kepada hukum mati melainkan ditetap oleh duli Pangeran seperti yang segala yang dahulu-dahulu itu tiyada duli Pangeran mengubahkannya seperti seko lembago yang dahulu kala itu jua adanya [.....]"

> Terjemahan:
>
> [..] dan demikianpula dengan semua hukum pemerintahan adat di dalam negeri seperti hukum orang melakukan *daga dagi, sandu' samun, umbuk umbai, upas racun, telum tikam malam, kincung kicuh,* semua itu hukumannya hukuman mati. Jikalau orang berbuat sumbang salah, berzina antara laki-laki dan perempuan yang bermahram, maka hukum mati juga hukumannya. Dan hukuman yang telah sampai pada tingkat hukuman mati harus ditetapkan oleh Pangeran sebagaimana aturan terdahulu. Pangeran

tidak akan mengubah ketetapan tersebut. (TK 03, Surat Undang-Undang disimpan oleh Datuk Caya Depati)

"......Tetaplah sekalian kamu seperti segala kembali kamu yang di dalam sumpah setia orang tua-tua kamu seperti mendirikan syarak dan adat kamu..." (tetaplah kamu semua sebagaimana di dalam perjanjian leluhurmu dulu, yaitu mendirikan syariat Islam dan adatmu) (TK 148, Surat Titah disimpan oleh Depati Sigumi Putih Kodrat, Dusun Balai)

Kedua, perintah untuk tidak melanggar konsensi khusus yang dibuat saat oleh Pangeran Temenggung sebelumnya. Perintah ini khusus ditujukan kepada depati yang ada di Semurup dan Siulak (bagian paling baratlaut Lembah Kerinci) unutk menaati ketetapan Pangeran Temenggung terkait dengan persengketaan batas-batas wilayah dan pemerintahan adat yang pernah terjadi sebelumnya (lihat halaman 92).

Ketiga, perintah kepada depati di seluruh Kerinci terutama di wilayah Mendapo Limo Dusun untuk menguatkan hukum Syariat (hukum Islam) di Kerinci. Pernyataan ini dimuat di dalam tiga surat titah dan satu undang-undang yang dikirimkan ke Sungai Penuh dan Sanggaran Agung. Teks-teks surat tersebut berbunyi.

[..] dan lagi titah duli Pangeran Sukarta kepada segala ra'yat naung yang selurah tanah Kerinci disuruh Pangeran Mengeraskan hukum syara' di dalam tanah Kerinci; duli Pangeran amat keraskan kepada Depati yang berempat dan yaitu Setiudo dan dan Depati Payung Negeri dan Depati Padua Negaro dan Depati Sungai Penuh yang dibawa oleh Kiyai Depati Simpan Negeri kawan Depati Suto Negaro serta Mangku Depati dan Faqih Muhamad itu yaitu yang ditegah oleh Pangeran itu karena karena tertegah pada syarak. Maka yang terlebih mungkar pada syarak itu yaitu empat perkara: Pertama jikalau kematian jangan diarak dengan gendang, gung, serunai dan bedil dan kedua, jangan diberi laki-laki bercampur dengan perempuan bertauh nyanyi suatu tempat dan kedua jangan bersalih memuji hantu dan syetan dan batu, kayu dan barang sebagainya dan ketiga jangan menikahkan perempuan dengan tiyada walinya dan keempat jangan makan minum yang haram dan barang sebagainya daripada segala yang tiyada diharuskan syara'[....]"

"[...]Dan barang siyapa tiyada mau mengikut syara' maka hukumkan oleh segala Malin dengan mufakat seperti hukum syara' jangan disalahi. Jikalau orang yang tiada mau mengikut hukum syara' maka segala para Depati dan para Mangku serta mufakat dengan para Menteri mengeraskan hukum syara' itu adanya. Demikianlah perintah duli Pangeran Sukarta [....]" (TK 04, Surat Titah disimpan oleh Datuk Caya Depati Kodrat).

Terjemahan:

"[....]dan lagi perintah Duli Pangeran Sukarta kepada seluruh rakyat yang bertempat tinggal di seluruh lurah Tanah Kerinci, untuk menguatkan hukum syariat (hukum syarak atau hukum Islam) di Tanah Kerinci. Perintah ditekankan secara khusus oleh Duli Pangeran kepada Depati yang berempat yaitu Depati Santiudo, Depati Payung Negeri, Depati Pahlawan Negara, Depati Sungai Penuh, Kiai Depati Simpan Negeri, Depati Suta Negara, Mangku Depati dan Faqih Muhammad, bahwa hal-hal yang dilarang oleh pangeran karena dilarang oleh hukum syarak (Syariat Islam). Maka yang paling terlarang di dalam hukum syarak adalah empat hal. Pertama, jikalau kematian janganlah diiringi dengan gendang, gong, serunai, dan bedil (jangan diiringi dengan musik. Kedua, janganlah diizinkan laki-laki bercampur dengan perempuan, menari (*bertauh*) dan menyanyi pada suatu tempat. Jangan *bersalih*[36], memuji hantu, setan, batu kayu dan sebagainya. Ketiga, jangan menikahkan orang tanpa wali. Keempat, jangan makan dan minum yang haram dan semua yang dilarang oleh hukum syarak.

Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti hukum syarak maka dihukum oleh semua ahli agama (*malin*) berdasarkan mufakat mengikuti hukum syarak. Jikalau orang tidak mau mengikuti hukum syarak maka para depati, para mangku bermufakat dengan menteri untuk menguatkan hukum syarak tersebut kepada mereka. Demikianlah perintah Duli Pangeran Sukarta.

Isi teks di dalam surat titah yang disimpan di Sanggaran Agung. Di dalam TK 230 disebutkan tentang tuak, arak,zina, menyembah pohon, batu dan berhala serta mengiringi jenazah dengan gendang, serunai dan bedil. Semua ini merupakan larangan hukum syarak dan memiliki kesamaan informasi dengan surat titah TK 04 yang ada di sungai penuh. Meskipun secara utuh teks TK 230 tidak dapat dipahami isinya karena banyaknya bagian teks yang tidak terbaca oleh Voorhoeve. Surat titah lain di Sanggaran Agung (TK 231) memuat teks yang lebih jelas yang berbunyi:

"[....] adalah termaktub dalamnya pesan Pangeran kepada kamu sekalian para dipati Pangeran minta kembangkan kepada kamu sekalian syarak Rasul Allah salla llahu 'alaihi wasallam. Mufakatlah kamu dengan segala…… yang di dalam 'alam Kerinci mendirikan agama Rasul Allah salla llahu 'alaihi wasallam dan seboleh-bolehnya buangkan kamu barang yang mungkir……….. dan mengadakan ….gendang serunai dan gung gendang dan barang sebagainya………..mufakatlah kamu menegahkan barang dilarangkan Allah ta'ala dan Rasulnya karena dunia ini sangatlah akhir. Adalah…….hadis Rasulullah yang sabit Imam Mahdi lagi dulapan tahun zahirnya. Adalah 'umur dunia tiadalah akan berapa lama lagi. Se-baik-baiknya kamu dirikan ugama yang sebenarnya………….Kerinci itu……….

36 *Bersalih, semacam ritual perdukunan. Kata "salih"masih digunakan sebagai gelar bagi orang-orang yang memimpin acara ritual pemujaan terhadap leluhur (Sunliensyar, 2016a).*

lagi berdiri agama sebenanya…………….dan pemangku dan para menteri dan segala 'alim mufakat mendirikan agama amru bilma'ruf wayan hauna 'anil munkar demikian titah Pangeran....."

Terjemahan:

"......adalah yang termaktub di dalam pesan pangeran kepada kamu sekalian para depati, pangeran meminta kalian semua untuk mengembangkan semua hukum syarak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Bermufakatlah kamu dengan semua (malin/ahli agama) yang ada di Alam Kerinci untuk mendirikan agama Rasulullah SAW dan sebisa-bisanya hilangkan semua perkara mungkar (bagian tidak terbaca) dan mengadakan (bagian tidak terbaca) gendang, serunai dan gong serta berbagai hal lainnya (bagian tidak terbaca). Bermufakatlah kamu mencegah hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala dan Rasulnya karena dunia berada di zaman akhir. Ada hadist Rasulullah yang menyebutkan Imam Mahdi akan lahir delapan tahun lagi dan umur dunia ini tidak akan lama lagi. Sebaik-baiknya kamu mendirikan agama yang sebenarnya (bagian tidak terbaca) Kerinci itu. (dan) lagi berdiri agama yang sebenarnya (bagian tidak terbaca) dan pemangku, para menteri dan semua ahli agama bekerjasama mendirikan agama Allah amar ma'ruf wayanhauna 'anil munkar (menyuruh kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang mugkar). Demikianlah titah pangeran."

Sebagai seorang muslim yang taat, sama seperti Sultan Ingalaga, Pangeran Sukarta Negara sangat meyakini akan segera datangnya sang Ratu Adil Imam Mahdi untuk memperbaiki kondisi manusia. Di tengah berbagai bencana dan kondisi buruk yang menerpa Jambi. Mereka percaya bahwa kini mereka hidup di zaman akhir, mendekati kiamat. Tentu hal ini merupakan bagian dari bangkitnya semangat spritiual kaum bangsawan yang telah lama hidup berpoya-poya bersama VOC, sekutu akrab mereka di hilir.

Langkah awal yang diambil oleh Pangeran Sukarta adalah menguatkan kembali hukum Islam di dalam kehidupan sosial masyarakat Kerinci. Perintah yang ia tujukan kepada para depati, menteri dan ulama di seluruh Kerinci adalah untuk memenuhi panggilan suci ber-*amar makruf nahi mungkar*. Meluruskan kembali akidah penduduk Kerinci yang ia anggap sudah jauh melenceng seperti melakukan aktivitas perdukunan, memuja batu, pohon dan berhala; menghapus praktik-praktik tradisi masyarakat yang ia anggap termasuk tradisi *jahiliah* seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan saat menari, mengiringi pemakaman dengan berbagai bunyi-bunyian dan musik hingga praktik menikahkan orang tanpa wali yang syah. Perkara-perkara tersebut harus dicegah sekuat mungkin oleh para depati bersama dengan menterinya dan para ulama di Kerinci. Inilah bentuk-bentuk reformasi di dalam kehidupan sosial yang berusaha diterapkan oleh pangeran di Kerinci.

Tidak hanya reformasi di bidang sosial, Pangeran Sukarta juga memerintahkan untuk mereformasi tata pemerintahan di Kerinci. Bila selama ini kewajiban menegakkan hukum hanya dibebankan kepada para depati, menteri dan pemangku sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak piagam terdahulu, kini para ulama menjadi bagian penting dalam pemerintahan lokal. Pangeran Sukarta memerintahkan pada depati dan perangkatnya bekerja sama dengan para ulama untuk menegakkan hukum syarak. Tidak hanya untuk para depati di Kerinci, tetapi juga pada tata pemerintahan di hulu. Pangeran Sukarta dikelilingi oleh pejabat dari kalangan ulama. Hal ini terlihat saat ia mengutus Tuanku Sidi Abdul Mukmin sebagai wakilnya untuk membawa beberapa surat ke Kerinci (lihat TK 230, 147). Ia juga mengangkat kaum ulama sebagai juru tulis sebagaimana yang dimuat di dalam piagam yang dikirim kepada para depati di Mendapo Limo Dusun. Di dalam surat tesebut disebutkan bahwa Tuan Haji Imam Abdul Ra'uf sebagai penulis surat.

Secara khusus, Pangeran Sukarta Negera mendirikan lembaga yang bertugas menegakkan hukum syarak di tingkat regional meliputi seluruh wilayah Kerinci. Mereka adalah tujuh orang depati yang bermukim di lima dusun (Mendapo Limo Dusun, Sungai Penuh Sekarang). Oleh sebab itu, wilayah yang dikuasai oleh tujuh orang depati ini dinamakan pula sebagai Tanah Pegawai Raja Pegawai Jenang, karena para depati di sanan mengemban tugas khusus yang diberikan oleh Pangeran Sukarta untuk menegakkan hukum syarak dalam lingkup yang lebih luas.

Selain persekutuan depati bertujuh di Tanah Pegawai Jenang Pegawai Raja, teks-teks naskah yang dikeluarkan oleh Pangeran Sukarta Negara juga mengindikasikan telah berdirinya banyak wilayah persekutuan depati di Kerinci. Surat titah (TK 231) yang dikeluarkan oleh Pangeran Sukarta Negara sudah menyebutkan berbagai wilayah persekutuan depati seperti Depati IV, Depati VII, Depati XII dam Depati VIII Helai Kain. Hal ini berbeda dengan naskah-naskah sebelumnya yang hanya menyebutkan wilayah persekutuan yang bernama Depati Empat. Seperti di dalam surat titah yang dikeluarkan oleh Pangeran Sutawijaya untuk Depati Uda Menggala (TK 243). Adanya perubahan jumlah wilayah persekutuan depati sejak era Sutawijaya hingga Sukarta Negara menunjukkan terjadinya peningkatan para penguasa lokal Kerinci yang mengakui otoritas Jambi. Dan yang terpenting lagi proses pembentukan wilayah federasi ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Tidak seketika dalam satu periode seperti yang dinarasikan para sejarawan lokal. Keberadaan federasi Depati IV-VIII Helai Kain mungkin baru terbentuk di akhir masa pemerintahan Sultan Anum Ingalaga dan wilayah hulu saat itu di bawah pemerintahan Pangeran Temenggung Mangku Negara bersama Sukarta Negara.

Di sisi lain, Pangeran Sukarta Negara berusaha meyakinkan para penguasa lokal di Kerinci bahwa ia tidak akan mengubah konsensus dan ketetapan para leluhur terdahulu terkait relasi Jambi dan orang Kerinci termasuk hak-hak para

depati untuk menjatuhkan hukum dan sanksi kepada orang-orang yang melanggar di wilayah mereka. Pangeran Sukarta hanya memberikan sesuatu yang baru di dalam menjalankan pemerintahan dengan pelibatan para ulama. Oleh sebab itu, walaupun Pangeran Sukarta melakukan reformasi di bidang sosial dan pemerintahan. Akan tetapi, reformasi itu tidak sampai merusak hubungan politisnya dengan penguasa Kerinci. Di lain pihak, para penguasa Kerinci tampaknya tidak keberatan dengan hal tersebut karena memang semangat keagamaan juga mulai tumbuh dan berkembang di sana.

Setelah surat yang ia kirimkan kepada para depati di Mendapo Limo Dusun pada tahun 1778, nama Pangeran Sukarta Negara seolah-olah lenyap begitu saja. Tak ada lagi teks-teks surat maupun piagam yang menyebutkan namanya. Sumber-sumber sejarah Jambi pun jarang sekali yang membahas tentang dirinya. Apakah ia wafat atau mengasingkan diri dari panggung politik menuju dunia yang lebih religius tidak ada yang tahu. Namun dalam ingatan masyarakat Kerinci, sang pangeran tetap dianggap sebagai raja bersama dua pangeran yang lain yaitu Pangeran Sutawijaya dan Pangeran Temenggung. Namanya tidak lekang di atas naskah-naskah piagam dan surat titah yang disimpan sebagai pusaka.

Selang empat belas tahun setelah pengiriman surat titah pada 1778, barulah piagam dikirimkan lagi ke Kerinci. Pada masa ini tahta Kesultanan Jambi sudah berganti begitu pula dengan tahta "kecil" di Muara Masumai. Pada tahun 1792, di hilir bertahta Sultan yang menggunakan gelar Sultan Mas'ud Badruddin atau kadangkala disebut Sultan Mas'ud bin Ahmad Badruddin. Sementara itu, di bagian hulu jabatan Pangeran Temenggung dipegang oleh seorang pangeran yang menggunakan gelar leluhurnya Pangeran Temenggung Kebul di Bukit.

Pada masa ini, Pangeran Temenggung Kebul di Bukit mengeluarkan dua naskah piagam yang ditujukan kepada depati yang berbeda. Satu piagam dikirim kepada depati berempat yang ada di Dusun Kumun dan satu piagam dikirim kepada depati bertiga di Dusun Cupak[37]. Secara tekstual, dua piagam menunjukkan pertanggalan yang sama persis. Akan tetapi, terdapat kesalahan pembacaan angka pertanggalan pada naskah piagam Kumun oleh masyarakat setempat. Mereka menyebutkan bahwa piagam Kumun dikeluarkan pada tahun 1106 Hijriah. Padahal di dalam teks piagam disebutkan kata "dua" setelah kata "seribu" sehingga pembacaannya menjadi seribu dua ratus enam bukan seribu seratus enam. Pertanggalan 1206 Hijriah (1792 M) berkesesuaian dengan teks pada cap Kesultanan Jambi yang tertera di dalam naskah. Teks pada cap tersebut menyebutkan nama sultan yang bertahta "Al-watsiq billah wa hadza cap Seri Sultan Mas'ud Badruddin".

Indikasi bahwa piagam Dusun Cupak dan Dusun Kumun dikeluarkan pada hari, bulan dan tahun yang sama terlihat pula dari piagam Cupak. Voorhoeve menyebutkan adanya teks nama depati yang dicoret kemudian diganti dengan nama

---

37 Teks piagam Kumun dapat dilihat pada http://andom99.blogspot.com/2015/01/329-tahun-dusun-kumun.html.

depati yang baru. Selain itu, teks pada dua naskah ini juga menyebutkan bahwa piagam-piagam ini ditulis di tempat yang sama yaitu Muara Masumai. Perbedaan teks kedua piagam ini terletak pada nama-nama Depati yang disebutkan serta batas-batas wilayah kekuasaan mereka yang diakui oleh pihak Jambi. Dua piagam ini menunjukkan bahwa pembentukan federasi depati dan pengesahan wilayah kekuasaan mereka terus berlangsung hingga masa Sultan Mas'ud Badruddin.

Dua tahun kemudian tepatnya pada Juli 1794, sepucuk surat titah (TK 43) kembali dikirim ke Kerinci. Surat titah ini dikirim kepada para Depati di dalam Mendapo Rawang tetapi ditujukan kepada federasi depati yang bernama Depati Empat-Delapan Helai Kain. Surat titah ini dikirim oleh Pangeran Ratu, Pangeran Suria Kesuma dan Sultan (Mas'ud bin) Ahmad Badruddin Almarhum. Kata almarhum yang mengikuti nama Sultan Ahmad Badruddin menunjukkan bahwa sang sultan telah wafat dan kini Pangeran Ratu dan Pangeran Suria Kesuma menjadi penerusnya. Untuk itulah sebuah surat titah kembali dikirim ke Kerinci untuk menegaskan adanya pemerintahan yang baru dan memberitahukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil kepada para penguasa di sana. Berdasarkan hasil transliterasi Voorhoeve, surat titah (TK 43) ini berbunyi:

> "Inilah cap serta tapak tangan Pangeran Suria Kesuma dan Pangeran Ratu serta Raja Sultan Ahmad Badruddin (al) marhum berdaulat di dalam daerah Negeri Jambi yang memerintahkan Sembilan Lurah Puncak Jambi, lagi menghukumkan segala hamba rakyat dengan hukum yang diturunkan Allah Ta'ala seperti dalil di dalam Qur'an "wa'idza hakamtum baina nnaasi 'antahkumu bil'adli (QS 4: 58), artinya: hukumkan antara segala manusia dengan hukum yang adil dan pula firman Allah: "fa'in tanaazaktum fi syai'in farudduuhu 'ila llahi warrasuli (QS 4: 59), artinya: maka jika bersalahan mereka itu pada suatu-suatu kembalilah pada kata Allah dan kata Rasul, serta (dengan) mendirikan kadhi menghukumkan dengan kitabullah, karena kadhi itu jadi suluh bendang negerinya yang mengetahui yang patut jadi raja dan jadi penghulu dan mengetahui sah batal……..Adapun asal kami jadi raja, befirman Allah Ta'ala: "Inni ja'ilun fil 'ardi khalifah (QS 2: 30), demikianlah tatkala nabi Adam jadi…………………..berfirman Allah……… ………………………..Bermula mati Nabi Adam, Sultan kembalilah kepada anaknya jadi sultan. Demikianlah keturunan raja datang sekarang ini adanya[38].
>
> Peri cap serta tapak tangan segala bagian itu yang terbawa kepada Haji Samaruddin datang ke hadapan segala Depati Empat Selapan Helai Kain dalam daerah Negeri Kurinci, yang ditetapkan Allah ta'ala amalnya dan imannya, karena cap serta tapak tangan segala bagian itu naik menitahkan

38 Voorhoeve menambahkan keterangan urutan surat dan ayat alqur'an terkait dengan ayat-ayat yang dikutip di dalam teks surat titah ini. Akan tetapi, keterangan tambahan tersebut keliru. Misalnya QS 4:61 seharusnya QS 4: 58, QS 4: 62 seharusnya QS 4: 59 dan QS 2: 28 seharusnya QS 2: 30.

> segala haji-haji dan segala syaikh-syaikh dan segala Faqih-faqih dan segala imam khatib akan jadi penghubung segala hukum depati dengan hukum kitabullah, karena segala malim (muallim) yang tersebut itu mengetahui segala yang patut didenda segala depati, dan mengetahui segala halal haram pekerjaan depati, karena syarak itu ibu bapak segala pekerjaan. Itulah perintah dari duli Sultan serta Pangeran Suria Kesuma serta Pangeran Ratu, serta Kadhi dalam negeri Jambi adanya. Seboleh-bolehnya mintak dijunjungi oleh segala Depati Empat Selapan Helai Kain serta segala pemangku dan segala merah menti dan segala rakyat yang banyak adanya. Tammatulkalam bilkhair.
>
> Tersurat kitab piagam ini serta cap ini pada malam Jum'at pada dua belas hari bulan Haji pada hijrat Nabi Seribu Dua Ratus Delapan (1208) tahun pada tahun Ba adanya. Yang menyuratkannya Tuan Haji 'Umar serta Tuan Imam Dereuh di Sungai Tabir adanya. La ilaha illa llah."

Diawali dengan teks suci yang memuat perintah tuhan untuk berbuat adil, menyelesaikan perselisihan dengan hukum Islam serta dalil tentang "khalifah" yang melegitimasi kekuasaan para Sultan turun temurun, menunjukkan bahwa surat ini memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Apalagi ia ditulis pada hari suci pula bagi orang Islam yakni hari tasyrik, hari ke-12 Bulan Zulhijjah 1208 Hijriah. Nilai kesucian tersebut memang tidaklah salah karena teks surat ini mengandung perintah sultan untuk mereformasi pemerintahan negaranya terutama di wilayah Kerinci dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum syariat.
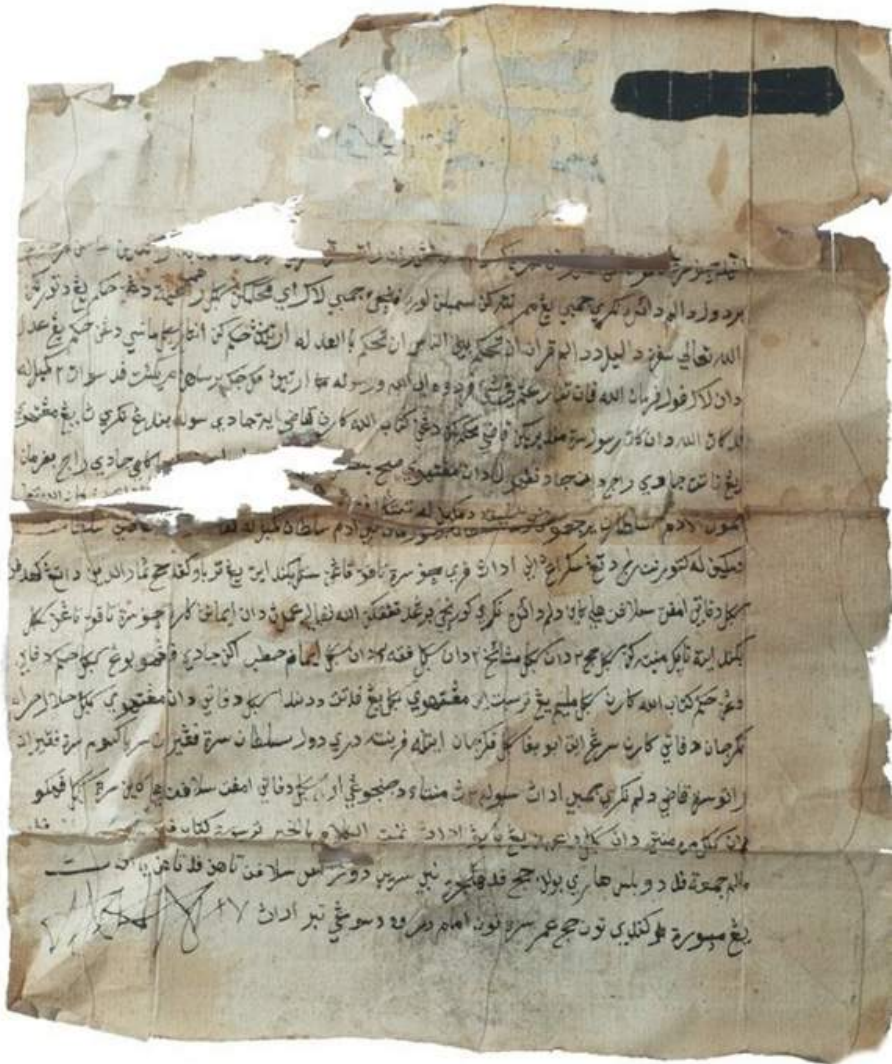
Gambar 16. Surat titah dari Jambi berangka tahun 1208 H yang disimpan di Rawang (TK 43). Dok. British Library, EAP117/2/1/7 (diakses 4 April 2019)

Pangeran Ratu dan Pangeran Suria Kesuma meneruskan cita-cita para pendahulu mereka yakni Sultan Ingalaga, Pangeran Sukarta dan Sultan

Mas'ud Badruddin untuk menegakkan kembali hukum Islam dalam mengelola pemerintahan. Mereka memerintahkan kepada para depati di seluruh Kerinci untuk melibatkan seluruh pemuka dan ahli agama (muallim) seperti para haji, syeikh, fakih, imam dan khatib dalam pengambilan keputusan dan menetapkan hukum. Di dalam pandangan Pangeran Ratu dan Pangeran Suria Kesuma, para Kadhi (ahli hukum Islam) seumpama pelita di dalam sebuah pemerintahan (*suluh bendang di dalam negeri*), oleh karenanya merekalah yang mengetahui siapa yang pantas menjadi raja dan penghulu. Dengan kata lain, pengangkatan para sultan maupun para penguasa lokal harus berdasarkan rekomendasi dari para ulama. Agaknya slogan "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah"* yang masih diucapkan hingga kini, mulai menggema seantero Jambi sejak akhir abad ke-18 M.

Memasuki awal abad ke-19, Jambi masih mengirimkan piagam-piagamnya ke Kerinci. Jambi terus melaksanakan kebijakannya untuk memenuhi keinginan para penguasa lokal di Kerinci yakni untuk mengakui status mereka sebagai seorang Depati dan melegitimasi wilayah kekuasaan mereka. Muara Masumai pada masa ini, dipimpin oleh pangeran yang menggunakan gelar Pangeran Puspa Citra Jaya Kebul di Bukit. Ia tercatat mengeluarkan piagam bertahun 1234 Hijriah (1819 M) (TK 44) untuk Depati Sungai Laga Pertama Tanah Kedipan dari Rawang. Piagam ini merupakan piagam bertanggal paling akhir yang dikeluarkan oleh pihak Jambi ke Kerinci. Piagam-piagam lain tanpa tanggal diperkirakan juga dikeluarkan pada akhir abad ke-18 hingga paruh awal abad ke-19 adalah piagam Depati Karto Gumi Nyato Negaro di Seleman (TK 216) dan Piagam Depati Alam Negeri di Sungai Penuh (TK 2). Piagam tersebut dikeluarkan oleh pangeran di Muara Masumai yang menggunakan gelar Pangeran Temenggung Nyata Negara Kertapati dan Pangeran Nyata Patih Jaya Kebul di Bukit.

E. Menyongsong Kolonialisme

Penutupan loji dagang Belanda di Jambi pada 1768, mulai berdampak positif terhadap jalannya pemerintahan di Jambi. Sebelumnya, para sultan dan pejabat di lingkungan Jambi harus memerintah di bawah bayang-bayang VOC. Setiap pergantian tahta mereka harus memperbarui kontrak dagang dengan VOC. Pihak VOC juga sudah berani mempengaruhi kebijakan politik dan masalah internal kerajaan di mulai dengan masalah suksesi hingga masalah hubungan luar negeri Kesultanan Jambi. Tidak hanya kebebasan berpolitik yang terhalang, tetapi juga gagasan para Sultan yang dibelenggu oleh pihak VOC sehingga kerapkali tidak dapat direalisasikan. Namun kini, para Sultan dan bangsawan sudah terbebas dari berbagai intervensi tersebut. Mereka dapat mengelola negaranya sendiri sesuai dengan kemauan mereka, salah satunya meneruskan keinginan Sultan Anum Suria Ingalaga untuk menguatkan kembali hukum syariat sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di wilayah-wilayah pedalaman. Hal inipun diikuti dengan kebijakan untuk melibatkan para ulama di dalam penyelesaian perkara hukum di tingkat daerah bersama dengan para depati dan menterinya.

Hampir selama setengah abad lebih era pembaruan berlangsung, orang Kerinci mulai menjalin hubungan intens kembali dengan pihak Kesultanan Inderapura. Beberapa kali Sultan Inderapura mengirim surat kepada depati di Kerinci untuk kembali menjalin hubungan dagang dengan mereka. Dua surat dikirimkan kepada Kiai Depati Uda Menggala yang bermukim di Tanah Kampung dan satu surat dikirimkan kepada Kiai Depati Rajo Simpan Bumi yang bermukim di Semurup. Ketiga surat ini ditulis tanpa adanya informasi pertanggalan. Akan tetapi, bila dilihat dari struktur bahasanya ketiga surat ini ditulis antara akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 M.

Dua surat yang dikirim kepada Kiai Depati Uda Menggala, masing-masing dikeluarkan oleh sultan yang berbeda. Surat TK 246 dikeluarkan sultan yang menggunakan gelar Raja Ahmadsyah sedangkan TK 248 dikeluarkan oleh Sultan Pesisir Barat. Sultan Pesisir Barat diperkirakan merupakan raja yang menggantikan Raja Ahmadsyah (lihat halaman 61). Surat TK 246 berbunyi:

> Salam do'a daripada Yang dipertuan Raja Ah(m)ad Sah disampaikan Allah Subhanahu wata'ala kiranya piak d…………….yaitu Kiahi Depati Uda Menggala lagi 'arif bijaksana kepada sekalian pekerjaan barang tahu saudara hamba Kiahi Depati Uda Menggala karena Inderapura sudah binasa dan tuanku sudah…………tinggal hamba satu saja yang tuo batang tahu saudara hamba, kemudian daripada itu………….teguh kepada perbuatan kita bersaudara ramaikan juga Bandar Inderapura dan………Tapan dan buka jalan di hulu Tapan, tak dapat tiada buka jua jalan itu oleh saudara hamba, jikalau lagi teguh saudara hamba kepada perbuatan setia yang dahulu karena kita ……rang bersaudara karena bapak kita sudah mati, kita perbaiki sekalian pekerjaan jangan berubah perbuatan orang tua-tua. Kemudian dari itu s………….tiada candak mati hamba minta do'a pada malam dan siang pagi dan petang s….mat kepada Allah. Tammat.

> Terjemahan:
>
> Salam do'a dari Yang Dipetuan Raja Ahmadsyah semoga disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kiranya kepada....... Kiai Depati Uda Menggala orang yang arif bijaksana untuk semua pekerjaan. Mungkin sudah tahu saudara saya Kiai Uda Menggala, bahwa Inderapura sudah rusak dan Tuanku sudah........tinggal saya seorang saja yang tua. Kemudian selanjutnya, (jikalau masih) teguh pada perbuatan kita bersaudara, (mohon) ramaikan juga Bandar Inderapura dan (Bandar) Tapan serta bukalah jalan di Hulu Tapan, tidak dapat tidak. Buka jalan itu oleh saudara saya, jikalau masih teguh kepada perjanjian yang terdahulu. Karena kita (o)rang bersaudara dan Bapak kita sudah meninggal, kita perbaiki semua pekerjaan, (supaya) jangan berubah perbuatan orang tua terdahulu. Kemudian selanjutnya s...... tidak

> berhenti (tiada candak mati?) saya meminta doa selamat pada malam, siang, pagi dan sore kepada Allah. Tamat.

Surat TK 246 ini memiliki kesamaan isi dengan TK 248 (lihat halaman 51-52) yaitu permintaan dari Sultan Inderapura kepada Kiai Depati Uda Menggala untuk segara mengadakan perniagaan ke bandar-bandar yang ada di wilayah Kesultanan Inderapura seperti Bandar Inderapura dan Bandar Tapan. Secara khusus pada TK 246 Raja Ahmadsyah juga meminta "saudaranya" Kiai Uda Menggala untuk membuka jalan baru melalui Hulu Tapan untuk memudahkan perjalanan para peniaga dari Kerinci langsung menuju Tapan. Surat permintaan dagang juga dikirimkan kepada Depati bertiga dan Menteri yang delapan serta secara khusus ditujukan Kiai Raja Simpan Bumi di Semurup oleh Orang Kaya Serian dan Orang Kaya Petor Muda (TK183). Hasil alih aksaranya menurut Voorhoeve (1941: 136) adalah sebagai berikut:

> "Alamat surat titah daripada Yang dipertuan Seri Sultan dalam Inderapura serta menteri yang dua puluh, barang disampaikan Allah subhanahu wata'ala kiranya kepada dupati yang batiga lawan pemangku dengan penggawa serta menteri yang selapan dalam tanah kurinci dalam negeri Semurut. Adapun seperti surat yang dikirimkan kepada kami sudah sampai, terlalu sukalah hati kami pada mendengar bunyi dalam surat itu menimbulkan yang usu dan hendak meramaikan bandar Inderapura. Lalu kepada kicang kecoh dalam Inderapura sudah habis Kami besarkanlah karena kita hendak ramai. Seperkara lagi pada jenis perniagaan sudah dilihat Raja Indera Suta, Tuwan Raja Hamat dan Meti dalam rinci. Tammat. Kauluhulhakk.
>
> Salam Allah………………………dibarakat Muhammadin saidil'anam amin ya Rabba l'alamin. Maka dapat daripada surat ta'lim dan takrim dan tabik banyak-banyak daripada orang kaya Serian dan orang kaya Petor Muda barang disampaikan Allah kiranya kepada Raja Kiai Dipayi Simpan Bumi dengan segala dipati semuanya dalam negeri Kerinci. Waba'du kemudian itu karena surat ini seperti janji tahu sekarang sudah datang barang-barang berniaga jenisnya selampuri hitam beseta itam besar beseta putih besar, beseta itam kecil, beseta (putih) kecil, zusilangan, kasah putih halus, kasah putih kasar, kasah merah halus, perkara (merah), giras putih, ipuh, kendakin, beseta papan, ginggang lagi sekih, ada besi panjang lagi semoa elok barang-barang. Karena itu kami suka Raja Dipati Simpan Bumi dengan orang banyak dari Air Aji berniaga bawak barang-barang lagi gading gajah dan lilin dan banyak-banyak tali Kerinci yang putar tiga lain-lain yang boleh dapat dalam negeri Kerinci. Tetapi jangan lupa bawa emas banyak-banyak ke dalam Air Aji, karena banyak barang sempati (?) banyak lurus, jangan takut

hitu (hiru) biru, tidak lain sekarang cenderamata orang kaya Serian dan Orang kaya Petor Muda sekayu paerkala merah se seperti tunjukkan baharu suruh dengan surat ini sama-sama habis bahagi barang yang patut itu kepada Raja Simpan Bumi. Wassalam bilkhairi. Tammat. Ini kepada Raja Simpan Bumi".

Terjemahan:

Alamat surat titah dari Yang Dipertuan Seri Sultan dalam (negeri) Inderapura serta Menteri yang Dua Puluh, semoga disampaikan kiranya oleh Allah SWT kepada Depati yang Bertiga, beserta pemangku dan punggawanya, serta menteri yang delapan di Tanah Kerinci, Negeri Semurup. Adapun surat (yang telah) dikirimkan kepada kami sudah sampai. Sangat senang hati kami mendengar isi surat tersebut, menimbulkan yang usu(l)(?) dan hendak meramaikan Bandar Inderapura. Kemudian masalah *kicang kecoh* (penipuan dan kecurangan) sudah tidak ada lagi dan kami memperbesar (bandar itu) supaya ramai. Satu hal lagi bahwa berbagai jenis barang perniagaan sudah dilihat dengan rinci oleh Raja Indera Suta, Tuan Raja Hamat dan Meti. Tammat Kauluhulhaq.

Salam Allah .... dibarakat Muhammadin Sayyidil'anam, amin ya Rabbal'alamin. Maka diperoleh surat taklim dan takrim serta penghormatan sebanyak-banyaknya dari Orang Kaya Serian dan Orang Kaya Petor Muda, semoga disampaikan Allah kiranya kepada Raja Kiai Depati Simpan Bumi serta semua depati di dalam Negeri Kerinci. Wa ba'du kemudian karena surat ini adalah surat janji pemberitahuan, (maka diberitahukan) bahwa telah datang berbagai jenis barang perniagaan seperi Salempuri Hitam, Bashta Hitam Besar, Bashta Putih Besar, Bashta Hitam Kecil, Bashta Putih Kecil, Zusilangan (?), Kasah (Serasah?) Putih Halus, Kasah Putih Kasar, Kasah Merah Halus, Perkara Merah, Giras Putih, Ipuh, Kendakin, Bashta Papan, Kendakin, Ginggang, sekin, dan besi panjang, semuanya adalah barang-barang yang bagus. Oleh sebab itu, kami sangat senang bila Raja Depati Simpan Bumi bersama orang banyak pergi ke Air Haji untuk berniaga dengan membawa barang-barang lagi seperti gading gajah, lilin, dan tali-tali dari Kerinci yang putar tiga serta hal-ha lain yang ada di Negeri Kerinci. Jangan lupa untuk membawa emas yang banyak ke Air Haji karena banyak barang yang menarik lagi disukai. Jangan takut pada kekacauan/keributan. Sekarang ini ada cenderamata dari Orang Kaya Serian dan Orang Kaya Petor Muda, sekayu (hitungan untuk kain) Perkala Merah yang baru menyertai surat ini, bagikan sampai habis kepada orang-orang yang patut menerimanya oleh Raja Simpan Bumi. Wassalam Bilkhair. Ini untuk Raja Simpan Bumi.

Teks naskah ini menginformasikan tentang barang-barang yang menjadi komoditas perdagangan antara orang Kerinci dengan pihak Kesultanan Inderapura. Orang-orang Kerinci menukarkan berbagai hasil sumber daya alam yang ada di Kerinci seperti gading gajah, lilin (resin pinus,damar dan kemenyan), tali temali dan emas dengan barang-barang yang mereka butuhkan seperti garam, besi dan berbagai jenis logam, senjata (sekin, ginggang) serta berbagai jenis kain seperti kain Bashta India, Kain Salempuri, Kain Perkala dan Kain Kasah (Serasah?) dengan berbagai ukuran dan warna. Berbagai barang tersebut dibawa oleh pedagang asing dari luar Inderapura yang bergelar Orang Kaya Serian dan Orang Kaya Petor Muda. Pihak Inderapura berperan sebagai perantara antara pedagang asing dan orang Kerinci dengan cara memfasilitasi aktivitas perniagaan tersebut seperti memperluas bandar dan membuat kebijakan untuk menghapus perbuatan curang dan penipuan saat perdagangan berlangsung.

Cara diplomasi yang dilakukan oleh penguasa Inderapura untuk membujuk penguasa Kerinci-pun juga terungkap di dalam naskah. Para sultan Inderapura mengirim hadiah-hadiah berupa kain mahal kepada para Depati Kerinci agar mereka tertarik untuk berdagang ke Inderapura. Seperti di dalam TK 248 diketahui bahwa Sultan Pesisir Barat mengirimkan kain warna emas bersama suratnya kepada Depati Uda Menggala. Cara serupa juga digunakan oleh Orang Kaya Petor Muda dan Orang Kaya Serian kepada Kiai Raja Simpan Bumi, mereka mengirimkan sejumlah kain Parkala Merah untuk Kiai Raja Simpan Bumi serta orang-orang yang patut diterimanya. Bahkan di dalam surat yang lain (TK 86) disebutkan bahwa pengiriman hadiah kepada orang Kerinci merupakan adat para leluhur terdahulu (*.....adapun perbuatan yang tersebut di atas ini, buatan nenek dahulu kalanya...*), bahwa bila datang surat dari Kesultanan Inderapura ke Kerinci harus beserta dengan “ekor dan kepalanya”. Yang dimaksud ekor dan kepala surat adalah barang-barang hadiah berupa: *beliung nan sebilah, lading nan sebuah, besi baja satu potong, kain Perkala satu kayu, garam nan selimih, pisau nan selusin, pedandang nan sekayu* dan *seputangan nan selusin.*

Upaya merajut kembali jalinan persahabatan dengan penguasa Kerinci juga dilakukan oleh Sultan Muhammad Syah Johan Berdaulat pada tahun 1831 M (1246 H). Ia mengirim dua surat (TK 140, 141) kepada persekutuan depati bertiga dan menteri berenam di Negeri Kemantan Darussalam. Di dalam TK 141, sang sultan menyatakan telah menasbihkan penguasa Kemantan terdahulu yang bernama Baginda Raja Muda Tua menjadi Raja Pangeran (*.....Raja Muda Tuha inilah ditukar gelar Raja Pangeran dengan dibacakan fatihah tatkala mematikan kerbau seekur*) (Voorhoeve, 1941: 104). Hubungan kekerabatan antara Inderapura dan pihak depati di Kemantan sendiri dijelaskan di dalam surat yang lain yakni TK 141. Di dalam naskah itu diceritakan bahwa salah seorang Sultan Inderapura bernama Sultan Gelumat pernah melarikan diri ke Kerinci dan menuju ke Kemantan. Di sana ia menikahi seorang perempuan yang ditaksirnya dan memiliki seorang anak laki-laki yang setelah dewasa dinobatkan pula sebagai

Raja Muda (Voorhoeve, 1941: 102-103). Oleh sebab itu, tidaklah salah bahwa pihak Kesultanan Inderapura menganggapnya sebagai seorang pangeran.

Di lain pihak sejak akhir abad ke-18 M, nasib buruk sedang menerpa sekutu lama Jambi dan Inderapura yakni VOC. Organisasi dagang Belanda ini terus dilanda krisis akibat kerugian yang terus menerus terjadi. Hal ini diperparah oleh kekalahan Kerajaan Belanda melawan Inggris (Gaastra, tanpa tahun: 42). Tepat di awal abad ke-19 M, VOC dinyatakan bangkrut, semua asetnya di Hindia Timur diambil oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1807, seorang Gubernur Jenderal bernama Daendels dikirim ke Hindia Timur untuk memulai reorganisai besar-besaran (Gaastra, tanpa tahun: 43). Akan tetapi, situasi politik dunia terutama di Eropa yang sedang kacau, menjadikan pemerintahan di Hindia Timur tidak berjalan secara optimal. Pada tahun 1811, Inggris menduduki beberapa pelabuhan di Hindia Timur dan berhasil menguasai Pulau Jawa. Selama beberapa tahun sebagian besar Hindia-Timur dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1816, terjadi perjanjian antara Inggris dan Belanda. Perjanjian tersebut memaksa Inggris untuk mengembalikan wilayah jajahan Belanda di Hindia-Timur (Ricklefs, 1991: 111-114). Sejak saat itu pula, Hindia-Timur resmi menjadi negara koloni bernama Hindia-Belanda yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda di Eropa.

Berdirinya pemerintahan Kolonial Belanda, telah membuat mereka semakin masif untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah kerajaan bekas sekutu VOC di masa lalu. Sebagian besar wilayah di Pesisir Barat dan Timur Sumatra berhasil diduduki oleh Belanda setelah traktat London pada 1824 (Ricklefs, 1991: 142; Locher-Scholten, 2004: 57). Inderapura saat itu secara resmi menjadi wilayah koloni Belanda. Para Sultan yang berkuasa di sana diangkat sebagai pejabat Belanda dengan status sebagai Regent. Para sultan ini diangkat atas persetujuan pihak Belanda dan dituntut menandatangani kontrak di bawah Kerajaan Belanda. Mereka menjalankan pemerintahan di bawah kendali pejabat Belanda yang berada di atas mereka.

Narasi lain terjadi di wilayah Kesultanan Jambi, sejak Belanda berupaya menaklukan Kesultanan Palembang di tahun 1819-1821, Jambi yang kala itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Mohiddin (1812-1833) secara aktif membantu kerajaan jirannya itu .(Meng, 1996: 10; Locher-Scholten, 2004: 55). Pada tahun 1833, tahta Kesultanan Jambi dipegang oleh Sultan Muhammad Fakhrudin (1833-1841) atau dikenal pula sebagai Sultan Keramat. Saat itu, sejumlah bajak laut yang dipimpin Tengku Long memasuki perairan Jambi di Tungkal dan oleh pasukan Belanda, mereka berhasil ditumpas dari perairan Jambi. Akan tetapi, tindakan Belanda tersebut belum mampu memenangkan hati Sultan Keramat untuk memperbarui konsensi dengan pihak Belanda sejak dibatalkan oleh Sultan Ingalaga lebih dari setengah abad silam (Meng, 1996: 11; Locher-Scholten, 2004: 58).

Pada November 1833, pasukan Sultan Keramat terlibat pertempuran dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Michiels di Sungai Baung,

Rawas, dekat perbatasan Jambi dan Palembang. Pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh pihak Belanda dan memaksa Sultan Keramat menandatangani perjanjian Korte Verkelaring pada 14 November 1833 (Locher-Scholten, 2004: 72). Perjanjian tersebut disempurnakan setahun kemudian dalam bentuk traktaat pada 15 Desember 1834 oleh Residen Palembang Proetorius. Dengan demikian, sejak saat itu secara resmi Kesultanan Jambi termasuk ke dalam wilayah Kolonial Hindia Belanda setelah sekian lamanya pemerintahan Jambi berjalan tanpa gangguan pihak asing (Meng, 1996: 11).

Setelah Sultan Keramat wafat, tahta Jambi diserahkan pada saudara termudanya Sultan Abdurrahman Nazaruddin (1841-1855). Tidak lama memegang jabatan Pada tahun 1855 Sultan Nazaruddin wafat, dan tampuk kekuasaan diserahkan kepada Pangeran Ratu Thaha Jayadiningrat, keponakannya yang juga anak Sultan Keramat. Pangeran Ratu diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Thaha Syaifuddin (Meng, 1996: 12; Chatib dkk, 2011: 48).

Sultan Thaha yang ditempa dengan pengetahuan agama sejak kecil, dan bahkan diceritakan pernah menuntut ilmu ke Aceh pada usia remaja memiliki semangat juang yang tinggi. Ia tidak rela negerinya dijajah oleh kaum "kafir" Belanda. Penentangannya terhadap penjajahan Belanda di mulai segera setelah ia naik tahta. Pada tahun 1856/7, ia dengan berani membatalkan semua konsensus dan perjanjian yang telah dibuat oleh ayahnya dengan Belanda. Tindakan Sultan Thaha semakin berani ketika pada Oktober 1857, ia mengutus kerabatnya ke Singapura dengan maksud bertemu dengan utusan Turki dan untuk mendeklarasikan Jambi berada di bawah kekhalifahan Turki (Locher-Scholten, 2004: 72). Aksi-aksi yang dilakukan Thaha membuat geram pemerintah Kolonial Belanda. Mereka mengancam Sultan Thaha dengan ancaman pengasingan ke Batavia sebagaimana yang terjadi pada kakek buyutnya di masa lalu (Meng, 1996: 13-14). Akan tetapi, ancaman tersebut sama sekali tidak direspon oleh Sultan Thaha. Ia malah menyiapkan pasukannya untuk menyerang pasukan Belanda yang berkedudukan di Kumpeh.

Melihat tindakan Sultan Thaha yang semakin agresif, membuat pamerintah Hindia-Belanda bertindak cepat. Pada September 1858, pemerintah Hindia mengutus Residen Palembang dan asistennya saat itu untuk mengadakan perundingan damai dengan Sultan Thaha. Akan tetapi, perjanjian yang berlangsung selama tiga hari tersebut tersebut hanyalah sia-sia belaka. Kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat di antara mereka. Thaha menolak sebagian besar poin-poin perjanjian yang ditetapkan oleh Belanda. Akibat buntunya perundingan tersebut, pada 2 September 1858 Belanda kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Thaha (Locher-Scholten, 2004: 123). Bahwa Sultan Thaha diberi kesempatan berfikir selama dua hari untuk menyetujui perjanjian baru. Jikalau Thaha tidak menyetujuinya, pasukan Belanda akan dikirim ke Jambi, Thaha akan diturunkan dari tahtanya dan diganti dengan raja baru yang loyal kepada Belanda. Selain tu, Thaha juga akan diasingkan ke Batavia (Meng, 1996: 15).

Militer Belanda mulai menjalankan strateginya untuk menangkap Thaha, bersamaan dengan dikirimnya surat ultimatum kepada Thaha, mereka telah menyiapkan angkatan perang di Muara Kumpeh. Sebanyak 30 kapal perang ditambah dengan ribuan pasukan di bawah komando Mayor van Langen (Meng, 1996: 15). Pada 6 September 1858, pasukan Belanda beserta angkatan lautnya bergerak menuju Keraton Kesultanan Jambi di Tanah Pilih, tepat pada pukul tiga pagi mereka menyerang benteng Keraton. Sekitar 50 prajurit Thaha gugur mempertahankan istana. Sedangkan di pihak Belanda empat prajuritnya gugur dan puluhan terluka serta satu kapalnya berhasil ditenggelamkan ke Sungai Batanghari oleh pasukan Thaha (Meng, 1996: 15; Locher-Scholten, 2004: 124).

Jikalau melihat besarnya kekuatan militer Belanda menggempur Tanah Pilih, sangat mustahil bagi Thaha dapat mempertahankan istananya. Sore harinya, Belanda berhasil masuk ke dalam keraton. Sayangnya mereka tidak menemukan Thaha dan pendukungnya, mereka secara diam-diam telah menyingkir ke Muara Tembesi bersama dengan regalia kesultanan yang ia bawa (Locher-Scholten, 2004: 124). Pada 8 September 1858, keraton Kesultanan Jambi dibumihanguskan oleh Belanda dan satu bulan kemudian mereka mengangkat Sultan Ahmad Nazaruddin untuk menggantikan Sultan Thaha.

Bagi Thaha, pertempuran di awal September 1858 hanyalah awal dari perjuangannya menentang dominasi Belanda atas kekuasaannya. Di Hulu, ia kembali menyusun kekuatan dan strategi perang untuk melawan kekuataan Belanda yang telah bercokol di hilir. Meskipun ia telah dimakzulkan oleh Belanda, Thaha tetap didukung oleh rakyatnya yang ada di hulu. Begitu pula dengan sebagian kerabat dan anggota bangsawan Jambi lainnya. Kedudukannya sebagai sultan masih tetap diakui selama regalia kesultanan masing dipegang oleh Thaha.

Serangan mendadak Belanda di pagi buta pada 6 September 1858, telah menyisakan kenangan pahit bagi Thaha sendiri. Meskipun ia dan anggota keluarganya berhasil menghindari tangkapan Belanda. Ia masih menyimpan duka mendalam akibat prajurit terbaiknya yang gugur serta melihat istananya yang telah berdiri ratusan tahun dibakar oleh pihak Belanda. Sampai-sampai ia mengirim surat kepada para Depati di Kerinci (TK 167-168). Dua surat ini memiliki isi yang sama persis, tetapi surat TK 168 memuat keterangan yang lebih lengkap. Surat yang disimpan oleh Depati Raja Simpan Bumi, di Dusun Koto Dua Semurup ini menurut Voorhoeve berbunyi (1941: 127-128), berbunyi:

> "Alamat surat barang siapa menjadikan rebut rampas tuwah parang itulah yang mengubahkan setia Pangeran Kebul di bukit……………. kata………………. Bismillahi rrahmani rrahim. Ya hu wa ya man huwa ya Allah ta'ala. Bahwa ini surat Depati Raja Simpan Bumi datang kepada Depati Tata Negara kepada Depati Uda Menggala kepada Depati Riyam(?) kepada Depati Turgumi kepada Depati Suka Beraja yang beroleh jasa yang beroleh ikamat dari dunia datang ke akhirat oleh karena negeri Sultan sudah binasa amba ra'yatnya sudah binasa sebabnya Depati Raja Simpan Bumi

menjunjung titah Sultan Depatipun ilirlah ke Jambi patut akan ditinjau beta ke Jambi oleh Depati segala oleh setia tiada berubah seperti dahulu kala jua. Tammat."

Terjemahan:

Alamat surat, barang siapa mengambilitulah yang merusak persumpahan setia Pangeran Kebul di Bukit........kata........... Bismillahirrahmanirrahim. Ya huwa ya man huwa ya Allah Ta'ala. Bahwa inilah surat (yang dibawa) Depati Raja Simpan Bumi kepada Depati Tata Negara, Depati Uda Menggala, Depati Aturbumi dan Depati Suka Beraja, yang memperoleh jasa dan hikmat dari dunia hingga akhirat. Oleh karena negeri sultan sudah hancur, hamba rakyatnya sudah binasa, itulah sebabnya Depati Raja Simpan Bumi menjunjung titah sultan. Depati-pun hilirlah ke Jambi, patut dijenguk saya ke Jambi oleh depati semua. Adapun sumpah setia tidak berubah, seperti dulu kala juga. Tammat.

Surat ini memang tidak menyebutkan pertanggalan dan nama pengirimnya. Akan tetapi, sangat jelas dikirim di dalam situasi pasca-peperangan. Indikasi tersebut terlihat dari beberapa hal. Pertama, bagian awal surat yang diawali dengan peringatan yang berhubungan dengan perang "*barang siapa menjadikan rebut rampas tuah perang itulah yang mengubah setia...* (Barangsiapa yang mengambil keuntungan/harta rampasan dari peperangan itulah yang merusak sumpah...). Kedua, surat ditulis dengan terburu-buru tanpa melalui prosedur yang biasa dilakukan oleh pejabat Kerajaan Jambi. Biasanya, surat-surat resmi kesultanan akan dibubuhkan stempel kerajaan dan dibawa oleh jenang ke Kerinci melalui Pangeran Temenggung di Muara Masumai. Akan tetapi, karena situasi yang sedang kacau pasca-peperangan, prosedur tersebut dilangkahi. Depati Raja Simpan Bumi, salah seorang penguasa dusun di Kerinci yang mungkin kebetulan sedang berada di hilir ditugaskan membawa "surat kaleng" dari sultan untuk disampaikan kepada rekan-rekannya sesama Depati di Kerinci. Keempat, sultan memerintahkan kepada para depati yang disebutkan di dalam surat untuk menjenguknya ke hilir karena negerinya sudah hancur dan rakyatnya banyak yang binasa. Hal ini semakin menegaskan surat dikirim pasca terjadinya peperangan yang menghancurkan negeri sultan dan menewaskan banyak *kawula*nya. Sepanjang sejarah Jambi, satu-satunya pertempuran besar yang mengakibatkan hancurnya keraton sultan di Tanah Pilih dan menewaskan banyak prajuritnya adalah serangan tanggal 6-8 September 1858 saat Sultan Thaha berkuasa. Dengan demikian, semakin jelas bahwa surat ini dikirim oleh Sultan Thaha ke Kerinci tidak lama setelah gempuran di Tanah Pilih.

Surat lain yang dikirim oleh Sultan Thaha ke Kerinci adalah surat titah (TK 207) yang disimpan oleh Depati Serah Bumi Sirah Mato di Dusun Seleman, tetapi surat ini ditujukan kepada persekutuan Depati Empat dan Depati Tiga Helai Kain. Bunyi surat tersebut menurut Voorhoeve adalah sebagai berikut.

> "(cap kerajaan) itulah jejakan kalam terbit dari bawah duli Sultan Taha dengan izin semua bakti-bakti dijunjungkan kepada Dipati-Dipati Empat serta dengan Dipati Tiga Helai Kain. Kemudian daripada itu, oleh karena…………kepada segala kami……meikrar salin aku kepada……………………dengan Duli Sultan……………..kepada Dipati Empat serta dengan Dipati Tiga Helai Kain…………..hendak bengkawikan anak baginda Pangeran Dipati hendak bersuka beramai dengan segala hamba ra'yat baginda, hendaklah kamu sekian-sekian hilir dengan adat segala permainan kamu. Dan oleh karena kebesaran duli Sultan, kelakati yang kamu hilangkan itu ilir kini kamu mengadap ke bawah duli Sultan jangan kamu takut dan duli Sultan mintak salinan tiga pada segala kamu dan mintak unjung yang banyak kepada sekalian kamu dan mintak carikan jualan gadang dengan mintak carikan jualan sando. Tammat assalam".
>
> Terjemahan:
>
> (cap kerajaan) itulah jejakan kalam (alat tulis?) yang terbit dari Duli Sultan Thaha atas izin semua bawahan ditujukan kepada Depati Empat dan Depati Tiga Helai Kain. Kemudian daripada itu, karena [......] hendak mengawinkan anak Baginda (yaitu) Pangeran Depati, (oleh karenanya Baginda) hendak bersuka cita dan berkumpul dengan semua hamba rakyatnya. Hendaklah kamu semua hilir (ke tempat sultan) dengan adat dan semua permainanmu. Dan karena kebesaran (hati) Duli Sultan, *kelakati* (kacip pinang) yang kamu hilangkan, hilirlah sekarang menghadap Sultan dan jangan takut. Dan juga Duli Sultan meminta salinan tiga dan *unjung* yang banyak kepada semua kamu serta minta dicarikan jualan besar dan jualan *sando* (gadai). Tammat assalam.

Surat ini mengandung informasi bahwa pada masa itu Sultan Thaha hendak mengadakan pesta pernikahan putranya Pangeran Depati sehingga Thaha meminta penguasa Kerinci Depati Empat dan Tiga Helai Kain untuk menghadiri dan memeriahkan pesta tersebut dengan berbagai macam permainan khas Kerinci. Thaha juga berpesan bahwa ia telah memaafkan para Depati tersebut karena *kelakati* (kacip pinang) yang mereka hilangkan. Kacip pinang yang sering disebut sebagai *kelakati bagumbak emas* merupakan salah satu regalia kesultanan Jambi. Kacip pinang tersebut adalah simbol relasi antara Depati Empat di Kerinci dan Kesultanan Jambi (Utomo dkk, 2009: 103). Thaha mungkin punya alasan yang lebih penting tentang mengapa ia memaafkan tindakan penghilangan harta kesultanan Jambi yang bernilai itu. Tampaknya, Thaha membutuhkan sokongan dana dari penguasa Kerinci selama perang gerilya yang ia kobarkan berlangsung. Hal ini tersirat dari pesan Thaha kepada Depati Empat untuk membawa serta *unjung* (persembahan) yang banyak serta meminta mereka mencarikan barang-barang yang bisa dijual dengan harga tinggi dan yang bisa digadaikan.

Posisi para penguasa Kerinci saat itu, sudah jelas mendukung perjuangan Thaha menentang Belanda, Komunikasi Thaha yang terus berlangsung dengan para Depati dan permintaan Thaha untuk membantu sokongan dana mencerminkan hubungan baik antarmereka. Apalagi perjuangan Thaha bukan dilandasi oleh ambisi politik semata tetapi dilandasi oleh ideologi keagamaan yakni *jihad fisabilillah*. Kaum ulama yang semakin mendapatkan tempat di tengah pemerintahan adat di Kerinci sejak masa Sultan Ingalaga, telah mengembalikan kehidupan yang lebih religius pada masyarakat Kerinci. Kehidupan yang lebih religius tercermin pula dari meningkatnya jama'ah haji yang berasal dari Kerinci. Di tahun 1289 H (1872/3) saja, ditemukan sekitar enam puluh tiga stempel jama'ah haji yang berasal Kerinci dalam satu dokumen bersama dengan jama'ah haji asal Aceh (Gallop, 2018: 18).

Semangat jihad dan kehidupan Islami yang lebih konservatif semakin menguat di dalam kehidupan orang Kerinci ketika mereka melakukan kontak dengan orang Aceh yang juga sedang mengobarkan perang fisabilillah melawan Belanda. Perjuangan kelompok-kelompok Islam semacam ini hampir merata terjadi di seluruh pedalaman Sumatra. Di Minangkabau saja, terdapat gerakan paderi yang menimbulkan pertentangan dengan kaum adat. Akan tetapi, di Kerinci pertentangan itu tampaknya tidak pernah terjadi karena kaum ulama sendiri telah ditempatkan dalam posisi penting di dalam pemerintahan adat sejak turunnya perintah dari Pangeran Ratu pada 1794. Gerakan-gerakan penentangan yang dilakukan oleh orang Kerinci diarahkan untuk melawan Belanda termasuk dengan cara mendukung perjuangan Sultan Thaha.

Kerinci ibarat satu zona strategis yang berada di tengah persimpangan jalan. Meskipun dikelilingi oleh perbukitan tinggi sebagai benteng alaminya, Kerinci tetap saja bisa dimasuki dari berbagai arah oleh pihak Belanda. Dari jalur Timur, sudah pasti Belanda lebih kesulitan memasuki Kerinci karena harus terlebih dulu melawan pasukan Thaha. Akan tetapi, jalur barat merupakan jalur yang sangat rawan karena Inderapura yang merupakan sekutu penguasa Kerinci kini secara penuh berada di bawah kendali Belanda. Orang Kerinci mesti siap siaga menghadapi kemungkinan masuknya pihak asing secara mendadak ke Kerinci. Kewaspadaan orang-orang Kerinci terlihat ketika Mr. Campbell dari Muko-muko masuk ke Kerinci untuk melakukan penelitian pada 1800. Para lelaki Kerinci digambarkan mencurigai Campbell sebagai mata-mata Inggris dan barang bawaannya kalau-kalau terdapat "periuk api' (sebutan mereka untuk senjata api) (Marsden, 1999). Sikap orang Kerinci yang menentang Belanda juga tampak dengan gagalnya tim ekspedisi Belanda memasuki wilayah Kerinci pada 1870-an. Kedatangan mereka ditolak oleh para penguasa lokal sehingga tidak ada jaminan keamanan bagi mereka (Veth, 1881).

Sebuah laporan yang dikirim oleh pejabat Belanda di Sumatra Barat kepada pemerintah pusat di Batavia, menceritakan bagaimana perilaku-perilaku penguasa Kerinci menunjukkan sikap perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1875,

seorang Kerinci bernama Haji Muhammad Nur yang berasal dari Dusun Cupak diusir keluar dari wilayah Kerinci karena dianggap sebagai mata-mata Belanda (Madjied, 2012: 8). Hal ini dikarenakan masalah sepele, Ia dituduh menunjukkan jalan menuju Kerinci kepada Belanda lantaran ia pulang ke Kerinci dengan berkuda.

Belanda yang bercokol di Inderapura-pun tampaknya mulai bersikap agresif terhadap kedaulatan para penguasa Kerinci. Pada paruh akhir tahun 1887, mereka mendirikan dua tiang trianggulasi di wilayah Kerinci. Titik trianggulasi itu bertujuan untuk menandai wilayah teritori pemerintah Belanda dengan wilayah Kerinci yang masih merdeka. Namun beberapa bulan kemudian, tiang tersebut roboh dan orang-orang Kerinci dengan serta merta dituduh sebagai penyebabnya. Padahal nyatanya, tiang tersebut roboh dengan sendirinya akibat titik pemasangannya yang tidak tepat (Madjid, 2012: 8). Melihat peristiwa tersebut, Residen di Sumatra Barat mengusulkan untuk membuat perjanjian dengan penguasa Kerinci terkait dengan batas-batas wilayah Kerinci sebagai negeri merdeka dengan Inderapura sebagai bagian dari *gubernemeen.* Menurut Madjid (2012: 8-9) usulan itu juga menyebutkan poin-poin perjanjian yang lain yakni kesepakatan untuk menyerahkan penjahat perang yang tertangkap di wilayah masing-masing, peraturan penjualan kopi dari Kerinci di wilayah Tapan dan pendirian rumah untuk gudang garam di Inderapura.

Pada 26 Mei 1888 bertepatan dengan pertengahan Ramadhan 1305 Hijriah dilakukanlah perundingan antara Regent sekaligus Sultan Inderapura yang bernama Sultan Permasnyah atau dikenal pula sebagai Marah Muhammad Baki dengan persekutuan depati dari Kerinci yang disebut sebagai Depati Empat Pemangku Lima nan Selapan Helai Kain untuk menentukan batas-batas wilayah kedua belah pihak (Aken, 1915: 6-7). Dalam perjanjian tersebut didapatkan hasil bahwa kedua wilayah dibatasi oleh Bukit Paninjau Laut. Jajaran Bukit Paninjau Laut ke sebelah pesisir laut adalah batas Inderapura sedangkan yang ke sebelah Kerinci merupakan batas dari Depati Empat-Pemangku Lima-Nan Selapan Helai Kain. Kemudian diperjelas lagi batas-batas tersebut di mulai dari Puncak Gunung Mentaga yang berada di antara Kerinci, Inderapura dan Muko-muko lurus ke arah puncak Gunung Paninjau Laut, lurus ke arah puncak Bukit Gedang, lurus ke arah puncak Gunung Sumuran. Dari Puncak Gunung Sumuran lurus ke arah timur dari kaki Gunung Pandan yang merupakan hulu Inderapura dan Air Haji. Bagian dari jajaran gunung-gunung tersebut yang menghadap ke pesisir laut merupakan batas dari Inderapura beserta Mangkubuminya, menteri yang dua puluh dan datuk tiga lurah, sedangkan yang menghadap ke arah Kerinci merupakan batas dari Depati Empat-Pemangku Lima-Nan Selapan Helai Kain.

Hasil perjanjian yang dihadiri sekitar 34 orang baik perwakilan Kerinci maupun Inderapura tersebut kemudian ditandatangani oleh Asisten Residen di Painan P.J Kooreman dan Countroleur di Inderapura J. Van Hengel. Perjanjian

yang berlangsung dengan suasana damai ini dan sangat memuaskan bagi Inderapura. Sultan Permansyah sampai-sampai memberikan hadiah sebuah gong kepada Mangku Sukarami Hitam, Mangku Sukarami Bandar Inderapura, Mangku Sukarami Tuah, Depati Muda Temenggung dan Depati Muda Caya Depati sebagai pihak yang turut hadir di dalam perundingan tersebut mewakili Kerinci. Perihal pemberian hadiah ini tertulis di dalam surat Inderapura yang disimpat di Rawang (TK 87). Alih aksara surat tersebut menurut Voorhoeve adalah sebagai berikut:

> *"Bahwa inilah sepucuk surat dari Tuanku Sultan Permansah yang bertahta kerajaan di dalam jajahan negeri Inderapura telah sudah mengurniakan satu buah gung kepada Pemangku Sukarami Bandar Inderapura dan Mangku Sukarami Hitam dan Mangku Sukarami Tuah. Dipati Muda Temenggung, Dipati Menggala Cahaya Dipati yang memegang seko nan sepanjang 'adat dalam 'alam Kerinci Mendapo Tanah Rawang Dusun Kota Teluk. Oleh kerana kebaikan dan kelurusan suaranya nan sepanjang adat purbakala nan sebaris tidak lupa, nan setitik tidak hilang, sampailah turun temurun kepada anak cucunya memakai ia…………di atas waris nan betul menurut 'adat yang lazim dalam 'alam Kurinci serta saya membuat di atas surat ini cap waris daripada orang tua saya. Demikianlah adanya".*

Surat ini diikuti pula oleh surat lain yang bertanggal 29 Mei 1888 M /18 Ramadan 1305 H (TK 86), selang tiga hari setelah perjanjian. Surat ini berisi informasi mengenai tata cara lama terkait pengiriman surat dan hadiah-hadiah dari Inderapura ke pada para depati di Kerinci dan sangat mungkin pengiriman surat ini juga diikuti oleh pengiriman hadiah tertentu kepada para depati di Kerinci (lihat halaman 106). Upaya–upaya ini dilakukan oleh Sultan Permansyah untuk terus menjalin hubungan baik dengan orang Kerinci meskipun Inderapura sekarang tak seperti dulu lagi. Inderapura telah menjadi wilayah jajahan Hindia Belanda sementara Kerinci masih menikmati status kemerdekaannya.

Sultan Permansyah wafat pada tahun 1891, tiga tahun setelah perjanjian berlangsung. Sebelum wafat, ia berpesan kepada suksesor sekaligus keponakannya Marah Rusli dipersaksikan oleh menteri yang dua puluh dan mangkubuminya Maharajo Iddin:

> *"Hai Rusli jika kamu diangkat Belanda jadi ganti aku, Alam Kurinci jangan kamu tunjukan pada Belanda. Apabila dilakukan juga maka kamu akan dimakan kutuk nenek moyang Raja di alam negeri Air Pura (Inderapura) semasa di Bukit Sitinjau Laut Kurinci. Ingat benar amanat ini. Kalau dilanggar kamu akan dimakan kutuk segala arwah nenek moyang Raja Air Pura (Inderapura). umurku tiada berapa hari lagi ingatlah pesanku itu, walaupun apa yang terjadi jangan ditunjukkan Alam Kurinci itu "* (Imaduddin, 2002: 52-53*).*

Terjemahan:

Wahai Rusli jika kamu diangkat Belanda menggantikan diriku, Alam Kerinci jangan kamu tunjukkan kepada Belanda, Apabila kamu lakukan juga maka kamu akan dikutuk oleh nenek moyang raja di negeri Inderapura semasa (perjanjian) di Bukit Sitinjau Laut, Kerinci. Ingat benar amanat ini. Kalau dilanggar kamu akan terkena kutuk semua arwah nenek moyang, Raja Inderapura. Umurku tidak berapa hari lagi ingatlah pesanku itu, walau apapun yang terjadi jangan ditunjukkan Alam Kerinci itu.

Wasiat yang disampaikan di akhir hayatnya, menunjukkan betapa Sultan Permansyah tidak ingin Kerinci yang masih merdeka bernasib sama seperti Inderapura yakni menjadi wilayah jajahan Belanda. Sultan Permansyah masih berpegang teguh pada wasiat raja sebelumnya untuk melindungi Kerinci dari musuh sesuai dengan persumpahan suci di masa lalu. Sepanjang hayatnya Sultan Permansyah telah melaksanakan amanat itu dan menunjukkan kepiawaiannya dalam memerintah. Hubungan Inderapura dengan Kerinci tetap harmonis sama seperti dahulu kala sebelum kedatangan Belanda.

Kondisi perpolitikan pemerintah Hindia-Belanda di sepanjang Pantai Barat yang sangat dinamis, menjadikan orang Kerinci susah menebak siasat dan rencana Belanda terhadap wilayah mereka. Orang Kerinci tetap selalu waspada dengan kemungkinan masuknya mata-mata Belanda ke Kerinci. Namun, kewaspadaan yang sangat itu bisa menjadi bumerang bagi orang Kerinci sendiri.

Mengawali abad ke-20 tepatnya pada 5 Agustus 1902, sebuah insiden yang menggusarkan Belanda terjadi. Pasalnya dua orang utusan Belanda yang dikirim melalui Regent Muko-muko, bernama Penggawa Mersah atau Imam Marusa dan Pemangku Somah tewas dihakimi massa di Dusun Lempur (Madjid, 2012: 18-19). Dua orang utusan ini diutus oleh regent di Muko-muko untuk menemui Depati Empat-Delapan Helai Kain di Dusun Pulau Sangkar. Akan tetapi, di dalam surat regent Muko-muko yang mereka bawa terselip pula surat dari pemerintah Belanda. Surat tersebut berisi permohonan Belanda untuk membuka pos dagang di Kerinci.

Keinginan Belanda tersebut tentu saja tidak dikabulkan oleh pihak penguasa Kerinci karena melihat apa yang menimpa sekutu mereka bahwa penjajahan negeri mereka di mulai dari persetujuan pendirian pos dagang. Dua utusan tersebut menemui para depati secara berulang dan para depati tersebut tetap konsisten dengan pendirian mereka. Dengan putus asa, Mersah dan Somah kembali ke Muko-muko melalui Dusun Lempur. Namun naas antara Dusun Lolo dan Lempur, mereka dicegat oleh penduduk dan dihakimi beramai-ramai hingga tewas.

Pembunuhan tersebut terjadi karena kecurigaan penduduk bahwa mereka

berdua adalah mata-mata Belanda yang akan menunjukkan jalan menuju Kerinci. Apalagi gerak-gerik mereka yang terlihat mencurigakan. Beberapa tulisan lokal menyebutkan dua orang utusan tersebut menyamar sebagai pedagang pakaian. Bagaimanapun juga pembunuhan ini seharusnya tidak terjadi karena para utusan yang membawa surat bercap kerajaan tidak boleh dibunuh dan wajib dilindungi oleh penguasa di Kerinci sesuai dengan tradisi yang berlaku. Hal lain dipaparkan oleh Madjid (2012: 20) bahwa pembunuhan itu terjadi karena Mersah dan Somah dianggap telah memalsukan surat dari para depati yang isinya memuat pernyataan *"bangsa Kerinci sudah takluk kepada Kumpeni dan segala depati telah beraja ke Mukomuko*".Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan penduduk yang berujung pada maut ke dua utusan tersebut.

Insiden berdarah yang menimpa dua utusan-- yang notabenenya merupakan pejabat Belanda-- telah menyebabkan orang Kerinci harus berurusan lebih jauh dengan pihak Belanda. Kasus pembunuhan tersebut dibawa ke rapat Dewan Hindia Belanda di Batavia pada 12 September 1902. Hasil rapat tersebut menghasilkan tiga poin rekomendasi yaitu: pertama, para pembunuh harus segera mendapat hukum setimpal. Kedua, mengisolasi dengan cara menutup seluruh jalan ke Kerinci agar mereka tidak dapat melarikan diri. Ketiga, tindakan menggunakan senjata harus dilakukan agar tuntutan penyerahan para pembunuh diketahui oleh khalayak (Madjid, 2012: 12).

Akan tetapi, tuntutan penyerahan pelaku pembunuhan hanya dijadikan alasan saja untuk melakukan ekspedisi militer ke Kerinci. Hal ini karena dewan tersebut juga menyetujui untuk menuntut denda atas pembunuhan kepada orang Kerinci serta penguasaan seluruh wilayah Kerinci melalui tindakan militer. Bahkan rekomendasi ini dijadikan oleh Gubernur Jendral sebagai dasar untuk segera membuat keputusan yang berisi rancangan dan strategi ekspedisi militer ke wilayah Kerinci.

Pada Februari 1903, asisten residen di Painan dan controuler Inderapura H. K. Manupassa menekan regent dan sultan Inderapura saat Marah Rusli Sultan Muhammadsyah untuk ikut serta di dalam ekspedisi tersebut. Keikutsertaan Regent Rusli dianggap oleh Belanda dapat meredam perlawanan orang Kerinci terhadap mereka karena pertalian Kerinci dan Inderapura secara adat. Marah Rusli sedari awal memang menolak ide Belanda untuk menganeksasi Kerinci mengingat amanat yang ia emban sebagai sultan. Akan tetapi, ancaman Belanda terhadap diri dan keluarganya membuat Marah Rusli tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah ekspedisi itu. Ia hanya mampu mengirim surat rahasia melalui para pengusaha Kerinci yang bermukim di Tapan. Isi surat tersebut berisi permohonan agar orang Kerinci tidak melakukan perlawanan terhadap militer Belanda. Mereka diminta beraktivitas seperti biasa seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa.

Pada Juni 1903, militer Belanda memasuki wilayah Kerinci. Mereka mendapat perlawanan yang cukup hebat dari masyarakat di sana. Namun karena kalah strategi, jumlah dan senjata, orang Kerinci akhirnya takluk kepada Belanda

dua bulan kemudian setelah beberapa kali kontak senjata (Madjid, 2012: 29). Dengan demikian berakhirlah sejarah panjang yang telah diukir bersama antara Kerinci dan Inderapura. Perjanjian sakral di atas Bukit Sitinjau Laut dengan sendirinya telah diingkari oleh pihak Inderapura ketika sang Sultan tidak berdaya menghadapi sang musuh itu.

Kisah menyedihkan juga terdengar dari Jambi, setahun kemudian perjuangan Sultan Thahapun harus terhenti. Pada 1904, ia gugur akibat terkena selongsong peluru Belanda (Meng, 1996: 20). Sang sultan yang telah uzur itupun meninggal, memenuhi panggilan sebagai *syuhada* sesuai pandangan Islam. Meskipun raga sang sultan sudah mati, tetapi semangat menentang Belanda masih terus berkobar di dalam dada para pendukungnya. Hingga dua tahun kemudian, gerakan-gerakan gerilya masih menggaung di Pedalaman Jambi.

Bab V
Motivasi Dibalik Jalinan Relasi

Berdasarkan data spasial, terlihat bahwa distribusi temuan naskah-naskah kerajaan yang ada di Kerinci hampir merata di dusun-dusun yang terletak di area Lembah Kerinci (lihat Gambar11, halaman 43). Batas area temuan naskah paling baratlaut berada di Dusun Siulak Gedang dan Siulak Mukai sementara di sebelah tenggara berada di Dusun Sanggaran Agung, yakni permukiman sisi Timur Danau Kerinci. Batas area paling Barat berada di Dusun Pondok Tinggi dan paling Timur berada di Dusun Hiang Tinggi. Sementara itu, di perkampungan di sepanjang sungai Batangmerangin belum ada laporan temuan naskah-naskah kerajaan. Konsentrasi naskah kerajaan paling banyak ditemukan di wilayah Mendapo Rawang yang meliputi beberapa dusun seperti Koto Keras, Koto Renah, Kampung Dalam, Koto Baru dan Koto Teluk. Naskah yang berasal dari Inderapura hanya ditemukan di beberapa dusun yaitu Semurup, Kemantan, Rawang, Sungai, Penuh, Tanah Kampung dan Hiang.

Data spasial ini menghasilkan beberapa interpretasi terkait dengan relasi antara Kerinci dengan Jambi dan Inderapura. Pertama, setiap dusun atau kampung yang menyimpan naskah kerajaan sebagai pusaka telah menjalin relasi dengan Jambi maupun Inderapura secara mandiri di masa lalu. Hal ini berimplikasi bahwa sistem pemerintahan tradisional di Kerinci berlangsung di tiap-tiap dusun tanpa adanya pemerintahan terpusat. Jikalaupun ada pemerintahan terpusat di Kerinci yang berhubungan dengan Jambi, maka sudah pasti naskah-naskah tersebut ditemukan terkonsentrasi pada satu tempat. Sementara itu, jumlah naskah yang banyak ditemukan di Mendapo Rawang dikarenakan banyaknya jumlah perkampungan yang memerintah secara mandiri di wilayah tersebut seperti Koto Keras, Koto Renah dan Koto Baru. Kedua, Ketiadaan naskah-naskah Kerajaan terutama di sepanjang aliran Sungai Batangmerangin seperti Tamiai, Pulau Sangkar dan Pengasi bukan berarti wilayah tersebut tidak menjalin relasi dengan Jambi. Akan tetapi harus dilihat bagaimana struktur pemerintahan adat yang berlaku khusus di wilayah tersebut. Agaknya naskah-naskah yang ditujukan kepada persekutuan Depati Empat dan Tiga Helai Kain—termasuk depati yang bermukim di tiga dusun di atas—tidak disimpan di dusun masing-masing melainkan di Dusun Hiang, Sanggaran Agung atau Dusun Seleman yang ketiganya memiliki hubungan adat dengan persekutuan Depati Empat dan Tiga Helai Kain seperti pada kasus TK 204, 207, 230 dan 231. Keempat, hubungan dengan Inderapura awalnya hanya berlangsung dengan beberapa orang depati saja di Kerinci seperti Depati Raja Muda dari Kemantan, Depati Uda Menggala dari Rawang dan Tanah Kampung, Depati Atur Bumi di Hiang dan Raja Simpan Bumi dari wilayah Semurup-Siulak. Akan tetapi, pada abad ke-19 M, hubungan

Kerinci dan Inderapura terjadi melalui persekutuan atau kelembagaan yang bernama Depati Empat-Pemangku Lima dan Selapan Helai Kain dengan pusat kerapatannya berada di Tanah Rawang.

Kompleks dan rumitnya tatanan pemerintahan tradisional yang berlaku seharusnya menyebabkan kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Kerinci kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang Kerinci. Akan tetapi sepanjang sejarahnya, sangat mengejutkan bahwa hubungan multilateral ini berjalan dengan damai dan lancar. Padahal berdasarkan legenda dan kisah historis yang ditulis ulang pada tahun 1831, M diketahui bahwa hubungan ini hanya di mulai dengan sebuah perjanjian dan penaklukan kecil di beberapa tempat.

Perjanjian yang tanpa meninggalkan bukti material apapun entah itu dokumen sejaman, prasasti maupun inskripsi, laiknya sebuah peristiwa penting yang melibatkan banyak kerajaan. Bahkan hingga kini tidak diketahui secara pasti kapan persisnya peristiwa itu terjadi. Akan tetapi, perjanjian atau yang disebut dengan *karang setio* ini terus dikenang dari masa ke masa oleh para sultan dan pejabat yang berkuasa. Sultan Inderapura misalnya masih terus mengingatkan tentang perjanjian itu kepada orang Kerinci hingga abad ke-19 M. Hal seperti ini tentu saja sangat menarik untuk ditelusuri.

Di dalam pandangan orang-orang Kerinci, para sultan Jambi dan Inderapura di masa lalu, nilai sebuah perjanjian tidak terletak pada tinggalan fisiknya yang membuktikan keabsahan perjanjian itu. Akan tetapi, sebuah perjanjian dianggap sangat penting bahkan mengikat secara turun temurun karena nilai kesakralannya. Durkheim (2011: 167-169) mengatakan bahwa hal yang sakral memiliki ciri-ciri antara lain: dianggap superior, sangat menguasai, terlarang dari hubungan normal, pantas untuk mendapatkan penghormatan tinggi, selalu melibatkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh kelompok, berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut komunitas, berperan sebagai titik utama klaim yang mempengaruhi seluruh komunitas dan wilayah sosial. Ciri sakral pada perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Sitinjau Laut dapat dilihat bagaimana perjanjian ini sangar dihormati oleh kedua belah pihak dan dijadikan klaim bagi penguasa untuk terus-menerus menjalin relasi dan menjaga hubungan baik demi kepentingan wilayah masing-masing

Lebih lanjut menurut Eliade (2002) mengemukakan bahwa sesuatu hal yang terlihat biasa akan menjadi luar biasa bila seseorang melihat adanya nilai sakral dari sesuatu hal tersebut. Kesakralan ini tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang bersifat supernatural dan tindakan yang bersifat religius. Fenomena demikian dapat dilihat di dalam peristiwa perjanjian Paninjau Laut bahwa unsur-unsur supernatural sengaja dimasukkan di dalam perjanjian itu baik melalui ritual, pemilihan tempat perjanjian maupun cara pewarisannya secara turun temurun. Pertama, tempat yang dipilih berada di atas puncak sebuah bukit bernama Paninjau Laut yang berada di antara Kerinci dan Inderapura. Lokasi-lokasi yang berada di ketinggian misalnya puncak gunung dan puncak dalam banyak pandangan

religi mengandung kekuatan supernatural yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain misalnya di dalam lingkungan keraton atau istana. Misalnya orang Krowe di Pulau Flores menganggap gunung sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur. oleh karenanya gunung memiliki kekuatan magis dan supernatural bagi mereka (Taniardi, 2017: 29). Begitu pula dengan orang Kerinci yang menghuni baratlaut Lembah Kerinci, mereka percaya bahwa gunung dan puncak bukit tertentu sebagai tempat asal usul leluhur sebelum turun ke wilayah lembah (Sunliensyar, 2018b). Dengan demikian jelaslah pemilihan lokasi perjanjian di tempat yang tinggi berhubungan dengan tempat-tempat yang dianggap sakral.

Kedua, melalui berbagai ritual yang dilakukan saat upacara perjanjian berlangsung seperti dengan mengorbankan kerbau bunting, menanam tanduknya, memakan dagingnya serta meminum air dari siraman keris pusaka menggunakan mangkuk bersama-sama. Penambahan unsur supernatural di sini terlihat dari ritual pengorbanan kerbau yang tidak biasa yaitu kerbau bunting. Kerbau di dalam ideologi berbagai etnis di Indonesia adalah binatang sakral yang sering dikorbankan untuk acara ritual terutama kepada arwah-arwah leluhur. Penganut Marapu di Pulau Sumba misalnya mengorbankan kerbau di dalam ritual kematian (Gunawan, 2013). Ritual pengorbanan kerbau juga terdapat di dalam tradisi orang Kerinci saat pelaksaan upacara tahunan yang disebut *kenduri seko (*Zakaria, 1984). Keris juga dianggap sebagai simbol dari kekuatan magis di dalam berbagai ideologi. Oleh karenanya meminum air siraman keris sama dengan memasukkan unsur supernatural ke dalam tubuh seseorang, sehingga apa yang ia lakukan pada saat itu bernilai sakral. Ketiga, pewarisan peristiwa perjanjian tersebut dilakukan melalui tradisi lisan bukan tulisan. Bagi masyarakat Melayu khususnya, suara memiliki kekuatan magis dibandingkan dengan tulisan. Suara merupakan medium di dalam pesan-pesan magis seperti mantra dan doa. Begitu pula dengan peristiwa perjanjian di Bukit Paninjau Laut ini harus selalu diingat dan disampaian secara turun temurun melalui medium suara bukan tulisan. Oleh karenanya, tidak akan ada sumber tertulis sezaman yang menceritakan peristiwa itu kecuali yang ditulis pada abad ke-19 M dan cerita di dalam naskah itupun diduga kuat bersumber dari tradisi lisan.

Perjanjian tidak hanya bernilai sakral bagi orang Kerinci di masa lampau akan tetapi juga hal yang sangat ditakuti. Hal ini karena adanya konsekuensi hukuman magis yang harus diterima bagi para pelanggar perjanjian. Banyak di antara naskah piagam maupun kisah di dalam tradisi lisan yang memuat kalimat-kalimat kutukan bagi para pelanggar perjanjian, misalnya *"dimakan sumpah, kena kutuk, di makan bisa kawi"* dan lain sebagainya. Hal serupa juga pernah diucapkan oleh Sultan Permansyah di Inderapura kepada suksesornya bahwa pelanggaran terhadap perjanjian dengan orang Kerinci akan berbuah kutukan dan laknat dari arwah para raja terdahulu. Terkena kutuk dan dimakan sumpah dipercayai akan membuat sipelanggar sumpah menderita seumur hidup. Kehidupan mereka diibaratkan seperti tanaman yang tidak hidup dan enggan

pula untuk mati atau seperti rumah yang terjengkang, tiangnya di atas sementara atapnya di bawah. Perjanjian yang dianggap sakral dan ditakuti inilah yang menjadi kunci "kelanggengan" relasi antara orang Kerinci dengan penguasa Jambi dan Inderapura. Perjanjian sakral telah menjadi media dan alat dalam mempertahankan relasi politik kedua belah pihak selama berabad-abad.

Atas nama perjanjian sakral ini pulalah, orang Kerinci di masa lalu menunjukkan kesetiaan dan loyalitas mereka kepada para penguasa Jambi dan Inderapura. Seperti yang tersirat di dalam naskah TK 243 dan yang diceritakan di dalam TK 140. Surat titah TK 243 merupakan surat yang dikirim oleh Pangeran Sutawiijaya, penguasa Jambi di wilayah hulu kepada para depati di Kerinci. Penggalan hasil alih aksara naskah tersebut menurut Voorhoeve adalah sebagai berikut:

> "[.....] jikalau lagi ingat kepada su(m)pah kamu yang dahulu-dahulu sakali jangan kamu beri orang Mangunjaya atau anak ulu masuk ke dalam Merangin itu karena duli Pangeran Suta mintak dibebar baik-baik tanah Merangin itu kepada kamu. Jikalau bekeras juga orang Mangunjaya atau anak ulu hendak membinasakan Merangin itu melainkan kejarkan dengan seboleh-boleh nya kamu melawan dia itu. Jikalau kamu sudah berperang, seruhan hilir duli Pangeran pun datang ke Merangin itu. Itulah titah duli Pangeran serta Mangkubumi. Hubaya-hubaya jangan dila(lu) oleh kamu sekalian. Tammat"
>
> Terjemahan:
>
> Jikalau (kalian) masih ingat kepada sumpahmu yang dulu sekali, jangan kamu izinkan orang (dari) Mangunjaya atau anak Hulu memasuki wilayah Merangin. (Oleh) karena (itu), Duli Pangeran Suta minta kepada kamu untuk menjaga sebaik mungkin Tanah Merangin. Jikalau orang Mangunjaya atau anak Hulu masih bersikeras mau merusak Merangin, maka kejar dan lawan mereka semampu-mampu kamu. Jikalau kamu sudah berperang, beritahulah ke hilir, Duli Pangeran-pun (akan) datang ke Merangin. Itulah perintah Duli Pangeran dan Mangkubumi. Janganlah dilanggar oleh kamu sekalian. Tammat.

Surat titah ini berisi perintah Pangeran Sutawijaya kepada orang Kerinci untuk membantunya menjaga Merangin-- yang merupakan wilayah kekuasaan Pangeran Sutawijaya—dari serangan orang Mangunjaya atau orang Hulu. Menurut Andaya (2016) sekitar tahun 1704-1710, Pangeran Sutawijaya pernah terlibat konflik dengan pendukung Pangeran Pringgabaya atau Maharaja Batu yang bermukim di Mangunjaya. Konflik ini terjadi akibat Pangeran Sutawijaya mengalihkan

dukungannya kepada Sultan Kiai Gede yang bertahta di hilir, setelah sekian lama mendukung dan menjadi mangkubumi dari Sultan Maharaja Batu yang bertahta di hulu (Mangunjaya). Oleh sebab itu, Pangeran Sutawijaya meminta bantuan kepada orang Kerinci untuk mengamankan wilayah kekuasaannya di Merangin.

Tampaknya para penguasa Jambi menganggap orang Kerinci sebagai sekutu yang setia bagi mereka. Hal ini jauh berbeda dengan komunitas lain yang sama-sama menghuni wilayah Kesultanan Jambi. Misalnya saja Andaya memaparkan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penguasa Jambi dalam mengatur para pedagang dan penambang emas yang bermigrasi ke wilayah mereka. Para migran ini dinarasikan cenderung tidak mengakui penguasa Jambi yang bertahta di hilir. Oleh sebab itu, loyalitas dan kesetiaan orang Kerinci terhadap Jambi di masa lalu patutlah untuk diapresiasi.

Perilaku yang sama ditunjukkan pula oleh orang Kerinci dengan penguasa Inderapura. Seperti yang dikisahkan di dalam penggalan cerita naskah TK 140. Berikut alihaksara naskah tersebut oleh Voorhoeve:

> "[......] Maka tersebut pula ihwal negeri Inderapura itu. Dengan takdir/ Allah ta'ala maka datanglah perang, jadi selisih di antara Yang dipertuan Sultan Permansyah dengan Kempani Walanda. Telah/ sampailah tiga tahun berperang itu, maka Yang dipertuan Sultan Permansyah undurlah ke Batayan pada kampung yang empat/langgam, serta Yang dipertuan pun teringatlah akan sumpah setia yang diperbuat nenek moyang di atas Bukit Tinjau Laut./ Maka menyuruhlah Yang dipertuan ke Kerinci. Setelah itu maka turunlah Raja Muda itu duduk pada negeri Inderapura sembilan bulan sebelas hari pada tanah Batayan kampung yang/ empat langgam. Dengan takdir Allah ta'ala berhentilah peperangan itu dan amanlah negeri. Maka Yang dipertuan membaharu sumpah setio dengan Raja Muda/ itu pada hari Arba' di atas Pulau Persumpahan. tatkala maniti di balakang buaya kumbang di kanan dimudiknya pohon telang kuning, dihilirnya/ kubangan batu berduri, didaratnya pasir genting Dusun Pasir di bawah nibung ditaku raja, supaya jadi kenyataanlah negeri Inderapura/ dangan Kerinci jadi satu. Akan Sengada tuha hulu balang itu, dibawalah serata bersumpah setio serata dikurnia memakai gelar Raja Simpang Bumi Berdarah/ Putih [.....]
>
> Yang dipertuan Sultan Permansyah dengan/ Baginda Raja Muda membaharui sumpah setio di atas Pulau Persumpahan pada hari Arba' dua belas hari bulan Zulhijjah sanah 1022 (?) wallahu a'lam".
>
> Terjemahan:
>
> [.....] Maka tersebutlah hal ihwal di Negeri Indrapura. Dengan takdir Allah Ta'ala timbullah perang, terjadi persengketaan antara Yang Dipertuan

> Sultan Permansyah dengan Kompeni Belanda. Setelah sampai tiga tahun peperangan itu, maka Yang Dipertuan Sultan Permansyah mundur ke Batayan (Bantayan) di Kampung yang Empat Langgam dan teringatlah pula dengan sumpah setia (perjanjian) yang dilakukan oleh nenek moyang di atas Bukit Tinjau Laut. Maka Yang Dipertuan menyuruh (orang) ke Kerinci (unutk menemui Raja Muda). Setelah itu, turunlah (pergilah) Raja Muda ke Inderapura dan berada (selama) sembilan bulan sebelas hari di Tanah Batayan Kampung yang Empat Langgam. Dengan takdir Allah Ta'ala, berhentilah peperangan dan amanlah negeri. Oleh sebab itu, Yang Dipertuan memperbarui sumpah setia (perjanjian) dengan Raja Muda pada hari Rabu di atas Pulau Persumpahan. Tatkala meniti di belakang Buaya Kumbang di (sebelah) kanan, di (sebelah) mudiknya Pohon Telang Kuning, di (sebelah) hilirnya Kubangan Batu Berduri, di daratnya Pasir Genting dusun Pasir, di bawahnya Nibung ditakuk raja, agar menjadi kenyataanlah Negeri Inderapura dan Kerinci bersatu. Adapun Sengada Tua (seorang) hulubalang (prajurit) itu, dibawa ikut serta bersumpah setia dan dikurniakan menggunakan gelar Raja Simpan Bumi Berdarah Putih [....] Yang Dipertuan Sultan Permansyah memperbarui sumpah setia (perjanjian) di atas Pulau Persumpahan pada hari Rabu dua belas Zulhijjah tahun 1022 (Hijriah), wallahu'alam.

Naskah ini menceritakan bagaimana keterlibatan orang Kerinci yang bergelar Raja Muda dan Sengada Tua membantu Sultan Permansyah berperang melawan Kompeni Belanda. Atas bantuan tersebut Sultan Permansyah memperbarui perjanjian dengan orang Kerinci yang diadakan disebuah tempat bernama Pulau Persumpahan. Dalam upacara persumpahan tersebut Sultan Permansyah menganugerahi seorang prajurit yang bernama Sengada Tua dengan gelar Raja Simpan Bumi Berdarah Putih. Menurut naskah ini perjanjian Pulau Persumpahan dilakukan pada hari Rabu 12 Zulhijjah 1022 Hijrah atau bertepatan dengan 23/22 Januari 1614 M. Kisah ini semakin menjelaskan bahwa orang Kerinci adalah sekutu yang setia bagi para raja.

Sebagaimana yang telah disinggung di awal, bahwa perjanjian sakral adalah media atau alat yang digunakan untuk menjalin dan mempertahankan relasi sosial-politik dalam konteks tiga wilayah yaitu Kerinci, Jambi dan Inderapura. Akan tetapi, apa yang terjadi dibalik itu belumlah terungkap. Apa yang menyebabkan orang Kerinci terdorong atau termotivasi untuk mengadakan relasi dengan Jambi dan Inderapura belumlah diketahui.

Tulisan-tulisan terdahulu memang telah memaparkan beberapa faktor penyebab terjadinya relasi baik antara Kerinci dan Jambi maupun antara Inderapura dan Jambi. Akan tetapi, narasi yang dibangun adalah dari perspektif "pihak kesultanan" melihat orang-orang Kerinci. Misalnya Andaya (2016) memaparkan bahwa hubungan penguasa Jambi di hilir dengan penguasa lokal di hulu termasuk Kerinci disebabkan oleh; (1) populasi di hulu lebih padat

dibandingkan dibandingkan di hilir. Sementara Para raja yang berkuasa di hilir membutuhkan banyak rakyat yang mengakui kekuasaan mereka untuk menambar rasa prestesiusnya sebagai seorang raja. Oleh sebab itu, sangat penting bagi mereka untuk menjalin relasi dengan orang-orang Ulu. Begitu pula dengan para penguasa di hulu, mereka membutuhkan sosok raja untuk menyelesaikan perkara hukum yang terjadi di hulu seperti masalah batas-batas wilayah adat dan kampung karena bentuk pemerintahan tradisional mereka tidak mengenal pemerintahan terpusat sehingga tidak ada otoritas tertinggi yang dapat memutuskan perkara hukum tertentu; dan (2) wilayah-wilayah hulu menyediakan komoditas yang diperdagangkan di hilir dari sumber daya alam yang kaya di hulu. Sementara itu, di hilir tersedia barang-barang mewah yang juga dibutuhkan di hulu seperti kain dan keramik. Lebih lanjut Sudarman (2016) memaparkan sedikit mengenai relasi antara Inderapura dan Kerinci. Menurutnya relasi antara Inderapura dan Kerinci terjalin akibat dari proses perdagangan dan islamisasi.

Hubungan relasi inter-wilayah ini tentu saja tidak akan terbentuk tanpa adanya keinginan dari semua pihak. Sayangnya, apa yang telah dipaparkan oleh dua peneliti sebelumnya lebih menekankan pada perspektif pihak-pihak kesultanan terhadap orang Kerinci. Bukan dari perspektif orang Kerinci terhadap pihak kesultanan sehingga orang Kerinci bersedia menjalin relasi dengan mereka. Andaya memang telah mengungkapkan sedikit di antaranya yaitu persoalan sistem pemerintahan tradisional dan perdagangan. Akan tetapi apa yang dipaparkan Andaya tampaknya belum menyentuh hal-hal yang mendasar.

Bagian bab ini akan difokuskan untuk mendiskusikan latarbelakang atau hal-hal yang mendorong terjadinya relasi politik antara orang-orang Kerinci dengan Penguasa kerajaan Islam di sekitarnya berdasarkan sudut pandang mereka. perlulah disadari bahwa latarbelakang yang diungkapkan di sini tidak akan mampu menyentuh hal-hal yang sangat spesifik karena pada hakikatnya tiap dusun memiliki sejarah tersendiri dalam relasi mereka baik dengan Jambi maupun Inderapura. Namun demikian, melalui sumber-sumber naskah, *tembo* dan tradisi lisan masyarakat akan didiskusikan beberapa faktor yang mendorong mereka menjalin relasi dengan Jambi dan Inderapura. Dalam hal ini, paling tidak terdapat tiga hal utama yang menjadi penyebabnya yaitu tanah, kuasa, dan niaga

A. Kekuasaan

Menurut Watson (1992) orang Kerinci merupakan kelompok keturunan unilineal. Artinya mereka membentuk kesatuan sosial yang diakui oleh masyarakat sedemikian rupa dengan keanggotaan berdasarkan garis keturunan dari seorang leluhur tertentu baik yang benar-benar ada ataupun hanya sekadar mitologi. Garis keturunan ini ditentukan hanya dari jalur patrilineal atau matrilineal saja. Dalamhal ini orang-orang Kerinci menggunakan garis keturunan dari pihak ibu atau disebut juga sebagai matrilineal. Hubungan kekerabatan yang ditentukan

oleh prinsip-prinsip keturunan yang bersifat selektif, mengikat terhadap hak dan kewajiban tertentu seperti hak pewarisan harta, gelar, pusaka, lambang-lambang, hak atas kedudukan tertentu serta keharusan untuk melakukan kegiatan tertentu secara bersama.

Berdasarkan sistem matrilineal tersebut, orang Kerinci membentuk struktur organisasi sosial di mulai dari tingkat terkecil hingga yang terbesar. Tingkat organisasi sosial terkecil dinamakan *tumbi* yang terdiri satu keluarga, ayah, ibu dan anak. Di tingkat *tumbi* mereka diatur oleh *teganai* yaitu saudara laki-laki dari pihak istri. Kumpulan beberapa *tumbi* yang berasal dari satu nenek perempuan dinamakan sebagai *perut.* Pada tingkat ini mereka diatur oleh *teganai tuo* atau teganai *tingkat lateh*, mereka adalah saudara laki-laki dari nenek sebelah istri. Kumpulan beberapa *perut* yang berasal dari satu leluhur perempuan dinamakan sebagai *kalbu.* Pada tingkat ini mereka diatur oleh para *menti ninek mamak* yaitu para teganai yang dipilih untuk memangku jabatan adat sehingga mereka diberi gelar-gelar pusaka. Antar *kalbu* membentuk persekutuan lagi yang dinamakan sebagai *luhah.* Adapun *luhah* ada yang dibentuk didasarkan garis keturunan maupun melalui perjanjian persekutuan antar *kalbu* yang memiliki leluhur berbeda. Di tingkat ini mereka diatur oleh seorang depati. Persekutuan antar*luhah* dan/atau *kalbu* inilah yang mendirikan perkampungan bernama dusun.

Tiap-tiap anggota *kalbu* dan *luhah* dibedakan berdasarkan gender yaitu anggota laki-laki yang disebut *anak jantan* dan anggota perempuan yang disebut *anak batino. Anak batino* memiliki hak atas pengelolaan tanah *ajun arah* baik sawah, ladang maupun tanah permukiman, menghuni dan mengurus rumah milik *kalbu*, dan menjaga segala harta pusaka baik bersifat material maupun nonmaterial seperti gelar-gelar adat. Mereka juga memiliki hak untuk memilih *anak jantan* mana yang paling tepat untuk menyandang gelar adat tersebut. Akan tetapi, mereka memiliki kewajiban untuk mematuhi *anak jantan* karena *anak jantan* merupakan pengatur dan pemimpin mereka secara adat di tiap-tiap tingkat organisasi sosial.

Anak jantan dari *kalbu* (suku) lain yang menikahi *anak batino* suatu *kalbu* disebut sebagai *uhang semendo.* Mereka diwajibkan tinggal di lingkungan keluarga istri setelah menikah. Sistem ini disebut dengan istilah matrilokal. Sama halnya dengan *anak batino, uhang semendo* diharuskan untuk mematuhi para *teganai, ninik mamak* dan *depati* di dalam *kalbu* istrinya. Mereka juga diberi hak untuk mengelola lahan atau tanah *ajun arah* milik *kalbu* sang istri, sebagai sumber dari mata pencarian untuk menafkahi keluarganya. Tanah-tanah *ajun arah* tersebut diatur pembagiannya oleh para *teganai* pihak istri.

Sistem semacam ini membatasi hak *uhang semendo* untuk berkuasa di dalam suku atau komunitas istrinya. Bagaimanapun juga mereka tetap tunduk di bawah para penguasa *kalbu* (suku) di pihak istri. Walaupun demikian, *uhang semendo* masih memiliki hak untuk berkuasa di *kalbu* asal mereka masing-masing. Mereka juga berhak menyandang jabatan adat di dalam *kalbu-kalbu* mereka sendiri.

Dengan demikian, *uhang semendo* memiliki dua status sekaligus. Pertama, bila mereka berada di dalam lingkungan *kalbu* sang istri, mereka berstatus sama dengan istri mereka yaitu *anak batino* dari suatu *kalbu*. Kewajiban mereka adalah tunduk di bawah kekuasaan para penguasa *kalbu* istrinya dan menafkahi keluarganya dengan mengelola lahan dan sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh *kalbu* istri. Kedua, bila mereka berada di lingkungan *kalbu* asal, mereka tetap berstatus sebagai *anak jantan*. Mereka mempunyai kewajiban untuk mengatur *anak batino* di dalam *kalbu*nya sendiri. Mereka juga berhak untuk menyandang gelar-gelar pusaka yang ada di dalam *kalbu* asal mereka.

Meskipun orang Kerinci hidup berkelompok berdasarkan garis keturunan dengan dua status yang dapat disandang oleh para lelaki yang telah menikah, orang-orang Kerinci dapat menjalankan pemerintahan tradisional mereka dengan damai sepanjang pemerintahan tersebut dijalankan secara mandiri tanpa menganggu hak-hak politik, ekonomi dan sosial kelompok lain. Akan tetapi saat pengaruh politik Jambi masuk di tenggara Danau Kerinci dan mulai merambah ke permukiman di sebelah baratlaut, sistem semacam ini justru menjadi pemantik terjadinya persaingan antar kelompok untuk memperebutkan dominasi politik, ekonomi dan sosial. Persaingan berebut kuasa tersebut terjadi baik antara *anak jantan* dengan *uhang semendo* dalam suatu *kalbu* maupun antar *anak jantan* dari *kalbu-kalbu* yang berbeda. Persaingan untuk saling berebut dominasi dalam suatu kawasan inilah yang mendorong mereka untuk menjalin relasi dengan Jambi.

Kasus persaingan antar kelompok ini diceritakan di dalam beberapa naskah *tembo*, seperti *tembo* Incung pada tanduk yang disimpan di Mendapo Rawang (TK 37-40, lihat halaman 37-39). Di dalam *tembo* itu dsebutkan adanya persaingan antara dua komunitas yang bermukim di wilayah Rawang yakni antara klan Depati Punjung dengan persekutuan Depati Muda dan Depati Sungai Laga. Persaingan tersebut terkait dengan kewenangan menguasai ”serah jajah naik” di wilayah Rawang. Persengketaan itu yang tidak dapar diselesaikan secara internal di Kerinci sehingga mereka menghadap pangeran Jambi yang ada di hilir.

Legenda di wilayah Siulak, menceritakan tentang persaingan antara *uhang semendo* dan *anak jantan* di dalam satu komunitas dalam memperebutkan legitimasi politik. Diceritakan bahwa salah seorang *semendo* di dalam *kalbu* Temenggung Dusun Siulak Gedang mendapatkan anugerah gelar Raja Simpan Bumi Berdarah Putih dari Sultan Inderapura. Karena merasa tidak senang akan legitimasi politik yang diperoleh oleh Raja Simpan Bumi, seorang *anak jantan* dari *kalbu* yang sama menghadap Pangeran Jambi agar mendapatkan legitimasi politik di wilayahnya. Ia kemudian digelari Depati Mangkubumi Tua Suta Menggala. Sampai saat ini dua gelar tersebut masih diwariskan turun temurun di Dusun Siulak Gedang. Bahkan gelar adat –disebut *seko gelar*—ini dikategorikan berdasarkan asal-usulnya. Gelar Raja Simpan Bumi disebut sebagai *seko anak batino* karena diperoleh oleh *uhang semendo* yang menikah dengan *anak batino* dari *kalbu* di dalam dusun sedangkan gelar Depati Mangkubumi Tua Suta Menggala disebut

sebagai *seko anak jantan* karena diperoleh oleh *anak jantan* atau anggota laki-laki yang asli dari *kalbu* di dalam dusun.

Teks-teks di dalam naskah Incung juga banyak menceritakan bagaimana para anggota suatu *kalbu* secara aktif menghadap para raja di sekitar wilayah mereka di masa lalu untuk mendapat gelar-gelar kebangsawanan seperti kisah di dalam naskah tanduk (TK 149) pusaka Sutan Depati Pangga Bumi Tuo di Dusun Balai Semurup. Bagian dari hasil alihaksara teks tembo tersebut menurut Voorhoeve adalah sebagai berikut:

> "[...] Ninik Sangada Dibalang napat haku sus saka dipati karana munuh sukarami sabapa hitu ninik sangada dibalang sabab hitu jaka mataram bulih saka galar dipati pala pasambih harik hina panggar bumi lalu ganunja hampat suka bulih patih galar dipati samurut lalu ka raja putih bulih galar haja simpan gumi badarih putih [...]".
>
> Terjemahan:
>
> [...] Ninik Sengada Dibalang memperoleh pusaka (berupa) gelar depati karena membunuh Sukarami. Oleh sebab itu, Ninik Singada Dibalang pergi ke Mataram. (Di sana ia) memperoleh pusaka gelar Depati Kepala Persembah Rekna Panggar Bumi, kemudian pergi ke Ganunja Empat Suka (?) memperoleh gelar Depati Semurup, kemudian pergi ke Raja Putih memperoleh gelar Raja Simpan Bumi Berdarah Putih [...]

Tembo ini menceritakan tentang seorang leluhur bagi komunitas adat di Semurup yang bernama Sengada Dibalang. Setelah ia melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang bernama Sukarami, ia pergi mengembara untuk menghadapa para raja. Di sana ia memperoleh berbagai gelar kebangsawanan. Di Mataram ia memperoleh gelar Depati Kepala Persembah Panggar Bumi, kemudian pergi ke Ganunja Empa Suka (?), di sana ia mendapatka gelar Depati Semurup. Terakhir ia menghadap ke Raja Putih di Inderapura dan mendapatkan gelar Raja Simpan Bumi Berdarah Putih. Perihal penganugrahan gelar Raja Simpan Bumi Berdarah Putih juga disinggung oleh pihak Inderapura di dalam TK 140 yang telah dipaparkan di atas.

Orang Kerinci melihat penguasa Jambi sebagai tempat untuk mendapatkan gelar dan legitimasi kekuasaan. Gelar-gelar kebangsawanan merupakan sesuatu yang sangat prestesius bagi mereka. Seseorang yang menyandang gelar kerajaan secara otomatis akan naik status sosialnya di tengah masyarakat begitu pula bagi sukunya. Suku-suku yang anggota laki-lakinya mendapat gelar kerajaan dianggap lebih superior dibandingkan dengan suku yang lain. Tak ayal, terjadi gelombang penjalinan relasi dengan Jambi oleh orang-orang Kerinci pada periode tertentu, misalnya pada masa Pangeran Sukarta Negara berkuasa di Merangin.

Penguasa Jambi tidak hanya dibutuhkan sebagai tempat mendapatkan hal-hal prestesius semata tetapi juga sebagai tempat untuk meminta keputusan

hukum dan nasihat atas perkara-perkara tertentu yang tak terselesaikan. Misalnya perkara pelik yang menyebabkan antar *kalbu* dan antar dusun saling bertikai. Kasus seperti ini diungkapkan di dalam sebuah surat titah yang dikirim kepada Depati Uda Menggala (TK 242, lihat halaman 50-51). Berdasarkan surat tersebut diketahui telah terjadi persengketaan terkait perkara kriminal yang melibatkan anggota suku dari Rio Bahi dan Depati di Semurup. Perkara tersebut dihadapkan kepada Pangeran Sutawijaya untuk diputuskan. Oleh Pangeran Sutawijaya, perintahnya terhadap perkara tersebut ditulis pada sepucuk surat yang kemudian dikirim ke Kerinci melalui Depati Uda Menggala. Sutawijaya berpendapat agar persengketaan tersebut harus diselesaikan dulu di pengadilan Depati Empat bersama jenang. Bila tidak selesai di sana maka barulah perkara tersebut dilimpahkan kepadanya atau jika tidak mau dihadapkan ke hilir, perkara tersebut sebaiknya diselesaikan saja secara kekeluargaan.

Dalam hal ini, sangatlah tepat pendapat Andaya (2016) yang mengatakan bahwa raja Jambi bagi orang di Hulu adalah penengah sengketa dalam perselisihan, pemberi nasihat yang bijaksana dan memberikan keadilan bagi semua. Seperti di dalam persengketaan Depati Semurup dan Rio Bahi, Pangeran Sutawijaya yang mewakili raja di wilayah Hulu tampil sebagai penengah dan pemberi nasihat pagi para penguasa lokal di Kerinci.

Di lain pihak, penguasa Jambi dengan senang hati menyambut kedatangan orang-orang Kerinci bahkan memberi mereka hadiah-hadiah mewah bila mereka mengaku “beraja” kepadanya. Dalam pandangan penguasa Jambi semakin banyak yang mengakui kedudukannya sebagai raja, maka semakin bertambah pula rakyatnya. Sementara, rakyat yang banyak merupakan hal yang bernilai prestesius bagi seorang raja. Dalam banyak hal, menurut Andaya, penguasa Jambi menjadikan para raja di Mataram sebagai *role model* mereka, termasuk perihal jumlah *kawula*. Mereka menganggap mampu menyaingi Raja-raja Mataram bila memiliki banyak rakyat.

Perilaku penguasa Jambi, tak ubahnya dengan perilaku penguasa lokal di Kerinci. Anugrah para raja di Jambi entah itu hanya sekadar gelar atau berupa kain mahal, senjata dan perkakas lainnya selalu dianggap sebagai hal yang membanggakan. Dengan berbagai anugrah raja itu, mereka menganggap diri memiliki status yang lebih tinggi dan kelompoknya berada di atas kelompok lain sehingga mereka dapat mendominiasi. Hal ini tentu saja tidak baik bagi masyarakat hulu yang komunal. Beberapa kasus bahkan memicu terjadinya beberapa konflik horizontal.

B. Legitimasi Tanah

Tanah dalam gagasan banyak penutur Austronesia dianggap sebagai perlambang ibu. Layaknya seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan bagi anaknya, maka tanah adalah sumber kehidupan bagi seluruh manusia. Dari

tanah tumbuh berbagai tanaman seperti padi, jagung, sagu dan berbagai hal yang menyokong kebutuhan primer maupun sekunder manusia. Tanpa tanah, manusia tidak akan hidup, tanpa tanah niscaya tidak ada kesejahteraan.

Telah disinggung di dalam bab II, bahwa tanah dalam pandangan orang Kerinci adalah bagian dari pusaka dari *kalbu.* Artinya tanah adalah bagian yang diwariskan turun temurun dari para leluhur. Tanah yang dimiliki oleh masing-masing *kalbu* ini dinamakan sebagai tanah *ajun arah*. Menurut mereka tanah diperoleh sejak kedatangan para leluhur pertama kali ke tempat itu. Para leluhur kemudian menandai lahan miliknya dengan sungai,gunung, kayu, tanaman dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang batas-batas lahan tersebut kemudian diwariskan melalui tradisi lisan.

Tanah *ajun arah* ini meliputi tanah basah, tanah kering, *bluka* hingga *imbo mendawo.* Tanah basah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan karena letaknya yang berada di lembah dan posisinya lebih rendah dari lahan yang lain sehingga mudah dialiri oleh sistem pengairan. Tanah kering dimanfaatkan sebagai lahan untuk mendirikan permukiman dan sebagai kebun karena posisinya yang lebih tinggi dari tanah basah. *Bluka* adalah ladang-ladang yang ditanami kayu-kayuan dan ditinggalkan selama beberapa tahun. Letaknya berada di pinggir hutan. Sedangkan *imbo mendawo* adalah bagian hutan yang dilarang untung ditebangi tetapi boleh dimanfaatkan sumber daya yang terdapat di dalamnya seperti rotan, getah kayu-kayuan termasuk hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, Morison mengatakan bahwa tidak ada lahan yang tidak bertuan di Kerinci karena telah diklaim kepemilikannya sejak dulu oleh tiap-tiap komunitas yang ada di Kerinci.

Bagi tiap *kalbu*, tanah tentunya sangat bernilai. Tanah adalah sumber dari kehidupan mereka. Mereka memerlukan lahan yang luas untuk bersawah, berladang dan bagian-bagian hutan yang dapat dimanfaatkan. Semakin luas lahan yang telah diklaim. Semakin terjamin pula kesejahteraan anggota *kalbu.* Apalagi seiring bertambahnya populasi di dalam suatu *kalbu*, kebutuhan akan lahan yang lebih luaspun meningkat lagi.

Akan tetapi, luas tanah yang ada di Kerinci sangat terbatas. Begitu pula dengan kondisi tanah yang berbeda-beda. Tidak semua kondisi tanah dikategorikan subur dan tidak semua dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Di samping itu, mereka diharuskan pula berbagi lahan dengan komunitas adat lain yang menghuni bentang alam yang sama. Keadaan seperti ini menyebabkan persaingan antar *kalbu* untuk mendapatkan akses-akses lahan subur dan sumber daya alam lainnya yang melimpah.

Pada dasarnya, batas-batas tanah adalah hal yang disepakati bersama antar *kalbu*. Para leluhur komunitas dipercaya telah mengadakan perjanjian terkait batas-batas tanah yang boleh dikelola oleh anggota *kalbu*nya. Mereka wajib tunduk kepada kesepakatan itu jikalau tidak mau terkena sumpah atau kutukan para leluhur. Akan tetapi, kesepakatan itu tidak berlaku selamanya.

Para penguasa berikutnya akan mengadakan pertemuan secara berkala untuk menegaskan kembali batas-batas wilayah dengan penguasa komunitas lain. Seperti yang pernah dilakukan oleh Sultan Anum dari Jambi dengan Putri Jamilan dari Minangkabau.

Di dalam *tembo* Incung di Kerinci banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan bagaimana leluhur di masa lalu mengadakan kesepakatan terkait batas-batas wilayah antar komunitas. Seperti di dalam TK 85 dan TK 97. TK 85 merupakan naskah pada tanduk yang disimpan oleh Mangku Sukarami Itam Bandar Indopuro di Dusun Koto Teluk, Mendapo Rawang (Voorhoeve, 1941: 1970). Alihaksara naskah tersebut menurut Voorhoeve adalah sebagai berikut:

> "habap tatkala masa hitu manusuk hutan sungay habu pamangku sakarami pamangku hagung hiya saka hiya bangsu duduk dalam sungai habu muka dibali karabaw sikur muka dibunuh jadi hancur sumpah hapa di dalam satiya barang sahapa mangasak mangingsir bautah surang surang ka dimakan satiya kalu hada hurang bakuwat(?) bakusa mangasak mangingsir parabatas kita hini didilir mudik hanggak baradaya dingan hurang hampat hakan dimakan satiya tamat sihapa menyurat raja bakili baduwa dingan pandita magik"
>
> Terjemahan:
>
> Bab tatkala masa pembagian hutan Sungai Abu, Pemangku Sukarami, Pemangku Agung, Riya Saka dn Riya Bungsu duduk (berunding) di Sungai Abu. Maka dibelilah kerbau seekor kemudian dikorbankan kerbau itu hingga hancur untuk persumpahan. Apa yang disebutkan di dalam setia (perjanjian/persumpahan) itu? "Barang siapa yang mengubah dan menggeser batas tanah masing-masing akan dimakan sumpah, jikalau ada orang berbuat mengubah dan menggeser perbatasan (tanah) kita ini di hilir dan di mudik, (tetapi) tidak ditindak oleh orang empat (empat orang yang ikut bersumpah), akan dimakan sumpah. Tamat. Siapa yang menulis perjanjian ini? (ialah) Raja Bakili berdua dengan Pandita Magik (Megat).

Teks di dalam naskah ini menceritakan tentang perjanjian yang dilakukan oleh empat orang leluhur terkait dengan pembagian hutan di wilayah Sungai Abu serta penentuan batas-batasnya. Mereka bersumpah untuk tidak mengubah kesepakatan itu dan saling menjaga wilayah hutan tersebut masing-masing dari gangguan pihak lain. Perjanjian yang menyangkut masalah batas-batas tanah juga terdapat di dalam naskah TK 97. Naskah ini disimpan oleh Depati Kuning Nyato Negaro dari Dusun Tebat Ijuk, Mendapo Depati Tujuh (Voorhoeve, 1942:1970). Berikut penggalan hasil alihaksaranya oleh Voorhoeve:

> "[...] higa kuta (ta)mpiy mudik su(ngay) riya hadil bacacara sahiga kuta tampiy hilir higa tamadak hampa mudik bagi dipati muda lawan dipati suka baraja datang ka muwara tamiyang hutan dipati muda dangang dipati suka baraja lalu ka pamatang tanah (hi)ga pa(ma)tang tanah mudik higa huma mamak jabun hilir bagi dipati suka baraja dingan dipati tali bumi hurang dingan sanak bapak".
>
> Terjemahan:
>
> [....]sehingga Kuta Tampi mudik sungai (wilayahnya) Riya Adil Bicara, dari Kuta Tampi (ke) hilir hingga Cimpedak Hampar (ke) mudik (wilayahnya) Depati Muda dan Depati Suka Beraja sampai ke Muara Temiang. Hutan Depati Muda dengan Depati Suka Beraja sehingga ke Pematang Tanah (ke) mudik. Dari Pematang Tanah (ke) mudik hingga persawahan Mamak Jabun (ke) hilir (wilayahnya) Depati Suka Beraja dan Depati Tali Bumi, orang yang bersaudara seayah.

Teks TK 87 berisi tentang batas-batas tanah yang telah disepakati oleh para depati di dalam Mendapo Depati Tujuh. Tampaknya, hasil-hasil perjanjian tersebut ditulis pada tanduk kerbau yang dikorbankan kemudian disimpan sebagai pusaka turun temurun. Dua naskah ini memperkuat pandangan bahwa batas-batas tanah antar *kalbu* adalah hal yang sifatnya disepakati bersama antar *kalbu* . (konsensus).

Perubahan kondisi politik di sekitar Kerinci sangat berpengaruh terhadap kesepakatan batas-batas tanah antar leluhur di masa lalu. Misalnya ketika pengaruh Jambi mulai masuk ke Kerinci. Para pemimpin tiap-tiap *kalbu* akan menghadap raja dan pangeran Jambi agar wilayah yang mereka klaim disahkan atau dilegitimasi. Legitimasi sangat diperlukan oleh para penguasa *kalbu* agar tanah-tanah adat mereka tidak diganggu oleh komunitas adat lain.

Penguasa Jambi mengeluarkan surat yang disebut sebagai surat piagam kepada penguasa lokal di Kerinci untuk mengesahkan tanah-tanah yang mereka klaim. Mereka menjamin hak dari penguasa lokal untuk memanfaatkan tanah-tanah yang mereka klaim bahkan memberikan jaminan bagi para penguasa Kerinci untuk menjatuhkan hukuman mati bagi siapa saja yang tanpa izin dan dengan sengaja mengambil sumber daya alam di wilayah yang mereka klaim. Sebagai imbalan atas surat-surat piagam tersebut, para raja dan pangeran Jambi meminta sebagian dari hasil sumber daya alam diserahkan kepada mereka. Hasil sumber daya alam itu disebut sebagai "*pesilak indang taring mustika, emas jatah jati rupa*" seperti gading, cula badak, batu mulia dan emas. Ke semuanya itu terlarang bagi para depati untuk mengambilnya sendiri. Barang-barang tersebut sebagiannya wajib dipersembahkan kepada raja. Inilah yang disebut sebagai harta raja atau harta larangan raja di dalam teks-teks naskah piagam.

Masalah kemudian muncul ketika para penguasa Jambi tidak memahami kondisi sosial masyarakat Kerinci kala itu. Tidak mungkin penguasa Jambi mengetahui batas-batas tanah antar komunitas di Kerinci, jikalau tidak bersumber dari orang Kerinci itu sendiri. Oleh sebab itu, batas-batas tanah yang dituliskan di dalam piagam tentu berdasarkan keterangan orang Kerinci yang menghadap raja atau pangeran di Jambi. Hal ini menjadi peluang bagi penguasa suatu *kalbu* untuk mengklaim suatu wilayah yang seharusnya bukan menjadi milik *kalbu*nya sehingga melanggar kesepakatan leluhur di masa lalu. Bagaimanapun juga hubungan antara seorang penguasa lokal dan penguasa Jambi terjalin secara mandiri. Suatu komunitas adat tidak akan mencampuri urusan politik komunitas adat lain.

Adanya praktik-praktik pengklaiman sepihak oleh suatu *kalbu* atau suatu komunitas atas wilayah yang juga diklaim oleh *kalbu* lain, tentu saja akan menimbulkan persengketaan. Wilayah adat yang sebelumnya tidak tertarik untuk mengakui kekuasaan politik Jambi di hilir, kini mulai berbondong-bondong menghadap Jambi untuk memperjelas dan mempertegas status tanah mereka kepada penguasa Jambi di hilir. Secara tidak langsung, untuk mendapatkan pengakuan Jambi atas tanah-tanah mereka yang telah diklaim komunitas lain, mereka mau tidak mau harus mengaku "beraja" kepada para penguasa Jambi. Hal inilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa pengaruh Jambi begitu mudah diterima oleh orang Kerinci meskipun mereka terbagi ke dalam banyak komunitas.

Meskipun kondisi sosial seperti ini menguntungkan pihak Jambi karena mempermudah proses mereka memperluas pengaruh politik di Kerinci. Akan tetapi secara bersamaan, hal ini justru menimbulkan konflik dan meningkatnya perpecahan antar komunitas. Seperti yang terjadi di masa pemerintahan Sultan Ingalaga (1743-1781).

Kebijakan Sultan Ingalaga untuk mempererat kembali hubungan hulu dan hilir dengan cara memperlonggar kontrol atas penguasa di Masumai dan memberikan kebebasan mereka mengeluarkan piagam untuk penguasa Kerinci, telah menciptakan konflik-konflik horizontal di Kerinci. Pada masa ini, semakin banyak orang Kerinci yang meminta piagam dari Jambi. Persaingan dan kecemburuan antar *kalbu* semakin meningkat karena adanya kelompok-kelompok yang mendominasi dan merasa superior dari *kalbu* lain dalam suatu wilayah adat.

Konflik atas di wilayah adat Tanah Persembah adalah salah satu contoh nyata dari dampak negatif yang diambil pada masa Sultan Ingalaga ini. Sultan Ingalaga telah gegabah mengeluarkan piagam kepada dua persekutuan komunitas yang saling bersaing di kawasan baratlaut. Hal ini terlihat ketika ia mengeluarkan dua piagam untuk dua persekutuan depati yang berbeda tetapi atas wilayah yang sama. Satu piagam untuk persekutuan Raja Simpan Bumi-Mangkubumi dan Raja Simpan Bumi Andum Laksana dan satu piagam lagi untuk persekutuan Depati Muda Pamuncak, Depati Muncak Negara dan Depati Mendala Bumi.

Pemberian piagam ini menimbulkan kontra bagi banyak komunitas yang menghuni wilayah Tanah Kepala Persembah. Di antara mereka tidak mau bergabung dimasukkan ke dalam wilayah Tanah Kepala Persembah karena adanya *kalbu* dan komunitas yang mendominasi di sana. Pada akhirnya Tanah Kepala Persembah harus dibagi menjadi tiga wilayah adat yakni: (1) wilayah adat Tanah Sekudung yang dikuasai tiga persekutuan depati (Depati Intan, Depati Mangkubumi dan Raja Simpan Bumi); (2) wilayah adat Pamuncak Tanah Semurup yang dikuasai oleh tiga persekutuan depati (Depati Kepala Sembah, Depati Mudo dan Depati Rajo Simpan Bumi); dan (3) wilayah adat Depati Tujuh yang dikuasai oleh tiga persekutuan depati (Depati Sekungkung, Depati Mendalo Bumi dan Depati Kuning) (Sunliensyar, 2016b: 144-145).

Penyelesaian konflik di Tanah Kepala Persembah merupakan salah satu peristiwa yang dianggap penting sepanjang pemerintahan Sultan Ingalaga. Bahkan ketika salah satu penguasa Jambi di hulu Pangeran Temenggung Mangku Negara wafat sekitar 1776 M, suksesornya Pangeran Sukarta Negara kembali mengingatkan keputusan yang telah diambil sang ayah selama masih hidup dalam sebuah surat yang dikirim kepada depati di Semurup.

Penguasa Jambi tidak selalu memainkan peran mereka sebagai penengah sengketa atau sebagai pemberi nasihat yang adil. Terkadang mereka juga menjadi pemantik konflik antara komunitas yang ada di hulu. Konflik-konflik ini tentunya bukanlah hal yang disengaja tetapi dampak-dampak buruk dari kebijakan yang kurang tepat. Meskipun demikian, mereka tidak membiarkan konflik itu meluas dan berlarut-larut. Mereka menyelesaikannya dengan segera dengan memberikan keputusan yang dapat diterima oleh semua kelompok.

Kebijakan penguasa Jambi untuk mengurangi konflik di Kerinci terus dilakukan hingga pergantian tahta Kesultanan. Misalnya dengan membentuk banyak wilayah persekutuan depati. Di abad ke-18 kita dapat melihat di dalam teks-teks surat titah yang dikirim ke Kerinci, ditujukan kepada banyak persekutuan depati misalnya Depati Tujuh (persekutuan yang terdiri tujuh orang depati), Depati Empat (persekutuan yang terdiri dari empat orang depati), Depati Dua Belas (persekutuan yang terdiri dari dua belas depati) dan Depati Delapan Helai Kain (persekutuan delapan orang depati). Bahkan di akhir abad ke-18 M, persekutuan tersebut makin diperluas menjadi Depati Empat-Pemangku Lima-Delapan Helai Kain. Dengan adanya wilayah persekutuan ini, para depati akan mendapat kedudukan yang sama di mata penguasa Jambi dan mereka akan lebih mudah untuk saling berkoordinasi.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh Jambi yang secara tidak langsung juga mengurangi konflik sosial di Kerinci adalah dengan melibatkan kaum ulama di dalam pemerintahan adat. Alim ulama dalam pandangan orang Kerinci diibaratkan sebagai “suluh yang amat terang”. Artinya, mereka diharapkan menjadi panduan bagi para depati dalam memutuskan perkara adat agar sesuai dengan hukum syariat atau hukum syarak. Selain itu, ulama juga diibaratkan sebagai “air yang

amat jernih" artinya mereka diharapkan mampu meredam segala perselihan yang terjadi di tengah masyarakat dari fatwa-fatwa mereka yang menyejukkan. Penyesuaian antara adat dan agama ini ditanggapi dengan positif oleh penguasa lokal di Kerinci. Mereka membentuk lembaga khusus yang menangani masalah keagamaan di dalam sebuah pemerintahan adat. Misalnya di wilayah adat Tanah Sekudung dan Semurup. Luhah Rajo Simpan Bumi secara khusus memiliki wewenang dalam menangani masalah-masalah keagamaan. Di dalam tradisi lisan, mereka disebut sebagai pemegang "*kait yang tidak sekah, cermin yang tidak kabur dan lantak yang tidak goyah"*. Istilah tersebut adalah metafora dari alqur'an dan hadis nabi. Sumber hukum yang tidak berubah sepanjang zaman.

Kebijakan penguasa Jambi inilah yang menjadikan situasi Kerinci tidak seperti yang terjadi di Minangkabau. Di pedalaman Minangkabau, justru terjadi konflik yang melibatkan kaum ulama dan kaum adat bahkan dengan pihak kerajaan. Sementara itu, di abad yang sama, Kerinci memasuki era perdamaian. Tak ada satupun laporan-laporan asing yang menunjukkan sedang berlangsungnya pertikaian antara kaum paderi dan kaum adat. Antara ulama dan kaum adat di Kerinci justru seiya sekata dan makin solid dalam menentang dominasi asing di wilayah mereka. Sikap ini ditunjukkan dalam kecurigaan dan kewaspadaan mereka terhadap orang-orang asing yang masuk ke wilayah Kerinci, seperti yang pernah dialami Campbell di tahun 1800. Bahkan di paruh akhir abad ke-19 M terjadi pelarangan terhadap orang asing yang berkeinginan masuk ke wilayah Kerinci meskipun hanya untuk tujuan penelitian atau ekspedisi yang bersifat ilmiah.

C. Perniagaan

Tak dipungkiri bahwa Kerinci merupakan wilayah yang sangat subur. Di bagian lembah terdapat dataran luas yang dialiri oleh banyak sungai. Kondisi alam yang seperti ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk menanam padi. Oleh sebab itu, justru sebagian besar area lembah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dibandingkan dengan lahan permukiman. Luasnya lahan persawahan tersebut menjadikan Kerinci sebagai salah satu lumbung pangan utama di bagian Sumatra Tengah. Hingga kinipun Kerinci menjadi lumbung pangan utama di Jambi. Surplus padi yang dihasilkan oleh orang Kerinci menjadikan mereka sebagai penyuplai utama berasa di kawasan Sumatra Tengah termasuk di masa lalu. Aken (1915) mencatat bahwa di awal abad ke-20, orang Kerinci termasuk penyuplai utama beras di kawasan Pesisir Barat dan sebagian wilayah di huluan Jambi seperti Tebo dan Bungo.

Bila lembah dimanfaatkan sebagai area persawahan, maka perbukitan di sekitar area permukiman dimanfaatkan sebagai ladang-ladang kopi dan kayu manis. Kayu manis adalah salah satu tanaman rempah yang tumbuh di wilayah Kerinci. Keberadaan kayu manis di Kerinci sudah tercatat sejak abad ke-18

M, ketika ditemukan adanya kayu manis yang dikirim oleh Penguasa Jambi ke Batavia. Sementara itu, kopi yang ditanam di Kerinci termasuk komoditas unggulan yang kerap dijual ke bandar-bandar Pesisir Barat Sumatra (lihat Aken, 1915). Kawasan hutanpun menyediakan begitu banyak hasil-hasil alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti getah pinus, kemenyan, dan rotan. Selain itu, hewan-hewan yang hidup di dalam hutan juga penghasil barang-barang mewah dan langka yang diburu oleh para raja di masa lampau seperti gading gajah, cula badak. Di samping itu, sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kerinci juga banyak mengandung emas. Tercatat pula bahwa sejak abad ke-17 M orang-orang Kerinci telah menandatangani kontrak dengan Penguasa Muko-muko yang bernama Raja Adil terkait dengan penambangan emas (Kathirthamby-Wells, 1976: 76).

Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, tidak semua barang-barang yang menjadi kebutuhan baik primer maupun sekunder tersedia di wilayah Kerinci contohnya saja garam. Berada di atas ketinggian antara 600 hingga 1000 mdpl serta jauh dari wilayah pantai, menjadi hal yang mustahil untuk mendapatkan sumber-sumber garam di Kerinci. Sumber-sumber garam hanya terdapat di pesisir pantai. Padahal garam merupakan salah satu bumbu dapur yang sangat dibutuhkan oleh orang Kerinci. Kandungan iodium yang terdapat di dalamnya juga sangat penting bagi kesehatan manusia.

Selain garam, kain juga menjadi barang langka di Kerinci. Kelangkaan kain bukan karena tidak adanya kapas yang menjadi bahan utama pembuatan kain tetapi karena tidak berkembangnya teknologi tenun di wilayah Kerinci. Sampai kini, antropolog yang meneliti orang Kerinci belum menemukan adanya teknologi tenun yang dipakai di sana. Catatan-catatan abad ke-19 M pun tak menyebutkan adanya aktivitas menenun yang dilakukan oleh perempuan Kerinci meskipun nyatanya orang-orang Kerinci kelas atas saat itu sudah menggunakan pakaian yang cukup indah (Marsden, 1999).

Satu-satunya cara pembuatan kain tradisional yang masih dikenal hingga sekarang adalah dengan menggunakan bahan kulit kayu. Mereka menggunakan kulit kayu yang disebut kayu *terap* atau *kayu t'hok*. Kulit kayu yang telah dipisahkan dari pohonya tersebut dipukul-pukul hingga tipis dan melebar. Setelah kering, bahan kulit kayu atau yang disebut kain *t'hok* ini nantinya dijahit sedemikian rupa untuk dijadikan pakaian. Sekitar tahun 1943-45, bahan-bahan kain dari kulit kayu digunakan kembali akibat terjadinya kelangkaan kain dan pakaian saat itu[39].

Di daerah pegunungan dengan suhu yang lebih dingin, menyebabkan kain menjadi salah satu barang yang sangat dibutuhkan oleh orang Kerinci. Akan tetapi, ia menjadi barang langka karena tidak diproduksi di Kerinci. Kain kemudian menjadi barang mewah bagi masyarakat dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang kelas atas. Secara adat, tingginya nilai kain ini menjadikannya digunakan

39 Wawancara Abidin, 16 Januari 2016.

sebagai alat pembayaran denda dan sanksi-sanksi adat. Hatta (2002) dan Qadri (1995) memaparkan bahwa kain dalam jumlah tertentu termasuk ke dalam barang yang digunakan untuk pembayaran denda *bangun*.

Besi dan logam-logam lainnya juga termasuk ke dalam barang yang tidak tersedia di Kerinci. Hal ini karena wilayah Kerinci tidak memiliki sumber-sumber tambang besi maupun logam lainnya yang sangat dibutuhkan sehari-hari. Besi adalah logam utama yang digunakan untuk membuat alat-alat pertanian seperti cangkul, mata bajak dan parang, perkakas-perkakas pertukangan seperti beliung, pahat dan untuk membuat senjata tradisional seperti keris, badik, dan laras senjata api. Tanpa semua alat-alat dari besi tersebut sangat sulit bagi orang Kerinci untuk mengolah lahan persawahan hingga mendirikan bangunan-bangunan kayu yang megah.

Meskipun tidak ada sumber logam yang dapat ditambang di wilayah Kerinci, alat-alat yang terbuat dari besi dan perunggu telah ditemukan di wilayah ini sejak era prasejarah. Penelitian-penelitian arkeologis di Kerinci menemukan banyak artefak perunggu seperti nekara, bejana, perhiasan, dan selubung lengan (Heekeren, 1958; Budisantosa, 2011). Alat-alat besi juga ditemukan sebagai salah satu benda yang dijadikan bekal kubur ataupun temuan lepas di sekitar situs-situs prasejaarah (Budisantosa, 2011; 2015). Di abad ke-14 M, berbagai jenis besi termasuk ke dalam barang-barang berharga, sehingga para pencuri besi tersebut diharuskan membayar denda antara lima hingga sepuluh emas tergantung jenis besi yang dicurinya (Kozok, 2006: 115). Noor (1985) juga mencatat bahwa pada abad ke-19 hingga paruh awal abad ke-20, orang-orang Kerinci telah menggunakan mata uang tersendiri berupa cincin-cincin yang terbuat dari campuran logam. Mata uang ini disebut sebagai *cincin anye* oleh masyarakat. Kenyataan ini tentulah menimbulkan pertanyaan dari mana orang-orang Kerinci mendapatkan barang-barang yang tidak terdapat di wilayahnya?

Ketiadaan barang-barang primer, sekunder maupun barang mewah yang diperlukan oleh orang Kerinci di wilayah mereka, telah mendorong terjadinya relasi dengan penguasa wilayah lain terutama dengan penguasa-penguasa pesisir tempat semua barang yang dibutuhkan tersedia. Di wilayah pesisir berdiri pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat pertukaran barang dari luar dengan barang lokal.

Pantai Barat Sumatra adalah wilayah yang jaraknya paling dekat dengan Kerinci secara geografis. Untuk mencapai bandar-bandar di pantai Barat Sumatra bisa ditempuh kurang dari sehari perjalanan. Akan tetapi, wilayah pesisir bukanlah wilayah tak bertuan. Sejarah mencatat telah berdiri kerajaan yang membentang dari Air Bangis di baratlaut hingga Ketahun di sebelah tenggara. Kerajaan itu bernama Inderapura. Kathirithamby-Wells (1976) mengemukakan meskipun tidak ada sumber sejarah pasti yang menyebutkan awal berdirinya kesultanan ini ,tetapi ia menduga bahwa Inderapura berkembang dengan sendirinya pasca-penaklukan Malaka oleh Portugis pada 1511. Inderapura menguasai pelabuhan-

pelabuhan besar maupun kecil yang di sepanjang wilayahnya sebagai penyokong perekonomian di kerajaan itu.

Sebagai wilayah yang berdaulat, Inderapura akan mengatur semua orang yang masuk ke wilayahnya termasuk para peniaga. Para peniaga ini tidak dapat bertindak secara bebas di pelabuhan-pelabuhan wilayah Inderapura. Mereka harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Kerajaan termasuk masalah pajak dan bea cukai. Di tahun 1624 saja, ketika hubungan dagang telah terjalin dengan VOC, pihak Inderapura mengatur sejumlah pembayaran pajak yang disebut *ruba-ruba* di dalam perniagaan lada dengan VOC (Kathirrithamby-Wells, 1976: 69).

Secara adat, istilah-istilah perpajakan yang terkait dengan aktivitas-aktivitas perdagangan di wilayah pesisir juga dikenal oleh orang Kerinci. Misalnya istilah *"hak dacing"* dan *"ubur-ubur gantung kemudi"(*Qadri, 1995: 55)*,* Hak *dacing* adalah hak bagi raja untuk mendapatkan sejumlah pembayaran dari penjualan barang-barang yang ditimbang. Adapun, *ubur-ubur, gantung kemudi* adalah hak raja untuk mendapatkan pembayaran pajak dari aktivitas bongkar muat kapal serta sewa kapal dan sewa pasar.

Orang-orang yang tidak menaati aturan kesultanan ini tidak akan diizinkan untuk berdagang di wilayahnya. Para penguasa tidak akan menjamin keamaan para peniaga yang sifatnya ilegal. Padahal faktor keamanan menjadi salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan dalam melakukan niaga. Jikalau tidak ada jaminan dari penguasa setempat, niscaya para peniaga tidak akan aman dari tindakan penyamunan (perampokan), penipuan bahkan pembunuhan.Oleh sebab itu, menjalin relasi antara peniaga dengan para penguasa setempat adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari termasuk oleh para peniaga dari Kerinci.

Sumber-sumber legenda mencatat hubungan terawal antara orang Kerinci dan penguasa Inderapura terjadi pada era Tuanku Berdarah Putih sekitar pertengahan abad ke-16 M. Perjanjian sakral yang dinamakan persumpahan Bukit Paninjau Laut itulah yang mengawali relasi akrab kedua belah pihak. Perjanjian ini dikatakan sebuah perjanjian yang mengikat antara orang Kerinci dan penguasa Inderapura hingga ke anak cucu dan tentu saja menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan adanya perjanjian ini, orang-orang Kerinci mendapat hak istimewa oleh penguasa Inderapura. Mereka dapat melakukan perniagaan bebas pajak di seluruh wilayah Inderapura. Banyak pula di antara mereka yang diangkat sebagai pejabat di lingkungan Kesultanan Inderapura sehingga menempati posisi yang tinggi dalam aktivitas perdagangan di Pantai Barat Sumatra. Pada abad ke-19 M saja, orang-orang Kerinci dilaporkan telah memainkan peranan penting di Pantai Barus (Claude dkk, 2007: 52). Adanya peniaga-peniaga Kerinci yang beraktivitas bebas di kawasan Barus tentu tidak bisa dilepaskan dengan hubungan baiknya dengan pihak Inderapura sebagai salah satu kesultanan berpengaruh di Pantai Barat.

Gambar 17. Para Pedagang Kerinci pada tahun 1914
(Sumber. http://collectie.wereldculturen.nl, diakses 9 April 2019)

Selain itu, orang-orang Kerinci diberikan perlindungan dan jaminan keamanan oleh pihak Inderapura. Orang Kerinci yang terbunuh atau terluka di wilayah Inderapura menjadi tanggung jawab pihak penguasa Inderapura untuk membayar denda-denda tertentu sesuai ketentuan adat. Salah satu tanda perlindungan dari penguasa Inderapura terhadap orang-orang Kerinci adalah dokumen-dokumen bercap kerajaan Inderapura. Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh orang Kerinci akan ditunjukkan kepada orang tertentu saat melakukan perdagangan sebagai bukti bahwa mereka mendapat jaminan dari penguasa Inderapura.

Salah satu legenda legenda menyatakan bahwa di masa lalu, orang-orang Kerinci pernah bertikai dengan pedagang besi di Bandar Kota Padang. Pertikaian tersebut menyebabkan salah seorang di antara orang Kerinci meninggal. Orang-orang Kerinci menuntut kepada Sultan Inderapura agar membayarkan denda *bangun* terhadap peristiwa kematian tersebut. Oleh Sultan Inderapura, orang-orang Kerinci diberi tanah yang luasnya meliputi separuh Bandar Padang sebagai bentuk pembayaran *bangun.* Cerita di dalam legenda ini merupakan salah satu contoh bagaimana para Sultan Inderapura menunaikan janjinya untuk menjamin keamanan dan melindungi keselamatan orang-orang Kerinci di Pantai Barat Sumatra.

Di sisi lain, hak istimewa tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma oleh penguasa Inderapura. Bila penguasa Jambi meminta sebagian barang-barang mewah yang didapatkan dari wilayah para depati di Kerinci, maka penguasa Inderapura meminta hak untuk mengelola tambang-tambang emas yang berada di wilayah para depati di Kerinci. Di abad ke-17, dua belas orang depati di Kerinci telah menandatangani kontrak penambangan emas dengan Raja Adil, salah seorang penguasa Inderapura di Muko-muko (KathirithambyWells: 1976: 68). Adanya kontrak pertambangan emas antara orang Kerinci dan penguasa Inderapura dipertegas lagi dari sebuah surat berangka tahun 1903. Di dalam surat tersebut secara jelas disebutkan adanya sejumlah tambang emas yang dikelola oleh penguasa Inderapura di wilayah seorang depati di Kerinci bernama Depati Muara Langkap. Tambang emas tersebut berada di wilayah Pangkalan Jambu. Ahli waris Kesultanan Inderapura saat itu, meminta kembali hak mereka atas tambang tersebut kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sana (Asnan dkk, 2012: 21-25).

Garam, besi dan berbagai jenis kain menjadi komoditas utama yang dibutuhkan oleh orang Kerinci saat melakukan perdagangan di Inderapura. Naskah-naskah surat Incung banyak yang menyebutkan adanya kegiatan orang Kerinci untuk membeli garam dan kain di sepanjang wilayah Inderapura seperti pada naskah TK 130. Di dalam naskah tersebut, si penulis naskah menceritakan dirinya pernah membeli kain di Ipuh dan membeli garam di Air Haji. Kedua tempat ini berada di wilayah kekuasaan Inderapura.

Surat-surat penguasa Inderapura yang dikirim ke Kerinci pun menyatakan hal yang serupa. Mereka meminta orang-orang Kerinci untuk pergi ke Inderapura guna membeli garam, besi dan berbagai jenis kain yang terdapat di sana. Salah satu surat yang dikirim kepada Kiai Depati Raja Simpan Bumi secara jelas merinci berbagai jenis kain yang dibawa oleh pedagang asing bergelar Orang Kaya Serian dan Orang Kaya Petor Muda. Mereka membawa kain-kain dari India untuk dijual kepada orang Kerinci seperti kain serasah dan kain basta dengan berbagai ukuran dan warna. Mereka juga membawa besi, baja, dan senjata untuk dijual atau ditukar dengan orang-orang Kerinci.

Gambar 18. Salah satu kain India yang disimpan sebagai pusaka oleh Depati Panggar Gumi Tuo di Semurup (Dok. British Library, No. EAP117/37/2/41, diakses 9 April 2019)

Ketiga jenis komoditas tersebut juga termasuk ke dalam daftar hadiah yang wajib dikirim oleh Sultan Inderapura kepada para penguasa Kerinci. Surat yang dikirim oleh Sultan Permansyah misalnya di tahun 1888, menjelaskan prosedur yang harus dilalui oleh para sultan terdahulu bila hendak mengirim surat resmi ke Kerinci. Mereka harus menyertai surat-surat tersebut dengan "*ekor dan kepalanya*" yakni kain, besi baja, pisau dan garam sebagai hadiah. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga komoditas tersebut termasuk barang berharga menurut orang-orang Kerinci di masa lalu.

Sebaliknya para penguasa Inderapura membutuhkan komoditas-komoditas yang ada di Kerinci untuk dijual di wilayahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam TK 183, Orang Kaya Petor Muda dan Orang Kaya Serian yang merupakan sekutu penguasa Inderapura, meminta kepada orang-orang Kerinci membawa emas, gading gajah, lilin, dan tali temali Kerinci ke Air Haji untuk ditukar dengan komoditas lain atau dijual di sana. Sebaaimana yang telah disinggung sebelumnya, lilin yang dimaksud di sini adalah resin dari kayua-kayuan yang dapat dijadikan sumber pelita seperti getah pinus dan getah damar. Adapun, tali temali tampaknya terbuat dari rotan atau ijuk yang dijalin sedemikian rupa. Tali temali ini menjadi barang yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas maritim di sepanjang pantai barat.

Relasi yang dijalin oleh orang Kerinci dan Penguasa Inderapura bukanlah terbentuk atas keinginan satu pihak saja. Akan tetapi, keinginan dua belah pihak untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan. Alasan perdagangan

menjadi salah satu sebab utama mengapa relasi ini terjalin dengan erat tetapi ini bukanlah faktor tunggal. Di bagian Bab IV sebelumnya, juga disinggung adanya alasan politik yang mendorong penguasa Kerinci membangun relasi dengan pihak Inderapura.

Bagaimanapun juga relasi yang akrab antara Kerinci dan Inderapura tidak sebatas hubungan dagang semata. Akan tetapi, berlanjut menjadi hubungan yang semakin intim yakni saling membantu menjaga keamanan dan menjadi pelindung bagi keluarga kesultanan. Hal ini terlihat dari kisah-kisah yang bersumber dari pihak Inderapura yang menyebutkan peran orang Kerinci yang membantu Sultan Inderapura berperang melawan VOC. Ada lagi kisah tentang orang Kerinci yang menjadi pelindung bagi kerabat Sultan Inderapura. Misalnya, orang Kerinci yang bergelar Sengada Tua, ketika terjadi peperangan di Inderapura ia melindungi anak Sultan yang bernama Putri Jilan. Oleh sebab itu, Sengada Tua diberi hadiah berupa gelar kebangsawanan, bedil, keris, budak, dan perhiasan tembaga (Lihat TK 140).

Kisah lain yang diceritakan dalam TK 140 adalah tentang Baginda Raja Muda yang membantu Sultan Gelumat yang diasingkan dari Inderapura oleh menteri yang dua puluh. Sultan Gelumat menghindar ke Kerinci kemudian ditampung oleh keluarga Depati Raja Muda di negeri Kemantan. Sultan Gelumatpun menikah di sana dan mendapatkan seorang putra yang sangat mirip dengannya. Sang putra dikemudian hari digelari pula sebagai Raja Muda. Adapun Sultan Gelumat pergi ke Muko-muko dan menjadi raja di sana. Sultan Gelumat bertahta di Muko-muko pada sekitar 1691-1716 (Znoj, 1998: 107).

Surat-surat kesultanan Inderapura-pun selain berisi himbauan dagang kepada orang Kerinci, juga berisi permohonan agar orang Kerinci membantu mereka untuk melindungi kerabat kesultanan yang saat itu sedang bersengketa dengan orang-orang Lunang. Surat (TK 204) tersebut berbunyi:

> "[...] Sekarang bertambah susah dalam negeri Inderapura diperbuat yang dipertuan muda hiru (haru?) biru dalam negeri yang tiga lurah siapa tahu di belakang surat inilah negeri lunang(?) sebat itu diberitahu saudara kami sebulih-bulihnya daripada pekerjaan itu mintak ditolong oleh saudara kami, minta' dilihati oleh saudara kami siapa tahu menolaki yang patuan muda, minta' diambat seboleh-bolehnya, siapa tahu tabawa orang Lunang minta' diambil seboleh-bolehnya, peranglah saudara kami jikalau lai teguh saudara kami disumpah setia lagi pula kalau belum dayanya menolaki seboleh-bolehnya minta' dilihat jualah kami oleh saudara kami sekarang kini [..]"

Terjemahan:

[..] sekarang bertambah susah negeri Inderapura akibat perbuatan Yang Dipertuan Muda, (yaitu) kerusuhan di dalam negeri yang tiga lurah, Negeri Lunang. Oleh sebab itu melalui surat ini, diberitahukan kepada saudara kami (di Kerinci), sebisa-bisanya untuk menolong dan menjaga Yang Dipertuan Muda, siapa tahu ada yang menolak dan menentang Yang Dipertuan Muda, (jikalau ada) minta dihambat sebisa mungkin. Siapa tahu ada orang Lunang yang ikut (menentang), supaya mereka ditangkap sebisa mungkin. Jikalau perlu peranglah saudara (orang Kerinci dengan orang yang menentang Yang Dipertuan Muda) , bila masih teguh memegang sumpah setia. Namun jika tidak mampu untuk mengadakan perlawanan supaya ditinjau (ditengok) saja oleh saudara kami sekarang [..]

Bagi orang Kerinci, relasi baik dengan penguasa Inderapura maupun penguasa Jambi adalah dua hal yang sama berharganya. Mereka mempunyai kepentingan kepada dua penguasa tersebut. Akan tetapi, intensitas relasi yang dibangun mengerucut pada dua hal yang berbeda. Relasi dagang dan bisnis lebih intens dilakukan dengan pihak Inderapura. Adapun relasi terkait masalah hukum dan politik lebih intens dilakukan dengan pihak Jambi.

Tentang mengapa terjadi dua pengerucutan ini, mungkin sekali terkait dengan reputasi Jambi dan Inderapura di mata orang-orang Kerinci. Jambi secara politik memang memiliki pengaruh yang lebih kuat di Kepulauan Melayu. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Andaya, sejak era Sultan Agung, Jambi telah memiliki pengaruh politik yang sangat luas kala itu. Kepiawiaian dari Sultan Agung mampu mempengaruhi kebijakan politik negara tetangganya seperti Palembang, Banten, Johor dan Minangkabau. Bahkan di abad ke-17 M, Jambi telah mendeklarasikan diri lepas dari vassal Kesultanan Mataram. . Sementara itu, Inderapura pengaruh politiknya secara regional tidaklah begitu besar. Kesultanan ini berada di bawah hagemoni Kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung sehingga Inderapura sering disebut sebagai ujung tanah Pagaruyung.

Reputasi inilah yang pada akhirnya membawa orang-orang Kerinci menghadapkan permasalahan hukum dan legitimasi kekuasaan kepada Jambi

Akan tetapi, di bidang perniagaan Inderapura tampaknya jauh lebih berkembang daripada Jambi. Inderapura menguasai banyak pelabuhan strategis di Pantai Barat Sumatra. Adapun Jambi hanya memiliki pelabuhan kecil di Pesisir Timur dan itupun harus bersaing pula dengan pihak Kerajaan Johor. Perdagangan lada di Jambi terus mengalami kemerosotan pasca era Sultan Agung hingga para sultan Jambi setelahnya kesulitan untuk memulihkan perekonomian kembali. Sementara di Inderapura, meskipun terjadi penurunan perdagangan lada mereka menyediakan komoditas lain yang dibutuhkan seperti kapas dan emas (Putri, 2018). Kondisi seperti ini menyebabkan perekonomian Inderapura tetap stabil

bila dibandingkan dengan Jambi. Oleh sebab itu, selain letak geografisnya yang lebih dekat dengan Kerinci, kondisi perniagaan di Kesultanan Inderapura yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Jambi juga turut menyebabkan intensnya urusan bisnis dan dagang yang dilakoni oleh orang Kerinci dan penguasa Inderapura.

Di bidang keamanan dan pertahanan, relasi yang sama kuat dibangun oleh Kerinci, Jambi, dan Inderapura. Orang-orang Kerinci diketahui pernah membantu penguasa Jambi ketika konflik sedang terjadi di hilir. Begitu pula dengan Inderapura, konflik-konflik yang berlangsung di sana tidak lepas dari bantuan orang Kerinci. Di sisi lain, Jambi dan Inderapura turut melindungi Kerinci dari cengkraman hagemoni pihak asing hingga masih menikmati kemerdekaannya hingga awal abad ke-20 M.

Bab VI

Kesimpulan

Kerinci, Jambi, dan Inderapura adalah tiga wilayah di Sumatra bagian tengah yang telah mengukir sejarah panjang selama ratusan tahun. Hubungan yang diawali tanpa adanya kontrak tertulis, hanya berdasarkan persumpahan dan perjanjian sakral para leluhur di masa lalu. Perjanjian yang terus diingat dan dipegang teguh dari generasi ke generasi, telah menjadi kunci keberhasilan jalinan persahabatan mereka berabad-abad lamanya.

Sumber-sumber lokal, asing dan legenda, mencatat dan menceritakan tiap episode hubungan sejarah yang cukup kompleks antarwilayah ini. Boleh dikatakan relasi ini berlangsung sangat dinamis dan mengalami pasang surut seiring dengan perubahan situasi politik-ekonomi di Jambi dan Inderapura. Berdasarkan sejarahnya yang cukup panjang, ada empat fase yang dapat simpulkan untuk menggambarkan dinamika relasi antara orang Kerinci dengan penguasa Jambi dan Inderapura.

Pertama, fase awal. Pada masa ini Jambi mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Panembahan Kota Baru hingga Sultan Agung (1615-1679). Jambi saat itu, menjadi salah satu kerajaan dengan kondisi ekonomi dan politik yang sangat kuat di Sumatra. Pondasi perekonomian Jambi bersumber dari monopoli perdagangan lada di sepanjang Sungai Batanghari baik hulu maupun hilir. Wilayah Kerinci bukanlah termasuk wilayah penghasil lada di Jambi sehingga hubungan dengan orang Kerinci tidak begitu diacuhkan oleh pihak Jambi. Terbukti pada masa ini, hanya ada satu piagam yang dikeluarkan oleh pejabat bergelar Pangeran Dipati Anum kepada Depati Atur Bumi sebagai salah satu penguasa dusun di Kerinci.

Kendali atas hulu termasuk Kerinci hampir sepenuhnya dipegang oleh para pangeran dari suku Kedipan. Di masa Sultan Agung tercatat gelar Pangeran Dipanegara sebagai penguasa Jambi yang bertahta di Muara Masumai. Lemahnya kontrol para Sultan kepada para pangeran di hulu telah menyebabkan mereka bertindak layaknya sultan yaitu memberi gelar-gelar kebangsawanan kepada penguasa lokal di Kerinci secara ilegal dan tanpa surat piagam. Para pangeran ini berusaha membangun kekuatan politik sendiri di hulu dengan mempengaruhi penguasa lokal yang tunduk kepada mereka. Di masa ini, orang Kerinci lebih intens membangun relasi niaga dan dagang dengan penguasa di Inderapura. Terbukti pada awal fase pertengahan, penguasa Kerinci telah menandai kontrak penambangan emas dengan penguasa di Pantai Barat.

Kedua, fase pertengahan. Fase ini berlangsung cukup lama yakni di mulai dari masa pemerintahan Sultan Anum Ingalaga hingga Sultan Astra Ingalaga turun tahta (1679-1743). Pada fase ini, Kesultanan Jambi diwarnai dengan konflik yang tiada berkesudahan. Di mulai dengan peperangan antara Jambi dan Johor yang berlangsung di akhir masa pemerintahan Sultan Agung hingga awal pemerintahan Sultan Anum Ingalaga. Selain dengan Johor, di masa Sultan Anum, Jambi juga terlibat konflik dengan Palembang. Lemahnya stabilitas politik Jambi telah mendorong Sultan Anum menjalin persekutuan dengan Yang Dipertuan Sakti di Pagaruyung. Akan tetapi, persekutuan ini tidak disenangi oleh VOC dan akhirnya berbuntut pada penurunan tahta dan pembuangan sang Sultan di Batavia. Tindakan VOC ini dibantu oleh anak Sultan Anum sendiri yakni Sultan Kiai Gede.

Konflik internal terus berlangsung setelah Sultan Anum lengser. Kali ini melibatkan antara dua bersaudara yang mengklaim tahta Kesultanan Jambi. Hal ini memicu terjadinya dualisme pemerintahan di Jambi. Sultan Kiai Gede adalah sultan Jambi yang bertahta di Tanah Pilih dan didukung oleh Belanda sedangkan Sultan Maharaja Batu bertahta di Mangunjayo, hulu Jambi, didukung oleh rakyat di hulu beserta Penguasa Pagaruyung. Konflik ini berakhir ketika dukungan terhadap Maharaja Batu semakin berkurang. Ia akhirnya harus bernasib sama dengan sang ayah yakni meninggal di tanah pembuangan.

Konflik internal kerajaan tidak berakhir sampai di situ. Pasca kematian Sultan Kiai Gede, konflik kembali memanas kali ini melibatkan keluarga kerajaan yang mendukung Sultan Astra—anak Sultan Maharaja batu-- dengan pendukung Pangeran Suria Negara atau Sultan Muhammadsyah—anak Sultan Kiai Gede-sebagai Sultan Jambi. Konflik ini terhenti setelah Sultan Muhammadsyah wafat secara mendadak akibat terkena penyakit cacar dan Sultan Astra dinobatkan kembali sebagai raja.

Hubungan orang Kerinci dan Jambi pada periode yang cukup panjang ini bisa dikatakan masih renggang. Hal ini karena situasi Jambi yang tidak stabil dan terkurasnya energi para pejabat menangani masalah konflik internal. Pada masa Sultan Anum dan Sultan Kiai Gede hanya ada masing-masing satu piagam yang mereka kirim ke Kerinci. Pangeran Sutawijaya sebagai pejabat kerajaan yang bertahta di Merangin pada masa Sultan Kiai Gede dan Maharaja Batu hanya mengirim dua surat titah dan tiga piagam ke wilayah Kerinci. Saat Sultan Astra bertahta, ia dan saudaranya yang bergelar Pangeran Sutawijaya di Merangin, berusaha membangun hubungan dagang kembali dengan orang-orang Kerinci. Mereka memaksa para penguasa Kerinci untuk membawa emas-emas dari Kerinci ke wilayah Jambi ketimbang ke Pesisir Barat.

Ketiga, fase reformasi. Fase ini di mulai ketika Sultan Anum Seri (Suria) Ingalaga bertahta hingga masa pemerintahan Sultan Muhammad Muhiddin (1743-1830?). Sultan Ingalaga bertahta menggantikan kakaknya Sultan Astra yang dimakzulkan oleh Belanda. Pada masa ini konflik internal antar kerabat kesultanan benar-benar telah berakhir. Akan tetapi, ia belum mampu memulihkan keadaan perekonomian Jambi seperti sediakala.

Sultan Ingalaga memiliki gagasan bahwa penyebab keterpurukan Jambi akibat menjalin hubungan dengan pihak VOC. Ia mulai memikirkan untuk tidak memperbarui kontrak lagi dengan VOC. Selain itu, beberapa bencana yang menimpa Jambi dan keluarganya menimbulkan kesadaran sprituanya untuk menguatkan kembali kehidupan beragama di lingkungan pemerintahannya maupun di tengah masyarakat. Gagasan Sultan Ingalaga pun terlaksana, pada tahun 1768 ia menutup seluruh pos dagang VOC yang ada di Jambi.

Hubungan penguasa Jambi dengan orang Kerinci pada masa ini berlangsung lebih intens. Sultan Ingalaga dibantu oleh dua orang pejabat di hulu untuk mengatur hubungan dengan orang Kerinci yaitu Pangeran Temenggung Mangku Negara dan anaknya, Pangeran Sukarta Negara. Pada masa ini mereka telah mengirim belasan surat piagam dan surat titah kepada penguasa lokal di Kerinci.

Pangeran Sukarta Negara mulai menerapkan gagasan Sultan Ingalaga di wilayah Kerinci, yaitu untuk menguatkan kembali hukum syarak di tengah kehidupan masyarakat. Ia mengirim beberapa surat titah antara tahun 1776 hingga 1778 yang isinya memerintahkan para penguasa Kerinci mengeraskan kembali hukum Islam di wilayah mereka. Para depati diperintahkan melibatkan para ulama untuk mencegah praktik-praktik yang dianggapnya sebagai praktik jahiliyah seperti praktik perdukunan, penyembahan batu dan kayu, pengiringan upacara pemakaman dengan musik, masalah bercampurnya laki-laki dan perempuan saat menari dan perihal pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali yang syah. Selain itu, Pangeran Sukarta Negera juga melakukan perombakan terhadap sistem pemerintahan di Kerinci dengan mendirikan banyak wilayah federasi atau wilayah persekutuan para depati, seperti Depati VIII Helai Kain, Depati VII dan Depati XII.

Penerapan hukum Islam (syarak) di dalam pemerintahan adat di Kerinci secara resmi diperintahkan oleh Pangeran Ratu yang menggantikan Sultan Mas'ud Badruddin di tahun 1798. Ia memerintahkan agar penyelesaian perkara hukum di wi;ayah Kerinci harus diselesaikan berdasarkan hukum syarak (hukum Islam). Oleh sabab itu, para depati diminta untuk melibatkan para ulama dalam penegakan hukum adat. Sejak saat itu, para ulama dideklarasikan oleh Pangeran Ratu sebagai salah satu komponen yang menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan adat di Kerici bersama depati dan para menterinya.

Pada masa Sultan Mas'ud Badruddin hingga masa Sultan Muhammad Muhiddin, surat-surat piagam terus dikeluarkan oleh pejabat kesultanan Jambi yang berkedudukan di Merangin. Tercatat pada tahun 1792, ada dua piagam yang dikeluarkan oleh pejabat yang menggunakan gelar Pangeran Temenggung Kebul di Bukit. Ada juga piagam lain yang dikeluarkan atas nama Pangeran Citra Puspa Jaya Kebul di Bukit tahun 1819 M. Dua piagam lain tanpa tanggal dikeluarkan oleh pejabat yang bergelar Pangeran Nyata Patih Jaya Kebul di Bukit dan Pangeran Temenggung Nyata Negara Kertapati.

Pada paruh akhir fase reformasi, hubungan-hubungan dagang antara orang Kerinci dan penguasa Inderapura yang merenggang akibat intervensi Sultan Astra, kembali dirajut oleh para Depati. Mereka mengirim beberapa utusan ke Inderapura dan mendapat sambutan baik oleh penguasa Inderapura saat itu. Hubungan baik antara orang Kerinci dan Inderapura terus berlanjut hingga abad ke-19 M.

Keempat, fase akhir atau Fase kemunduran. Fase ini di mulai saat bertahtanya Sultan Muhammad Fakhruddin atau Sultan Keramat hingga masa Sultan Thaha Syaifuddin (1833-1904). Pada masa ini, pemerintah Hindia-Belanda, mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah bekas sekutu VOC di masa lalu. Pada tahun 1834, Kesultanan Jambi secara resmi menjadi bagian dari negara kolonial Belanda setelah Sultan Muhammad Fakhruddin dikalahkan dalam pertempuran di Sungai Baung. Pada tahun 1855, Sultan Thaha dinobatkan sebagai sultan Jambi menggantikan pamannya Sultan Abdurrahman Nazaruddin yang telah wafat. Namun, Sultan Thaha menunjukkan sikap perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Ia membatalkan semua kontrak politik dengan pihak VOC yang telah disepakati ayahnya, Sultan Fakhrudin, di masa lalu.

Sultan Thaha dimakzulkan dari tahta kesultanan Jambi pada tahun 1855 oleh Belanda. Ia kemudian menyingkir dan membentuk pemerintahan mandiri sebagai oposisi Belanda dan sultan di Tanah Pilih. Masa ini perpecahan di kalangan bangsawan Jambi kembali terjadi. Pada masa ini, wilayah hulu seperti Merangin dan Kerinci menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Thaha. selama berjuang melawan Belanda, Thaha diketahui pernah mengirim dua surat kepada penguasa Kerinci. Surat pertama berisi pemberitahuan tentang negerinya yang telah hancur oleh Belanda dan surat kedua undangan perkawinan anaknya serta permohonan terkait dukungan finansial para penguasa Kerinci untuk membantunya berperang melawan Belanda.

Pada 1888, terjadi perundingan terkait batas-batas wilayah antara Kerinci sebagai wilayah merdeka dengan wilayah Kesultanan Inderapura yang menjadi bagian dari jajahan Hindia Belanda. Pada pertengahan tahun 1903, Kerinci berhasil ditaklukan dan resmi menjadi bagian wilayah Hindia-Belanda, setelah ekspedisi militer yang berlangsung sekitar tiga bulan. Setahun kemudian, menyusul Sultan Thaha gugur tertembak dalam perjuangannya menentang Belanda. Dengan demikian, berakhir pulalah sejarah panjang Kerinci, Jambi, dan Inderapura.

Ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong orang Kerinci untuk menjalin relasi dengan Jambi dan Inderapura. Pertama, masalah kekuasaan. Sistem sosial yang berlaku di Kerinci menyebabkan hubungan antarklan dan antarkomunitas adat yang begitu rapuh. Hal ini kemudian menimbulkan persaingan yang tidak sehat antarkelompok tersebut. Ketika Jambi mulai memberikan gelar dan kekuasaan kepada anggota laki-laki dari suatu kelompok adat, maka anggota laki-laki dari kelompok lain juga akan melakukan hal serupa. Mereka meminta penguasa Jambi memberikan gelar dan kuasa kepada mereka karena tidak mau didominasi oleh kelompok adat yang lain yang telah berhubungan lebih awal dengan Jambi.

Kedua, legitimasi tanah. Tanah menjadi salah satu pembentuk identitas di dalam suatu kelompok adat di Kerinci. Tanah menjadi sumber penghidupan bagi anggota tiap kelompok/suku/kalbu. Oleh sebab itu, dalam persepsi mereka semakin luas tanah yang mereka klaim semakin terjamin pula kesejahteraan anggota kelompok. Akan tetapi, karena luas tanah yang terbatas, para leluhur komunitas di masa lalu telah membuat kesepakatan tentang pembagian lahan dan batas-batas tanah.

Namun, datangnya pengaruh Jambi sebagai kekuatan politik yang baru telah dimanfaatkan oleh suatu kelompok untuk mengklaim lahan yang lebih luas dengan cara meminta legitimasi dari pihak Jambi. Tentu saja, hal ini akan menimbulkan pertentangan dari komunitas adat yang lain. Mereka yang tadinya belum mengakui kekuasaan Jambi, akhirnya ikut pula menghadap penguasa Jambi untuk meminta legitimasi atas tanah ulayat kelompok mereka. Dengan demikian, status tanah yang mereka punyai semakin jelas dan terhindar dari klaim sepihak kelompok lain.

Ketiga perniagaan. Keterbatasan sumber daya alam yang ada di Kerinci mengakibatkan ketidaktersedian barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana, misalnya garam, besi, dan kain. Mereka hanya bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan tersebut di wilayah pesisir karena di sana terdapat pelabuhan yang menjadi tempat berlangsungnya pertukaran barang dari wilayah luar. Akan . Akan tetapi, orang Kerinci tidak dapat bertindak secara bebas di sana karena merupakan bagian dari kerajaan lain. Oleh sebab itu, mereka perlu menjalin relasi dengan penguasa setempat. Jalinan relasi ini akan semakin mempermudah orang Kerinci melakukan aktivitas perniagaan di sepanjang pesisir pantai. Mereka dibebaskan dari cukai serta mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari penguasa setempat.

Daftar Pustaka

Aken, Ph. Van. 1915. *Nota betreffende de afdeeling Koerintji*. Batavia: Encyclopaedisch Bureau.

Alimin dkk, 2003. *Sastra Incung Kerinc*i. Kerinci, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Andaya, Barbara Watson. 2016. *Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara pada Abad 17-18 M*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Andhifani, Wahyu Rizki, 2012. "Naskah Kuna Pusaka Raja Sulah Desa Siulak Mukai Kerinci Jambi". *Jurnal Siddhayatra* Vol. 17 No. 2 hlm. 62-68.

Asnan, Gusti dkk. 2012. *Dinamika Sistem Birokrasi pada Masa Kesultanan Inderapura Abad XVI- Awal Abad XX M*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI.

Budisantosa, Tri Marhaeni S. 2011. "Megalit dan Kubur Tempayan Dataran Tinggi Jambi, Situs Lolo Gedang Kerinci", dalam Inajati Adrisijanti (peny). *Asia Tenggara Dalam Perspektif Arkeologi: Kajian Arkeologi Sumatra Bagian Tenggara*. Sumatra Selatan: Balai Arkeologi Sumatra Bagian Selatan.

Budisantosa, Tri MarhaeniS. 2015a. "Pola Permukiman Komunitas Budaya Megalitik di desa Muak". *Sangkhakala* 18(1): 77-94.

Budisantosa, Tri Marhaeni. 2015b. "Kubur Tempayan di Siulak Tenang, Dataran Tinggi Jambi Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Kepercayaan". *Forum Arkeologi* 28 (1), hlm. 1-10.

Bonatz, Dominik dkk. 2006. "The Megalithic Complex of Highland Jambi: an Archaeological perspective". *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (BKI)* 162 (4), hlm. 490-522.

Bonatz, Dominik, 2012. "A Highland Perspective on the Archaeology and Settlement History of Sumatra". *Archipel 84*, hlm. 35-81.

Chatib, Adrianus dkk. 2011. *Kesultanan Jambi dalam Konteks Sejarah Nusantara*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagaman Kementerian Agama RI.

Claude, Guillot dkk. 2007. *Barus Seribu Tahun yang Lalu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Drakard, Jane. 1993. *A Kingdom of Words: Minangkabau Sovereignity in Suma-*

tran Histroy. [Tesis. Australian National University, Australia].

Durkheim, Emile. 2011. *The Elementary Forms of Religious Life: Sejarah Bentuk-bentuk Agama Paling Dasar*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Eliade, Mircea. 2002. Sakral dan Profan (terjemahan). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Gaastra, F.S. tanpa tahun. *Organisasi VOC*. Jakarta: ANRI.

Gallop, Annabel Teh. 2009. "Piagam Serampas: Malay Documents from Highland Jambi", dalam Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel, Mai Lin Tjoa-Bonatz (peny). *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Gallop, Annabel Teh. 2013. "Piagam Muara Mendras: More Malay Documents from Highland Jambi". *Jurnal Budaya Seloko* 2 (1), hlm. 1-50.

Gallop, Annabel Teh. 2014. "Royal Minangkabau Seals: Disseminating Authority in Malay Borderlands". *Indonesia and the Malay Word*, hlm. 1-28.

Gallop, Annabel Teh. "What's in A Name? Malays Seals as Onomastic Sources". *Malay Literature* 31(1), hlm. 1-28.

Gunawan. 2013. "Kerbau untuk Leluhur: Dimensi Horizontal dalam Ritus Kematian pada Agama Marapu". *Komunitas* 5(1), hlm. 93-100

Harun, Hermanto dan Sagala, Irma. 2013. "Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo". *Kontekstualita* 28(1), hlm 79-118.

Heekeren, H. R. Van. 1958. *The Bronze-Iron Age of Indonesia.* Land en Volkenkunde, Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal, S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Hunter, Thomas M. 2015. "Sanskrit in a Distant Land: The Sankritised Section", dalam Uli Kozok dkk. (peny). *A 14th Century Malay Code of Laws: The Nitisarasamuccaya*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Idin, Siarman Muhammad. 2009. "Kaedah Pembahagian Harta Pusaka Adat Tiga Luhah Tanah Sekudung Siulak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". [*Tesis*. University of Malaya, Malaysia].

Imaduddin, Iim. 2003. *Inderapura Kerajaan Maritim dan Kota Pantai di Pesisir Selatan Pantai Barat Sumatera.* Padang: BKSNT.

Istiawan, Budi. 2006. Selintas Prasasti dari Melayu Kuno. Batusangkar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakalan Batusangkar.

Kathirithamby-Wells, J. 1976. "The Inderapura Sultanate: The Foundations of Its

Rise and Decline, from the Sixteenth tothe Eighteenth Centuries”. *Indonesia* No. 21, hlm 64-84.

Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kozok,Uli. 2015. *A 14th Century Malay Code of Laws: The Nitisarasamuccaya*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Kukushkin, Sergei. 2004. Hikayat Negeri Jambi: *The Structure and Sources of A Nineteenth-Century Malay Historical Work*. Indonesia and the Malay World 32 (92), hlm. 53-61.

Locher-Scholten, Elsbeth. 2004. *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism*. New York: Cornell University.

Madjid, M. Dien. 2012. ‘Lika-liku Perjuangan Depati Parbo Menghadapi Kolonialisme Belanda di Alam Kerinci’, Makalah dipresentasikan dalam seminar perlawanan Depati parbo dalam Menghadapi Kolonialisme Belanda, Kerinci, 08 November.

Marsden, William, 1999. *Sejarah Sumatra* (terjemahan). Bandung: Rosda Karya.

Meng, Usman. 1996. Napak Tilas Liku-Liku Propinsi Jambi: Kerajaan Melayu Kuno sampai dengan Terbentuknya Propinsi Jambi. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.

Morison, H. H. 1940. *De Mendapo Hiang in Het District Korintji: Adatrechtelijke Verhandelingen*. Nederlandsch-Indie: Koninklwk Instituut.

Nofrial. 2016. *Rumah Etnik Kerinci: Arsitektur dan Seni Ukir*. Padang Panjang: ISI Padang Panjang.

Noor, Djuhar. 1985. *Perubahan Sosial di Kerinci pada Awal abad XX*. [Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta].

Putri, Mega Jeli. 2018. *Pelabuhan Muaro Sakai di Pantai Barat Sumatra Masa Kesultanan Inderapura.* [Tesis. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang].

Qadri, Haji. 1995. *Hukum Adat Sakti Alam Kerinci: Suatu pedoman dan Ico pakai di Tigo Luhah Siulak Tanah Sekudung.* Kerinci: Cetakan Mandiri.

Rajo-Endah, Syamsuddin St. 2008. *Kaba Klasik Minangkabau: Cindua Mato*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia.

Reijn, E.O. Van. 1974. “Some Remarks on The Dialects of North Kerinci: A Link With Mon-Khmer Languanges”. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 47 (2), hlm. 130-138.

Ricklefs, M.C. 1991. *A Modern History of Indonesia, 2nd edition*. London: The

MacMillan Press LTD.

Setrawati. 2002. "Asyeik Ngayun Luci dan Implikasinya dalam masyarakat Kecamatan Gunung Kerinci (Kajian Aspek Keislaman)". [*Skripsi*. IAIN Imam Bonjol, Padang].

Setyaningsih, Christina dkk. 2019. "First Palaeoecological Evidence of Buffalo Husbandry and Rice Cultivation in the Kerinci Seblat National Park in Sumatra, Indonesia". *Journal of vegetation history and archaeobotany* 28 (1), hlm. 1-16.

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sudarman. 2016. *Jaringan Perniagaan dan Islamisasi di Kerajaan Inderapura Abad XVII-Awal abad XVIII M*. [Disertasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta].

Sunliensyar, Hafiful Hadi, 2016a. *Ritual Asyeik sebagai Akulturasi Antara Kebudayaan Islam dan Kebudayaan Pra-Islam Suku Kerinci*. Jurnal Siddhayatra Vol. 21 No. 2 hlm. 107-128.

Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2016b. "Peranan Kesultanan Jambi Dalam Penyelesaian Konflik di Kerinci Antara Wilayah Adat Semurup dan Siulak Pada Abad ke 17-18 M", dalam Nurhadi Rangkuti (ed.), *Kerincimu Kerinciku: Dataran Tinggi Jambi dalam Perspektif Arkeologi*. Yogyakarta: Ombak.

Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2018a. "*Idu Tawa Lam Jampi*: Mantra-mantra dalam Naskah Surat Incung Kerinci. *Manuskripta* 8 (1): 31-53.

Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2018b. *Lanskap Budaya Masyarakat Kerinci di Pusat Wilayah Adat Tanah Sekudung, Dataran Tinggi Jambi*. [Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta].

Taniardi, Putri. 2017. "Relasi Ata Krowe dan Gunung Mapitara". *Berkala* 37 (1), hlm. 15-34.

Tim Depdikbud. 1979. *Sejarah Kebangkitan Nasioanl Jambi.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim BPS. 2017. *Kabupaten Kerinci dalam Angka*. Kerinci: Badan Pusat Statistik Kerinci.

Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Tjoa-Bonatz, Mai Lin, 2012. "More than 3400 Years of Earthenware Traditions in Highland Jambi on Sumatra". *Selected paper The 13th International Conferences of The European Association of Southeast Asian Archaeologist Vol. 2*. National University of Singapura: NUS Press.

Utomo, Bambang Budi. 2016. *Pengaruh kebudayaan India dalam Bentuk Arca di Sumatra*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Utomo, Bambang Budi, dkk. 2009. *Treasures of Sumatra*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Vansina, Jan. 2014. *Tradisi Lisan sebagai Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Veth, P.J. 1881. *Reizen En Onderzoekingen Der Sumatra-Expeditie, Uitgrust Door Het Aardrijkskundig Genootschap, 1877-1879*. Leiden: E.J. Bril.

Voorhoeve, P. 1941, *Tambo Kerintji: Disalin dari Toelisan DjawaKoeno, Toelisan Rentjong dan Toelisan Melajoe jang Terdapat pada Tandoek Kerbau, Daoen Lontar, Boeloeh dan Kertas dan Koelit Kajoe, Poesaka Simpanan Orang Kerintji*, P.Voorhoeve, dengan pertolongan R.Ng.Dr. Poerbatjaraka, toean H.Veldkamp, controleur B.B., njonja M.C.J. Voorhoeve, Bernelot Moens, goeroe A. Hamid,. [diketik ulang oleh C.W. Watson].

https://*ipll.manoa.hawaii.edu/indonesian/research/tambo-kerinci* (diusahakan oleh Uli Kozok, 2006).

Voorhoeve, Petrus. 1970. "Kerintji Documents". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. 126 no. 4, hlm.. 369-399.

Wahyono, Ary. 2007. "Adaptasi Pertanian Penduduk: Studi Tentang Perambahan Lahan Kasus Tanaman Kulit Manis di Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, Sumatera". *Jurnal Kependudukan Indonesia* II (1): 61-80.

Watson, C.W.. 1992. "Kinship, Property and Heritance in Kerinci, Central Sumatra". [*Tesis*. University of Kent, Canterbury].

Westenenk, L.C. 1922. "*Rèntjong-schrift".* Tijdschrift voor Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. 61. Batavia: Albrecht en Co./'s-Gravenhage: M. Nijhoff.

Yakin, A. Rasyid. 1986. *Menggali Adat Lama Pusaka Usang di Sakti Alam Kerinci*, Sungai Penuh: Percetakan Anda.

Yakub, Nurdin. 1987. *Minangkabau Tanah Pusaka*. Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia.

Zakaria, Iskandar. 1984. *Tambo Sakti Alam Kerinci I*. Jakarta: Departemen P dan K.

Zakaria, Iskandar dkk. 1989. *Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Jambi II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Znoj, Heinzpeter. 1998. "Sons versus Nephews: A Highland Jambi Alliance at War with the British East India Company, ca. 1800". *Indonesia* No. 65, hlm. 97-121.

Lain-Lain

ANRI. 2015. Overview of Diplomatic Letters. www.sejarah-nusantara.anri.go.id (diakses tanggal 19 Maret 2019)

British Library. Piagam Tanah Hiang (EAP117/51/1/10). https://eap.bl.uk/archive-file/EAP117-51-1-10 (diakses tanggal 10 Februari 2017)

British Library. Surat Incung koleksi Bakhtiar Anip (EAP117/63/1/15). https://eap.bl.uk/archive-file/EAP117-63-1-15 (diakses tanggal 18 Maret 2019)

British Library. Surat Titah dari Kesultanan Jambi, pusaka Depati Sungai Lago Tuo (EAP117/2/1/7). https://eap.bl.uk/archive-file/EAP117-2-1-7 (diakses tanggal 4 April 2019)

Hatta, K.H Rajo Sulah. 2002. Kumpulan Tulisan tentang Adat Tanah Sekudung. (tidak diterbitkan)

Sultan Arbi dan Sultan Iradat. "Sejarah Pertalian Alam Kerinci dengan Indrapura dan Kisah Alam Kerinci Jatuh ke Tangan Belanda", diketik ulang oleh Eman Canser dalam https://*kerajaanairpura.blogspot.com* (diakses tanggal 16 Maret 2019)

Zarmoni. 2018. Dasar-dasar Hukum Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak: Bab *Uteh Bateh* (diketik dari tradisi lisan). https://zarmonishalihbujangtandangmawei.blogspot.com/2018/10/dasar-dasar-adat-tigo-luhah-tanah.html (diakses tanggal 28 Maret 2019)

Piagam Dusun Kumun. http://andom99.blogspot.com/2015/01/329-tahun-dusun-kumun.html (diakses tanggal 30 Maret 2019)

https://kbbi.web.id/candung (diakses tanggal 29 Maret 2019)

https://kbbi.web.id/tambo (diakses tanggal 29 Maret 2019)

Wawancara Abidin, Desa Siulak Panjang, 16 Januari 2016, pukul 09. 00-11.00 WIB

Wawancara Muntahar, Desa Siulak Panjang, 30 Agustus 2016, pukul 08.00-10.00 WIB

Glosarium

anak *batino*	anggota *kalbu* yang berjenis kelamin perempuan
anak jantan	anggota *kalbu* yang berjenis kelamin laki-laki
balian	*pemuka agama tradisional di Kerinci*
bluka	lahan perladangan yang sengaja ditinggalkan oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memulihkan kesuburan tanah
depati	kepala/pemimpin *luhah*
dusun	tingkatan permukiman yang secara gografis dan demografis berada di atas
	kuto. dusun dihuni oleh penduduk yang terdiri dari empat suku (*kalbu*) utama
hak dacing	hak raja untuk memperoleh pajak atau bagian dari barang-barang yang ditimbang
j*enang*	para utusan penguasa atau pejabat dari Jambi ke wilayah-wilayah lain
kalbu	kelompok sosial masyarakat Kerinci yang berasal dari satu kesatuan nenek moyang dan territorial berdasarkan garis matrilineal
karang setia	perjanjian atau persumpahan sakral
luhah (1)	struktur pemerintahan adat yang terdiri dari federasi *kalbu* dan dikepalai oleh *depati* (2) gabungan kelompok *depati* yang menguasai suatu wilayah adat yang luas
mahram	orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya
matrilineal	hubungan keturunan melalui garis kerabat pihak ibu
matrilokal	hal kebiasaan yang menentukan bahwa pengantin menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri
mendapo	persekutuan/federasi dusun-dusun yang terdiri dari dusun induk dan dusun pemekaran
ninek mamak	kepala, penguasa *kalbu*

pemangku	jabatan adat yang bertugas sebagai perantara hubungan *Depati* dengan *ninek Mamak*, *Depati* dengan pihak Kerajaan aliansi, maupun dalam arah sebaliknya
perut	gabungan dari *tumbi-tumbi* yang berasal dari satu nenek perempuan
piagam	surat-surat yang berasal dari Kesultanan Jambi berisi tentang pengakuan status *Depati* bagi seseorang serta batas-batas wilayah adat kekuasaannya
regalia	benda yang menjadi tanda-tanda kebesaran kerajaan
serah jajah	aturan pembayaran pajak dari penguasa kerinci ke penguasa Jambi dan penerimaan otoritas dalam bentuk gelar, piagam, hadiah dari penguasa Jambi ke penguasa Kerinci
surat Incung	aksara yang digunakan oleh suku Kerinci
surat titah	surat-surat perintah yang ditujukan kepada para penguasa Kerinci oleh pihak Jambi
syarak	hukum yang bersendi ajaran Islam
tanah *ajun arah*	tanah adat yang diklaim kepemilikannya oleh suatu *kalbu*
tumbi	keluarga inti
tuto tembo	tradisi lisan yang menceritakan legenda leluhur, silsilah kelompok dan batas batas tanah adat
uhang semendo	para laki-laki dari suatu suku/ kelompok yang menikah dengan perempuan dari suku/kelompok lain

Daftar Informan

1. Nama : Abidin gelar Temenggung Adil Bicaro (wafat 2 Mei 2018)
   Umur : Saat wawancara berumur 86 tahun
   Pekerjaan : Petani, Pemangku adat Tigo Luhah Tanah Sekudung
   Alamat : Desa Siulak Panjang, Siulak, Kerinci

2. Nama: Muntahar gelar Temenggung Titin Rajo
   Umur: 69 Tahun
   Pekerjaan : Petani, Pemangku adat Tigo Luhah Tanah Sekudung
   Alamat : Desa Siulak Panjang, Siulak, Kerinci

Indeks

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Riwayat Hidup Penulis

Hafiful Hadi Sunliensyar M.A. Lahir di Kerinci, Jambi pada 18 Februari 1994. Beliau lulusan arkeologi Universitas Gadjah Mada yang meminati bidang kajian prasejarah, lanskap dan filologi, terutama naskah-naskah kuna di Jambi. Saat ini beliau terdaftar sebagai anggota Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa). Beliau aktif menulis artikel populer di Kompasiana dengan topik sosial budaya dan karya-karya ilmiah yang telah dimuat di dalam buku dan jurnal-jurnal nasional.

Beberapa karyanya antara lain: Menggali Makna Motif Hias Bejana Perunggu Nusantara: Pendekatan Strukturalisme Levi-Strauss di Berkala (2016), Peranan Kesultanan Jambi dalam Penyelesaian Konflik di Kerinci antara Wilayah Adat Semurup dan Siulak pada abad XVII dalam Kerincimu Kerinciku: Dataran Tinggi Jambi dalam Perspektif Arkeologi (2016), Lanskap Arkeologi dalam Perspektif Prosesual dan Pasca-Prosesual: Studi Kasus Kompleks Megalitik di Dataran Tinggi Jambi di Berkala (2019), *Idu Tawa Lam Jampi*: Mantra-mantra dalam Naskah Surat Incung Kerinci di Manuskripta (2018) dan Asosiasi Gundukan Tanah, Sungai dan Menhir di Pusat Wilayah Adat Tanah Sekudung, Baratlaut Lembah Kerinci, Dataran Tinggi Jambi di Amerta (2019).